



Katalog: 4301002

STATISTIK PENDIDIKAN

2022



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDIDIKAN

2022





STATISTIK PENDIDIKAN 2022

ISSN: 2086-4566

No. Publikasi: 04200.2219

Katalog: 4301002

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxxviii + 228 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Desain Kover oleh:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit:

© BPS RI

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

Slidesgo.com

Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



TIM PENYUSUN

STATISTIK PENDIDIKAN 2022

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono SE, M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Ahmad Avenzora, SE, MSE.

Penanggung Jawab Teknis:

Wachyu Winarsih, M.Si.

Editor:

Raden Sinang, SST., M.Si.

Ika Maylasari, SST., M.Si.

Penulis dan Pengolah Data:

Rida Agustina, SST., M.Si.

Rini Sulistyowati, SST. M.E.K.K

Mega Silviliyana SST. M.E.K.K

Rhiska Putrianti, S.Tr.Stat.

Ganish Anggraeni S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Freshy Windy Rosmala Dewi, SST.

Desain/Layout:

Rida Agustina, SST., M.Si.





KATA PENGANTAR

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM tangguh yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Statistik Pendidikan 2022 sebagai salah satu potret pendidikan Indonesia menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2022. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan *output* pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Tahun Ajaran 2021/2022. Data ini memuat informasi mengenai input pendidikan yang mencakup data jumlah sekolah, peserta didik, pendidik, sarana prasarana pendidikan, dan sanitasi sekolah.

Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Jakarta, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si






RINGKASAN

Pendidikan diperlukan sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan hilangnya pembelajaran (*learning loss*) secara tatap muka di kalangan peserta didik dan tenaga pendidik. Antisipasi dilakukan pemerintah dengan menyederhanakan kurikulum serta penyesuaian metode pembelajaran yang tidak hanya dilakukan secara jarak jauh tetapi juga mulai dilakukan dengan tatap muka langsung khususnya di daerah yang memiliki level PPKM 1, 2, atau 3. Perkembangan kebijakan serta program pembangunan pendidikan dapat terlihat dari data dan informasi yang lengkap dan akurat sehingga sangat diperlukan untuk dapat menjawab tantangan di bidang pendidikan yang sedang dan akan dihadapi. Publikasi Statistik Pendidikan Indonesia 2022 diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta evaluasi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional dan Visi Pendidikan Indonesia 2035 pada Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.

Setelah kurang lebih dua tahun tidak ada proses pembelajaran di sekolah berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, termasuk dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun ajaran 2021/2022, infrastruktur pendidikan sekolah telah mengalami kemajuan. Jumlah sekolah dasar dan menengah telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021. Peraturan zonasi sekolah mengakibatkan sekolah negeri terbatas menerima peserta didik dari luar zona sekolah. Dalam satu tahun terakhir lebih dari 1.000 sekolah swasta baru terdaftar di Kemendikbudristek.

Ruang kelas merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan angka tersebut hampir 3 kali dari jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sisi kondisi/keadaannya. Apabila dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan. Namun, jumlah ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan. Keadaan ini terjadi pada semua jenjang pendidikan. Jumlah rombongan belajar (rombel) idealnya sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda, dimana semua jenjang pendidikan memiliki angka rasio rombel per kelas dibawah 1 (satu).





Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Pada tahun 2021, terdapat 10 persen sekolah pada jenjang pendidikan SD yang tidak memiliki sumber air layak atau tidak ada sumber air. Persentase tersebut semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, secara umum setidaknya terdapat 6 dari 10 sekolah pada setiap jenjang yang memiliki sanitasi yang layak dan terpisah dengan kondisi baik atau rusak ringan. Jenjang pendidikan sekolah dasar memiliki ketersediaan sanitasi dasar yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Dari 100 sekolah, hanya 59 Sekolah Dasar yang memiliki toilet layak dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021, terdapat 7 dari 10 sekolah di setiap jenjang pendidikan memiliki sarana kebersihan dasar. Artinya, bahwa masih terdapat 3 sekolah di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bagi sivitas akademika di sekolah tersebut.

Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Keadaan tahun ajaran 2021/2022 menunjukkan bahwa jumlah guru mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir. Penurunan terjadi pada setiap jenjang pendidikan. Penurunan paling banyak adalah jumlah guru Sekolah Dasar yaitu sekitar 78 ribu guru tidak mengajar lagi. Walaupun jumlah guru mengalami penurunan, persentase guru layak mengajar mengalami kenaikan dalam setahun terakhir pada setiap jenjang. Menurut jenjang pendidikan, persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 paling banyak ada pada jenjang sekolah menengah atas, sedangkan jenjang sekolah dasar merupakan jenjang dengan persentase paling kecil. Persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas ada sebanyak 98 dari 100 guru. Sedangkan pada jenjang sekolah dasar, dari 100 guru terdapat 95 guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas adalah rasio murid-guru. Pada jenjang sekolah dasar walaupun secara nasional rasio murid-guru sudah baik yaitu tidak lebih dari angka ideal (satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid), namun menurut sebaran provinsi terdapat tiga provinsi dengan rasio di atas angka



idealnya yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua. Angka ini menunjukkan terjadinya penumpukan guru sekolah dasar di level provinsi. Rasio terkecil ada di Provinsi Aceh, dimana satu guru bertanggung jawab kepada 10 murid. Sedangkan di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab terhadap 24 murid.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menghasilkan indikator partisipasi sekolah setiap tahun. Selain partisipasi sekolah pada jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, Susenas juga menghasilkan indikator pendidikan anak usia dini, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator APK PAUD adalah salah satu indikator pendidikan yang mengalami kemunduran sejalan dengan adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.

Adanya pandemi Covid-19 menghalangi kesempatan anak-anak usia dini untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah, termasuk mengikuti pendidikan prasekolah. Sejalan dengan itu, APK PAUD pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (37,52 menjadi 35,28). Jika dilihat menurut status disabilitas, masih terdapat *gap* antara APK PAUD kelompok disabilitas terhadap kelompok nondisabilitas (25,09 berbanding 35,36 pada tahun 2022). Di sisi lain, AKS tahun 2022 mencapai 74,34 persen dan capaian tersebut cenderung stagnan di angka 74 persen sejak tahun 2016.

Sementara itu, dilihat dari kelompok umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil seiring bertambahnya umur. Perbedaan besaran angka partisipasi sekolah pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) dan terbawah (Kuintil 1) tampak samar pada APS 7-12 tahun. Perbedaan tersebut semakin nyata terlihat seiring kenaikan kategori kelompok umur. Sama halnya dengan APS, penduduk kelompok pengeluaran teratas memberikan kontribusi paling besar untuk APK SM/ sederajat dan APK PT.

Salah satu sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun adalah meningkatnya partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan menengah (SM/ sederajat) yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan capaian indikator APK SM/ sederajat level provinsi melebihi 95 (Renstra Kemdikbud 2020-2024). Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, sebanyak enam provinsi sudah memenuhi harapan pemerintah. Keenam provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sementara itu, indikator APM jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs)





untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan (Bappenas, 2017). Kelompok penduduk yang dibandingkan antara lain laki-laki dan perempuan, disabilitas dan nondisabilitas, perkotaan dan perdesaan, serta kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) dan terbawah (kuintil 1). Pada semua kategori disagregasi kecuali status disabilitas, ketimpangan APM tampak samar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Kesenjangan partisipasi pendidikan tampak nyata pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat ke atas dengan kelompok tertinggal adalah laki-laki, perdesaan, penduduk disabilitas, dan kuintil 1.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu keharusan pada hampir seluruh peserta didik dalam proses belajar mengajar dengan segala keterbatasan selama masa pandemi. Di tahun 2022, proses belajar mengajar berangsur normal kembali dengan didorongnya pemberlakuan 100 persen Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Fenomena ini turut mengubah penggunaan TIK para peserta didik berupa penurunan persentase penggunaan internet dan penggunaan telepon seluler. Meskipun demikian, penggunaan komputer mengalami peningkatan di kalangan peserta didik. Walaupun pembelajaran selama pandemi memengaruhi perilaku TIK peserta didik, namun jika dilihat dari tujuannya, hiburan, media sosial, dan akses informasi/berita mendominasi peserta didik dalam mengakses internet.

Selain bersekolah, peserta didik juga melakukan hal lain seperti mengurus rumah tangga maupun bekerja. Hal ini dikarenakan usia 5-24 tahun yang dianalisis beririsan dengan usia bekerja dan usia perkawinan. Pada tahun 2022, persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga menurun cukup tajam yaitu sekitar 8,71 persen poin dibandingkan tahun 2021. Begitu pula dengan persentase peserta didik yang bekerja juga mengalami penurunan meski hanya sekitar 0,38 persen poin dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan jenjang pendidikan, masih terdapat 0,65 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat yang bekerja. Hal ini menjadi perhatian karena di dalam UU, penduduk yang berada di bawah usia 13 tahun dilarang untuk bekerja. Sementara sebagian besar peserta didik pada jenjang SD/ sederajat berusia di bawah 13 tahun. Secara umum, meskipun melakukan kegiatan lainnya, 89,83 persen peserta didik menggunakan waktu terbanyaknya untuk sekolah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melakukan kegiatan dengan waktu terbanyak untuk mengurus rumah tangga, bekerja dan lainnya.

Hasil dan capaian proses pendidikan tercermin dari beberapa indikator output pendidikan di antaranya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), dan persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang





ditamatkan. Hasil dan capaian dari proses pendidikan itu sendiri, tidak terlepas dari indikator input dan indikator proses pendidikan.

Secara umum, mayoritas penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun (62,68 persen). Pada tahun 2022, penduduk yang tamat SMP/ sederajat 22,56 persen, tamat SM/ Sederajat sebesar 29,97 persen, sedangkan yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebesar 10,15 persen, sedangkan sisanya tamatan SD/ sederajat ke bawah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas juga baru sebesar sebesar 9,08 tahun atau setara kelas 3 SMP/ Sederajat pada tahun 2022.

Demikian juga Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas juga sebesar 96,35 persen, artinya dari 100 penduduk masih ada sekitar 4 penduduk yang buta huruf. Hal ini harus menjadi fokus perhatian karena AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6.

Kejadian putus sekolah masih mewarnai proses pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2022 dari 1.000 siswa SD/ Sederajat terdapat 1 siswa yang putus sekolah. Angka ini semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang SM/ Sederajat terdapat 13 dari 1.000 siswa yang putus sekolah. Tantangan lain adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, terdapat sekitar 22 anak yang tidak sekolah.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxiii
METODOLOGI	xxvii
PENJELASAN TEKNIS	xxxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Pendidikan di Masa Transisi Setelah Pandemi	3
1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan.....	6
1.3 Sistematika Penulisan	7
BAB 2. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	9
2.1 Jumlah Sekolah	11
2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas.....	14
2.3 Sanitasi Sekolah.....	17
2.4 Guru.....	23
BAB 3. PARTISIPASI SEKOLAH	53
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	55
3.2 Partisipasi Sekolah.....	59
3.3 Angka Partisipasi Kasar.....	62
3.4 Angka Partisipasi Murni.....	65
BAB 4. KEGIATAN PESERTA DIDIK	103
4.1 Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)....	105
4.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Bersekolah.....	111





Halaman

BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN.....	141
5.1 Angka Melek Huruf.....	143
5.2 Hasil Proses Pendidikan.....	145
5.3 Angka Putus Sekolah.....	148
5.4 Tingkat Pendidikan.....	151
5.5 Rata-rata Lama Sekolah.....	154
5.6 Tingkat Penyelesaian Sekolah.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	183
LAMPIRAN.....	189
METADATA.....	217

<https://www.bps.go.id>





DAFTAR TABEL

Halaman

Bab 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.1.1	Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	28
Tabel 2.1.2	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	29
Tabel 2.1.3	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	30
Tabel 2.1.4	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	31
Tabel 2.2.1	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022	32
Tabel 2.2.2	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022	33
Tabel 2.2.3	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022	34
Tabel 2.2.4	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022	35
Tabel 2.3	Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	36
Tabel 2.4	Rasio Rombel per Kelas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	37
Tabel 2.5.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021	38
Tabel 2.5.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021	39
Tabel 2.5.3	Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021	40
Tabel 2.5.4	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021	41





Tabel 2.6.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021	42
Tabel 2.6.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021	43
Tabel 2.6.3	Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021	44
Tabel 2.6.4	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021	45
Tabel 2.7.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021	46
Tabel 2.7.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021	47
Tabel 2.7.3	Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021	48
Tabel 2.7.4	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021	49
Tabel 2.8	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	50
Tabel 2.9	Rasio Murid-Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	51

Bab 3 Partisipasi Sekolah

Tabel 3.1	Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2022	68
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, 2022	69
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2022	70
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	71
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	72
Tabel 3.6	Persentase Penduduk 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2022	73
Tabel 3.7	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2022	74
Tabel 3.8.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	75





Tabel 3.8.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	76
Tabel 3.8.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan dan Perdesaan)	77
Tabel 3.9.1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	78
Tabel 3.9.2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	79
Tabel 3.9.3	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan dan Perdesaan)	80
Tabel 3.10.1	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022 (Perkotaan)	81
Tabel 3.10.2	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022 (Perdesaan)	82
Tabel 3.10.3	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022 (Laki-Laki)	83
Tabel 3.10.4	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022 (Perempuan)	84
Tabel 3.10.5	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022 (Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan).....	85
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun dan 7-18 Tahun Menurut Provinsi, 2022	86
Tabel 3.12.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perkotaan)	87
Tabel 3.12.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perdesaan)	88
Tabel 3.12.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Laki-Laki)	89
Tabel 3.12.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perempuan)	90
Tabel 3.12.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan).....	91
Tabel 3.13.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan)	92





Tabel 3.13.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perdesaan)	93
Tabel 3.13.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Laki-Laki)	94
Tabel 3.13.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perempuan)	95
Tabel 3.13.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan).....	96
Tabel 3.14.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan)	97
Tabel 3.14.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perdesaan)	98
Tabel 3.14.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Laki-Laki)	99
Tabel 3.14.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perempuan)	100
Tabel 3.14.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan).....	101
Tabel 3.15	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi, 2022	102

Bab 4 Kegiatan Peserta Didik

Tabel 4.1	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja, 2022	113
Tabel 4.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2022	116
Tabel 4.3	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2022	117
Tabel 4.4	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2022	118
Tabel 4.5	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga, Tahun 2022	119
Tabel 4.6	Persentase Siswa Umur 10-24 Tahun Menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak Menurut Karakteristik Demografi, 2022	120





Tabel 4.7.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	121
Tabel 4.7.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	122
Tabel 4.7.3	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	123
Tabel 4.8.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	124
Tabel 4.8.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	125
Tabel 4.8.3	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	126
Tabel 4.9.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	127
Tabel 4.9.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	128
Tabel 4.9.3	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	129
Tabel 4.10.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan)	130
Tabel 4.10.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perdesaan)	131





Tabel 4.10.3	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	132
Tabel 4.11.1	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	133
Tabel 4.11.2	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	134
Tabel 4.11.3	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	135
Tabel 4.12.1	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan)	136
Tabel 4.12.2	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perdesaan)	137
Tabel 4.12.3	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022 (Perkotaan+Perdesaan)	138
Tabel 4.13	<i>Sampling Error</i> Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi, 2022	139
Tabel 4.14	<i>Sampling Error</i> Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, 2022	140

Bab 5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Tabel 5.1	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, 2022	160
Tabel 5.2	Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	160
Tabel 5.3	Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	161
Tabel 5.4	Angka Anak Tidak Sekolah (OOSC) Menurut Kelompok Umur, 2022	161
Tabel 5.5.1	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perkotaan)	162
Tabel 5.5.2	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perdesaan)	163
Tabel 5.5.3	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Laki-Laki)	164
Tabel 5.5.4	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perempuan)	165





Tabel 5.5.5	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022 (Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan).....	166
Tabel 5.6	Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022	167
Tabel 5.7.1	Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2022	168
Tabel 5.7.2	Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022	169
Tabel 5.8	Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022	170
Tabel 5.9	Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022 ...	171
Tabel 5.10	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022	172
Tabel 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022	173
Tabel 5.12.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2022	174
Tabel 5.12.2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022	175
Tabel 5.13	Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022	176
Tabel 5.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022	177
Tabel 5.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022	178
Tabel 5.16	<i>Sampling Error</i> Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022	179





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Bab 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Gambar 2.1	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020 s.d. 2021/2022.....	12
Gambar 2.2	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	13
Gambar 2.3	Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022.....	14
Gambar 2.4	Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022	15
Gambar 2.5	Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	16
Gambar 2.6	Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	17
Gambar 2.7	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sumber Air, 2021	18
Gambar 2.8	Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sumber Air Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021	19
Gambar 2.9	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sanitasi, 2021	20
Gambar 2.10	Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sanitasi Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021	21
Gambar 2.11	Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sarana Kebersihan Dasar, 2021	21
Gambar 2.12	Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sarana Kebersihan Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021	22
Gambar 2.13	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022	23
Gambar 2.14	Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	24
Gambar 2.15	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022	25





Gambar 2.16	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022	26
Gambar 2.17	Sebaran Provinsi Berdasarkan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun Ajaran 2021/2022	27

Bab 3 Partisipasi Sekolah

Gambar 3.1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang /Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Klasifikasi Desa, 2019-2022.....	56
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Status Disabilitas, 2020-2022	58
Gambar 3.3	Angka Kesiapan Sekolah, 2016-2022	59
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2019-2022	60
Gambar 3.5	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2022	61
Gambar 3.6	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun dan 6 Tahun yang Masih Bersekolah, 2022	62
Gambar 3.7	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2020-2022	63
Gambar 3.8	Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT Menurut Kelompok Pengeluaran, 2022	64
Gambar 3.9	Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat Menurut Provinsi, 2022	65
Gambar 3.10	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022	67

Bab 4 Kegiatan Peserta Didik

Gambar 4.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Internet, 2019-2022	106
Gambar 4.2	Sarana Komunikasi yang Digunakan Guru dalam Kegiatan Belajar dari Rumah	107
Gambar 4.3	Peralatan yang Paling Sering Digunakan Siswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	108
Gambar 4.4	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer 2019-2022	109





Gambar 4.5	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2022	110
Gambar 4.6	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir, 2022	110
Gambar 4.7	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2019-2022	111
Gambar 4.8	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2022	114
Gambar 4.9	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun Menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2022	115

Bab 5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Gambar 5.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2022	144
Gambar 5.2	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2022	145
Gambar 5.3	Angka Mengulang Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2022 ..	146
Gambar 5.4	Angka Bertahan Kelas 6 SD/Sederajat Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2022	147
Gambar 5.5	Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022	148
Gambar 5.6	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022	149
Gambar 5.7	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik, 2022	150
Gambar 5.8	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2022	151
Gambar 5.9	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, 2022	152
Gambar 5.10	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi, 2022	153
Gambar 5.11	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Disabilitas, 2022	154





Gambar 5.12 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2022	155
Gambar 5.13 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Karakteristik Demografi, 2022	156
Gambar 5.14 Persentase Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2022	158
Gambar 5.15 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 21-24 Tahun, 2022	159

<https://www.bps.go.id>





METODOLOGI

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang dilaksanakan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September.


Susenas Maret tahun 2022 menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (BPS, 2022). Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu.

Jumlah sampel Susenas Maret 2022 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada setiap blok sensus yang dipilih secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan *systematic sampling* sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan *implicit stratification* dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2022 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan





maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2022 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Menurut Aryago Mulia dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Tidak semua variabel hasil pendataan dihitung RSE-nya. Hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung RSE-nya.



<https://www.bps.go.id>





PENJELASAN TEKNIS

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.


Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga yakni orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Status Ekonomi Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah,





Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.

Rasio murid-guru adalah gambaran jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Rasio Murid-Kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Rombel (Rombongan Belajar) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah.

Rasio toilet laki-laki dihitung dengan membagi jumlah siswa laki-laki dari sekolah yang memiliki toilet layak, terpisah, dan baik dengan jumlah toilet laki-laki.

Rasio toilet perempuan dihitung dengan membagi jumlah siswa perempuan dari sekolah yang memiliki toilet layak, terpisah, dan baik dengan jumlah toilet perempuan.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.



Paket A/B/C merupakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui program Paket A dan Paket B serta pendidikan menengah melalui program Paket C. Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 26, pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yg mencakup Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tidak Punya Ijazah SD adalah jika tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, dan/atau sekolah dasar pamong).

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama).

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa, HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SD.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMP.

Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMA.





Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

Program Diploma 1/2 adalah program D1/D2 pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Diploma 1/2 pada pendidikan formal. Program Diploma 1 hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Program Diploma 3/Sarjana Muda adalah program D3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.

Program Diploma 4/Sarjana adalah program pendidikan Diploma 4 atau Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan tinggi.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.





Tidak Bersekolah Lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat Sekolah adalah jika telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.


APK PAUD 3-5 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-5 tahun.

APK PAUD 3-6 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-6 tahun.

APM PAUD 3-5 Tahun adalah jumlah anak yang yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-5 tahun terhadap penduduk kelompok umur 3-5 tahun.

APM PAUD 3-6 Tahun adalah jumlah anak yang yang terdaftar dalam pendidikan umur dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-6 tahun terhadap penduduk kelompok umur 3-6 tahun.





Rasio APM (SD/SMP/SM) adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/ mahasiswa laki-laki pada tiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa kelas x suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran lalu yang masih duduk di kelas x pada tahun ajaran sekarang, terhadap anak kelas x pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada Jenjang SD ke SMP adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada Jenjang SMP ke SM adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SM pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu.

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus



dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Angka Bertahan SD adalah persentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas terakhir SD.

Tingkat Penyelesaian Sekolah adalah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Kelompok umur referensi menurut UNESCO adalah 3-5 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Untuk Indikator nasional di Indonesia kelompok umur referensi adalah 1-3 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Tingkat penyelesaian sekolah SD dihitung sebagai persentase penduduk umur 13-15 tahun yang minimal telah tamat SD. Terdapat tiga kelompok umur referensi yang digunakan dalam mengukur capaian tingkat penyelesaian sekolah, yaitu: tingkat penyelesaian SD penduduk umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP penduduk umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SMA penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Anak Tidak Sekolah adalah persentase penduduk usia jenjang pendidikan tertentu yang tidak sedang bersekolah. Penduduk yang sedang prasekolah dianggap sebagai bersekolah. Penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA ke atas dianggap sebagai bersekolah. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.





PENDAHULUAN

**Surat Keputusan Bersama
NOMOR 03/KB/2021,
NOMOR 384 TAHUN 2021,
NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021,
dan NOMOR 440-717 TAHUN 2021**

Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetapi juga dengan **pembelajaran tatap muka (PTM)** secara **terbatas** dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilaksanakan paling lambat **mulai TA 2021/2022**.





BAB I PENDAHULUAN

Visi Pendidikan Indonesia 2035 pada Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Peta Jalan tersebut dirancang untuk mengantisipasi disrupsi perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan yang sedang terjadi secara global. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi diperlukan agar bangsa Indonesia dapat bertahan menghadapi disrupsi sehingga lebih maju dan sejahtera. Pendidikan menjadi salah satu sarana untuk membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

1.1 Pendidikan di Masa Transisi Setelah Pandemi

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama di sektor pendidikan. Berbagai keterbatasan yang ditujukan untuk meminimalisasi penyebaran virus di kalangan peserta didik dan tenaga pendidik telah menyebabkan hilangnya pembelajaran (*learning loss*). Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengutarakan bahwa *learning loss* yang terjadi untuk literasi setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi setara dengan 5 bulan belajar (Kemdikbud, 2022).

Sebagai antisipasi dari hilangnya pembelajaran tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penyederhanaan kurikulum menjadi kurikulum darurat yaitu kurikulum dalam kondisi khusus sejak tahun 2020 dan dinyatakan efektif dalam memitigasi ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 (Kemdikbud, 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih





komprehensif. Oleh karena itu mulai tahun ajaran 2021/2022, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri mulai diimplementasikan di sekitar 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PGP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) (Kemdikbud, 2022).

Kurikulum Merdeka dilansir memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kurikulum lain sebelumnya (Kemdikbud, 2022). Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, tidak adanya program peminatan di SMA membuat peserta didik bisa bebas untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Selain itu tenaga pendidik dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Ketiga, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keempat, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan proyek sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Namun demikian, implementasi kurikulum merdeka adalah sebuah opsi bagi satuan pendidikan sesuai dengan kesiapannya masing-masing.

Tidak hanya penyesuaian kurikulum, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan Bersama NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan NOMOR 440-717 TAHUN 2021 terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut, penyelenggaraan di masa pandemi tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetapi juga dengan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sesuai ketentuan KEEMPAT, penyelenggaraan PTM terbatas





tersebut dilaksanakan paling lambat pada tahun ajaran 2021/2022. Namun sebelumnya, setiap satuan pendidikan diperiksa kesiapannya sehingga akhirnya diperbolehkan untuk melaksanakan PTM terbatas.

Adapun terdapat syarat bagi satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan PTM terbatas. Pertama, tidak ada warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 dan tidak ada kontak erat dengan penderita Covid-19. Kedua, seluruh warga satuan pendidikan harus dalam keadaan sehat dan jika memiliki penyakit penyerta/kormobid maka harus dalam kondisi yang terkontrol. Ketiga, warga satuan pendidikan tidak ada yg memiliki gejala Covid-19 termasuk keluarga dan orang yang serumah. Satuan pendidikan harus memenuhi daftar persyaratan untuk dapat diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas. PTM terbatas dilakukan melalui dua fase yaitu: masa transisi yang berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya PTM terbatas di satuan pendidikan, dan masa kebiasaan baru yang dilaksanakan setelah masa transisi selesai (Surat Keputusan Bersama, 2021).

Ketentuan penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan level kondisi daerahnya (Surat Keputusan Bersama, 2021). Untuk daerah dengan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tidak diperbolehkan untuk melaksanakan PTM terbatas dan tetap melaksanakan PJJ secara penuh. Daerah PPKM level 3 dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas maksimal 50% dan durasi jam belajar maksimal selama 4 jam. Daerah PPKM level 1 dan 2 dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas antara 50%-100% dengan durasi jam belajar maksimal selama 6 jam. Sedangkan daerah khusus/3T dapat melaksanakan PTM dengan kapasitas maksimal 100% dan durasi jam belajar selama maksimal 6 jam. Dengan mulai berlakunya PTM meskipun masih terbatas, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik.

Pada awal tahun 2022 terjadi penurunan level PPKM kabupaten/kota di beberapa daerah, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Dengan adanya penurunan





level PPKM tersebut, maka semakin banyak satuan pendidikan yang dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas hingga 100%. Adanya perubahan pola pembelajaran yang terjadi selama tahun ajaran 2021/2022 tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap kesiapan siswa dan adaptasinya terhadap pola pembelajaran. Bagaimana pengaruhnya terhadap tren indikator-indikator pendidikan? Hal ini akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran. Dengan adanya informasi tersebut maka situasi serta kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini akan lebih tergambar. Informasi dan perencanaan yang matang diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan di bidang pendidikan yang sedang dan akan dihadapi. Potret situasi, kondisi, dan capaian pembangunan bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 2022 salah satunya tercermin pada beberapa indikator pendidikan yang disajikan dalam publikasi "Statistik Pendidikan Indonesia 2022". Informasi yang ada pada publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta evaluasi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu data yang ada juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Dengan jumlah sampel mencapai 345.000 rumah tangga, data yang disajikan mencakup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Data tersebut disajikan dengan disagregasi menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan, status disabilitas, kelompok pengeluaran, dan wilayah, sehingga diharapkan mampu menggambarkan pendidikan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Selain itu juga digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun ajaran 2021/2022.





1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Pendidikan Tahun 2022 secara sistematis disajikan dalam lima bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menceritakan bagaimana gambaran pendidikan di masa transisi setelah pandemi, pentingnya data pendidikan untuk pembangunan serta sistematika penulisan dari publikasi.
- Bab II Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah, ketersediaan dan kondisi ruang kelas, sanitasi sekolah, dan guru.
- Bab III Partisipasi Sekolah, yaitu tentang Pendidikan Anak Usia Dini, partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Kasar, serta Angka Partisipasi Murni.
- Bab IV Kegiatan Peserta Didik, menjelaskan akses teknologi informasi dan komunikasi serta aktivitas peserta didik selain sekolah yang meliputi peserta didik dalam dunia kerja, peserta didik pekerja dan status pekerjaannya, serta peserta didik dalam kegiatan mengurus rumah tangga.
- Bab V Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan Angka Melek Huruf, hasil proses pendidikan, Angka Putus Sekolah, tingkat pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah, serta Tingkat Penyelesaian Sekolah.

Pada setiap akhir bab disajikan tabel informasi indikator menurut karakteristik demografi dan provinsi. Selain itu untuk melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel, maka hasil penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan juga ditampilkan pada bagian akhir bab. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam metadata dan penjelasan teknis.



2

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



Persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 paling banyak pada jenjang **Sekolah Menengah Atas (SMA)**, sedangkan paling sedikit pada jenjang **Sekolah Dasar (SD)**.



 Rasio Murid-Guru SD



Rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD) di **Provinsi Papua** lebih dari **2x** rasio di **Provinsi Aceh**. Di **Provinsi Aceh**, dimana satu guru bertanggung jawab kepada 10 murid. Sedangkan di **Provinsi Papua**, satu guru bertanggung jawab terhadap hampir 24 murid.





BAB 2

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tertuang 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Arah kebijakan dan strategi ditujukan agar setiap anak memiliki kesempatan bersekolah dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Input dalam sistem pendidikan, seperti sarana dan prasarana pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan ramah gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Peralihan pandemi menuju pasca pandemi mengakibatkan proses pembelajaran juga dituntut beralih dari pembelajaran dari rumah (BDR) menuju pembelajaran tatap muka di sekolah. Setelah sekitar dua tahun tidak ada proses pembelajaran di sekolah, maka perlu dilihat bagaimana kesiapan sarana prasarana sekolah dalam mendukung proses pembelajaran dan menghadapi tantangan di era peralihan seperti saat ini.

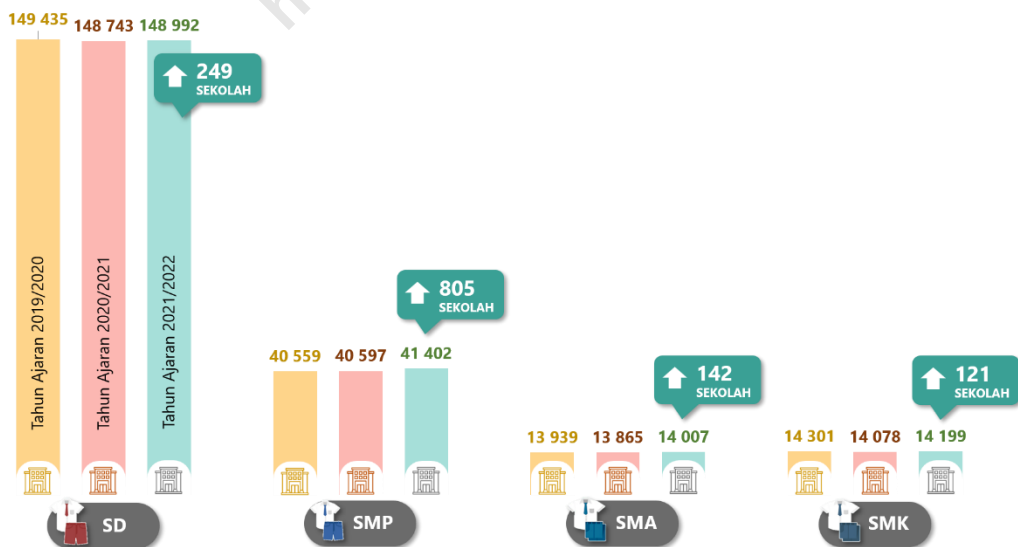
2.1 Jumlah Sekolah

Puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2021 lalu, telah mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami penutupan sehingga hampir pada semua jenjang



pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah sekolah mengalami penurunan (Statistik Pendidikan 2021). Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun ajaran 2021/2022, infrastruktur pendidikan sekolah telah mengalami kemajuan. Jumlah sekolah dasar dan menengah telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021. Apabila memperhatikan kecenderungan jumlah peserta didik pada setiap jenjang, kenaikan jumlah sekolah dasar tidak begitu banyak dibandingkan kenaikan jumlah sekolah menengah pertama. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun paling banyak terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 805 sekolah baru dan penambahan jumlah sekolah paling sedikit terjadi pada jenjang sekolah menengah kejuruan yaitu sebanyak 121 sekolah baru. Namun, dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelum pandemi melanda yaitu tahun ajaran 2019/2020, jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan tahun ajaran 2021/2022 masih mengalami penurunan. Sebanyak 443 sekolah dasar dan sebanyak 102 sekolah menengah kejuruan sudah tidak melakukan aktivitas pembelajaran lagi.

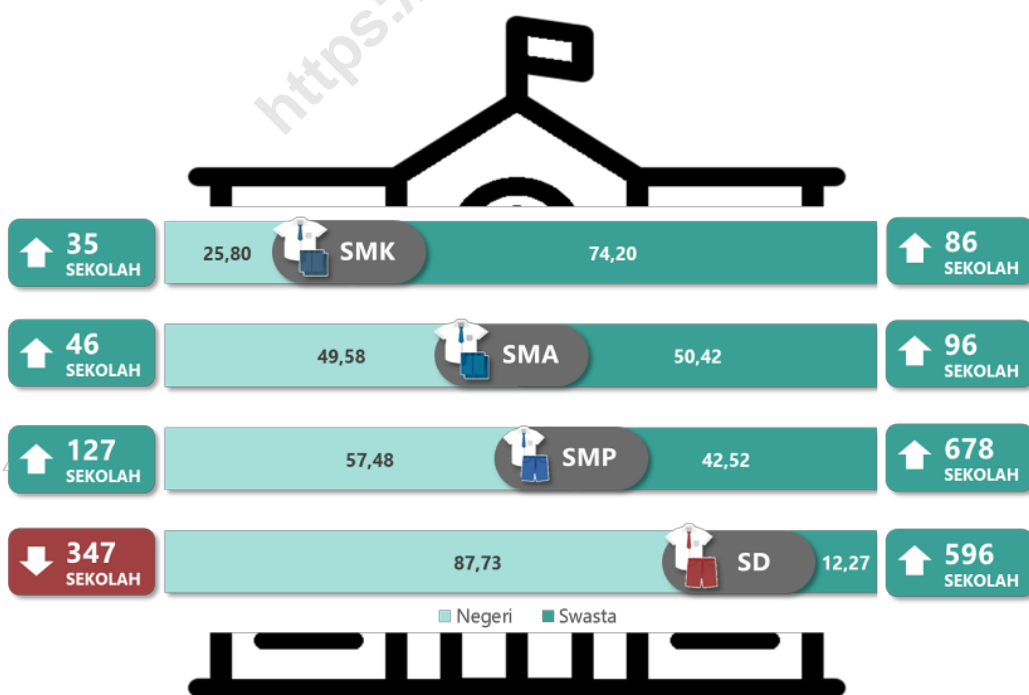
Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020 s.d. 2021/2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Peraturan zonasi sekolah mengakibatkan sekolah negeri terbatas menerima peserta didik dari luar zona sekolah dan orang tua banyak memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang tidak terikat peraturan tersebut. Dalam satu tahun, kenaikan jumlah sekolah swasta lebih besar dari kenaikan jumlah sekolah negeri di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2021/2022. Pada sekolah swasta, kenaikan jumlah sekolah paling banyak terjadi pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yaitu lebih dari 1.000 sekolah baru terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berkebalikan dengan sekolah swasta, jenjang pendidikan dasar sekolah negeri dalam setahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran 2020/2021. Sekolah-sekolah swasta dituntut untuk dapat menjaga kualitas pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana sekolah, karena sekolah swasta juga memiliki peran menjamin mutu pendidikan di Indonesia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Gambar 2.2 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

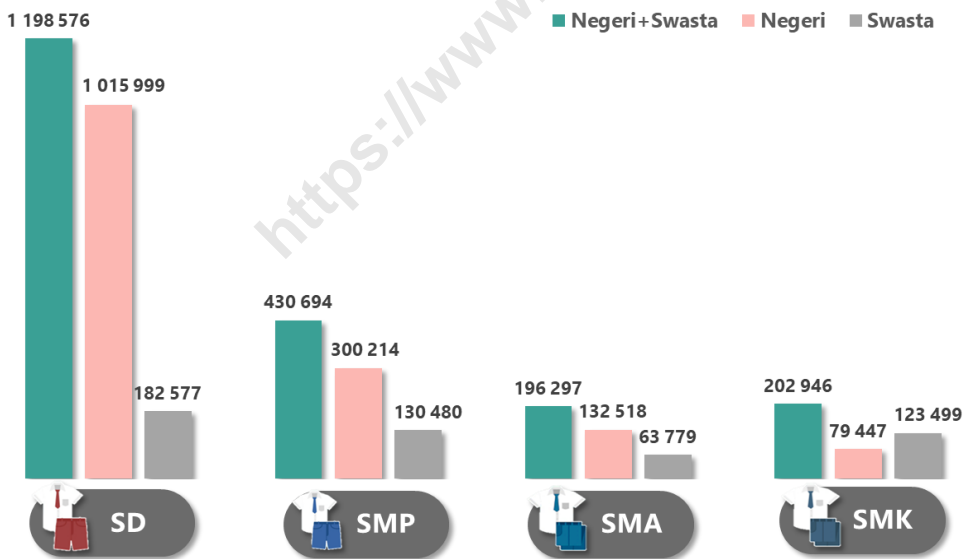


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Walaupun di beberapa daerah masih ada pembelajaran yang dilakukan secara daring, namun sebagian besar sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka karena pandemi yang sudah beranjak mereda. Dalam satu tahun terakhir jumlah ruang kelas mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas pada jenjang sekolah dasar dan angka tersebut hampir 3 kali dari jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah menengah pertama. Sedangkan jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan apabila digabungkan hampir sama dengan jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah menengah pertama.

Gambar 2.3 Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022



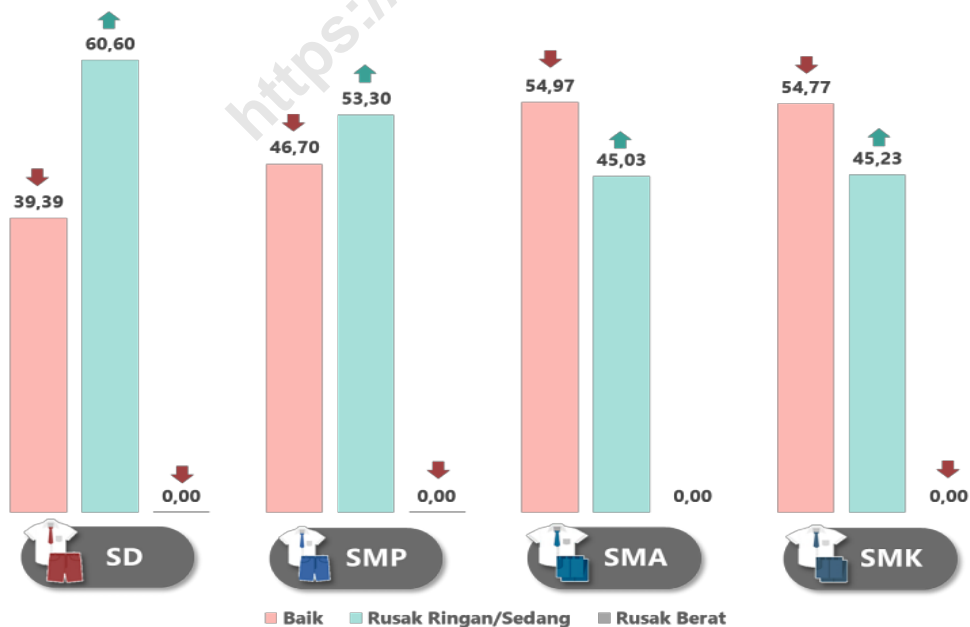
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Menurut status sekolah, jumlah ruang kelas sekolah negeri lebih banyak dari ruang kelas sekolah swasta. Walaupun jumlah sekolah swasta mengalami kenaikan yang lebih banyak dari kenaikan jumlah sekolah negeri, namun penambahan ruang kelas sekolah swasta tidak lebih banyak dari penambahan ruang kelas sekolah negeri. Jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah dasar di

sekolah negeri lebih banyak 8 kali dari jumlah ruang kelas sekolah swasta pada jenjang yang sama. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah kejuruan, jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah ruang kelas sekolah negeri.

Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sisi kondisi/keadaannya. Apabila dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan. Namun, jumlah ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan. Keadaan ini terjadi pada semua jenjang pendidikan. Ruang kelas yang dalam keadaan rusak berat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total ruang kelas, yaitu 15 berbanding lebih dari 2 juta ruang kelas. Selain itu, ruang kelas yang baik pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan persentasenya lebih besar dibandingkan ruang kelas yang rusak ringan atau sedang.

Gambar 2.4 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022

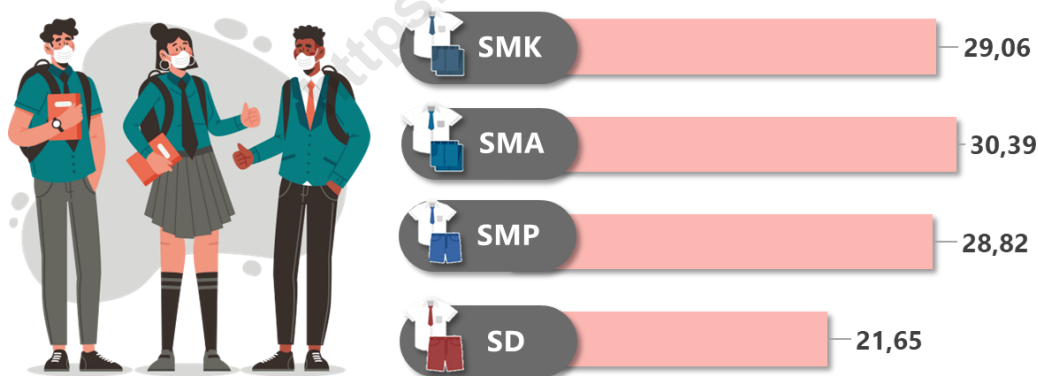


↑ Mengalami **kenaikan** dibandingkan tahun ajaran 2020/2021
↓ Mengalami **penurunan** dibandingkan tahun ajaran 2020/2021

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Rombongan belajar (rombel) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017. Pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup 20-28 peserta didik, jenjang SMP setidaknya terdiri dari 20-32 peserta didik, jenjang SMA mencakup 20-36 peserta didik, sedangkan cakupan pada jenjang SMK setidaknya mencakup 15-36 peserta didik. Semakin kecil rombel atau semakin sedikit jumlah peserta didik dalam satu rombel, semakin efektif sebuah proses pembelajaran dan memberikan capaian akademik yang lebih baik. Jumlah peserta didik yang sedikit dalam sebuah rombel akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pendidik dengan peserta didik (peserta didik merasa lebih mendapatkan dukungan dari guru-guru mereka), antar peserta didik, antar komunitas, dan sekolah sehingga menciptakan komitmen pada pendidikan dari semua pemegang kepentingan (Barrett dkk, 2019).

Gambar 2.5 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

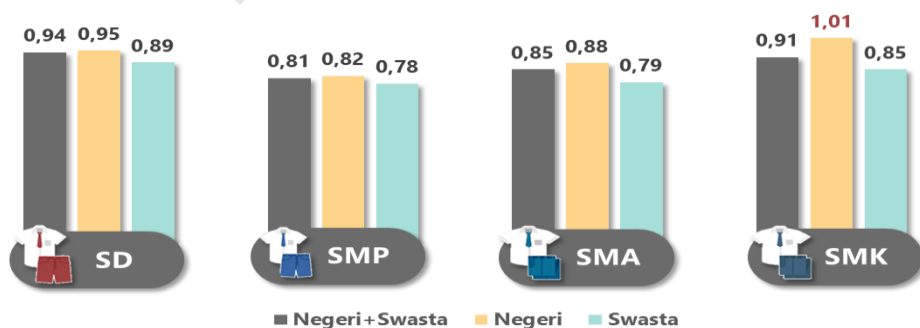
Rasio peserta didik per rombel pada setiap jenjangnya sudah berada pada rentang ketentuan yang berlaku sesuai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Rasio peserta didik per rombel paling kecil pada jenjang sekolah dasar dan paling besar pada jenjang sekolah menengah atas. Pada jenjang sekolah dasar rasio peserta didik per rombel sebesar 21,65 yang artinya bahwa setiap rombel di



sekolah dasar terdiri dari 21 sampai 22 siswa. Sedangkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas setiap rombel memiliki 30 sampai 31 siswa.

Selain rasio peserta didik per rombel, hal yang patut mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Semua jenjang pendidikan memiliki angka rasio rombel per kelas dibawah satu. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia lebih besar daripada jumlah rombel. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang ada, dengan memperhatikan kewajaran daya tampung peserta didik per kelas. Walaupun secara nasional rasio rombel per kelas sudah dibawah satu, kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa sekolah yang kekurangan ruang kelas atau ruang kelas dalam kondisi rusak berat sehingga ruang kelas harus digunakan secara bergantian (detik.com, 2022). Menurut status sekolah, pada sekolah negeri rasio rombel per kelas lebih dari 1 pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang artinya jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia.

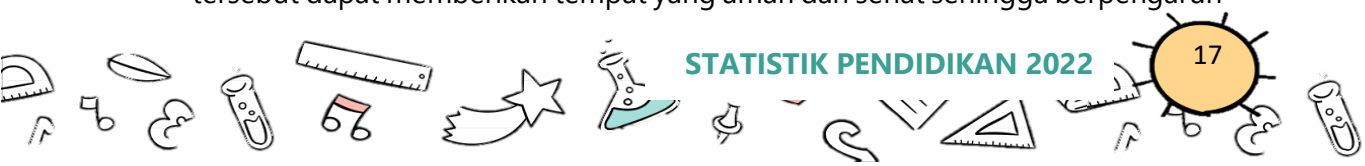
Gambar 2.6 Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

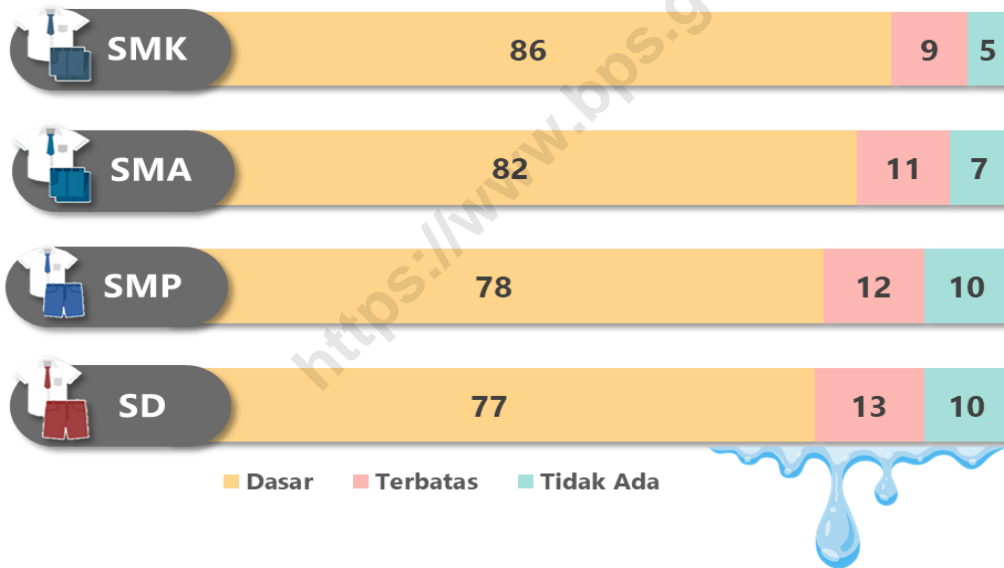
2.3 Sanitasi Sekolah

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan atau akses terhadap sekolah tidak hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana sekolah tersebut dapat memberikan tempat yang aman dan sehat sehingga berpengaruh



positif terhadap *outcome* pembelajaran peserta didik. Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan 4.a yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Indikator yang digunakan adalah proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).

Gambar 2.7 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sumber Air, 2021



Catatan:

1. Sumber Air Dasar yaitu memiliki sumber air layak*, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup**.
2. Sumber Air Terbatas yaitu memiliki sumber air layak, namun tidak cukup.
3. Sumber Air Tidak Ada yaitu memiliki sumber air tidak layak atau tidak ada sumber air di lingkungan sekolah.

*) Sumber air layak yaitu ledeng/PAM, sumur pompa, air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindungi, dan air kemasan

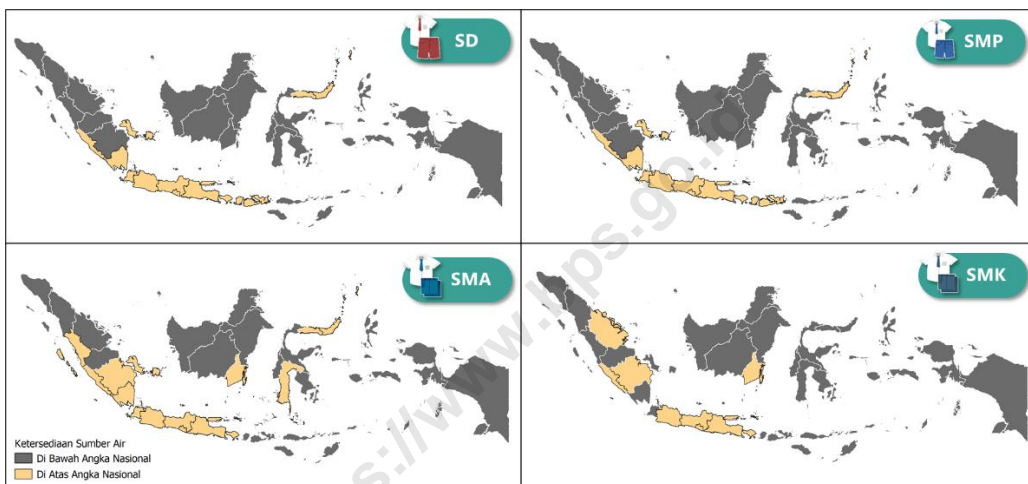
***) Cukup yaitu tersedia sepanjang waktu

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022



Pada tahun 2021 masih ada sekolah di Indonesia yang belum memiliki sumber air dasar (layak dan cukup). Namun, mayoritas sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah tersedia sumber air yang layak dan cukup. Terdapat 10 persen sekolah pada jenjang pendidikan SD yang tidak memiliki sumber air layak atau tidak ada sumber air. Persentase tersebut semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Gambar 2.8 Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sumber Air Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

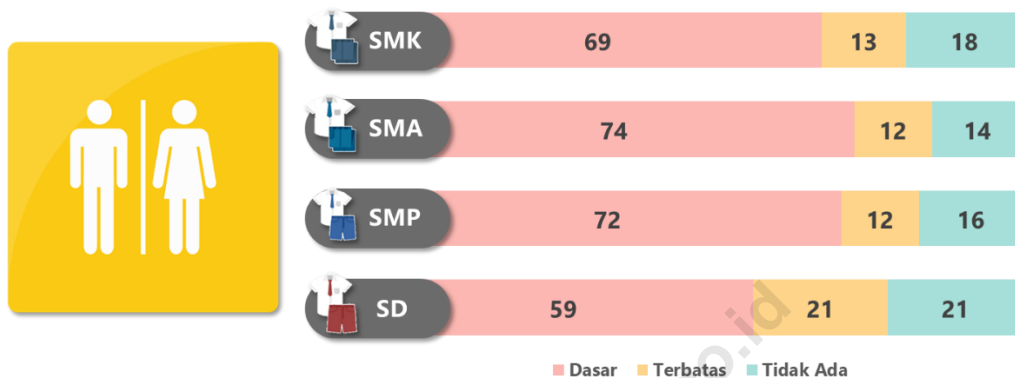
Apabila dilihat dari sebaran provinsi, provinsi dengan persentase sekolah yang memiliki sumber air dasar lebih besar dari angka nasional terlihat mengelompok di pulau Jawa dan pulau Sumatera bagian selatan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Sebaran provinsi untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama memiliki pola yang sama. Sementara itu, provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia memiliki persentase dibawah angka nasional.

Ketersediaan toilet di sekolah kerap tidak menjadi perhatian, padahal hal tersebut adalah aspek penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Sekolah yang sehat membutuhkan toilet yang seimbang dengan jumlah warga sekolah. Selain itu, ketersediaan toilet yang terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan siswa,



membiasakan peserta didik agar selalu berperilaku sehat, dan memenuhi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) bagi peserta didik perempuan.

Gambar 2.9 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sanitasi, 2021



Catatan:

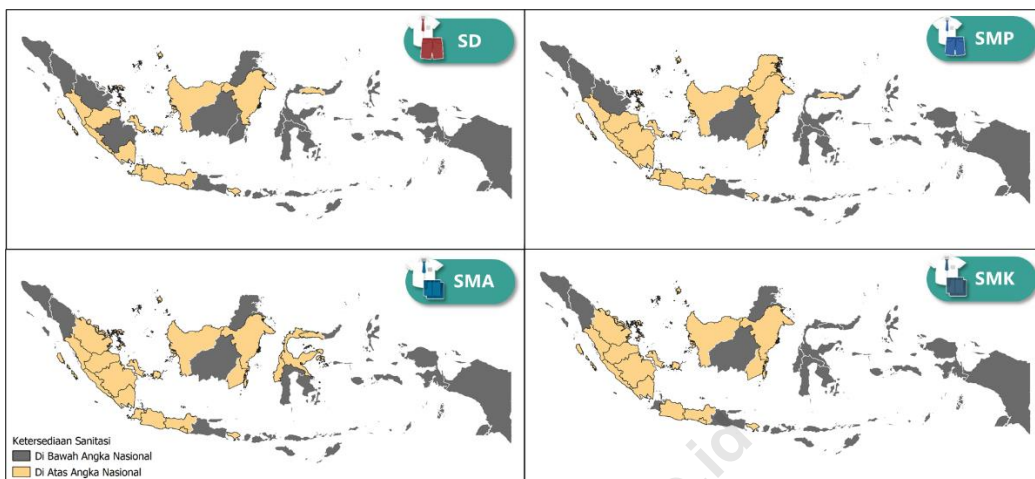
1. Sanitasi Dasar yaitu memiliki toilet layak dan terpisah laki-laki perempuan dengan kondisi baik atau rusak ringan
2. Sanitasi Terbatas yaitu memiliki toilet layak tetapi tidak terpisah laki-laki perempuan dan kondisi rusak berat
3. Tidak ada sanitasi yaitu tidak memiliki toilet atau toilet tidak layak.

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, secara umum setidaknya terdapat 6 dari 10 sekolah pada setiap jenjang yang memiliki sanitasi yang layak dan terpisah dengan kondisi baik atau rusak ringan. Jenjang pendidikan sekolah dasar memiliki ketersediaan sanitasi dasar yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Dari 100 sekolah hanya 59 sekolah dasar yang memiliki toilet layak dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, sekolah dasar adalah jenjang pendidikan yang paling banyak tidak memiliki sarana sanitasi. Terdapat 21 persen sekolah dasar yang tidak tersedia toilet atau tidak memiliki toilet yang layak. Ketersediaan sanitasi dasar perlu menjadi salah satu fokus pembangunan sekolah, agar dapat memberikan lingkungan belajar yang ramah anak dan ramah gender.



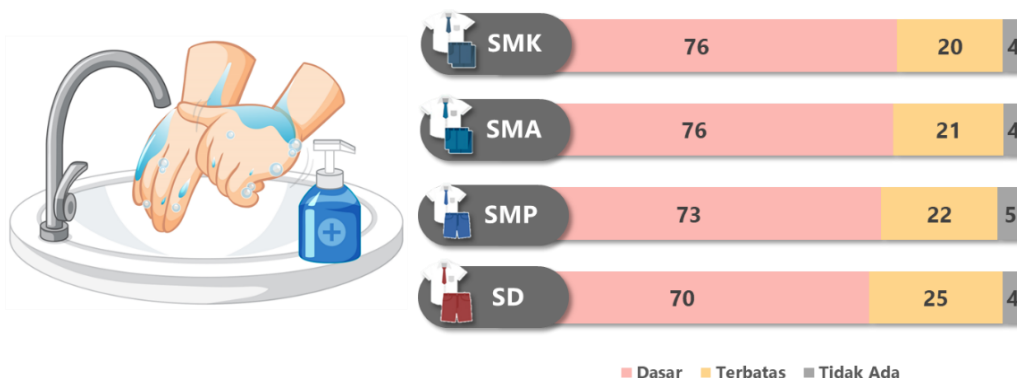
Gambar 2.10 Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sanitasi Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Berdasarkan sebaran provinsi, provinsi dengan persentase sekolah yang memiliki sarana sanitasi dasar lebih besar dari angka nasional terlihat berada pada wilayah Indonesia barat dan tengah. Di pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur menjadi satu satunya provinsi dimana persentase sekolah yang memiliki sarana sanitasi dasar masih dibawah angka nasional untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia juga memiliki persentase sekolah yang memiliki sarana sanitasi dasar dibawah angka nasional.

Gambar 2.11 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Sarana Kebersihan Dasar, 2021



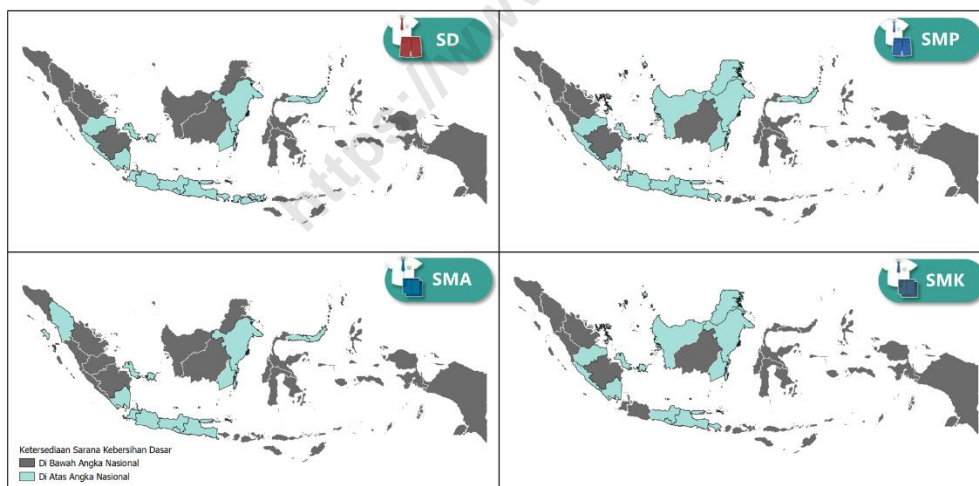
Catatan: Sarana Kebersihan Dasar yaitu sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022



Mencuci tangan adalah cara sederhana dan garis pertahanan pertama dalam mencegah penyebaran penyakit mulai dari flu biasa hingga infeksi yang lebih serius, terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah. Akan tetapi, belum semua sekolah memiliki ketersediaan akses untuk mencuci tangan. Pada tahun 2021, setidaknya terdapat 7 dari 10 sekolah di setiap jenjang pendidikan memiliki sarana kebersihan dasar (Gambar 2.11). Artinya, bahwa masih terdapat 3 sekolah di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bagi sivitas akademika di sekolah tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam satu tahun peningkatan persentase sekolah yang memiliki sarana kebersihan dasar meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2020 hanya sekitar 5 dari 10 sekolah di setiap jenjang pendidikan memiliki sarana kebersihan dasar (Statistik Pendidikan 2021).

Gambar 2.12 Sebaran Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sarana Kebersihan Dasar di Sekolah dan Jenjang Pendidikan, 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

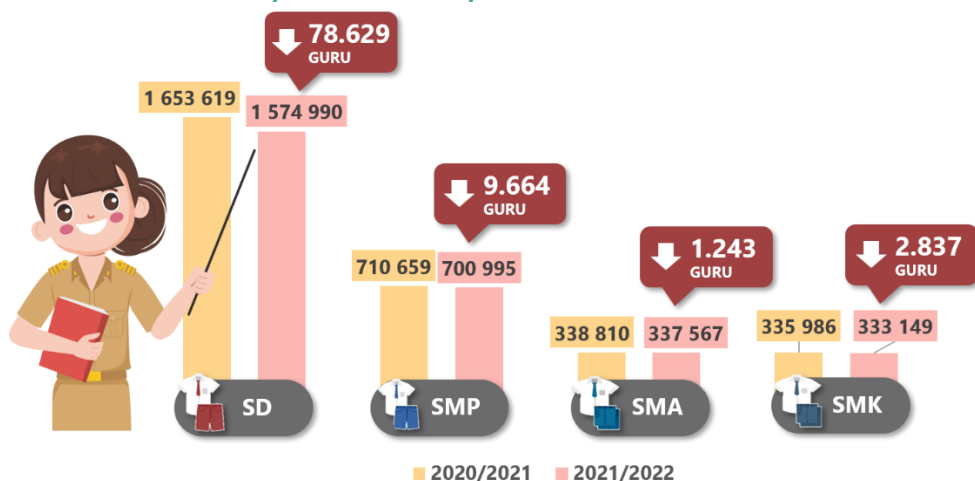
Ketersediaan sarana kebersihan dasar di sekolah pada setiap jenjang menurut sebaran provinsi terlihat pada Gambar 2.12. Menurut sebaran provinsi, provinsi dengan persentase sekolah yang memiliki sarana kebersihan dasar lebih besar dari angka nasional terlihat menyebar pada wilayah Indonesia barat dan tengah. Di pulau jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi satu satunya provinsi dimana persentase sekolah menengah kejuruan yang memiliki sarana kebersihan dasar

masih dibawah angka nasional. Selain itu, provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia memiliki persentase sekolah yang memiliki sarana kebersihan dasar dibawah angka nasional.

2.4 Guru

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan seorang guru dalam melakukan pengajaran. Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Indikatornya adalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta memantau upaya peningkatan kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDG's, guru yang memenuhi kualifikasi adalah yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Gambar 2.13 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022

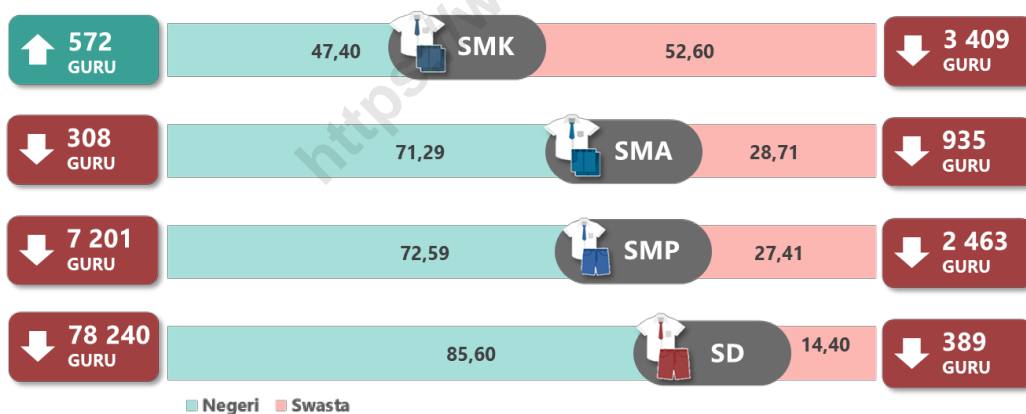


Catatan: Guru yang dimaksud termasuk Kepala Sekolah

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Jumlah guru sekolah dasar dan menengah pada tahun ajaran 2021/2022 adalah hampir 3 juta guru. Komposisi guru paling banyak berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 1,6 juta guru. Sedangkan jumlah guru sekolah menengah pertama kurang lebih setengah dari jumlah guru sekolah dasar yaitu sebanyak 700 ribu guru. Lain hal dengan guru pada jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan, apabila digabungkan jumlahnya masih kurang dari jumlah guru sekolah menengah pertama. Keadaan tahun ajaran 2021/2022 menunjukkan bahwa jumlah guru mengalami penurunan yang sangat banyak dalam satu tahun terakhir. Penurunan terjadi pada setiap jenjang pendidikan. Padahal tren tahun ajaran sebelumnya, profesi guru masih cukup diminati yang ditunjukkan dengan jumlah guru yang mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2020/2021 di setiap jenjang pendidikan (Statistik Pendidikan 2021). Penurunan paling banyak adalah jumlah guru sekolah dasar yaitu sekitar 78 ribu guru sudah tidak terdaftar lagi di Kemendikbudristek.

Gambar 2.14 Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

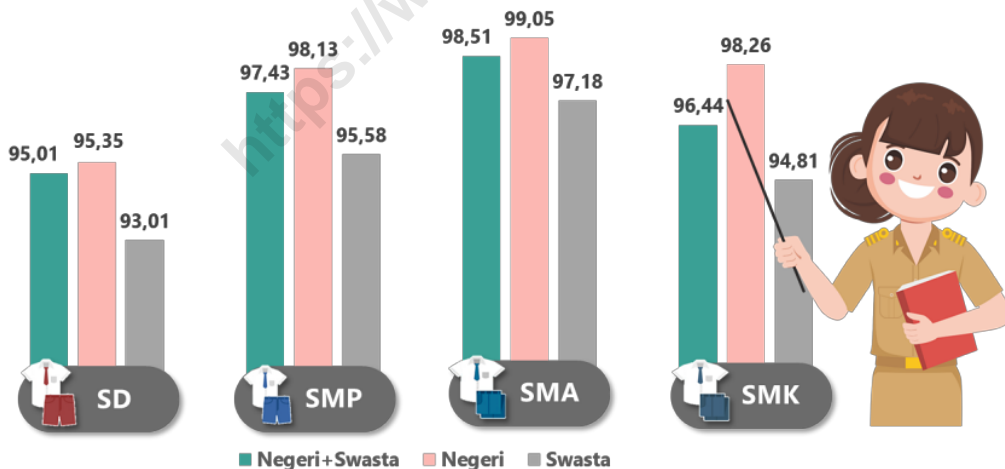


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Berdasarkan status sekolah, jumlah guru sekolah dasar yang berada di sekolah negeri menurun sangat signifikan. Sekitar 78 ribu guru tidak lagi mengajar di sekolah dasar merupakan guru di sekolah negeri. Pada sekolah negeri hanya guru di sekolah menengah kejuruan yang mengalami kenaikan. Sedangkan di sekolah swasta, guru yang paling banyak tidak mengajar lagi adalah guru yang berada pada jenjang sekolah menengah kejuruan.

Pada tahun ajaran 2021/2022, secara absolut jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah guru juga mengalami penurunan. Namun apabila ditinjau secara persentase, persentase guru layak mengajar mengalami kenaikan dalam setahun terakhir pada setiap jenjang. Menurut jenjang pendidikan, persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 paling banyak ada pada jenjang sekolah menengah atas, sedangkan jenjang sekolah dasar merupakan jenjang dengan persentase paling kecil. Persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas ada sebanyak 98 dari 100 guru. Sedangkan pada jenjang sekolah dasar, dari 100 guru terdapat 95 guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Berdasarkan status sekolah, keberadaan guru dengan pendidikan minimal S1/D4 di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Gambar 2.15 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

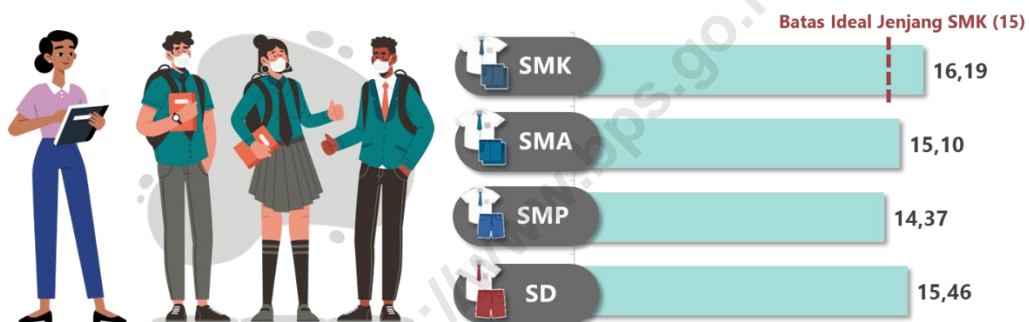


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Kualitas dan distribusi pendidik yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah,

berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA rasio murid-guru masih memenuhi standar ideal. Namun, pada jenjang pendidikan SMK rasio murid-guru belum memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan.

Gambar 2.16 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022



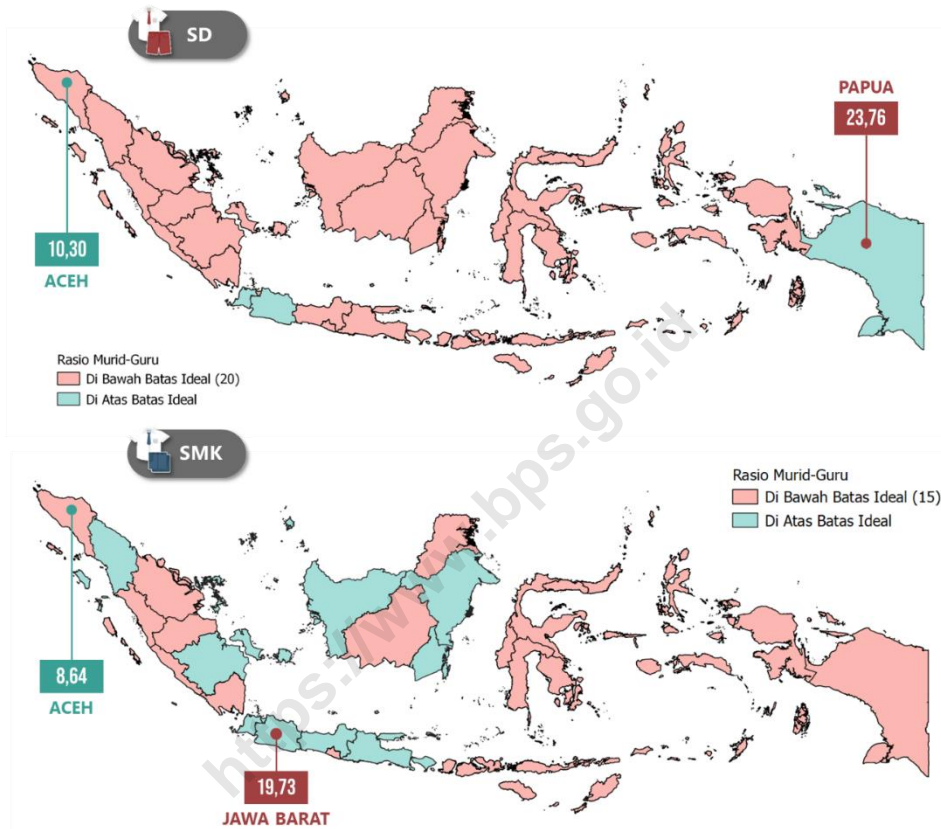
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Pada jenjang sekolah dasar walaupun secara nasional rasio murid-guru sudah baik yaitu tidak lebih dari angka ideal, namun menurut sebaran provinsi terdapat tiga provinsi dengan rasio di atas angka idealnya yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua. Angka ini menunjukkan capaian yang belum baik karena terjadinya penumpukan guru sekolah dasar di level provinsi. Rasio terkecil ada di Provinsi Aceh, dimana satu guru bertanggung jawab kepada 10 murid. Sedangkan di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab terhadap 24 murid. Angka ini lebih dari dua kali rasio di Provinsi Aceh. Pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dimana menurut sebaran provinsi sudah tidak ada provinsi yang rasio murid-guru di atas batas ideal. Lain hal dengan yang terjadi pada jenjang sekolah menengah kejuruan, dimana provinsi-provinsi dengan rasio di atas batas ideal banyak ditemukan di pulau



Jawa yang cenderung banyak penduduknya seperti di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gambar 2.17 Sebaran Provinsi Berdasarkan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022



Tabel 2.1.1 Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 335	94,93	178	5,07	3 513	100,00
Sumatera Utara	8 262	84,39	1 528	15,61	9 790	100,00
Sumatera Barat	3 981	93,78	264	6,22	4 245	100,00
Riau	3 210	85,51	544	14,49	3 754	100,00
Jambi	2 316	93,99	148	6,01	2 464	100,00
Sumatera Selatan	4 262	90,97	423	9,03	4 685	100,00
Bengkulu	1 304	93,34	93	6,66	1 397	100,00
Lampung	4 337	91,67	394	8,33	4 731	100,00
Kep. Bangka Belitung	760	92,01	66	7,99	826	100,00
Kep. Riau	683	70,56	285	29,44	968	100,00
DKI Jakarta	1 534	61,43	963	38,57	2 497	100,00
Jawa Barat	17 424	88,72	2 215	11,28	19 639	100,00
Jawa Tengah	17 547	93,41	1 237	6,59	18 784	100,00
DI Yogyakarta	1 425	77,15	422	22,85	1 847	100,00
Jawa Timur	17 105	89,76	1 952	10,24	19 057	100,00
Banten	3 912	84,49	718	15,51	4 630	100,00
Bali	2 274	94,08	143	5,92	2 417	100,00
Nusa Tenggara Barat	3 012	92,14	257	7,86	3 269	100,00
Nusa Tenggara Timur	3 365	64,91	1 819	35,09	5 184	100,00
Kalimantan Barat	4 132	93,53	286	6,47	4 418	100,00
Kalimantan Tengah	2 416	91,55	223	8,45	2 639	100,00
Kalimantan Selatan	2 769	94,25	169	5,75	2 938	100,00
Kalimantan Timur	1 650	86,80	251	13,20	1 901	100,00
Kalimantan Utara	435	90,44	46	9,56	481	100,00
Sulawesi Utara	1 361	61,44	854	38,56	2 215	100,00
Sulawesi Tengah	2 671	91,66	243	8,34	2 914	100,00
Sulawesi Selatan	6 087	94,99	321	5,01	6 408	100,00
Sulawesi Tenggara	2 255	96,70	77	3,30	2 332	100,00
Gorontalo	896	96,76	30	3,24	926	100,00
Sulawesi Barat	1 297	97,89	28	2,11	1 325	100,00
Maluku	1 273	70,57	531	29,43	1 804	100,00
Maluku Utara	1 106	84,43	204	15,57	1 310	100,00
Papua Barat	686	63,05	402	36,95	1 088	100,00
Papua	1 629	62,75	967	37,25	2 596	100,00
Indonesia	130 711	87,73	18 281	12,27	148 992	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.1.2 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	897	73,95	316	26,05	1 213	100,00
Sumatera Utara	1 331	50,30	1 315	49,70	2 646	100,00
Sumatera Barat	674	79,76	171	20,24	845	100,00
Riau	855	69,51	375	30,49	1 230	100,00
Jambi	557	80,38	136	19,62	693	100,00
Sumatera Selatan	901	65,20	481	34,80	1 382	100,00
Bengkulu	381	86,79	58	13,21	439	100,00
Lampung	710	50,28	702	49,72	1 412	100,00
Kep. Bangka Belitung	161	72,20	62	27,80	223	100,00
Kep. Riau	234	58,65	165	41,35	399	100,00
DKI Jakarta	339	29,84	797	70,16	1 136	100,00
Jawa Barat	1 969	34,64	3 715	65,36	5 684	100,00
Jawa Tengah	1 769	52,31	1 613	47,69	3 382	100,00
DI Yogyakarta	214	47,77	234	52,23	448	100,00
Jawa Timur	1 729	35,54	3 136	64,46	4 865	100,00
Banten	573	36,57	994	63,43	1 567	100,00
Bali	272	66,67	136	33,33	408	100,00
Nusa Tenggara Barat	605	61,17	384	38,83	989	100,00
Nusa Tenggara Timur	1 354	75,98	428	24,02	1 782	100,00
Kalimantan Barat	1 018	75,35	333	24,65	1 351	100,00
Kalimantan Tengah	708	83,79	137	16,21	845	100,00
Kalimantan Selatan	522	84,33	97	15,67	619	100,00
Kalimantan Timur	447	66,92	221	33,08	668	100,00
Kalimantan Utara	153	82,26	33	17,74	186	100,00
Sulawesi Utara	474	65,20	253	34,80	727	100,00
Sulawesi Tengah	731	85,00	129	15,00	860	100,00
Sulawesi Selatan	1 265	74,68	429	25,32	1 694	100,00
Sulawesi Tenggara	691	89,28	83	10,72	774	100,00
Gorontalo	312	92,31	26	7,69	338	100,00
Sulawesi Barat	318	84,35	59	15,65	377	100,00
Maluku	534	79,23	140	20,77	674	100,00
Maluku Utara	363	72,31	139	27,69	502	100,00
Papua Barat	229	70,90	94	29,10	323	100,00
Papua	507	70,32	214	29,68	721	100,00
Indonesia	23 797	57,48	17 605	42,52	41 402	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.1.3 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	395	74,67	134	25,33	529	100,00
Sumatera Utara	427	40,06	639	59,94	1 066	100,00
Sumatera Barat	236	71,30	95	28,70	331	100,00
Riau	303	67,79	144	32,21	447	100,00
Jambi	161	68,51	74	31,49	235	100,00
Sumatera Selatan	329	54,92	270	45,08	599	100,00
Bengkulu	109	76,22	34	23,78	143	100,00
Lampung	238	46,48	274	53,52	512	100,00
Kep. Bangka Belitung	45	64,29	25	35,71	70	100,00
Kep. Riau	93	61,18	59	38,82	152	100,00
DKI Jakarta	128	25,55	373	74,45	501	100,00
Jawa Barat	512	30,71	1 155	69,29	1 667	100,00
Jawa Tengah	360	42,45	488	57,55	848	100,00
DI Yogyakarta	69	40,83	100	59,17	169	100,00
Jawa Timur	423	27,81	1 098	72,19	1 521	100,00
Banten	152	26,39	424	73,61	576	100,00
Bali	83	52,53	75	47,47	158	100,00
Nusa Tenggara Barat	154	46,25	179	53,75	333	100,00
Nusa Tenggara Timur	370	63,79	210	36,21	580	100,00
Kalimantan Barat	267	59,60	181	40,40	448	100,00
Kalimantan Tengah	181	75,10	60	24,90	241	100,00
Kalimantan Selatan	141	69,80	61	30,20	202	100,00
Kalimantan Timur	142	62,28	86	37,72	228	100,00
Kalimantan Utara	44	66,67	22	33,33	66	100,00
Sulawesi Utara	121	52,84	108	47,16	229	100,00
Sulawesi Tengah	175	77,09	52	22,91	227	100,00
Sulawesi Selatan	335	56,30	260	43,70	595	100,00
Sulawesi Tenggara	245	80,33	60	19,67	305	100,00
Gorontalo	61	88,41	8	11,59	69	100,00
Sulawesi Barat	76	86,36	12	13,64	88	100,00
Maluku	209	74,11	73	25,89	282	100,00
Maluku Utara	139	64,65	76	35,35	215	100,00
Papua Barat	81	62,79	48	37,21	129	100,00
Papua	141	57,32	105	42,68	246	100,00
Indonesia	6 945	49,58	7 062	50,42	14 007	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.1.4 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	152	69,09	68	30,91	220	100,00
Sumatera Utara	269	27,62	705	72,38	974	100,00
Sumatera Barat	114	53,77	98	46,23	212	100,00
Riau	128	42,52	173	57,48	301	100,00
Jambi	104	58,76	73	41,24	177	100,00
Sumatera Selatan	118	38,69	187	61,31	305	100,00
Bengkulu	64	60,95	41	39,05	105	100,00
Lampung	111	22,75	377	77,25	488	100,00
Kep. Bangka Belitung	36	61,02	23	38,98	59	100,00
Kep. Riau	36	32,43	75	67,57	111	100,00
DKI Jakarta	74	12,82	503	87,18	577	100,00
Jawa Barat	288	9,91	2 619	90,09	2 907	100,00
Jawa Tengah	237	15,28	1 314	84,72	1 551	100,00
DI Yogyakarta	50	23,36	164	76,64	214	100,00
Jawa Timur	297	13,94	1 834	86,06	2 131	100,00
Banten	81	11,04	653	88,96	734	100,00
Bali	53	31,93	113	68,07	166	100,00
Nusa Tenggara Barat	99	30,75	223	69,25	322	100,00
Nusa Tenggara Timur	158	50,64	154	49,36	312	100,00
Kalimantan Barat	107	48,42	114	51,58	221	100,00
Kalimantan Tengah	93	67,88	44	32,12	137	100,00
Kalimantan Selatan	63	49,61	64	50,39	127	100,00
Kalimantan Timur	87	39,91	131	60,09	218	100,00
Kalimantan Utara	21	65,63	11	34,38	32	100,00
Sulawesi Utara	91	48,66	96	51,34	187	100,00
Sulawesi Tengah	106	57,61	78	42,39	184	100,00
Sulawesi Selatan	169	40,63	247	59,38	416	100,00
Sulawesi Tenggara	102	61,82	63	38,18	165	100,00
Gorontalo	40	68,97	18	31,03	58	100,00
Sulawesi Barat	59	45,04	72	54,96	131	100,00
Maluku	82	71,30	33	28,70	115	100,00
Maluku Utara	63	43,15	83	56,85	146	100,00
Papua Barat	33	57,89	24	42,11	57	100,00
Papua	79	56,83	60	43,17	139	100,00
Indonesia	3 664	25,80	10 535	74,20	14 199	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.2.1 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Total
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,45	61,55	0,00	100,00
Sumatera Utara	43,86	56,14	0,00	100,00
Sumatera Barat	38,64	61,36	0,00	100,00
Riau	46,17	53,83	0,00	100,00
Jambi	37,58	62,42	0,00	100,00
Sumatera Selatan	38,13	61,87	0,00	100,00
Bengkulu	32,30	67,70	0,00	100,00
Lampung	35,96	64,04	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,35	46,65	0,00	100,00
Kep. Riau	61,37	38,63	0,00	100,00
DKI Jakarta	70,25	29,75	0,00	100,00
Jawa Barat	34,62	65,38	0,00	100,00
Jawa Tengah	32,70	67,29	0,00	100,00
DI Yogyakarta	41,80	58,20	0,00	100,00
Jawa Timur	35,55	64,44	0,01	100,00
Banten	45,08	54,92	0,00	100,00
Bali	45,21	54,79	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,38	61,62	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,43	60,57	0,00	100,00
Kalimantan Barat	35,37	64,63	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	38,24	61,76	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	42,76	57,24	0,00	100,00
Kalimantan Timur	51,53	48,47	0,00	100,00
Kalimantan Utara	45,97	54,03	0,00	100,00
Sulawesi Utara	38,97	61,03	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	49,01	50,98	0,01	100,00
Sulawesi Selatan	35,38	64,62	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	41,56	58,44	0,00	100,00
Gorontalo	43,21	56,79	0,00	100,00
Sulawesi Barat	36,68	63,32	0,00	100,00
Maluku	43,38	56,62	0,00	100,00
Maluku Utara	35,08	64,92	0,00	100,00
Papua Barat	44,85	55,15	0,00	100,00
Papua	39,85	60,15	0,00	100,00
Indonesia	39,39	60,60	0,00	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.2.2 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Total
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	42,87	57,13	0,00	100,00
Sumatera Utara	48,69	51,31	0,00	100,00
Sumatera Barat	49,61	50,39	0,00	100,00
Riau	47,51	52,49	0,00	100,00
Jambi	40,72	59,28	0,00	100,00
Sumatera Selatan	46,63	53,37	0,00	100,00
Bengkulu	39,93	60,07	0,00	100,00
Lampung	43,57	56,43	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	61,34	38,66	0,00	100,00
Kep. Riau	61,74	38,26	0,00	100,00
DKI Jakarta	72,96	27,04	0,00	100,00
Jawa Barat	46,38	53,62	0,00	100,00
Jawa Tengah	42,92	57,08	0,00	100,00
DI Yogyakarta	47,19	52,81	0,00	100,00
Jawa Timur	44,92	55,08	0,00	100,00
Banten	52,05	47,95	0,00	100,00
Bali	55,81	44,19	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,75	56,24	0,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,43	55,57	0,00	100,00
Kalimantan Barat	39,86	60,14	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	42,91	57,09	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	48,80	51,20	0,00	100,00
Kalimantan Timur	52,90	47,10	0,00	100,00
Kalimantan Utara	54,56	45,44	0,00	100,00
Sulawesi Utara	43,52	56,48	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	49,63	50,37	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	42,04	57,95	0,01	100,00
Sulawesi Tenggara	44,10	55,90	0,00	100,00
Gorontalo	47,40	52,60	0,00	100,00
Sulawesi Barat	45,17	54,83	0,00	100,00
Maluku	49,93	50,07	0,00	100,00
Maluku Utara	37,57	62,43	0,00	100,00
Papua Barat	39,38	60,62	0,00	100,00
Papua	40,39	59,61	0,00	100,00
Indonesia	46,70	53,30	0,00	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.2.3 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Total
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	41,31	58,69	0,00	100,00
Sumatera Utara	55,05	44,95	0,00	100,00
Sumatera Barat	51,67	48,33	0,00	100,00
Riau	53,82	46,18	0,00	100,00
Jambi	50,98	49,02	0,00	100,00
Sumatera Selatan	50,86	49,14	0,00	100,00
Bengkulu	44,03	55,97	0,00	100,00
Lampung	49,39	50,61	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,45	31,55	0,00	100,00
Kep. Riau	65,01	34,99	0,00	100,00
DKI Jakarta	73,66	26,34	0,00	100,00
Jawa Barat	56,92	43,08	0,00	100,00
Jawa Tengah	57,24	42,76	0,00	100,00
DI Yogyakarta	59,73	40,27	0,00	100,00
Jawa Timur	55,75	44,25	0,00	100,00
Banten	59,61	40,39	0,00	100,00
Bali	68,27	31,73	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,00	59,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,50	41,50	0,00	100,00
Kalimantan Barat	52,12	47,88	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	55,92	44,08	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	59,69	40,31	0,00	100,00
Kalimantan Timur	52,18	47,82	0,00	100,00
Kalimantan Utara	51,68	48,32	0,00	100,00
Sulawesi Utara	54,71	45,29	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	64,62	35,38	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	54,57	45,43	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	48,44	51,56	0,00	100,00
Gorontalo	68,99	31,01	0,00	100,00
Sulawesi Barat	52,92	47,08	0,00	100,00
Maluku	44,12	55,88	0,00	100,00
Maluku Utara	52,37	47,63	0,00	100,00
Papua Barat	37,16	62,84	0,00	100,00
Papua	42,65	57,35	0,00	100,00
Indonesia	54,97	45,03	0,00	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.2.4 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Total
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	45,59	54,41	0,00	100,00
Sumatera Utara	54,54	45,46	0,00	100,00
Sumatera Barat	48,59	51,41	0,00	100,00
Riau	55,50	44,50	0,00	100,00
Jambi	54,66	45,34	0,00	100,00
Sumatera Selatan	52,66	47,34	0,00	100,00
Bengkulu	52,45	47,55	0,00	100,00
Lampung	50,64	49,36	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	57,17	42,83	0,00	100,00
Kep. Riau	60,74	39,26	0,00	100,00
DKI Jakarta	65,07	34,93	0,00	100,00
Jawa Barat	55,37	44,63	0,00	100,00
Jawa Tengah	53,10	46,90	0,00	100,00
DI Yogyakarta	58,62	41,38	0,00	100,00
Jawa Timur	56,37	43,63	0,00	100,00
Banten	52,32	47,68	0,00	100,00
Bali	66,98	33,02	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,30	52,70	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,35	42,65	0,00	100,00
Kalimantan Barat	53,93	46,07	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	51,10	48,90	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	60,01	39,99	0,00	100,00
Kalimantan Timur	62,25	37,75	0,00	100,00
Kalimantan Utara	56,30	43,70	0,00	100,00
Sulawesi Utara	47,43	52,57	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	58,33	41,67	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	49,94	50,06	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	49,50	50,50	0,00	100,00
Gorontalo	60,12	39,88	0,00	100,00
Sulawesi Barat	53,17	46,83	0,00	100,00
Maluku	46,76	53,24	0,00	100,00
Maluku Utara	55,95	44,05	0,00	100,00
Papua Barat	54,65	45,35	0,00	100,00
Papua	41,60	58,40	0,00	100,00
Indonesia	54,77	45,23	0,00	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.3 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20	26	26	22
Sumatera Utara	21	29	32	29
Sumatera Barat	20	27	31	28
Riau	23	28	30	27
Jambi	20	26	29	25
Sumatera Selatan	23	29	31	30
Bengkulu	19	26	29	26
Lampung	21	28	30	28
Kep. Bangka Belitung	24	30	31	31
Kep. Riau	24	30	31	28
DKI Jakarta	27	32	31	30
Jawa Barat	27	31	32	30
Jawa Tengah	21	30	32	31
DI Yogyakarta	20	29	30	30
Jawa Timur	20	29	30	30
Banten	28	31	32	30
Bali	22	32	33	32
Nusa Tenggara Barat	22	26	31	27
Nusa Tenggara Timur	19	28	28	27
Kalimantan Barat	18	27	30	31
Kalimantan Tengah	16	24	27	25
Kalimantan Selatan	18	26	29	30
Kalimantan Timur	23	28	30	29
Kalimantan Utara	19	26	28	30
Sulawesi Utara	15	25	25	22
Sulawesi Tengah	16	25	30	24
Sulawesi Selatan	19	27	30	25
Sulawesi Tenggara	18	25	28	23
Gorontalo	18	24	30	23
Sulawesi Barat	16	25	29	24
Maluku	18	25	26	21
Maluku Utara	17	25	26	20
Papua Barat	18	26	26	24
Papua	25	30	30	25
Indonesia	22	29	30	29

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.4 Rasio Rombel per Kelas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,86	0,68	0,73	0,86
Sumatera Utara	0,93	0,82	0,87	0,85
Sumatera Barat	0,91	0,77	0,86	0,99
Riau	0,92	0,77	0,88	0,87
Jambi	0,89	0,76	0,83	0,89
Sumatera Selatan	0,97	0,85	0,88	1,00
Bengkulu	0,89	0,78	0,86	0,84
Lampung	0,94	0,80	0,87	0,95
Kep. Bangka Belitung	0,80	0,80	0,92	0,83
Kep. Riau	0,96	0,85	0,90	0,82
DKI Jakarta	0,93	0,83	0,87	0,80
Jawa Barat	1,05	0,84	0,87	0,90
Jawa Tengah	0,94	0,86	0,90	0,96
DI Yogyakarta	0,93	0,88	0,85	0,92
Jawa Timur	0,94	0,84	0,88	0,99
Banten	1,02	0,81	0,88	0,88
Bali	0,95	0,92	0,92	1,01
Nusa Tenggara Barat	0,92	0,77	0,84	0,96
Nusa Tenggara Timur	0,79	0,75	0,81	0,91
Kalimantan Barat	0,94	0,84	0,87	0,98
Kalimantan Tengah	0,90	0,76	0,84	0,92
Kalimantan Selatan	0,92	0,76	0,88	0,99
Kalimantan Timur	0,97	0,85	0,81	0,86
Kalimantan Utara	0,95	0,84	0,90	0,80
Sulawesi Utara	0,92	0,74	0,85	0,91
Sulawesi Tengah	0,83	0,71	0,84	0,78
Sulawesi Selatan	0,95	0,77	0,80	0,86
Sulawesi Tenggara	0,87	0,73	0,76	0,82
Gorontalo	0,84	0,75	0,92	0,87
Sulawesi Barat	0,90	0,73	0,79	0,85
Maluku	0,85	0,68	0,75	0,85
Maluku Utara	0,88	0,74	0,76	0,74
Papua Barat	0,96	0,81	0,87	0,97
Papua	0,89	0,78	0,84	0,88
Indonesia	0,94	0,81	0,85	0,91

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.5.1 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sumber Air		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	73	15	12
Sumatera Utara	72	17	12
Sumatera Barat	77	15	8
Riau	72	13	15
Jambi	74	13	14
Sumatera Selatan	73	16	12
Bengkulu	79	12	9
Lampung	81	12	7
Kep. Bangka Belitung	81	12	6
Kep. Riau	73	14	13
DKI Jakarta	95	3	2
Jawa Barat	82	12	6
Jawa Tengah	89	8	4
DI Yogyakarta	92	6	2
Jawa Timur	86	9	5
Banten	84	10	6
Bali	87	9	5
Nusa Tenggara Barat	78	14	8
Nusa Tenggara Timur	43	26	30
Kalimantan Barat	50	23	26
Kalimantan Tengah	58	13	29
Kalimantan Selatan	75	9	17
Kalimantan Timur	71	14	15
Kalimantan Utara	63	20	18
Sulawesi Utara	79	13	8
Sulawesi Tengah	71	15	15
Sulawesi Selatan	77	13	9
Sulawesi Tenggara	75	14	11
Gorontalo	79	11	10
Sulawesi Barat	64	15	20
Maluku	68	18	14
Maluku Utara	74	17	9
Papua Barat	44	24	31
Papua	38	33	29
Indonesia	77	13	10

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.5.2 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sumber Air		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	72	15	12
Sumatera Utara	77	14	9
Sumatera Barat	77	14	10
Riau	75	12	12
Jambi	78	12	10
Sumatera Selatan	77	15	8
Bengkulu	84	9	7
Lampung	81	10	9
Kep. Bangka Belitung	83	11	6
Kep. Riau	76	13	11
DKI Jakarta	95	4	2
Jawa Barat	84	11	6
Jawa Tengah	90	7	3
DI Yogyakarta	92	6	2
Jawa Timur	87	9	4
Banten	87	9	4
Bali	88	8	4
Nusa Tenggara Barat	74	17	9
Nusa Tenggara Timur	45	23	32
Kalimantan Barat	58	20	22
Kalimantan Tengah	63	13	24
Kalimantan Selatan	74	11	16
Kalimantan Timur	75	13	12
Kalimantan Utara	66	19	15
Sulawesi Utara	80	14	6
Sulawesi Tengah	73	13	13
Sulawesi Selatan	78	12	10
Sulawesi Tenggara	74	14	12
Gorontalo	77	14	9
Sulawesi Barat	68	15	18
Maluku	64	15	21
Maluku Utara	71	18	12
Papua Barat	57	22	21
Papua	49	31	20
Indonesia	78	12	10

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.5.3 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sumber Air		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78	12	10
Sumatera Utara	82	11	7
Sumatera Barat	84	11	5
Riau	81	10	9
Jambi	80	11	9
Sumatera Selatan	86	8	6
Bengkulu	87	8	4
Lampung	87	7	6
Kep. Bangka Belitung	86	11	4
Kep. Riau	79	11	10
DKI Jakarta	94	6	1
Jawa Barat	88	8	4
Jawa Tengah	92	6	2
DI Yogyakarta	89	9	2
Jawa Timur	88	8	4
Banten	87	8	5
Bali	91	7	3
Nusa Tenggara Barat	81	13	6
Nusa Tenggara Timur	53	22	25
Kalimantan Barat	69	16	14
Kalimantan Tengah	78	10	12
Kalimantan Selatan	87	7	5
Kalimantan Timur	82	10	9
Kalimantan Utara	65	15	20
Sulawesi Utara	87	10	3
Sulawesi Tengah	77	12	11
Sulawesi Selatan	85	9	6
Sulawesi Tenggara	77	10	12
Gorontalo	84	9	7
Sulawesi Barat	81	13	7
Maluku	70	15	15
Maluku Utara	81	13	7
Papua Barat	60	22	18
Papua	61	27	11
Indonesia	82	11	7

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.5.4 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sumber Air, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sumber Air		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80	12	8
Sumatera Utara	80	13	7
Sumatera Barat	85	10	5
Riau	88	4	8
Jambi	84	10	6
Sumatera Selatan	87	10	4
Bengkulu	87	10	2
Lampung	85	7	8
Kep. Bangka Belitung	83	11	6
Kep. Riau	85	8	7
DKI Jakarta	95	4	1
Jawa Barat	88	8	4
Jawa Tengah	90	7	3
DI Yogyakarta	91	6	3
Jawa Timur	90	6	4
Banten	86	8	6
Bali	93	3	4
Nusa Tenggara Barat	81	12	7
Nusa Tenggara Timur	60	21	18
Kalimantan Barat	70	18	12
Kalimantan Tengah	80	7	13
Kalimantan Selatan	88	7	5
Kalimantan Timur	85	10	6
Kalimantan Utara	63	28	9
Sulawesi Utara	86	9	6
Sulawesi Tengah	82	11	8
Sulawesi Selatan	85	10	5
Sulawesi Tenggara	73	15	13
Gorontalo	86	10	3
Sulawesi Barat	77	12	11
Maluku	67	15	18
Maluku Utara	77	12	11
Papua Barat	68	16	16
Papua	65	18	17
Indonesia	86	9	5

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.6.1 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sanitasi		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	53	22	25
Sumatera Utara	53	17	30
Sumatera Barat	61	18	21
Riau	54	21	24
Jambi	65	18	17
Sumatera Selatan	51	23	27
Bengkulu	60	22	18
Lampung	83	7	10
Kep. Bangka Belitung	74	13	14
Kep. Riau	65	17	18
DKI Jakarta	84	8	8
Jawa Barat	63	23	15
Jawa Tengah	72	19	9
DI Yogyakarta	84	11	5
Jawa Timur	58	23	19
Banten	60	19	21
Bali	69	18	12
Nusa Tenggara Barat	51	20	29
Nusa Tenggara Timur	48	20	32
Kalimantan Barat	62	20	19
Kalimantan Tengah	45	28	27
Kalimantan Selatan	56	27	17
Kalimantan Timur	69	17	14
Kalimantan Utara	54	19	27
Sulawesi Utara	51	28	20
Sulawesi Tengah	45	24	31
Sulawesi Selatan	54	24	23
Sulawesi Tenggara	45	25	30
Gorontalo	61	22	17
Sulawesi Barat	32	22	47
Maluku	34	20	46
Maluku Utara	30	27	43
Papua Barat	38	18	44
Papua	29	11	60
Indonesia	59	21	21

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.6.2 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sanitasi		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65	15	20
Sumatera Utara	71	10	19
Sumatera Barat	79	10	11
Riau	68	12	20
Jambi	79	9	12
Sumatera Selatan	73	14	13
Bengkulu	73	13	13
Lampung	85	5	10
Kep. Bangka Belitung	81	6	13
Kep. Riau	77	9	13
DKI Jakarta	86	5	9
Jawa Barat	77	10	13
Jawa Tengah	84	9	7
DI Yogyakarta	90	6	5
Jawa Timur	72	11	17
Banten	74	12	14
Bali	82	8	11
Nusa Tenggara Barat	58	14	28
Nusa Tenggara Timur	61	14	25
Kalimantan Barat	76	11	13
Kalimantan Tengah	67	17	16
Kalimantan Selatan	76	14	10
Kalimantan Timur	78	10	12
Kalimantan Utara	73	11	16
Sulawesi Utara	67	17	16
Sulawesi Tengah	68	14	18
Sulawesi Selatan	69	16	15
Sulawesi Tenggara	67	13	20
Gorontalo	74	13	12
Sulawesi Barat	56	14	30
Maluku	47	16	38
Maluku Utara	46	21	34
Papua Barat	59	12	29
Papua	52	12	36
Indonesia	72	12	16

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.6.3 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sanitasi		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	72	15	13
Sumatera Utara	73	14	14
Sumatera Barat	82	8	10
Riau	80	11	9
Jambi	77	10	13
Sumatera Selatan	86	6	8
Bengkulu	75	12	13
Lampung	83	7	10
Kep. Bangka Belitung	82	5	13
Kep. Riau	78	13	9
DKI Jakarta	89	4	7
Jawa Barat	78	12	10
Jawa Tengah	81	12	7
DI Yogyakarta	84	11	5
Jawa Timur	73	12	15
Banten	77	11	13
Bali	78	9	13
Nusa Tenggara Barat	62	15	23
Nusa Tenggara Timur	67	12	21
Kalimantan Barat	75	11	13
Kalimantan Tengah	72	15	13
Kalimantan Selatan	77	9	13
Kalimantan Timur	81	10	10
Kalimantan Utara	70	9	21
Sulawesi Utara	73	15	12
Sulawesi Tengah	77	9	14
Sulawesi Selatan	70	16	14
Sulawesi Tenggara	65	16	19
Gorontalo	81	9	10
Sulawesi Barat	75	7	18
Maluku	54	16	30
Maluku Utara	53	20	28
Papua Barat	66	15	19
Papua	60	12	28
Indonesia	74	12	14

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.6.4 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sanitasi, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sanitasi		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	68	15	17
Sumatera Utara	68	12	20
Sumatera Barat	75	10	14
Riau	77	10	12
Jambi	78	10	11
Sumatera Selatan	83	4	13
Bengkulu	71	12	17
Lampung	71	15	14
Kep. Bangka Belitung	76	8	16
Kep. Riau	75	11	13
DKI Jakarta	78	10	12
Jawa Barat	70	13	16
Jawa Tengah	77	11	12
DI Yogyakarta	79	11	10
Jawa Timur	65	16	19
Banten	69	12	19
Bali	70	13	16
Nusa Tenggara Barat	53	13	33
Nusa Tenggara Timur	61	13	27
Kalimantan Barat	80	7	13
Kalimantan Tengah	64	16	20
Kalimantan Selatan	83	6	12
Kalimantan Timur	76	14	10
Kalimantan Utara	66	22	13
Sulawesi Utara	65	15	20
Sulawesi Tengah	60	13	27
Sulawesi Selatan	64	16	20
Sulawesi Tenggara	55	16	28
Gorontalo	69	14	17
Sulawesi Barat	52	18	31
Maluku	47	19	34
Maluku Utara	47	20	34
Papua Barat	60	9	32
Papua	56	14	30
Indonesia	69	13	18

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.7.1 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sarana Kebersihan		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	63	32	5
Sumatera Utara	62	30	8
Sumatera Barat	70	26	4
Riau	70	26	4
Jambi	74	23	4
Sumatera Selatan	62	31	7
Bengkulu	71	27	3
Lampung	77	20	2
Kep. Bangka Belitung	79	19	2
Kep. Riau	70	26	4
DKI Jakarta	80	18	2
Jawa Barat	71	25	4
Jawa Tengah	78	21	1
DI Yogyakarta	88	11	1
Jawa Timur	75	23	3
Banten	72	24	3
Bali	81	18	1
Nusa Tenggara Barat	71	25	4
Nusa Tenggara Timur	64	32	4
Kalimantan Barat	64	30	6
Kalimantan Tengah	67	28	5
Kalimantan Selatan	72	26	2
Kalimantan Timur	72	25	3
Kalimantan Utara	69	24	6
Sulawesi Utara	75	21	4
Sulawesi Tengah	60	28	11
Sulawesi Selatan	70	26	3
Sulawesi Tenggara	64	30	6
Gorontalo	71	26	3
Sulawesi Barat	53	38	9
Maluku	57	36	8
Maluku Utara	58	36	6
Papua Barat	56	32	12
Papua	42	29	29
Indonesia	70	25	4

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.7.2 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sarana Kebersihan		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66	28	7
Sumatera Utara	71	22	7
Sumatera Barat	69	26	5
Riau	70	25	5
Jambi	75	21	4
Sumatera Selatan	70	24	6
Bengkulu	75	22	4
Lampung	78	18	4
Kep. Bangka Belitung	79	17	4
Kep. Riau	74	22	4
DKI Jakarta	83	15	2
Jawa Barat	75	20	5
Jawa Tengah	81	17	2
DI Yogyakarta	88	11	2
Jawa Timur	78	18	4
Banten	79	17	4
Bali	84	15	1
Nusa Tenggara Barat	69	26	5
Nusa Tenggara Timur	61	32	7
Kalimantan Barat	74	22	4
Kalimantan Tengah	69	24	6
Kalimantan Selatan	77	21	1
Kalimantan Timur	76	18	6
Kalimantan Utara	76	17	7
Sulawesi Utara	75	22	4
Sulawesi Tengah	65	25	9
Sulawesi Selatan	70	24	6
Sulawesi Tenggara	67	28	5
Gorontalo	78	20	1
Sulawesi Barat	60	32	8
Maluku	59	32	9
Maluku Utara	57	34	8
Papua Barat	65	25	10
Papua	53	29	19
Indonesia	73	22	5

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.7.3 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sarana Kebersihan		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	69	28	2
Sumatera Utara	77	19	4
Sumatera Barat	74	22	4
Riau	75	23	2
Jambi	76	20	4
Sumatera Selatan	71	25	3
Bengkulu	76	22	1
Lampung	83	14	3
Kep. Bangka Belitung	80	16	3
Kep. Riau	72	26	3
DKI Jakarta	82	14	3
Jawa Barat	77	20	3
Jawa Tengah	84	14	1
DI Yogyakarta	86	11	3
Jawa Timur	79	19	2
Banten	81	16	3
Bali	74	23	3
Nusa Tenggara Barat	70	24	6
Nusa Tenggara Timur	63	31	7
Kalimantan Barat	73	23	4
Kalimantan Tengah	72	22	6
Kalimantan Selatan	78	17	5
Kalimantan Timur	80	17	4
Kalimantan Utara	74	23	3
Sulawesi Utara	77	19	4
Sulawesi Tengah	75	23	2
Sulawesi Selatan	75	21	4
Sulawesi Tenggara	74	19	7
Gorontalo	84	12	4
Sulawesi Barat	72	23	6
Maluku	67	26	8
Maluku Utara	62	33	5
Papua Barat	71	22	6
Papua	64	22	14
Indonesia	76	21	4

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.7.4 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Ketersediaan Sarana Kebersihan, 2021

Provinsi	Ketersediaan Sarana Kebersihan		
	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67	27	6
Sumatera Utara	71	23	6
Sumatera Barat	73	23	4
Riau	72	24	5
Jambi	78	18	4
Sumatera Selatan	66	23	11
Bengkulu	77	22	2
Lampung	80	20	0
Kep. Bangka Belitung	81	15	4
Kep. Riau	77	20	3
DKI Jakarta	84	14	3
Jawa Barat	76	21	3
Jawa Tengah	80	17	3
DI Yogyakarta	86	12	2
Jawa Timur	79	18	3
Banten	76	20	4
Bali	80	19	1
Nusa Tenggara Barat	73	20	7
Nusa Tenggara Timur	65	24	11
Kalimantan Barat	79	19	2
Kalimantan Tengah	73	20	7
Kalimantan Selatan	77	18	5
Kalimantan Timur	78	20	2
Kalimantan Utara	81	13	6
Sulawesi Utara	75	20	5
Sulawesi Tengah	70	26	5
Sulawesi Selatan	70	25	5
Sulawesi Tenggara	70	26	4
Gorontalo	64	26	10
Sulawesi Barat	60	34	6
Maluku	65	26	9
Maluku Utara	57	32	11
Papua Barat	68	26	5
Papua	66	24	10
Indonesia	76	20	4

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

Tabel 2.8 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	92,57	97,52	99,25	98,71
Sumatera Utara	94,92	97,36	98,16	95,61
Sumatera Barat	96,51	97,66	99,00	98,10
Riau	93,80	96,48	98,11	96,29
Jambi	92,58	97,68	98,52	97,29
Sumatera Selatan	93,91	97,23	98,58	95,12
Bengkulu	94,55	97,46	99,11	96,51
Lampung	93,45	95,98	97,67	93,36
Kep. Bangka Belitung	96,17	97,74	98,96	96,63
Kep. Riau	94,50	96,95	98,47	96,54
DKI Jakarta	96,44	97,81	98,80	96,63
Jawa Barat	96,65	97,02	98,22	95,32
Jawa Tengah	97,77	98,37	98,83	97,35
DI Yogyakarta	97,51	98,09	98,67	97,55
Jawa Timur	97,43	98,35	98,90	97,62
Banten	96,02	97,13	97,97	96,33
Bali	98,02	98,80	98,82	96,62
Nusa Tenggara Barat	94,42	98,02	98,93	97,38
Nusa Tenggara Timur	92,52	96,87	97,65	93,25
Kalimantan Barat	93,26	96,09	97,79	94,68
Kalimantan Tengah	94,78	97,76	99,01	97,37
Kalimantan Selatan	96,20	98,64	99,05	96,91
Kalimantan Timur	95,87	97,88	98,81	97,18
Kalimantan Utara	94,92	97,82	98,79	98,59
Sulawesi Utara	93,46	96,21	98,48	96,53
Sulawesi Tengah	88,40	97,74	99,09	97,47
Sulawesi Selatan	96,11	98,52	98,80	97,93
Sulawesi Tenggara	93,14	98,12	99,03	96,92
Gorontalo	97,09	97,81	99,59	96,79
Sulawesi Barat	87,46	95,78	99,06	95,32
Maluku	84,59	94,75	97,77	95,19
Maluku Utara	80,47	95,58	97,28	94,22
Papua Barat	87,56	96,81	98,81	96,38
Papua	77,03	91,97	97,63	93,88
Indonesia	95,01	97,43	98,51	96,44

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

Tabel 2.9 Rasio Murid-Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022

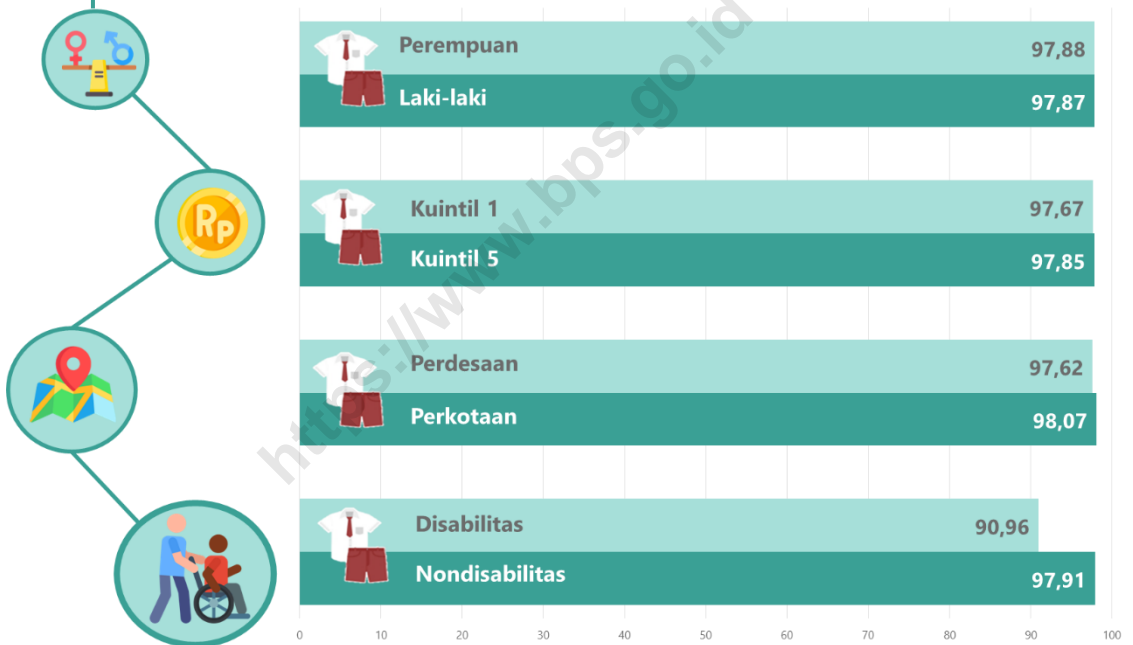
Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,30	8,68	9,34	8,64
Sumatera Utara	14,83	14,44	16,24	15,88
Sumatera Barat	13,33	11,43	13,18	12,68
Riau	15,33	12,80	13,91	13,16
Jambi	13,75	10,60	12,80	12,03
Sumatera Selatan	15,31	13,51	14,42	15,75
Bengkulu	12,76	11,30	12,56	11,70
Lampung	14,72	13,64	13,83	14,55
Kep. Bangka Belitung	17,24	16,25	16,98	15,61
Kep. Riau	16,44	15,88	15,06	15,53
DKI Jakarta	19,78	18,50	15,57	17,34
Jawa Barat	21,24	18,87	19,42	19,73
Jawa Tengah	15,59	16,70	16,78	18,07
DI Yogyakarta	13,75	14,63	13,16	14,07
Jawa Timur	14,21	15,17	15,80	16,99
Banten	20,98	18,92	17,97	19,10
Bali	15,16	16,60	16,26	16,51
Nusa Tenggara Barat	12,86	8,47	12,29	11,73
Nusa Tenggara Timur	13,06	12,03	13,39	13,37
Kalimantan Barat	15,05	13,95	17,07	19,24
Kalimantan Tengah	10,96	10,93	12,00	11,95
Kalimantan Selatan	12,25	11,99	13,53	15,23
Kalimantan Timur	15,90	14,80	15,56	16,68
Kalimantan Utara	12,97	12,10	12,59	13,35
Sulawesi Utara	11,75	11,85	12,93	12,39
Sulawesi Tengah	11,58	10,73	14,78	11,98
Sulawesi Selatan	12,72	11,62	14,64	12,99
Sulawesi Tenggara	12,00	9,84	13,41	11,35
Gorontalo	13,22	11,26	16,17	10,94
Sulawesi Barat	11,02	10,47	13,02	11,78
Maluku	12,08	9,61	10,94	8,79
Maluku Utara	12,34	9,46	11,93	9,86
Papua Barat	14,81	11,14	12,98	13,65
Papua	23,76	15,32	14,74	12,68
Indonesia	15,46	14,37	15,10	16,19

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (diolah)

3

PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Murni SD/ sederajat, 2022



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



“Kelompok **disabilitas** paling **rendah** dalam capaian **APM SD/ sederajat**”



BAB 3 PARTISIPASI SEKOLAH

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menghasilkan indikator partisipasi sekolah setiap tahun. Upaya peningkatan capaian pendidikan diawali dengan mengetahui gambaran seberapa besar partisipasi sekolah penduduk. Partisipasi sekolah yang menunjukkan kemajuan yang baik, dapat mendorong capaian indikator *outcome* pendidikan seperti rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan membantu intervensi program pendidikan agar lebih tepat sasaran.

Berbeda dari publikasi Statistik Pendidikan sebelumnya, publikasi tahun ini tidak lagi menyajikan data dan informasi mengenai indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok umur 3-5 tahun, serta APK PT 19-24 tahun. Ketiga indikator tersebut tidak berkenaan dengan sasaran program pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak menargetkan kelompok umur 3-5 tahun untuk partisipasi PAUD, melainkan kelompok umur 3-6 tahun. Demikian pula dengan kelompok umur 19-24 tahun sebagai acuan penghitungan APK Perguruan Tinggi, pemerintah menggunakan kelompok umur 19-23 tahun.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

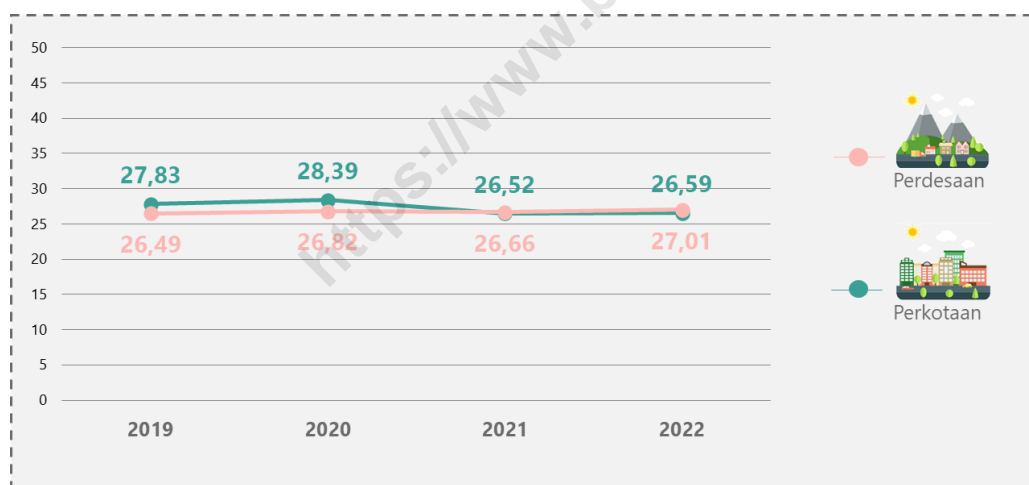
Pendidikan anak usia dini dimulai sejak anak lahir hingga berusia enam tahun (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD). Dikutip dari Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi (a) layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan enam (0-6) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)/sederajat; (b) layanan PAUD untuk usia dua sampai dengan empat (2-4) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya; dan (c) layanan



PAUD untuk usia empat sampai dengan enam (4-6) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)/sederajat. PAUD diharapkan dapat membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak sehingga mereka memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014).

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, sekitar satu dari empat anak umur 0-6 tahun mengikuti prasekolah (26,77 persen). Dilihat dari klasifikasi desa, tampak partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun lebih tinggi di daerah perkotaan. Namun, sejalan merebaknya wabah Covid-19 pada tahun 2020-2021, partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun di perkotaan turun sehingga *gap* antara perkotaan dan perdesaan menjadi kabur.

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang /Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Klasifikasi Desa, 2019-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2022

Pada tahun 2019, partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun di perkotaan sebesar 27,83 persen. Setelah sempat naik pada tahun 2020, partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun di perkotaan turun menjadi 26,59 persen di tahun 2022. Di sisi lain, partisipasi prasekolah anak umur 0-6 tahun di perdesaan sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019 menjadi 27,01 persen pada tahun 2022.



Menurut Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), pemerintah mencanangkan kewajiban anak-anak mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar (SD/ sederajat). Sejalan dengan itu, Program PAUD Satu Tahun Pra-SD bertujuan untuk meningkatkan APK PAUD dan menyiapkan anak-anak agar lebih matang ketika memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut (BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan, 2018). Meskipun payung hukum mengenai PAUD sebagai bagian dari pendidikan dasar belum disahkan (sampai dengan publikasi ini diterbitkan), RUU tersebut menyiratkan keseriusan pemerintah terhadap isu PAUD. Kebutuhan akan data dan informasi mengenai partisipasi prasekolah anak usia dini kian penting.

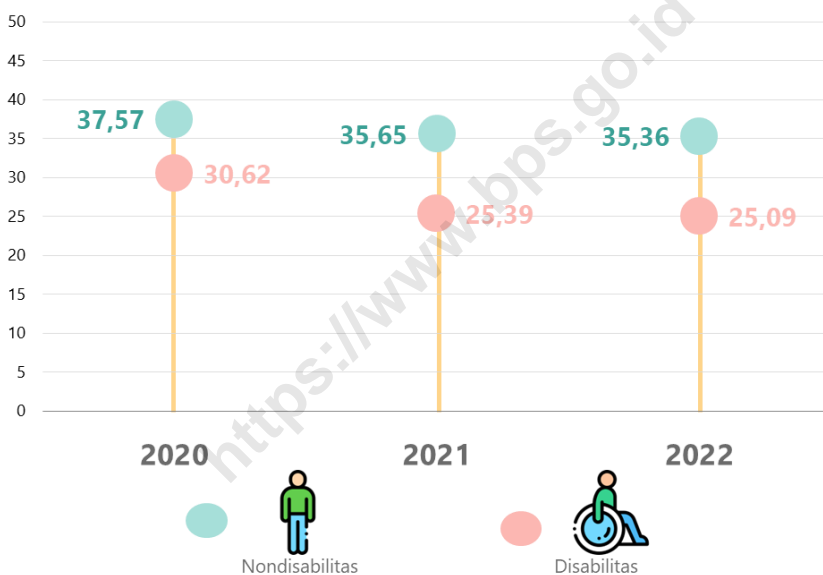
Setiap tahun, BPS merilis indikator-indikator pendidikan melalui Publikasi Statistik Pendidikan. Publikasi sebelumnya menampilkan dua kelompok umur APK PAUD, yakni kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Mengingat regulasi pemerintah Indonesia yang menetapkan awal usia sekolah dasar (*official age*) adalah usia 7 tahun (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003), indikator APK PAUD yang disajikan dalam publikasi ini adalah APK PAUD kelompok umur 3-6 tahun. Selain itu, indikator APK PAUD 3-6 tahun juga sudah dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) periode 2020-2024 sebagai bagian dari indikator program pendidikan anak usia dini.

Dibandingkan angka partisipasi prasekolah, indikator APK PAUD memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai partisipasi prasekolah anak usia dini karena kelompok umur yang dilibatkan dalam penghitungan diperpendek dengan cakupan umur 3-6 tahun. APK PAUD dihitung dari perbandingan penduduk umur 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah dan jumlah penduduk umur 3-6 tahun. Selain itu, jenis prasekolah yang dipertimbangkan adalah TK/RA/BA dan PAUD sejenis. Penghitungan indikator ini mengeluarkan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak sebagai jenis prasekolah.



Adanya pandemi Covid-19 menghalangi kesempatan anak-anak usia dini untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah, termasuk mengikuti pendidikan prasekolah. Sejalan dengan itu, APK PAUD kelompok disabilitas maupun nondisabilitas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan tersebut memperlebar *gap* APK PAUD kelompok disabilitas terhadap kelompok nondisabilitas. Pada tahun 2022, APK PAUD kelompok disabilitas sebesar 25,09, sedangkan APK PAUD kelompok nondisabilitas sebesar 35,36.

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Status Disabilitas, 2020-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

Sehubungan dengan adanya Program PAUD Satu Tahun Pra-SD, pendidikan prasekolah diharapkan dapat mendukung kesiapan anak-anak untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan formal. Indikator pendidikan yang bersesuaian dengan isu ini adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini melihat seberapa besar anak-anak yang saat ini menduduki kelas 1 sekolah dasar telah mengenyam pendidikan prasekolah sebelumnya. Jenis pendidikan prasekolah yang dihitung dalam AKS adalah TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya. Angka kesiapan sekolah juga merupakan indikator pendidikan anak usia dini yang disorot dalam dokumen resmi pemerintah, seperti Renstra Kemdikbud

2020-2024, dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI).

Gambar 3.3 Angka Kesiapan Sekolah, 2016-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2016-2022

Sejak tahun 2016, AKS cenderung *stagnan* di angka 74 persen. Pada tahun 2016, AKS sebesar 74,15 persen. Kemudian pada tahun 2022, AKS sebesar 74,34 persen. Artinya, sekitar 74 dari 100 siswa kelas 1 SD/ sederajat pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya.

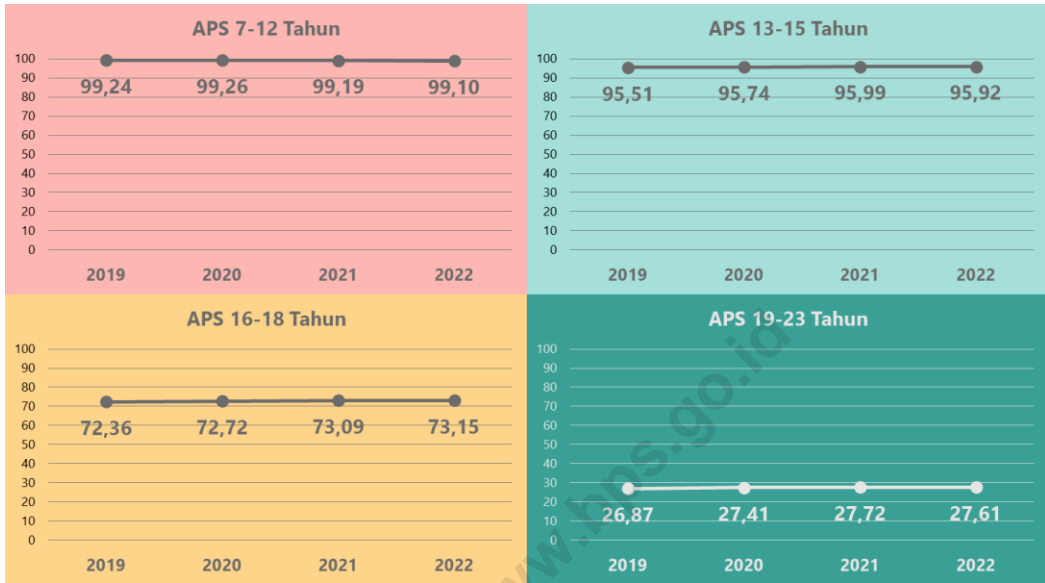
3.2 Partisipasi Sekolah

Dalam publikasi ini, partisipasi sekolah yang dimaksud adalah partisipasi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pendidikan yang setara dengan itu. Jenjang pendidikan dasar meliputi SD/MI/Paket A/ sederajat dan SMP/MTs/Paket B/ sederajat. Kemudian, jenjang pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/ sederajat, sedangkan jenjang pendidikan tinggi adalah D1/D2/D3/D4/S1/S2/Profesi/S3/ sederajat. Rincian pertanyaan mengenai partisipasi sekolah ditanyakan untuk semua responden usia lima tahun ke atas. Partisipasi prasekolah tidak termasuk dalam konsep partisipasi sekolah yang dimuat dalam subbab ini.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk yang bersekolah (tanpa mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan) terhadap total seluruh penduduk. Indikator APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur, yaitu (i) APS 7-12 tahun, (ii) APS 13-15 tahun, (iii) 16-18 tahun, dan (iv) APS

19-23 tahun. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2019-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2022

Dilihat dari kelompok umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil seiring bertambahnya umur. Partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) sudah lebih dari 95 persen. Akan tetapi, APS 16-18 tahun masih berkisar di angka 73 persen. Meskipun demikian, APS 16-18 tahun meningkat secara perlahan setiap tahun.

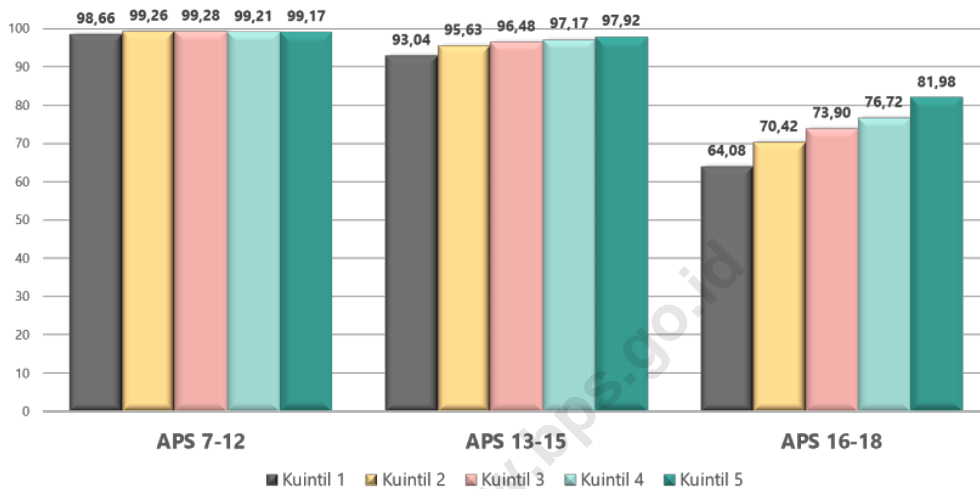
Di sisi lain, APS 19-23 tahun sebesar 27,61 persen. Artinya, satu dari empat penduduk kelompok umur 19-23 tahun sedang bersekolah. Kelompok umur 19-23 tahun bersesuaian dengan kelompok umur jenjang pendidikan PT. Akan tetapi, penghitungan indikator APS tidak mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan penduduk sehingga angka tersebut tidak menunjukkan partisipasi sekolah penduduk pada jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan dasar untuk semua, khususnya kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Angka partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun menjadi sasaran kinerja Kemdikbud yang dimuat dalam Renstra



Kemdikbud 2020-2024. Lebih jauh, pemerintah melalui Kemdikbud menyoroti isu ketimpangan ekonomi dalam partisipasi sekolah. Pemerintah berharap kemerdekaan belajar merata untuk semua kelompok ekonomi masyarakat.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2022

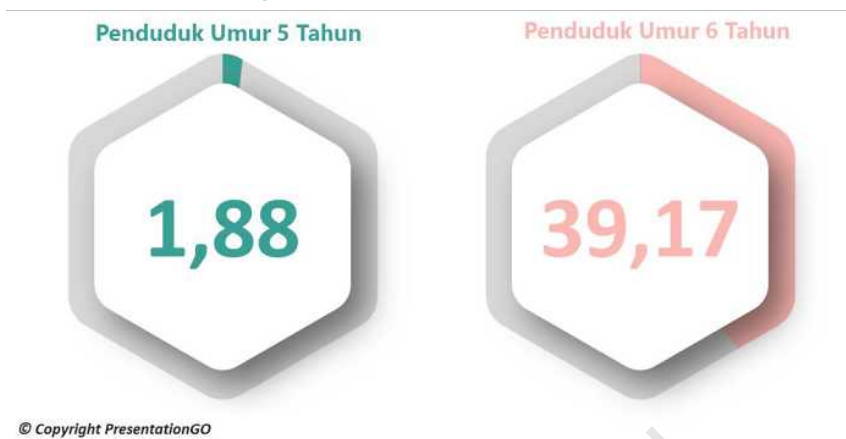


Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Gambar 3.5 menunjukkan perbedaan besaran angka partisipasi sekolah pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) dan terbawah (Kuintil 1). Perbedaan tersebut semakin nyata terlihat seiring kenaikan kategori kelompok umur. Ketimpangan ekonomi tampak samar pada APS 7-12 tahun. Hal ini sejalan dengan besarnya APS 7-12 tahun pada Gambar 3.4.

Di sisi lain, APS 13-15 tahun pada kuintil 1 terpaut sekitar 4 persen poin dari nilai kuintil 5. Selisih tersebut semakin besar pada APS 16-18 tahun dengan selisih hampir 18 persen poin. Peningkatan APS 13-15 dan 16-18 tahun dapat dilakukan dengan menyasar penduduk kelompok pengeluaran terbawah.

Gambar 3.6 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun dan 6 Tahun yang Masih Bersekolah, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

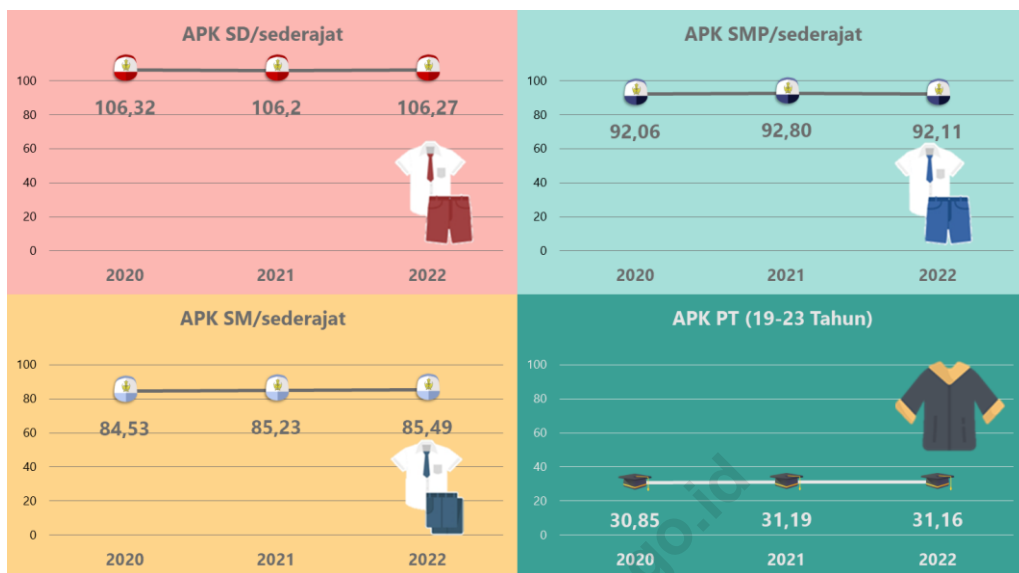
Sementara itu, pemerintah membuka usia sekolah dasar dimulai pada usia 7 tahun, namun hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan partisipasi sekolah sudah terlihat pada kelompok umur di bawah 7 tahun. Sebesar 1,88 persen penduduk umur 5 tahun sudah memasuki jenjang pendidikan dasar. Kemudian, terdapat 39,17 persen penduduk umur 6 tahun yang sedang bersekolah. Temuan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang memberikan kesempatan anak usia 5 tahun 6 bulan untuk dapat diterima pada jenjang sekolah dasar dengan sejumlah persyaratan.

3.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur dari *official age* sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas.



Gambar 3.7 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2020-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

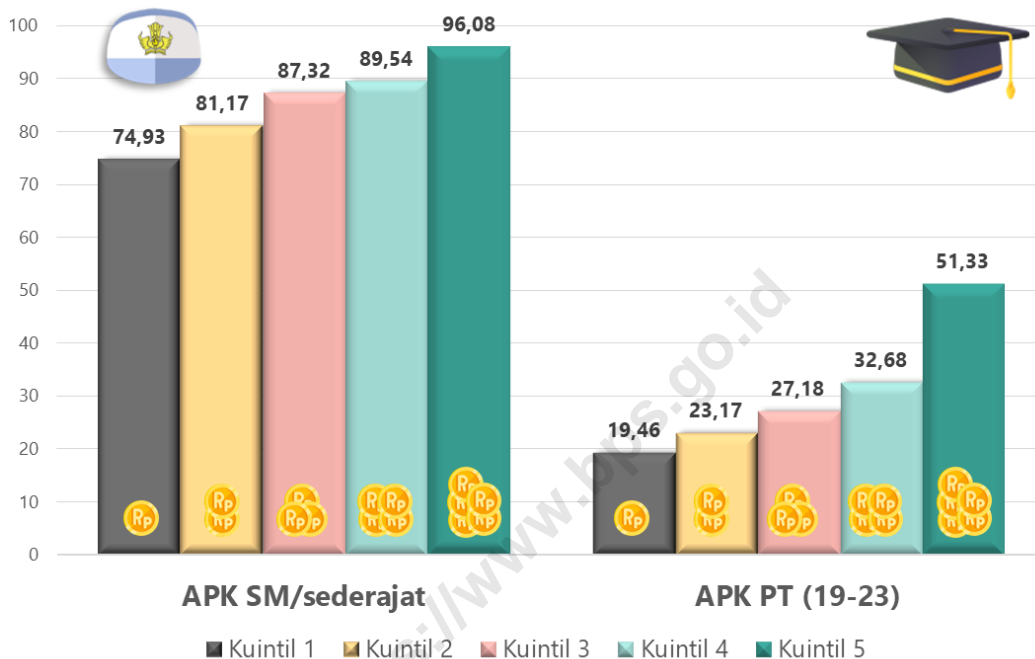
Sama halnya dengan APS, tidak ditemukan adanya indikasi dampak pandemi Covid-19 dari perkembangan indikator APK. Gambar 3.7 tidak memperlihatkan guncangan angka yang signifikan pada periode tahun 2020-2021 pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil nilai APK. Indikator APK SD/ sederajat dihitung berdasarkan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Nilai APK SD/ sederajat yang mencapai 106,27 pada tahun 2022 menunjukkan lebih besarnya penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat dengan komposisi umur yang berada di luar 7-12 tahun. Hasil ini sejalan dengan partisipasi sekolah anak umur 6 tahun yang menunjukkan hampir 40 persen anak umur 6 tahun sudah bersekolah di jenjang pendidikan dasar (Gambar 3.6).

Sementara itu, capaian APK SD/ sederajat dan APK SMP/ sederajat lebih besar dibandingkan APK jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pada tahun 2022, APK SM/ sederajat sebesar 85,49 dengan sumbangan terbesar dari penduduk kelompok pengeluaran menengah atas. Hal ini terlihat dari nilai APK SM/ sederajat pada kuintil 3, kuintil 4, dan kuintil 5 yang nilainya melebihi nilai APK rata-rata. Lebih jauh, APK SM/ sederajat pada kuintil 5 sudah cukup besar dengan nilai sebesar 96,08. Angka tersebut terpaut 20 persen poin dari APK



SM/ sederajat kuintil 1. Untuk meningkatkan nilai APK SM/ sederajat, upaya intervensi harus menyasar kelompok pengeluaran kuintil 1 dan kuintil 2.

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT Menurut Kelompok Pengeluaran, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

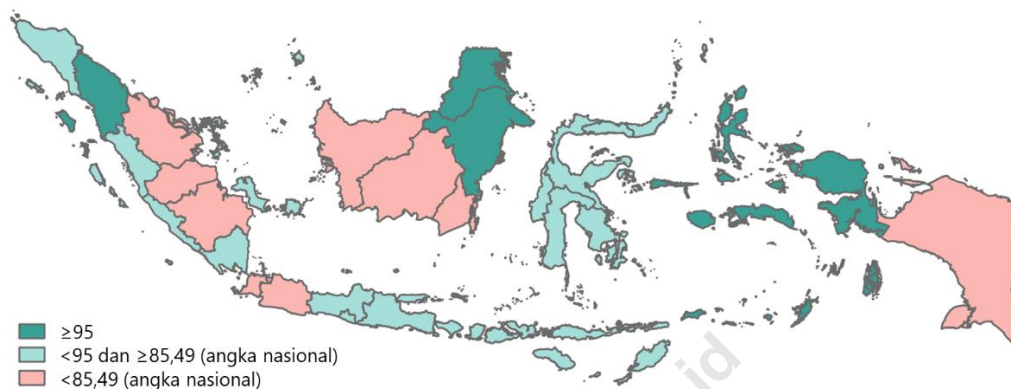
Hasil yang sama juga ditunjukkan pada indikator APK PT. Penduduk kelompok pengeluaran teratas memberikan kontribusi paling besar untuk APK PT. Hal tersebut terlihat dari nilai APK PT pada kuintil 4 dan kuintil 5 yang melebihi nilai APK rata-rata (31,16). Angka APK PT kuintil 5 lebih dari dua kalinya APK PT kuintil 1 (51,33 berbanding 19,46). Untuk menggenjot angka partisipasi kasar PT, upaya intervensi harus lebih keras lagi dibandingkan dengan APK SM/ sederajat.

Salah satu sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun adalah meningkatnya partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan menengah (SM/ sederajat) yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan itu ditandai dengan tingginya nilai APK SM/ sederajat. Pemerintah menargetkan capaian indikator APK SM/ sederajat level provinsi melebihi 95



(Renstra Kemdikbud 2020-2024). Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, sebanyak enam provinsi sudah memenuhi harapan pemerintah (Gambar 3.9).

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat Menurut Provinsi, 2022




Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Keberhasilan keenam provinsi tersebut cukup mencengangkan karena sebagian provinsi dari bagian timur Indonesia. Keenam provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki APK SM/ sederajat yang lebih rendah dari angka nasional (Gambar 3.9). Posisi APK SM/ sederajat DKI Jakarta setara dengan Provinsi Papua dengan nilai yang tidak jauh berbeda (Tabel 3.14.5). Temuan ini semakin memberikan gambaran betapa besar tantangan pemerintah untuk mendorong penduduk menempuh pendidikan menengah. Upaya peningkatan APK SM/ sederajat masih harus digalakkan, baik di wilayah terdekat pusat pemerintahan (Provinsi DKI Jakarta) maupun seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah ujung timur Indonesia (Provinsi Papua).

3.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/ Sederajat (7-12 tahun), SMP/ Sederajat (13-15 tahun), dan SM/ Sederajat (16-18 tahun). Untuk jenjang



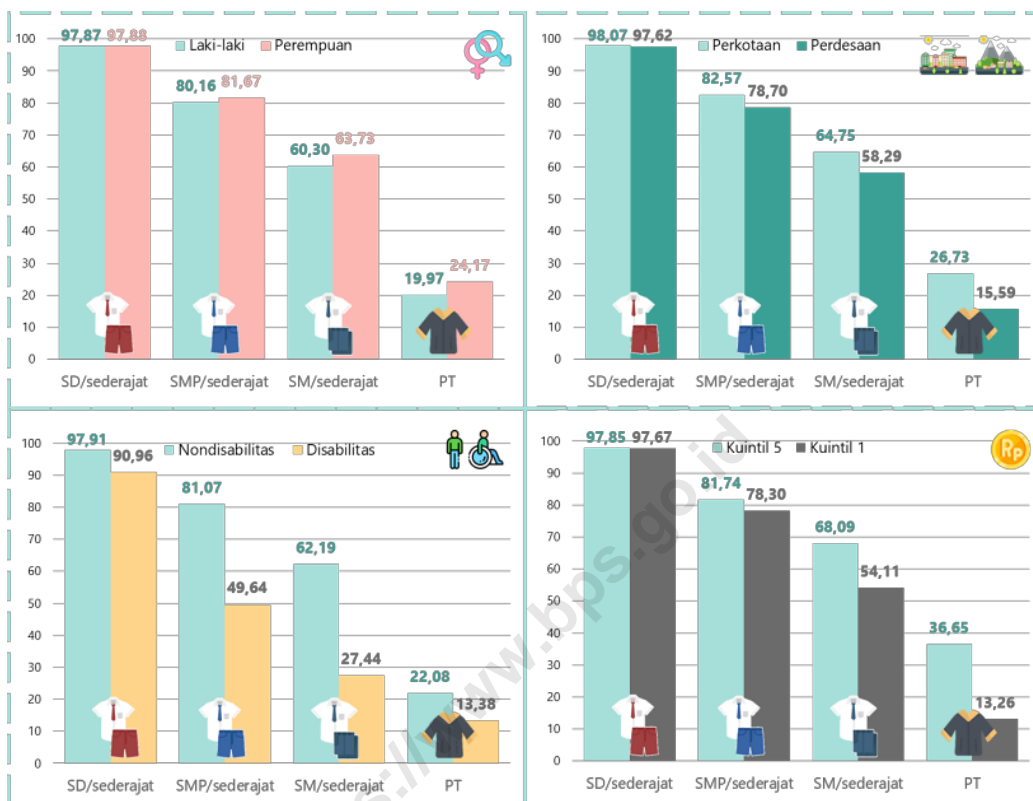
pendidikan tinggi, indikator APM kurang tepat digunakan karena besarnya variasi durasi program pendidikan (UNESCO, 2009).

APM tidak masuk target Renstra Kemdikbud dan RPJMN 2020-2024. Ketepatan waktu dalam partisipasi sekolah bukan merupakan isu utama dalam agenda pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, pemerintah mengedepankan keikutsertaan semua penduduk untuk mengakses pendidikan. Namun demikian, indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan (Bappenas, 2017).

Indikator APM jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diperhitungkan sebagai bagian dari target 4.5, yaitu pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan (Bappenas, 2020). Kelompok penduduk yang dibandingkan antara lain laki-laki dan perempuan, perkotaan dan perdesaan, serta kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) dan terbawah (kuintil 1).

Dilihat menurut jenis kelamin, ketimpangan APM tampak samar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Artinya, penduduk umur 7-12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat. Akan tetapi, pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola ini tampak berkebalikan dari hipotesis awal disparitas gender yang umumnya menyoroti kelompok perempuan sebagai kelompok *vulnerable* (SDGs Tujuan 5).

Gambar 3.10 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Sementara itu, kesenjangan partisipasi pendidikan tampak nyata pada kelompok bukan disabilitas dan disabilitas serta perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan tersebut konsisten terjadi pada semua jenjang pendidikan. APM semua jenjang pendidikan lebih besar pada kelompok perkotaan dibandingkan perdesaan dan kelompok nondisabilitas terhadap kelompok disabilitas. Ketidakmerataan ini perlu dijadikan perhatian pemerintah, tanpa mengesampingkan isu kelompok pengeluaran yang saat ini sudah masuk dalam sasaran Renstra Kemdikbud.

Tabel 3.1 Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2022

Karakteristik	Indikator		
	APK PAUD 3-6 Tahun	APM PAUD 3-6 Tahun	Angka Kesiapan Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	35,28	34,82	74,34
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	34,71	34,26	73,73
Perempuan	35,89	35,41	75,01
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	35,36	34,90	74,36
Disabilitas	25,09	23,92	69,34
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	33,09	32,50	68,78
Kuintil 2	34,26	33,85	72,55
Kuintil 3	35,43	34,95	75,01
Kuintil 4	36,14	35,74	77,53
Kuintil 5	39,02	38,64	81,03
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	35,27	34,86	77,06
Perdesaan	35,31	34,77	70,98

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, 2022

Karakteristik	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	5,70	23,73	70,57	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	5,00	23,87	71,13	100,00
Perempuan	6,41	23,58	70,01	100,00
Kelompok Umur				
5	98,12	1,88	0,00	100,00
6	60,82	39,17	0,00	100,00
7-12	0,73	99,10	0,17	100,00
13-15	0,50	95,92	3,58	100,00
16-18	0,55	73,15	26,30	100,00
19-23	0,93	27,61	71,46	100,00
24+	4,04	1,25	94,72	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	5,41	24,20	70,39	100,00
Disabilitas	17,64	4,31	78,05	100,00
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	8,33	24,95	66,72	100,00
Kuintil 2	6,20	25,24	68,56	100,00
Kuintil 3	5,33	24,33	70,34	100,00
Kuintil 4	4,82	22,98	72,20	100,00
Kuintil 5	3,92	21,24	74,84	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	4,59	24,06	71,35	100,00
Perdesaan	7,20	23,28	69,52	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2022

Karakteristik	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	99,10	95,92	73,15	27,61
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	98,98	95,26	71,63	25,61
Perempuan	99,23	96,62	74,75	29,73
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	99,14	96,09	73,34	27,68
Disabilitas	91,75	65,05	43,91	18,58
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	98,66	93,04	64,08	18,82
Kuintil 2	99,26	95,63	70,42	21,06
Kuintil 3	99,28	96,48	73,90	24,70
Kuintil 4	99,21	97,17	76,72	29,38
Kuintil 5	99,17	97,92	81,98	42,56
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,33	96,88	75,96	32,50
Perdesaan	98,80	94,66	69,43	20,96

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	106,27	92,11	85,49	31,16
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	106,50	91,78	83,24	28,91
Perempuan	106,02	92,47	87,85	33,55
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	106,30	92,22	85,72	31,27
Disabilitas	99,79	72,07	50,03	17,00
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	106,90	89,95	74,93	19,46
Kuintil 2	106,90	93,24	81,17	23,17
Kuintil 3	106,33	92,22	87,32	27,18
Kuintil 4	105,39	93,52	89,54	32,68
Kuintil 5	105,30	91,68	96,08	51,33
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	105,49	92,05	88,70	37,13
Perdesaan	107,28	92,19	81,23	23,05

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	97,88	80,89	61,97	22,01
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	97,87	80,16	60,30	19,97
Perempuan	97,88	81,67	63,73	24,17
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	97,91	81,07	62,19	22,08
Disabilitas	90,96	49,64	27,44	13,38
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	97,67	78,30	54,11	13,26
Kuintil 2	97,95	81,35	59,40	15,50
Kuintil 3	97,96	81,19	63,41	19,53
Kuintil 4	97,97	82,27	65,75	23,57
Kuintil 5	97,85	81,74	68,09	36,65
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	98,07	82,57	64,75	26,73
Perdesaan	97,62	78,70	58,29	15,59

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.6 Persentase Penduduk 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24,82	26,30	25,33	26,28	25,79
Sumatera Utara	20,96	21,00	19,53	22,49	20,98
Sumatera Barat	21,09	22,84	21,99	21,93	21,96
Riau	17,94	20,32	18,34	20,41	19,35
Jambi	22,55	28,20	25,42	27,36	26,37
Sumatera Selatan	22,60	22,29	22,83	21,96	22,41
Bengkulu	25,38	21,04	20,30	24,85	22,52
Lampung	22,64	23,55	22,66	23,88	23,26
Kep. Bangka Belitung	24,27	25,29	23,88	25,59	24,71
Kep. Riau	21,50	26,55	20,57	23,49	22,03
DKI Jakarta	27,42	-	26,42	28,47	27,42
Jawa Barat	23,65	23,86	22,58	24,85	23,69
Jawa Tengah	33,97	33,28	33,48	33,80	33,64
DI Yogyakarta	43,55	47,64	46,47	42,43	44,53
Jawa Timur	37,43	36,69	36,09	38,15	37,10
Banten	23,12	18,65	21,58	22,39	21,98
Bali	23,15	17,56	20,44	22,74	21,56
Nusa Tenggara Barat	27,05	32,43	29,12	30,23	29,66
Nusa Tenggara Timur	25,83	25,58	25,67	25,60	25,64
Kalimantan Barat	16,58	17,57	17,33	17,06	17,20
Kalimantan Tengah	24,86	27,63	26,59	26,29	26,44
Kalimantan Selatan	29,12	33,97	31,28	31,99	31,63
Kalimantan Timur	18,19	27,58	20,54	21,92	21,20
Kalimantan Utara	20,29	28,70	20,46	26,13	23,25
Sulawesi Utara	23,99	29,93	27,65	25,95	26,83
Sulawesi Tengah	26,86	29,63	28,59	28,92	28,75
Sulawesi Selatan	24,18	22,78	24,64	22,12	23,43
Sulawesi Tenggara	23,53	25,81	25,74	24,19	24,98
Gorontalo	31,30	40,20	36,47	36,38	36,43
Sulawesi Barat	33,21	31,31	29,64	33,84	31,71
Maluku	21,61	29,10	26,30	25,99	26,15
Maluku Utara	19,66	29,87	26,73	27,08	26,90
Papua Barat	21,35	21,59	22,40	20,53	21,49
Papua	20,01	10,68	13,46	14,58	13,99
Indonesia	26,59	27,01	26,19	27,39	26,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.7 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	77,83	71,88	74,60	72,96	73,81
Sumatera Utara	67,09	59,84	64,15	62,76	63,51
Sumatera Barat	70,59	72,57	74,36	68,38	71,65
Riau	71,88	74,36	72,58	73,83	73,18
Jambi	69,77	70,76	70,91	70,02	70,50
Sumatera Selatan	62,61	62,76	60,56	65,21	62,70
Bengkulu	76,36	75,70	73,77	78,15	75,93
Lampung	88,72	79,71	79,39	86,96	82,68
Kep. Bangka Belitung	81,70	81,75	79,58	84,57	81,73
Kep. Riau	81,05	75,93	79,91	81,15	80,48
DKI Jakarta	83,68	-	85,86	81,06	83,68
Jawa Barat	72,81	71,71	68,60	76,31	72,57
Jawa Tengah	89,40	88,46	90,14	87,57	88,96
DI Yogyakarta	99,77	100,00	100,00	99,48	99,81
Jawa Timur	91,92	90,70	90,38	92,45	91,38
Banten	69,28	47,20	64,55	63,15	63,92
Bali	83,58	76,23	80,45	82,06	81,28
Nusa Tenggara Barat	70,67	60,50	71,07	61,24	66,02
Nusa Tenggara Timur	61,39	51,18	53,16	53,27	53,22
Kalimantan Barat	39,17	36,18	36,62	38,03	37,31
Kalimantan Tengah	76,70	77,48	78,73	75,76	77,14
Kalimantan Selatan	92,53	84,75	86,05	90,14	88,13
Kalimantan Timur	76,73	79,41	75,16	80,36	77,54
Kalimantan Utara	67,04	86,71	70,34	76,90	73,83
Sulawesi Utara	76,01	83,78	79,04	80,57	79,80
Sulawesi Tengah	78,40	77,90	74,50	80,87	78,06
Sulawesi Selatan	67,97	67,21	67,86	67,12	67,52
Sulawesi Tenggara	70,69	81,90	75,51	80,72	78,05
Gorontalo	92,85	88,49	88,20	92,65	90,29
Sulawesi Barat	69,69	66,48	65,10	69,42	67,01
Maluku	53,99	54,89	54,56	54,57	54,57
Maluku Utara	53,50	49,04	55,67	44,60	50,15
Papua Barat	53,67	48,71	50,85	50,39	50,62
Papua	54,22	26,81	35,84	36,82	36,29
Indonesia	77,06	70,98	73,73	75,01	74,34

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.8.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,17	27,60	29,88
Sumatera Utara	20,89	26,00	23,46
Sumatera Barat	24,86	29,31	26,82
Riau	15,47	24,60	19,89
Jambi	24,38	32,12	28,05
Sumatera Selatan	25,53	27,33	26,41
Bengkulu	25,96	32,13	29,15
Lampung	27,03	28,43	27,73
Kep. Bangka Belitung	31,40	34,73	33,03
Kep. Riau	23,47	32,41	27,80
DKI Jakarta	36,88	37,63	37,25
Jawa Barat	30,50	33,54	31,97
Jawa Tengah	47,78	46,30	47,06
DI Yogyakarta	59,84	63,21	61,38
Jawa Timur	52,96	51,72	52,34
Banten	26,67	30,20	28,38
Bali	28,40	35,13	31,72
Nusa Tenggara Barat	35,86	41,13	38,36
Nusa Tenggara Timur	36,11	31,09	33,86
Kalimantan Barat	19,43	17,69	18,58
Kalimantan Tengah	33,49	31,30	32,36
Kalimantan Selatan	39,77	40,73	40,27
Kalimantan Timur	23,73	21,85	22,80
Kalimantan Utara	23,40	34,19	29,05
Sulawesi Utara	30,43	23,36	27,00
Sulawesi Tengah	36,75	31,50	34,11
Sulawesi Selatan	35,40	28,48	32,18
Sulawesi Tenggara	32,42	31,45	31,97
Gorontalo	45,57	38,83	42,05
Sulawesi Barat	41,53	51,87	46,68
Maluku	22,73	27,98	25,28
Maluku Utara	25,69	32,47	28,91
Papua Barat	25,02	25,13	25,07
Papua	20,88	23,95	22,35
Indonesia	34,47	36,10	35,27

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.8.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,77	31,80	31,28
Sumatera Utara	21,27	23,91	22,55
Sumatera Barat	29,05	29,90	29,47
Riau	23,63	25,17	24,37
Jambi	32,51	32,94	32,73
Sumatera Selatan	26,35	22,05	24,27
Bengkulu	23,92	27,03	25,42
Lampung	31,49	32,87	32,17
Kep. Bangka Belitung	28,62	33,35	31,03
Kep. Riau	33,96	37,48	35,84
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	34,79	33,21	34,03
Jawa Tengah	45,90	45,81	45,86
DI Yogyakarta	71,77	63,94	68,20
Jawa Timur	51,45	52,51	51,99
Banten	26,53	24,33	25,44
Bali	30,17	17,86	23,92
Nusa Tenggara Barat	44,70	47,59	46,10
Nusa Tenggara Timur	30,75	33,36	32,03
Kalimantan Barat	21,10	21,31	21,20
Kalimantan Tengah	35,80	33,66	34,81
Kalimantan Selatan	47,56	45,63	46,62
Kalimantan Timur	30,59	41,38	35,69
Kalimantan Utara	43,88	33,97	39,08
Sulawesi Utara	35,02	34,63	34,84
Sulawesi Tengah	40,03	37,25	38,66
Sulawesi Selatan	28,17	30,11	29,11
Sulawesi Tenggara	34,62	33,41	34,04
Gorontalo	52,31	61,56	56,73
Sulawesi Barat	40,73	45,72	43,27
Maluku	33,77	33,05	33,43
Maluku Utara	41,98	41,44	41,72
Papua Barat	25,86	23,89	24,95
Papua	7,39	9,27	8,26
Indonesia	35,02	35,61	35,31

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.8.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	31,24	30,37	30,81
Sumatera Utara	21,07	25,04	23,03
Sumatera Barat	26,80	29,61	28,11
Riau	20,37	24,94	22,57
Jambi	29,88	32,69	31,25
Sumatera Selatan	26,04	24,06	25,08
Bengkulu	24,59	28,86	26,70
Lampung	30,04	31,39	30,71
Kep. Bangka Belitung	30,16	34,09	32,12
Kep. Riau	24,45	32,98	28,62
DKI Jakarta	36,88	37,63	37,25
Jawa Barat	31,36	33,48	32,38
Jawa Tengah	46,88	46,06	46,48
DI Yogyakarta	62,64	63,38	62,98
Jawa Timur	52,30	52,07	52,18
Banten	26,64	28,72	27,65
Bali	28,87	30,29	29,58
Nusa Tenggara Barat	40,17	44,35	42,18
Nusa Tenggara Timur	32,08	32,87	32,46
Kalimantan Barat	20,49	19,94	20,22
Kalimantan Tengah	34,88	32,60	33,78
Kalimantan Selatan	43,91	43,17	43,54
Kalimantan Timur	26,02	28,00	26,98
Kalimantan Utara	31,21	34,11	32,69
Sulawesi Utara	32,66	28,67	30,76
Sulawesi Tengah	39,00	35,39	37,22
Sulawesi Selatan	31,66	29,35	30,56
Sulawesi Tenggara	33,78	32,70	33,27
Gorontalo	49,65	51,61	50,62
Sulawesi Barat	40,91	47,05	44,02
Maluku	29,61	31,07	30,30
Maluku Utara	37,21	38,91	38,03
Papua Barat	25,54	24,40	25,00
Papua	11,56	14,00	12,71
Indonesia	34,71	35,89	35,28

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.9.1 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,16	27,19	29,67
Sumatera Utara	20,49	25,94	23,24
Sumatera Barat	24,67	28,66	26,43
Riau	15,35	24,60	19,83
Jambi	24,25	31,95	27,91
Sumatera Selatan	25,09	27,33	26,19
Bengkulu	25,75	32,13	29,05
Lampung	27,03	27,69	27,36
Kep. Bangka Belitung	31,40	34,73	33,03
Kep. Riau	22,75	30,94	26,71
DKI Jakarta	36,72	37,42	37,06
Jawa Barat	30,15	33,15	31,60
Jawa Tengah	47,24	45,67	46,48
DI Yogyakarta	59,05	61,40	60,12
Jawa Timur	52,17	50,87	51,53
Banten	26,67	29,91	28,24
Bali	28,30	34,92	31,57
Nusa Tenggara Barat	35,86	40,95	38,27
Nusa Tenggara Timur	35,89	30,41	33,44
Kalimantan Barat	19,43	17,50	18,48
Kalimantan Tengah	33,08	31,30	32,16
Kalimantan Selatan	39,59	40,73	40,18
Kalimantan Timur	23,41	21,65	22,55
Kalimantan Utara	22,94	33,39	28,42
Sulawesi Utara	29,94	23,36	26,75
Sulawesi Tengah	36,75	30,59	33,65
Sulawesi Selatan	34,83	27,71	31,51
Sulawesi Tenggara	32,11	31,45	31,80
Gorontalo	44,61	38,83	41,59
Sulawesi Barat	39,90	50,79	45,32
Maluku	22,20	27,96	25,00
Maluku Utara	25,69	32,47	28,91
Papua Barat	25,02	24,47	24,75
Papua	20,53	23,52	21,97
Indonesia	34,10	35,65	34,86

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.9.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,40	31,39	30,38
Sumatera Utara	20,93	23,68	22,26
Sumatera Barat	28,95	29,62	29,28
Riau	23,63	25,05	24,31
Jambi	32,00	32,79	32,39
Sumatera Selatan	26,24	21,88	24,14
Bengkulu	23,92	26,93	25,37
Lampung	31,45	32,81	32,12
Kep. Bangka Belitung	28,62	33,35	31,03
Kep. Riau	33,74	37,09	35,53
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	34,07	32,53	33,33
Jawa Tengah	45,67	45,24	45,46
DI Yogyakarta	68,16	62,99	65,81
Jawa Timur	50,47	51,86	51,17
Banten	25,34	22,96	24,16
Bali	29,74	17,86	23,71
Nusa Tenggara Barat	43,57	46,30	44,89
Nusa Tenggara Timur	29,99	32,50	31,22
Kalimantan Barat	21,00	21,00	21,00
Kalimantan Tengah	35,44	33,12	34,37
Kalimantan Selatan	47,56	45,46	46,54
Kalimantan Timur	29,49	41,38	35,11
Kalimantan Utara	43,88	33,92	39,06
Sulawesi Utara	34,63	33,93	34,30
Sulawesi Tengah	39,49	36,59	38,07
Sulawesi Selatan	27,82	29,87	28,81
Sulawesi Tenggara	34,31	32,66	33,52
Gorontalo	51,31	57,22	54,13
Sulawesi Barat	39,79	45,31	42,60
Maluku	32,17	32,09	32,13
Maluku Utara	40,68	39,60	40,15
Papua Barat	25,61	22,85	24,33
Papua	7,02	8,54	7,73
Indonesia	34,47	35,08	34,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.9.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,33	29,95	30,14
Sumatera Utara	20,70	24,91	22,78
Sumatera Barat	26,65	29,15	27,81
Riau	20,33	24,86	22,51
Jambi	29,49	32,53	30,97
Sumatera Selatan	25,81	23,95	24,91
Bengkulu	24,52	28,80	26,64
Lampung	30,01	31,10	30,55
Kep. Bangka Belitung	30,16	34,09	32,12
Kep. Riau	23,78	31,63	27,61
DKI Jakarta	36,72	37,42	37,06
Jawa Barat	30,94	33,03	31,95
Jawa Tengah	46,49	45,46	45,99
DI Yogyakarta	61,18	61,77	61,45
Jawa Timur	51,42	51,31	51,37
Banten	26,35	28,16	27,23
Bali	28,69	30,14	29,41
Nusa Tenggara Barat	39,62	43,62	41,54
Nusa Tenggara Timur	31,45	32,04	31,74
Kalimantan Barat	20,42	19,67	20,06
Kalimantan Tengah	34,51	32,30	33,44
Kalimantan Selatan	43,83	43,09	43,46
Kalimantan Timur	25,44	27,87	26,62
Kalimantan Utara	30,92	33,58	32,27
Sulawesi Utara	32,22	28,34	30,37
Sulawesi Tengah	38,63	34,66	36,66
Sulawesi Selatan	31,20	28,87	30,09
Sulawesi Tenggara	33,47	32,22	32,88
Gorontalo	48,67	49,17	48,92
Sulawesi Barat	39,81	46,50	43,20
Maluku	28,41	30,47	29,40
Maluku Utara	36,28	37,58	36,91
Papua Barat	25,38	23,52	24,50
Papua	11,20	13,37	12,22
Indonesia	34,26	35,41	34,82

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.10.1 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022

Provinsi	Perkotaan			
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,56	29,50	66,93	100,00
Sumatera Utara	3,40	27,39	69,21	100,00
Sumatera Barat	3,73	28,27	68,00	100,00
Riau	4,23	28,29	67,49	100,00
Jambi	4,10	26,37	69,53	100,00
Sumatera Selatan	3,59	26,14	70,26	100,00
Bengkulu	3,88	28,06	68,06	100,00
Lampung	4,26	24,39	71,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,30	23,54	73,16	100,00
Kep. Riau	4,78	26,58	68,64	100,00
DKI Jakarta	3,71	22,14	74,16	100,00
Jawa Barat	4,36	23,08	72,55	100,00
Jawa Tengah	5,19	21,95	72,86	100,00
DI Yogyakarta	4,43	24,55	71,02	100,00
Jawa Timur	5,24	21,87	72,89	100,00
Banten	4,84	24,25	70,91	100,00
Bali	5,92	22,07	72,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,91	26,13	65,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,65	31,17	65,18	100,00
Kalimantan Barat	5,30	25,96	68,74	100,00
Kalimantan Tengah	4,24	25,89	69,87	100,00
Kalimantan Selatan	4,21	24,74	71,05	100,00
Kalimantan Timur	3,93	27,16	68,91	100,00
Kalimantan Utara	5,75	26,19	68,05	100,00
Sulawesi Utara	2,62	22,96	74,42	100,00
Sulawesi Tengah	4,80	29,63	65,57	100,00
Sulawesi Selatan	4,77	26,76	68,47	100,00
Sulawesi Tenggara	5,63	30,33	64,05	100,00
Gorontalo	4,88	26,30	68,81	100,00
Sulawesi Barat	6,78	27,37	65,86	100,00
Maluku	2,42	30,21	67,37	100,00
Maluku Utara	3,87	29,09	67,03	100,00
Papua Barat	4,23	30,74	65,03	100,00
Papua	7,61	30,83	61,56	100,00
Indonesia	4,59	24,06	71,35	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.10.2 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022

Provinsi	Perdesaan			
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,40	28,32	67,28	100,00
Sumatera Utara	4,98	28,58	66,44	100,00
Sumatera Barat	4,30	26,48	69,22	100,00
Riau	5,88	26,53	67,58	100,00
Jambi	5,91	24,12	69,97	100,00
Sumatera Selatan	4,49	24,18	71,34	100,00
Bengkulu	5,05	25,00	69,95	100,00
Lampung	5,02	23,08	71,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,29	22,64	72,07	100,00
Kep. Riau	7,88	23,76	68,35	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	5,30	21,07	73,63	100,00
Jawa Tengah	6,60	20,03	73,36	100,00
DI Yogyakarta	7,84	19,75	72,41	100,00
Jawa Timur	8,87	19,28	71,84	100,00
Banten	6,59	24,16	69,25	100,00
Bali	9,43	20,66	69,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,78	25,21	64,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,02	28,60	64,39	100,00
Kalimantan Barat	8,06	24,51	67,43	100,00
Kalimantan Tengah	4,74	23,73	71,53	100,00
Kalimantan Selatan	4,83	23,52	71,64	100,00
Kalimantan Timur	5,19	25,90	68,90	100,00
Kalimantan Utara	8,41	25,99	65,59	100,00
Sulawesi Utara	2,86	22,12	75,02	100,00
Sulawesi Tengah	5,63	25,37	69,00	100,00
Sulawesi Selatan	8,36	24,56	67,08	100,00
Sulawesi Tenggara	7,00	27,73	65,27	100,00
Gorontalo	6,17	23,89	69,95	100,00
Sulawesi Barat	8,63	26,90	64,47	100,00
Maluku	3,79	31,45	64,76	100,00
Maluku Utara	4,98	29,08	65,94	100,00
Papua Barat	8,79	29,30	61,91	100,00
Papua	38,46	21,98	39,56	100,00
Indonesia	7,20	23,28	69,52	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.10.3 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022

Provinsi	Laki-laki			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,77	28,98	67,24	100,00
Sumatera Utara	3,68	28,57	67,75	100,00
Sumatera Barat	4,10	27,29	68,61	100,00
Riau	4,84	26,90	68,26	100,00
Jambi	4,55	24,69	70,76	100,00
Sumatera Selatan	3,69	24,74	71,58	100,00
Bengkulu	4,08	25,57	70,35	100,00
Lampung	4,22	23,27	72,51	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,65	22,77	73,58	100,00
Kep. Riau	4,37	27,08	68,56	100,00
DKI Jakarta	3,53	22,31	74,16	100,00
Jawa Barat	4,21	22,74	73,05	100,00
Jawa Tengah	4,69	21,27	74,04	100,00
DI Yogyakarta	4,28	23,79	71,93	100,00
Jawa Timur	5,50	21,12	73,38	100,00
Banten	4,65	24,18	71,17	100,00
Bali	5,13	22,17	72,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,83	26,15	66,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,60	29,35	65,05	100,00
Kalimantan Barat	5,85	24,57	69,59	100,00
Kalimantan Tengah	4,34	24,15	71,51	100,00
Kalimantan Selatan	4,39	24,38	71,23	100,00
Kalimantan Timur	3,93	26,60	69,47	100,00
Kalimantan Utara	7,00	24,95	68,05	100,00
Sulawesi Utara	2,75	22,20	75,05	100,00
Sulawesi Tengah	5,16	26,11	68,73	100,00
Sulawesi Selatan	6,41	26,14	67,45	100,00
Sulawesi Tenggara	6,27	28,46	65,26	100,00
Gorontalo	5,72	24,39	69,88	100,00
Sulawesi Barat	7,51	26,89	65,60	100,00
Maluku	3,05	31,43	65,52	100,00
Maluku Utara	4,28	29,09	66,63	100,00
Papua Barat	6,15	29,58	64,26	100,00
Papua	27,60	24,35	48,05	100,00
Indonesia	5,00	23,87	71,13	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.10.4 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022

Provinsi	Perempuan			
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,46	28,46	67,08	100,00
Sumatera Utara	4,51	27,25	68,24	100,00
Sumatera Barat	3,94	27,42	68,63	100,00
Riau	5,61	27,58	66,80	100,00
Jambi	6,11	25,04	68,85	100,00
Sumatera Selatan	4,63	25,10	70,27	100,00
Bengkulu	5,26	26,49	68,25	100,00
Lampung	5,36	23,75	70,89	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,68	23,56	71,76	100,00
Kep. Riau	5,91	25,44	68,65	100,00
DKI Jakarta	3,88	21,96	74,15	100,00
Jawa Barat	4,92	22,57	72,51	100,00
Jawa Tengah	7,04	20,80	72,16	100,00
DI Yogyakarta	6,29	22,87	70,83	100,00
Jawa Timur	8,20	20,32	71,48	100,00
Banten	5,93	24,28	69,79	100,00
Bali	8,75	21,17	70,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,83	25,20	63,97	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,70	29,16	64,13	100,00
Kalimantan Barat	8,32	25,54	66,14	100,00
Kalimantan Tengah	4,73	25,17	70,10	100,00
Kalimantan Selatan	4,67	23,86	71,47	100,00
Kalimantan Timur	4,75	26,95	68,30	100,00
Kalimantan Utara	6,39	27,41	66,20	100,00
Sulawesi Utara	2,72	22,96	74,33	100,00
Sulawesi Tengah	5,58	27,36	67,06	100,00
Sulawesi Selatan	7,02	25,01	67,97	100,00
Sulawesi Tenggara	6,74	28,89	64,37	100,00
Gorontalo	5,48	25,52	69,01	100,00
Sulawesi Barat	9,02	27,10	63,88	100,00
Maluku	3,36	30,40	66,24	100,00
Maluku Utara	5,06	29,08	65,86	100,00
Papua Barat	7,71	30,23	62,06	100,00
Papua	32,12	24,65	43,23	100,00
Indonesia	6,41	23,58	70,01	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.10.5 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2022

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,12	28,72	67,16	100,00
Sumatera Utara	4,09	27,91	68,00	100,00
Sumatera Barat	4,02	27,36	68,62	100,00
Riau	5,22	27,23	67,55	100,00
Jambi	5,31	24,86	69,82	100,00
Sumatera Selatan	4,15	24,92	70,93	100,00
Bengkulu	4,66	26,02	69,32	100,00
Lampung	4,77	23,51	71,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,15	23,16	72,69	100,00
Kep. Riau	5,13	26,27	68,60	100,00
DKI Jakarta	3,71	22,14	74,16	100,00
Jawa Barat	4,56	22,65	72,78	100,00
Jawa Tengah	5,86	21,04	73,10	100,00
DI Yogyakarta	5,30	23,33	71,38	100,00
Jawa Timur	6,86	20,72	72,42	100,00
Banten	5,28	24,23	70,49	100,00
Bali	6,93	21,67	71,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,33	25,67	65,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,15	29,26	64,59	100,00
Kalimantan Barat	7,05	25,04	67,91	100,00
Kalimantan Tengah	4,53	24,64	70,83	100,00
Kalimantan Selatan	4,53	24,12	71,35	100,00
Kalimantan Timur	4,32	26,77	68,91	100,00
Kalimantan Utara	6,71	26,12	67,17	100,00
Sulawesi Utara	2,73	22,57	74,70	100,00
Sulawesi Tengah	5,36	26,72	67,91	100,00
Sulawesi Selatan	6,72	25,57	67,71	100,00
Sulawesi Tenggara	6,50	28,67	64,82	100,00
Gorontalo	5,60	24,95	69,45	100,00
Sulawesi Barat	8,25	26,99	64,75	100,00
Maluku	3,20	30,92	65,88	100,00
Maluku Utara	4,66	29,08	66,25	100,00
Papua Barat	6,90	29,90	63,20	100,00
Papua	29,72	24,49	45,79	100,00
Indonesia	5,70	23,73	70,57	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun dan 7-18 Tahun Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	APS 7-15 Tahun	APS 7-18 Tahun
(1)	(2)	(3)
Aceh	98,96	95,30
Sumatera Utara	98,62	93,72
Sumatera Barat	98,54	94,82
Riau	98,41	93,46
Jambi	98,37	92,14
Sumatera Selatan	98,04	91,54
Bengkulu	98,92	94,22
Lampung	98,37	92,16
Kep. Bangka Belitung	97,28	90,11
Kep. Riau	99,20	96,12
DKI Jakarta	98,96	92,33
Jawa Barat	98,08	90,75
Jawa Tengah	98,68	91,46
DI Yogyakarta	99,40	96,82
Jawa Timur	98,67	92,28
Banten	98,38	91,52
Bali	98,98	95,14
Nusa Tenggara Barat	98,74	93,74
Nusa Tenggara Timur	97,33	92,07
Kalimantan Barat	96,80	89,87
Kalimantan Tengah	97,70	90,37
Kalimantan Selatan	97,76	91,30
Kalimantan Timur	99,30	94,72
Kalimantan Utara	98,34	92,97
Sulawesi Utara	97,81	91,77
Sulawesi Tengah	96,51	91,15
Sulawesi Selatan	97,28	90,38
Sulawesi Tenggara	97,60	91,99
Gorontalo	96,47	89,85
Sulawesi Barat	95,41	89,12
Maluku	98,91	93,82
Maluku Utara	98,61	93,71
Papua Barat	97,97	93,72
Papua	83,51	79,60
Indonesia	98,08	91,92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.12.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	Perkotaan			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,81	98,79	87,82	40,77
Sumatera Utara	99,69	97,19	79,26	33,40
Sumatera Barat	99,34	96,76	88,84	45,33
Riau	99,64	96,68	82,60	39,97
Jambi	99,43	94,80	80,99	37,90
Sumatera Selatan	99,48	97,01	76,54	31,96
Bengkulu	98,69	97,87	84,23	49,59
Lampung	99,77	96,36	78,68	32,62
Kep. Bangka Belitung	98,97	93,01	73,72	22,04
Kep. Riau	99,26	99,04	85,86	23,19
DKI Jakarta	99,44	97,95	72,10	27,23
Jawa Barat	99,41	96,01	70,82	27,31
Jawa Tengah	99,54	97,57	74,35	30,71
DI Yogyakarta	99,67	99,19	93,13	63,28
Jawa Timur	99,09	97,96	76,97	32,90
Banten	99,24	97,03	72,10	26,75
Bali	99,62	98,16	85,16	36,48
Nusa Tenggara Barat	99,32	98,42	83,16	29,80
Nusa Tenggara Timur	98,95	97,40	81,33	47,21
Kalimantan Barat	98,64	95,02	73,87	34,32
Kalimantan Tengah	99,41	95,68	74,29	32,67
Kalimantan Selatan	99,12	93,53	71,40	36,09
Kalimantan Timur	99,43	98,65	83,54	38,61
Kalimantan Utara	99,29	97,23	78,61	32,53
Sulawesi Utara	99,35	95,83	75,24	30,91
Sulawesi Tengah	97,77	94,64	83,37	47,37
Sulawesi Selatan	99,48	93,71	73,35	44,65
Sulawesi Tenggara	98,65	94,35	79,17	51,21
Gorontalo	99,36	95,09	77,20	41,50
Sulawesi Barat	98,07	91,23	73,79	31,67
Maluku	99,52	98,77	80,42	55,35
Maluku Utara	99,20	98,04	83,70	44,39
Papua Barat	98,91	97,69	83,75	44,13
Papua	95,25	96,21	86,94	39,93
Indonesia	99,33	96,88	75,96	32,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.12.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	Perdesaan			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,24	97,56	80,81	31,12
Sumatera Utara	99,28	96,30	77,91	23,47
Sumatera Barat	99,75	96,27	78,65	33,84
Riau	99,60	95,12	74,07	23,78
Jambi	99,28	96,85	68,35	19,22
Sumatera Selatan	99,32	93,91	67,50	12,74
Bengkulu	99,87	97,66	76,76	23,98
Lampung	99,46	95,28	67,26	17,58
Kep. Bangka Belitung	100,00	92,98	61,86	14,86
Kep. Riau	99,56	98,73	75,61	18,60
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	99,32	92,50	60,79	15,45
Jawa Tengah	99,62	95,85	66,81	18,67
DI Yogyakarta	99,32	98,43	80,85	34,29
Jawa Timur	99,21	97,20	68,65	19,21
Banten	99,57	94,58	61,87	15,43
Bali	99,38	97,06	80,41	23,57
Nusa Tenggara Barat	99,02	97,08	71,89	24,03
Nusa Tenggara Timur	98,48	93,97	73,41	26,11
Kalimantan Barat	98,78	91,23	65,84	20,98
Kalimantan Tengah	99,04	93,80	60,65	19,10
Kalimantan Selatan	99,72	94,46	68,48	19,02
Kalimantan Timur	99,86	98,96	76,82	22,11
Kalimantan Utara	98,41	96,69	73,38	22,10
Sulawesi Utara	99,33	93,72	73,20	16,23
Sulawesi Tengah	98,42	92,35	71,85	20,48
Sulawesi Selatan	99,39	92,76	68,61	28,14
Sulawesi Tenggara	99,27	95,05	71,91	23,18
Gorontalo	98,57	89,32	67,86	28,21
Sulawesi Barat	98,48	88,93	70,17	23,37
Maluku	99,57	97,03	78,12	33,59
Maluku Utara	99,10	97,43	75,55	27,92
Papua Barat	97,83	97,15	78,18	29,01
Papua	79,57	75,69	57,97	19,32
Indonesia	98,80	94,66	69,43	20,96

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.12.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	Laki-laki			
	7-12	13-15	16-18	19-23
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,52	97,35	82,76	30,82
Sumatera Utara	99,43	96,31	76,74	27,18
Sumatera Barat	99,52	95,27	79,24	36,01
Riau	99,70	95,31	74,23	26,87
Jambi	99,48	95,93	70,59	23,77
Sumatera Selatan	99,54	93,66	67,74	18,16
Bengkulu	99,63	96,43	77,18	29,21
Lampung	99,73	93,98	69,68	19,39
Kep. Bangka Belitung	99,42	90,51	67,54	15,91
Kep. Riau	99,27	99,44	81,48	22,95
DKI Jakarta	99,45	98,02	73,73	23,31
Jawa Barat	99,10	94,75	66,54	24,49
Jawa Tengah	99,54	96,03	70,49	22,14
DI Yogyakarta	99,43	98,28	88,01	55,99
Jawa Timur	99,01	97,21	72,13	24,94
Banten	99,00	96,88	67,87	21,54
Bali	99,35	97,21	83,36	31,60
Nusa Tenggara Barat	98,98	96,93	76,78	28,41
Nusa Tenggara Timur	98,55	93,92	71,57	29,76
Kalimantan Barat	98,77	90,57	67,25	22,02
Kalimantan Tengah	99,52	94,11	63,93	22,65
Kalimantan Selatan	99,02	94,32	71,56	24,95
Kalimantan Timur	99,65	98,57	79,43	31,89
Kalimantan Utara	98,61	98,48	74,56	24,17
Sulawesi Utara	99,19	93,57	72,97	19,57
Sulawesi Tengah	97,78	91,31	74,06	27,52
Sulawesi Selatan	99,31	91,57	70,36	33,30
Sulawesi Tenggara	98,74	93,22	73,80	31,42
Gorontalo	98,90	87,40	64,97	28,81
Sulawesi Barat	98,09	87,13	67,32	21,83
Maluku	99,48	97,14	78,41	40,52
Maluku Utara	99,56	97,83	76,20	31,92
Papua Barat	97,92	97,30	78,97	32,57
Papua	84,02	81,44	63,34	24,30
Indonesia	98,98	95,26	71,63	25,61

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.12.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	Perempuan			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,35	98,58	83,47	37,89
Sumatera Utara	99,58	97,30	80,64	30,99
Sumatera Barat	99,58	97,93	88,02	43,16
Riau	99,53	96,15	80,64	33,61
Jambi	99,17	96,48	74,62	26,54
Sumatera Selatan	99,20	96,40	74,47	21,64
Bengkulu	99,36	99,04	81,69	37,05
Lampung	99,37	97,29	72,75	25,42
Kep. Bangka Belitung	99,40	95,48	69,36	22,05
Kep. Riau	99,30	98,48	88,02	22,38
DKI Jakarta	99,43	97,88	70,48	31,32
Jawa Barat	99,70	95,81	70,89	25,18
Jawa Tengah	99,62	97,55	71,15	28,06
DI Yogyakarta	99,76	99,76	91,94	57,39
Jawa Timur	99,28	98,09	74,75	28,92
Banten	99,67	95,88	70,63	26,01
Bali	99,76	98,53	84,36	34,35
Nusa Tenggara Barat	99,36	98,58	78,18	25,34
Nusa Tenggara Timur	98,63	95,83	79,75	34,68
Kalimantan Barat	98,69	94,82	70,30	30,04
Kalimantan Tengah	98,85	95,16	68,91	27,43
Kalimantan Selatan	99,85	93,67	68,05	30,51
Kalimantan Timur	99,49	98,93	83,73	35,02
Kalimantan Utara	99,35	95,59	78,98	34,51
Sulawesi Utara	99,51	96,19	75,83	29,80
Sulawesi Tengah	98,68	94,95	77,60	32,09
Sulawesi Selatan	99,57	94,94	71,26	38,36
Sulawesi Tenggara	99,38	96,50	75,26	36,70
Gorontalo	98,96	96,15	78,72	39,95
Sulawesi Barat	98,72	91,75	74,78	28,79
Maluku	99,63	98,31	79,67	46,50
Maluku Utara	98,69	97,35	79,37	33,48
Papua Barat	98,63	97,45	82,33	37,64
Papua	84,74	81,92	68,89	26,17
Indonesia	99,23	96,62	74,75	29,73

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.12.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,44	97,96	83,10	34,31
Sumatera Utara	99,50	96,78	78,66	29,06
Sumatera Barat	99,55	96,52	83,71	39,39
Riau	99,61	95,72	77,32	30,23
Jambi	99,33	96,20	72,53	25,10
Sumatera Selatan	99,38	95,06	70,93	19,82
Bengkulu	99,49	97,73	79,31	33,04
Lampung	99,56	95,63	71,14	22,37
Kep. Bangka Belitung	99,41	93,00	68,42	18,88
Kep. Riau	99,28	99,01	84,54	22,66
DKI Jakarta	99,44	97,95	72,10	27,23
Jawa Barat	99,39	95,27	68,66	24,82
Jawa Tengah	99,58	96,77	70,82	25,03
DI Yogyakarta	99,59	99,01	89,95	56,69
Jawa Timur	99,14	97,64	73,40	26,87
Banten	99,33	96,39	69,22	23,67
Bali	99,55	97,85	83,84	32,90
Nusa Tenggara Barat	99,17	97,74	77,43	26,93
Nusa Tenggara Timur	98,59	94,83	75,55	32,12
Kalimantan Barat	98,73	92,64	68,72	25,88
Kalimantan Tengah	99,20	94,61	66,32	24,94
Kalimantan Selatan	99,43	94,01	69,88	27,64
Kalimantan Timur	99,57	98,75	81,43	33,40
Kalimantan Utara	98,98	97,03	76,50	29,01
Sulawesi Utara	99,34	94,86	74,33	24,41
Sulawesi Tengah	98,22	93,02	75,84	29,79
Sulawesi Selatan	99,43	93,20	70,81	35,79
Sulawesi Tenggara	99,05	94,80	74,53	33,98
Gorontalo	98,93	91,83	71,68	34,04
Sulawesi Barat	98,40	89,39	70,85	25,02
Maluku	99,55	97,69	79,03	43,43
Maluku Utara	99,13	97,59	77,70	32,65
Papua Barat	98,27	97,37	80,56	34,98
Papua	84,35	81,66	65,93	25,12
Indonesia	99,10	95,92	73,15	27,61

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.13.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	107,65	93,97	94,67	56,01
Sumatera Utara	107,23	89,63	97,68	36,45
Sumatera Barat	106,82	87,41	97,14	55,38
Riau	105,23	92,98	91,57	48,88
Jambi	108,02	81,79	99,77	46,33
Sumatera Selatan	111,56	85,07	89,76	41,35
Bengkulu	109,39	92,31	101,98	55,77
Lampung	105,47	92,95	97,39	32,01
Kep. Bangka Belitung	105,77	87,49	95,09	16,77
Kep. Riau	106,03	91,60	88,02	29,28
DKI Jakarta	103,34	89,89	76,91	39,56
Jawa Barat	104,42	93,34	81,96	28,62
Jawa Tengah	106,07	94,35	92,51	29,08
DI Yogyakarta	105,47	92,28	93,56	82,91
Jawa Timur	104,13	95,66	91,81	35,99
Banten	107,05	93,33	78,32	35,98
Bali	103,22	94,86	92,26	43,10
Nusa Tenggara Barat	106,95	93,61	96,21	37,73
Nusa Tenggara Timur	108,02	90,09	100,71	52,99
Kalimantan Barat	111,31	90,33	90,04	37,89
Kalimantan Tengah	107,70	89,99	92,05	36,23
Kalimantan Selatan	105,33	82,77	81,96	37,96
Kalimantan Timur	105,41	86,70	96,65	49,45
Kalimantan Utara	99,84	98,77	106,20	27,20
Sulawesi Utara	105,43	90,58	85,43	41,80
Sulawesi Tengah	101,05	96,97	100,30	62,09
Sulawesi Selatan	105,63	84,67	89,86	53,77
Sulawesi Tenggara	107,83	79,98	98,64	65,63
Gorontalo	108,94	81,59	92,00	48,21
Sulawesi Barat	103,50	87,34	95,03	36,70
Maluku	108,64	89,69	100,39	63,28
Maluku Utara	105,24	92,41	94,59	60,77
Papua Barat	107,20	89,03	108,51	46,44
Papua	103,46	95,51	108,35	35,39
Indonesia	105,49	92,05	88,70	37,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.13.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,71	95,52	91,49	38,76
Sumatera Utara	109,58	91,10	96,67	23,83
Sumatera Barat	110,03	97,80	84,26	32,98
Riau	106,22	95,36	80,72	26,30
Jambi	110,31	90,62	76,73	22,62
Sumatera Selatan	112,26	91,95	75,83	17,54
Bengkulu	109,16	90,02	89,81	28,51
Lampung	106,11	92,10	82,26	16,57
Kep. Bangka Belitung	109,20	88,39	75,87	12,42
Kep. Riau	108,57	107,15	80,72	13,70
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	105,07	93,89	67,60	16,17
Jawa Tengah	106,32	93,71	80,41	18,22
DI Yogyakarta	103,33	99,47	79,52	50,72
Jawa Timur	105,40	96,33	81,45	22,57
Banten	106,42	96,13	68,29	23,83
Bali	103,03	99,68	87,07	26,36
Nusa Tenggara Barat	107,49	91,62	91,23	26,33
Nusa Tenggara Timur	115,03	89,81	81,09	24,30
Kalimantan Barat	112,13	81,18	81,85	20,03
Kalimantan Tengah	107,18	89,49	78,23	17,98
Kalimantan Selatan	108,97	89,86	80,06	16,82
Kalimantan Timur	104,79	101,82	91,69	21,48
Kalimantan Utara	102,26	101,62	84,81	22,65
Sulawesi Utara	107,63	88,52	86,76	24,98
Sulawesi Tengah	104,62	91,16	81,48	27,52
Sulawesi Selatan	107,61	87,49	83,56	33,02
Sulawesi Tenggara	108,83	89,38	83,77	32,46
Gorontalo	108,50	77,66	84,94	28,13
Sulawesi Barat	106,72	83,89	86,20	27,63
Maluku	112,58	86,72	93,03	41,52
Maluku Utara	109,11	86,85	95,69	37,61
Papua Barat	112,64	91,40	89,67	29,37
Papua	90,22	78,58	65,22	14,07
Indonesia	107,28	92,19	81,23	23,05

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.13.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Laki-laki			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,31	96,36	91,78	40,30
Sumatera Utara	108,33	88,55	96,27	28,80
Sumatera Barat	109,37	94,02	86,05	37,86
Riau	106,40	94,42	84,38	31,67
Jambi	110,18	87,01	82,66	27,34
Sumatera Selatan	112,98	89,65	78,40	22,48
Bengkulu	108,71	91,44	86,52	37,37
Lampung	105,96	92,13	84,65	18,93
Kep. Bangka Belitung	108,81	85,47	82,87	12,85
Kep. Riau	105,90	95,71	87,92	25,46
DKI Jakarta	104,72	88,73	75,81	37,31
Jawa Barat	104,29	94,41	75,16	25,41
Jawa Tengah	106,60	93,59	83,59	22,21
DI Yogyakarta	105,48	93,99	87,45	74,99
Jawa Timur	104,64	95,03	86,21	27,31
Banten	107,28	95,17	72,06	30,55
Bali	102,68	96,15	90,86	37,84
Nusa Tenggara Barat	107,36	91,98	91,18	33,31
Nusa Tenggara Timur	115,81	86,51	81,16	29,37
Kalimantan Barat	112,18	81,70	84,17	21,66
Kalimantan Tengah	107,34	88,10	83,29	23,18
Kalimantan Selatan	107,54	84,19	78,96	26,25
Kalimantan Timur	106,77	91,38	95,38	37,66
Kalimantan Utara	98,24	105,04	86,60	24,04
Sulawesi Utara	105,02	91,42	85,80	28,24
Sulawesi Tengah	101,70	90,53	90,48	35,07
Sulawesi Selatan	107,34	85,47	85,94	39,93
Sulawesi Tenggara	108,46	85,55	88,96	40,37
Gorontalo	110,01	75,71	78,92	33,37
Sulawesi Barat	107,49	83,95	83,72	26,16
Maluku	111,50	86,77	99,44	46,81
Maluku Utara	108,65	89,88	95,15	40,77
Papua Barat	112,09	90,02	92,52	34,41
Papua	94,39	81,37	75,73	18,79
Indonesia	106,50	91,78	83,24	28,91

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.13.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perempuan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,37	93,65	93,34	48,73
Sumatera Utara	108,30	92,21	98,22	33,13
Sumatera Barat	107,56	90,94	95,10	50,43
Riau	105,23	94,49	85,35	38,94
Jambi	108,89	88,69	86,14	33,07
Sumatera Selatan	110,96	89,17	84,13	30,49
Bengkulu	109,78	90,13	102,28	38,97
Lampung	105,86	92,61	90,44	24,10
Kep. Bangka Belitung	105,60	90,24	90,38	16,98
Kep. Riau	106,64	90,31	86,12	29,41
DKI Jakarta	101,91	91,20	78,00	41,91
Jawa Barat	104,83	92,45	82,77	26,65
Jawa Tengah	105,76	94,54	90,17	25,78
DI Yogyakarta	104,40	94,06	92,46	76,19
Jawa Timur	104,72	96,94	88,60	33,03
Banten	106,49	92,87	79,08	35,00
Bali	103,67	96,31	90,78	39,14
Nusa Tenggara Barat	107,07	93,23	96,53	30,70
Nusa Tenggara Timur	110,90	93,63	91,90	35,84
Kalimantan Barat	111,48	87,65	85,45	31,90
Kalimantan Tengah	107,45	91,48	84,71	28,73
Kalimantan Selatan	106,81	88,87	83,17	28,82
Kalimantan Timur	103,58	91,56	94,77	43,80
Kalimantan Utara	103,21	94,71	111,57	27,51
Sulawesi Utara	108,04	87,77	86,28	41,17
Sulawesi Tengah	105,49	95,49	85,53	43,96
Sulawesi Selatan	106,06	86,97	87,03	45,42
Sulawesi Tenggara	108,51	86,57	89,32	50,44
Gorontalo	107,31	82,93	97,18	40,97
Sulawesi Barat	104,63	85,24	92,47	33,28
Maluku	110,55	89,07	92,42	56,17
Maluku Utara	107,44	86,78	95,67	48,20
Papua Barat	108,73	90,97	103,46	37,98
Papua	94,11	85,93	78,58	21,71
Indonesia	106,02	92,47	87,85	33,55

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.13.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,34	95,02	92,53	44,45
Sumatera Utara	108,31	90,31	97,23	30,94
Sumatera Barat	108,47	92,57	90,66	43,79
Riau	105,82	94,45	84,85	35,29
Jambi	109,55	87,84	84,33	30,08
Sumatera Selatan	112,00	89,41	81,11	26,31
Bengkulu	109,23	90,79	93,97	38,15
Lampung	105,91	92,37	87,40	21,48
Kep. Bangka Belitung	107,26	87,85	86,50	14,85
Kep. Riau	106,26	93,27	87,08	27,47
DKI Jakarta	103,34	89,89	76,91	39,56
Jawa Barat	104,55	93,46	78,86	26,01
Jawa Tengah	106,19	94,05	86,83	23,95
DI Yogyakarta	104,96	94,02	89,93	75,59
Jawa Timur	104,68	95,95	87,37	30,07
Banten	106,89	94,05	75,49	32,67
Bali	103,16	96,23	90,82	38,46
Nusa Tenggara Barat	107,21	92,59	93,68	32,05
Nusa Tenggara Timur	113,36	89,88	86,38	32,48
Kalimantan Barat	111,84	84,59	84,79	26,59
Kalimantan Tengah	107,39	89,70	83,97	25,84
Kalimantan Selatan	107,18	86,40	80,97	27,50
Kalimantan Timur	105,21	91,47	95,09	40,62
Kalimantan Utara	100,70	99,85	97,57	25,66
Sulawesi Utara	106,48	89,63	86,03	34,36
Sulawesi Tengah	103,55	92,86	87,99	39,48
Sulawesi Selatan	106,71	86,19	86,49	42,63
Sulawesi Tenggara	108,48	86,04	89,14	45,24
Gorontalo	108,70	79,37	87,83	36,94
Sulawesi Barat	106,08	84,58	87,86	29,43
Maluku	111,05	87,85	95,96	51,36
Maluku Utara	108,05	88,35	95,40	44,27
Papua Barat	110,42	90,45	97,71	36,11
Papua	94,26	83,51	77,06	20,08
Indonesia	106,27	92,11	85,49	31,16

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.14.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,43	88,83	73,91	37,55
Sumatera Utara	98,18	82,08	68,09	26,21
Sumatera Barat	98,45	79,32	74,41	41,27
Riau	96,85	79,38	68,59	35,87
Jambi	99,43	79,03	68,02	31,97
Sumatera Selatan	98,20	78,30	63,32	28,81
Bengkulu	97,66	84,98	71,88	41,54
Lampung	99,31	85,17	69,40	22,87
Kep. Bangka Belitung	97,42	75,91	64,49	14,18
Kep. Riau	99,20	86,36	74,83	21,25
DKI Jakarta	98,37	84,22	60,88	24,87
Jawa Barat	98,18	83,30	60,95	21,86
Jawa Tengah	98,46	81,70	63,87	20,44
DI Yogyakarta	99,67	84,36	76,05	58,17
Jawa Timur	98,01	84,85	65,64	27,23
Banten	97,67	85,76	62,68	25,24
Bali	97,42	86,40	76,18	34,51
Nusa Tenggara Barat	99,04	88,84	71,89	23,61
Nusa Tenggara Timur	95,40	73,18	65,52	34,33
Kalimantan Barat	96,94	73,68	58,16	22,94
Kalimantan Tengah	99,41	79,68	62,05	21,54
Kalimantan Selatan	98,88	77,48	60,87	31,08
Kalimantan Timur	98,99	81,73	69,55	32,28
Kalimantan Utara	94,61	80,40	67,79	19,08
Sulawesi Utara	94,51	76,99	64,58	29,57
Sulawesi Tengah	90,69	78,84	73,56	42,59
Sulawesi Selatan	98,85	78,47	61,46	38,79
Sulawesi Tenggara	98,37	76,35	65,77	46,34
Gorontalo	99,36	74,08	61,11	32,35
Sulawesi Barat	95,82	71,34	67,84	26,07
Maluku	96,03	79,31	67,17	51,92
Maluku Utara	97,71	78,41	68,37	38,91
Papua Barat	93,89	74,98	72,28	35,30
Papua	91,55	72,33	63,85	25,42
Indonesia	98,07	82,57	64,75	26,73

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.14.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,87	87,92	69,83	27,02
Sumatera Utara	97,78	81,56	68,49	17,88
Sumatera Barat	99,12	78,40	62,43	23,94
Riau	98,43	81,08	60,97	18,88
Jambi	99,28	80,35	57,14	15,57
Sumatera Selatan	98,01	78,91	59,58	10,31
Bengkulu	99,04	77,86	63,88	18,54
Lampung	99,28	80,61	58,13	11,73
Kep. Bangka Belitung	98,77	72,90	53,66	11,03
Kep. Riau	99,25	90,12	64,86	11,99
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	98,71	80,93	50,05	11,06
Jawa Tengah	98,32	80,24	58,12	13,04
DI Yogyakarta	98,65	88,17	70,05	32,36
Jawa Timur	98,21	82,42	57,37	14,86
Banten	98,70	81,58	51,53	13,91
Bali	97,57	88,08	70,97	19,16
Nusa Tenggara Barat	98,62	83,35	63,46	17,34
Nusa Tenggara Timur	96,30	69,00	52,49	14,18
Kalimantan Barat	97,83	65,14	48,34	11,56
Kalimantan Tengah	98,90	78,04	51,17	11,43
Kalimantan Selatan	99,35	75,14	58,44	13,65
Kalimantan Timur	97,30	84,65	68,12	12,84
Kalimantan Utara	92,02	77,71	62,50	12,07
Sulawesi Utara	96,45	75,09	61,72	14,74
Sulawesi Tengah	94,35	74,30	61,58	17,89
Sulawesi Selatan	98,05	76,52	59,55	23,88
Sulawesi Tenggara	98,22	78,56	63,17	18,53
Gorontalo	98,23	69,79	56,64	21,74
Sulawesi Barat	95,80	70,08	58,47	17,37
Maluku	97,46	77,79	62,85	28,84
Maluku Utara	97,11	77,05	64,27	20,70
Papua Barat	94,60	68,94	57,24	17,92
Papua	77,32	53,73	41,49	11,30
Indonesia	97,62	78,70	58,29	15,59

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.14.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Laki-laki			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,07	88,68	70,64	26,74
Sumatera Utara	98,06	80,30	67,18	21,16
Sumatera Barat	98,78	78,67	62,70	27,91
Riau	97,80	79,46	62,42	22,07
Jambi	99,48	79,98	61,48	19,09
Sumatera Selatan	98,22	77,02	59,60	14,87
Bengkulu	98,76	77,93	61,59	24,42
Lampung	99,31	81,23	59,79	12,21
Kep. Bangka Belitung	97,94	70,25	56,94	10,16
Kep. Riau	99,13	88,93	72,85	19,42
DKI Jakarta	98,73	82,92	60,57	20,34
Jawa Barat	98,04	82,43	56,01	19,11
Jawa Tengah	98,77	81,14	60,36	14,95
DI Yogyakarta	99,24	84,66	71,89	51,63
Jawa Timur	97,99	82,41	60,57	19,67
Banten	97,63	85,56	56,58	19,97
Bali	97,53	87,42	74,91	29,19
Nusa Tenggara Barat	98,84	86,21	65,45	21,12
Nusa Tenggara Timur	97,03	67,91	50,79	17,70
Kalimantan Barat	97,48	65,45	50,91	11,58
Kalimantan Tengah	99,39	76,47	55,62	14,24
Kalimantan Selatan	98,89	74,79	58,56	19,99
Kalimantan Timur	98,76	82,36	68,10	23,42
Kalimantan Utara	92,96	82,60	62,92	13,69
Sulawesi Utara	94,37	75,25	63,35	17,82
Sulawesi Tengah	92,80	73,40	64,92	23,40
Sulawesi Selatan	98,64	77,07	60,54	27,79
Sulawesi Tenggara	97,95	76,88	64,07	26,78
Gorontalo	98,63	68,03	51,94	22,39
Sulawesi Barat	96,39	71,18	57,92	16,33
Maluku	96,95	76,92	65,58	35,95
Maluku Utara	97,19	76,87	64,27	24,38
Papua Barat	94,60	71,51	62,25	23,58
Papua	81,53	57,47	46,19	14,87
Indonesia	97,87	80,16	60,30	19,97

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.14.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Perempuan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,06	87,73	71,72	34,36
Sumatera Utara	97,93	83,52	69,38	24,02
Sumatera Barat	98,82	79,08	73,84	37,23
Riau	97,80	81,48	65,42	29,25
Jambi	99,17	79,88	59,92	22,52
Sumatera Selatan	97,93	80,29	62,55	19,58
Bengkulu	98,43	82,59	72,21	29,05
Lampung	99,27	82,91	64,35	18,41
Kep. Bangka Belitung	98,08	79,12	62,55	15,60
Kep. Riau	99,29	84,12	74,34	20,90
DKI Jakarta	98,00	85,67	61,18	29,60
Jawa Barat	98,55	83,18	61,33	20,12
Jawa Tengah	98,00	80,89	62,01	19,04
DI Yogyakarta	99,63	85,93	77,15	52,98
Jawa Timur	98,20	85,30	63,71	24,03
Banten	98,25	83,73	62,65	24,56
Bali	97,39	86,30	74,55	31,42
Nusa Tenggara Barat	98,82	85,87	70,07	19,80
Nusa Tenggara Timur	95,14	72,42	61,50	22,32
Kalimantan Barat	97,56	71,36	52,89	20,21
Kalimantan Tengah	98,82	81,28	55,77	17,46
Kalimantan Selatan	99,35	77,94	60,75	25,07
Kalimantan Timur	98,11	82,95	70,25	29,07
Kalimantan Utara	94,44	76,19	69,14	20,14
Sulawesi Utara	96,57	77,00	63,25	28,79
Sulawesi Tengah	93,72	78,15	66,52	29,52
Sulawesi Selatan	98,18	77,79	60,34	33,89
Sulawesi Tenggara	98,60	78,74	64,16	31,87
Gorontalo	98,86	75,19	65,32	30,91
Sulawesi Barat	95,21	69,46	62,81	22,36
Maluku	96,86	80,01	63,54	42,79
Maluku Utara	97,35	77,97	66,56	27,67
Papua Barat	94,01	71,21	65,22	26,09
Papua	81,82	61,03	49,28	15,79
Indonesia	97,88	81,67	63,73	24,17

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.14.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,07	88,21	71,16	30,50
Sumatera Utara	98,00	81,84	68,27	22,58
Sumatera Barat	98,80	78,86	68,38	32,31
Riau	97,80	80,43	63,87	25,64
Jambi	99,33	79,93	60,73	20,73
Sumatera Selatan	98,08	78,68	61,00	17,12
Bengkulu	98,60	80,25	66,61	26,68
Lampung	99,29	82,07	61,96	15,27
Kep. Bangka Belitung	98,01	74,68	59,65	12,79
Kep. Riau	99,20	86,76	73,54	20,17
DKI Jakarta	98,37	84,22	60,88	24,87
Jawa Barat	98,29	82,80	58,60	19,60
Jawa Tengah	98,39	81,02	61,17	16,95
DI Yogyakarta	99,43	85,28	74,50	52,30
Jawa Timur	98,09	83,80	62,10	21,78
Banten	97,93	84,67	59,54	22,16
Bali	97,46	86,88	74,73	30,25
Nusa Tenggara Barat	98,83	86,05	67,61	20,49
Nusa Tenggara Timur	96,08	70,05	56,00	19,92
Kalimantan Barat	97,52	68,32	51,87	15,74
Kalimantan Tengah	99,11	78,75	55,69	15,78
Kalimantan Selatan	99,12	76,28	59,61	22,45
Kalimantan Timur	98,45	82,65	69,10	26,14
Kalimantan Utara	93,69	79,38	65,65	16,71
Sulawesi Utara	95,44	76,11	63,30	23,01
Sulawesi Tengah	93,25	75,63	65,72	26,44
Sulawesi Selatan	98,41	77,42	60,44	30,79
Sulawesi Tenggara	98,27	77,77	64,11	29,24
Gorontalo	98,74	71,66	58,47	26,39
Sulawesi Barat	95,81	70,34	60,24	19,10
Maluku	96,90	78,37	64,57	39,27
Maluku Utara	97,27	77,41	65,35	25,93
Papua Barat	94,31	71,38	63,66	24,77
Papua	81,66	59,14	47,63	15,28
Indonesia	97,88	80,89	61,97	22,01

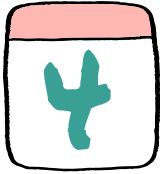
Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 3.15 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi, 2022

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
		(3)	(4)			(7)	(8)			(11)	(12)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Aceh	37,55	33,31	41,78	5,75	27,02	24,76	29,27	4,26	30,50	28,43	32,56	3,45
Sumatera Utara	26,21	23,73	28,69	4,82	17,88	16,09	19,68	5,12	22,58	20,97	24,18	3,63
Sumatera Barat	41,27	37,53	45,01	4,63	23,94	21,07	26,81	6,12	32,31	29,91	34,70	3,78
Riau	35,87	31,54	40,21	6,16	18,88	16,54	21,22	6,33	25,64	23,35	27,93	4,55
Jambi	31,97	26,97	36,98	7,99	15,57	13,11	18,02	8,05	20,73	18,46	23,00	5,58
Sumatera Selatan	28,81	25,09	32,53	6,59	10,31	8,54	12,07	8,75	17,12	15,28	18,96	5,49
Benqkulu	41,54	36,44	46,64	6,26	18,54	15,47	21,61	8,44	26,68	23,89	29,47	5,33
Lampung	22,87	18,25	27,48	10,30	11,73	9,80	13,66	8,40	15,27	13,29	17,25	6,60
Kep. Bangka Belitung	14,18	10,65	17,71	12,68	11,03	7,24	14,83	17,55	12,79	10,23	15,36	10,23
Kepulauan Riau	21,25	15,33	27,18	14,23	11,99	5,95	18,02	25,68	20,17	14,86	25,49	13,45
DKI Jakarta	24,87	22,01	27,74	5,88	-	-	-	-	24,87	22,01	27,74	5,88
Jawa Barat	21,86	20,23	23,49	3,80	11,06	9,52	12,61	7,13	19,60	18,26	20,94	3,49
Jawa Tengah	20,44	18,86	22,02	3,95	13,04	11,58	14,49	5,70	16,95	15,86	18,03	3,26
DI Yogyakarta	58,17	53,04	63,30	4,50	32,36	21,40	43,32	17,28	52,30	47,64	56,96	4,55
Jawa Timur	27,23	25,40	29,06	3,43	14,86	13,31	16,42	5,35	21,78	20,52	23,04	2,95
Banten	25,24	22,04	28,45	6,47	13,91	10,71	17,11	11,72	22,16	19,66	24,66	5,76
Bali	34,51	30,78	38,24	5,52	19,16	15,23	23,08	10,46	30,25	27,24	33,27	5,09
Nusa Tenggara Barat	23,61	19,71	27,51	8,44	17,34	13,89	20,80	10,17	20,49	17,91	23,07	6,42
Nusa Tenggara Timur	34,33	28,55	40,10	8,58	14,18	12,58	15,78	5,75	19,92	17,72	22,13	5,65
Kalimantan Barat	22,94	18,89	26,98	9,00	11,56	9,72	13,40	8,11	15,74	13,88	17,60	6,04
Kalimantan Tengah	21,54	17,41	25,68	9,80	11,43	9,07	13,80	10,55	15,78	13,55	18,02	7,23
Kalimantan Selatan	31,08	26,98	35,19	6,73	13,65	11,24	16,07	9,03	22,45	20,02	24,89	5,54
Kalimantan Timur	32,28	28,45	36,11	6,05	12,84	9,09	16,59	14,91	26,14	23,21	29,07	5,71
Kalimantan Utara	19,08	13,61	24,54	14,61	12,07	6,98	17,15	21,49	16,71	12,73	20,69	12,14
Sulawesi Utara	29,57	25,34	33,80	7,30	14,74	12,00	17,49	9,51	23,01	20,33	25,69	5,94
Sulawesi Tengah	42,59	37,30	47,88	6,34	17,89	15,54	20,24	6,71	26,44	23,85	29,02	4,98
Sulawesi Selatan	38,79	35,43	42,14	4,41	23,88	21,82	25,95	4,41	30,79	28,83	32,74	3,24
Sulawesi Tenggara	46,34	41,17	51,52	5,70	18,53	16,27	20,79	6,22	29,24	26,61	31,88	4,60
Gorontalo	32,35	26,80	37,89	8,75	21,74	17,68	25,79	9,52	26,39	23,04	29,74	6,48
Sulawesi Barat	26,07	18,25	33,88	15,29	17,37	14,24	20,51	9,21	19,10	16,10	22,09	8,00
Maluku	51,92	47,20	56,64	4,64	28,84	25,14	32,53	6,54	39,27	36,22	42,33	3,97
Maluku Utara	38,91	33,09	44,72	7,62	20,70	17,67	23,72	7,46	25,93	23,04	28,82	5,69
Papua Barat	35,30	29,75	40,84	8,02	17,92	14,90	20,93	8,58	24,77	21,88	27,66	5,95
Papua	25,42	21,32	29,51	8,22	11,30	9,66	12,94	7,40	15,28	13,58	16,98	5,67
Indonesia	26,73	26,05	27,41	1,30	15,59	15,13	16,06	1,52	22,01	21,56	22,45	1,02

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022



KEGIATAN PESERTA DIDIK



Pada tahun 2022, persentase peserta didik yang mengakses internet dan menggunakan telepon seluler mengalami penurunan



Tujuan Penggunaan internet oleh para peserta didik didominasi untuk Hiburan, Medsos, dan Informasi/Berita



Hiburan (66.51%)

Medsos (58.19%)

Informasi/Berita (55,10%)



Selain sekolah, sekitar 6,53% peserta didik sambil bekerja. Hal tersebut terutama terjadi pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (sekolah sambil bekerja)





BAB 4 KEGIATAN PESERTA DIDIK

Pandemi Covid-19 mengubah wajah pendidikan Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Setelah diberlakukannya pembelajaran dengan metode daring secara penuh di tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/KB/2022; Nomor 408 Tahun 2022; Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022; dan Nomor 420-1026 Tahun 2022, pemerintah membuka peluang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dengan beralihnya metode pendidikan yang kembali menjadi luring, pada bab ini akan dilihat apakah terdapat perubahan kegiatan peserta didik dalam hal akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maupun kegiatan bekerja dan atau melakukan pekerjaan rumah tangga pada tahun 2022.

4.1 Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak terlepas dari aktivitas seluruh penduduk, termasuk para peserta didik di Indonesia. Pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dapat menyesuaikan diri dengan gaya belajar baru secara daring. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar seperti internet, telepon seluler, maupun komputer menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi, di tahun 2022 sekolah didorong untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) seperti yang tertera pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 01/KB/2022; Nomor 408 Tahun 2022; Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022; dan Nomor 420-1-26 Tahun 2022. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap membuka peluang pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi wilayah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

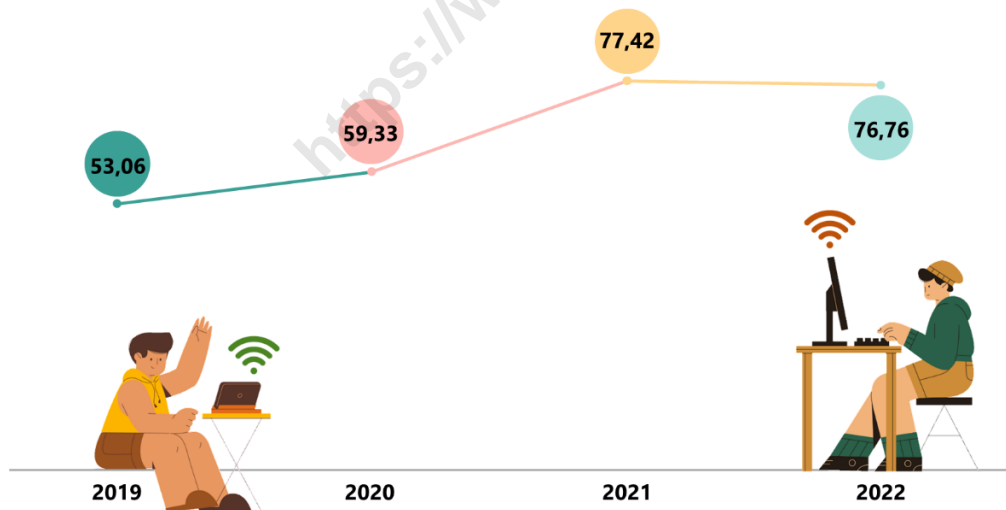
Pada tahun 2022, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih ada, walaupun angkanya tidak setinggi capaian dua tahun yang lalu. Oleh karena itu, walaupun



pendidikan di Indonesia telah didorong untuk 100 persen dilakukan secara tatap muka, namun melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 diberlakukan diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SE tersebut menjelaskan kondisi penghentian sementara PTM jika diperlukan dengan beberapa kondisi tertentu.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan pola yang berbeda pada sebaran peserta didik yang mengakses internet, menggunakan telepon seluler, dan menggunakan komputer jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sebelum tahun 2022, gambar 4.1 memperlihatkan bahwa persentase peserta didik yang menggunakan internet mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2021, persentase penggunaan internet naik sebesar 18,09 persen poin dibandingkan tahun 2020. Kenaikan yang cukup tinggi ini disinyalir disebabkan oleh kebutuhan internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi COVID-19.

Gambar 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet 2019-2022



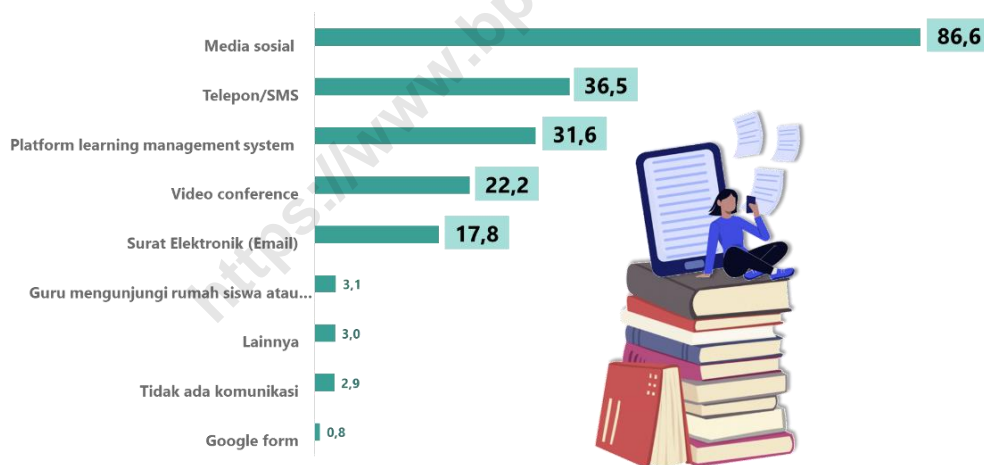
Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2022

Pada tahun 2022, persentase penggunaan internet yang meningkat sebelumnya, mengalami penurunan menjadi 76,76 persen. Capaian ini menurun sebesar 0,66 persen poin dibandingkan tahun 2021. Meskipun relatif kecil, penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan sistem pembelajaran dari PJJ

yang mengharuskan sistem pendidikan berjalan secara daring menjadi PTM yang dilaksanakan secara luring.

Berbagai media dapat digunakan untuk mengakses internet bagi peserta didik, beberapa di antaranya adalah melalui telepon seluler dan komputer. Sejalan dengan penggunaan internet, penggunaan telepon seluler mengalami penurunan di tahun 2022. Hasil Survei Belajar dari Rumah (BDR) yang dilaksanakan oleh Kemendikbud yang dilaksanakan pada April dan Mei 2020 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, telepon/SMS, maupun aplikasi daring menjadi sarana komunikasi yang paling banyak digunakan guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar dari rumah.

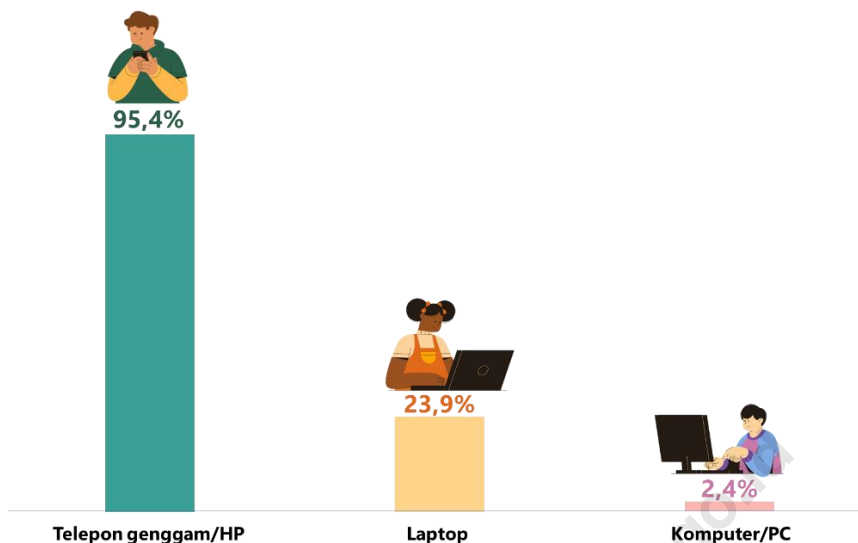
Gambar 4.2 Sarana Komunikasi yang Digunakan Guru dalam Kegiatan Belajar dari Rumah



Sumber : Kemendikbud, Survei Belajar dari Rumah 2020

Jika dilihat dari berbagai sarana komunikasi yang digunakan oleh guru pada gambar 4.2, penggunaan telepon seluler menjadi satu media yang dapat membantu proses pembelajaran. Hal ini seperti hasil yang ditunjukkan oleh Survei PJJ yang dilakukan oleh KPAI pada tahun 2020 bahwa 95,4 persen siswa/peserta didik menggunakan telepon genggam/HP selama masa PJJ, sementara hanya 23,9 persen, dan 2,4 persen lainnya yang menggunakan laptop dan komputer/PC.

Gambar 4.3 Peralatan yang Paling Sering Digunakan Siswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

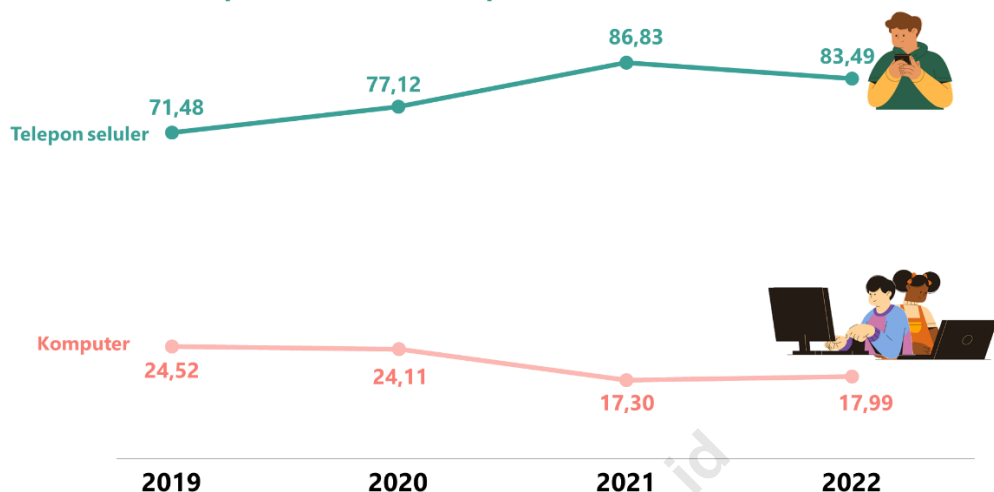


Sumber : Survei Pembelajaran Jarak Jauh KPAI untuk Siswa, 2020

Jika merujuk pada gambar 4.2 dan 4.3, terlihat bahwa potensi penggunaan telepon seluler dapat semakin meningkat dikarenakan pemberlakuan PJJ selama pandemi. Selain karena ukurannya yang kecil dan lebih mudah dibawa dibandingkan dengan peralatan lain seperti laptop/komputer/PC, telepon seluler juga multi fungsi dan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi sehari-hari.

Seiring dengan beralihnya pendidikan di Indonesia selama pandemi dari sistem PJJ yang didorong menuju 100 persen PTM, penggunaan telepon seluler oleh para peserta didik menurun menjadi 83,49 persen di tahun 2022 atau menurun sebesar 3,34 persen poin dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, gambar 4.4 menunjukkan penggunaan komputer (termasuk PC/desktop, laptop/notebook, tablet/sejenis komputer genggam) meningkat menjadi 17,99 persen atau meningkat 0,69 persen poin dibandingkan tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan tipis di tahun 2022, secara umum penggunaan komputer pada peserta didik jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan telepon seluler.

Gambar 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer 2019-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2022

Tidak seperti penggunaan telepon seluler yang cenderung homogen jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran rumah tangga, penggunaan komputer cenderung memiliki pola tertentu. Semakin tinggi jenjang pendidikan, penggunaan komputer pada peserta didik semakin tinggi. Dapat dilihat hanya 5,04 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat, sementara itu terdapat 52,09 persen penduduk pada jenjang perguruan tinggi yang menggunakan komputer. Begitu juga berdasarkan kelompok pengeluaran, semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, maka persentase penggunaan komputer pada peserta didik juga semakin tinggi. Terlihat bahwa pada kuantil 1 sebesar 7,18 persen, sementara 41,91 persen peserta didik pada kuantil 5 menggunakan komputer.

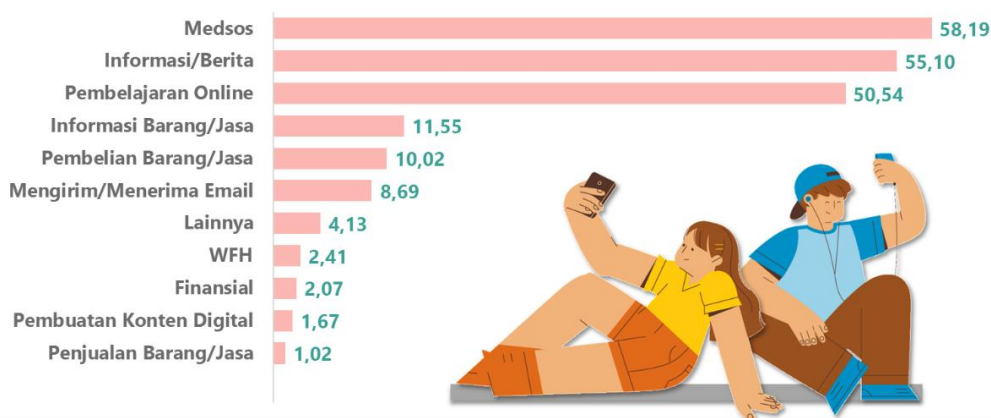
Gambar 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Meskipun sistem pendidikan Indonesia sedikit banyak memengaruhi penggunaan internet bagi para peserta didik, namun ternyata penggunaan internet di kalangan peserta didik di tahun 2022 bukan didominasi oleh pembelajaran daring. Penggunaan internet terbanyak pada peserta didik didominasi untuk tujuan hiburan (66,51 persen) dan media sosial (58,19 persen). Sementara itu, hanya 50,54 persen penggunaan internet untuk pembelajaran daring/*online* oleh peserta didik di tahun 2022. Rendahnya tujuan penggunaan internet untuk pembelajaran daring tersebut dapat disebabkan oleh pembelajaran di Indonesia yang didorong untuk 100 persen dilaksanakan secara PTM di tahun 2022 oleh pemerintah.

Gambar 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir , 2022



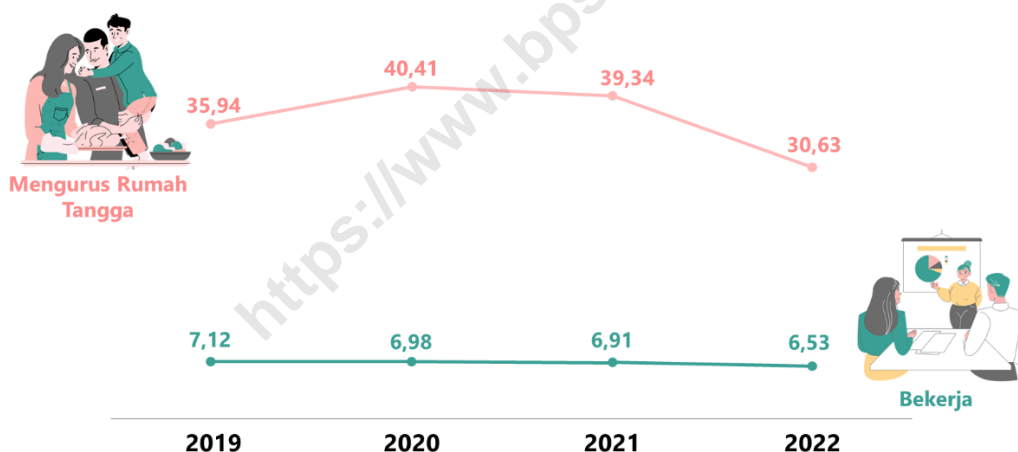
Sumber : BPS, Susenas Maret 2022



4.2. Aktivitas Peserta Didik Selain Bersekolah

Selain bersekolah, peserta didik juga melakukan kegiatan lainnya seperti mengurus rumah tangga maupun bekerja. Hal ini dikarenakan, usia peserta didik yang dianalisis pada publikasi ini yaitu yang berusia 5-24 tahun beririsan dengan usia bekerja (minimal 13 tahun untuk anak melakukan pekerjaan ringan menurut UU No. 13 Tahun 2003) dan usia perkawinan (minimal 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019). Akan tetapi, karena tujuan utama publikasi ini adalah untuk melihat aktivitas peserta didik secara keseluruhan, maka analisis yang digunakan dalam melihat kegiatan/aktivitas lain dibatasi pada peserta didik yang berusia 10-24 tahun.

Gambar 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2019-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2022

Pada tahun 2022, aktivitas peserta didik usia 10-24 tahun untuk bekerja dan mengurus rumah tangga mengalami penurunan. Persentase peserta didik yang bekerja turun sekitar 0,38 persen poin dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 6,53 persen. Sementara itu, persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga juga mengalami penurunan tajam sekitar 8,71 persen poin di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Penurunan aktivitas peserta didik selain sekolah tersebut dapat terjadi karena di masa pandemi COVID-19 seluruh





kegiatan penduduk telah dibatasi, salah satunya untuk bekerja atau bahkan mengurus rumah tangga.

Mortimer (2010) menyatakan bahwa pemuda yang bekerja dapat memiliki dampak positif dan negatif. Bekerja dapat mendorong perkembangan yang sehat seperti meningkatkan keterampilan manajemen waktu, rasa tanggung jawab, pengaturan keuangan, dsb. Akan tetapi, bekerja juga dapat memberikan dampak negatif terhadap peserta didik. Tekanan pekerjaan akan memberikan banyak resiko, salah satunya dapat mengganggu proses belajar mengajar peserta didik tersebut. Bahkan dalam kondisi ekstrim, pekerjaan juga dapat menyebabkan putus sekolah. Oleh karena itu, idealnya jenis pekerjaan yang dilakukan peserta didik menyesuaikan dengan kondisi serta beban kerja yang memenuhi rekomendasi yang tertera pada regulasi mengenai pekerjaan di Indonesia yang telah disesuaikan dengan usia para peserta didik tersebut.

Tabel 4.1 menunjukkan persentase peserta didik yang bekerja semakin besar seiring semakin tingginya jenjang dan kuintil kelompok pengeluaran rumah tangga. Sekitar 0,65 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat yang bekerja, di sisi lain peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi yang bekerja jauh lebih besar yaitu 29,12 persen. Meskipun persentasenya relatif kecil, namun temuan ini juga harus menjadi perhatian karena berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, usia minimal untuk bekerja ringan adalah 13 tahun. Sementara itu, tabel 4.1 menunjukkan bahwa peserta didik pada jenjang SD/ sederajat (yang sebagian besar berusia di bawah 13 tahun) masih ada yang bekerja. Padahal dalam UU tersebut, usia di bawah 13 tahun dilarang untuk bekerja, apalagi yang dapat mengganggu perkembangan serta kesehatan mental, fisik, dan sosial anak.



Tabel 4. 1 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja, 2022

Karakteristik	Bekerja	Tidak Bekerja	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,53	93,47	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	7,66	92,34	100,00
Perempuan	5,37	94,63	100,00
Status Disabilitas			
Disabilitas	4,77	95,23	100,00
Nondisabilitas	6,54	93,46	100,00
Jenjang Pendidikan			
SD Sederajat	0,65	99,35	100,00
SMP Sederajat	2,44	97,56	100,00
SM Sederajat	5,31	94,69	100,00
PT	29,12	70,88	100,00
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	5,49	94,51	100,00
Kuintil 2	6,09	93,91	100,00
Kuintil 3	6,82	93,18	100,00
Kuintil 4	6,98	93,02	100,00
Kuintil 5	7,30	92,70	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	6,16	93,84	100,00
Perdesaan	7,06	92,94	100,00

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Hal menarik lainnya terlihat dari fenomena peserta didik yang bekerja dilihat dari status disabilitas. Persentase bekerja pada peserta didik yang mengalami disabilitas maupun yang tidak mengalami disabilitas tidak jauh berbeda yaitu 4,77 persen dan 6,54 persen atau berbeda sekitar 1,77 persen poin.

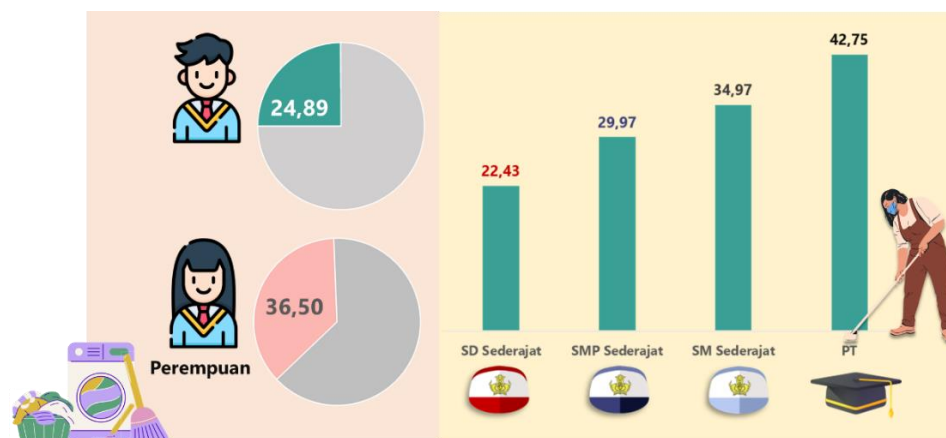
Seperti yang dikemukakan oleh Tumin et.al. (2020) bahwa sebagian besar peserta didik memutuskan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan finansial dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan/akademis. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilihat kembali apakah 4,77 persen peserta didik disabilitas tersebut bekerja secara terpaksa karena masalah ekonomi, atau untuk menambah pengalaman kerja. Jika memang karena masalah ekonomi dalam membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, pemerintah dapat

memfokuskan peningkatan lapangan usaha yang dapat menerima para penyandang disabilitas dalam dunia kerja serta yang sesuai beban usia seperti yang tertera pada UU.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, peserta didik yang bekerja didominasi oleh buruh/karyawan (52,31 persen) dan pekerja keluarga/tidak dibayar (27,29 persen). Apabila ditelaah lebih lanjut, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase status kerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar akan semakin rendah. Terlihat bahwa 86,19 persen dan 64,15 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pekerja keluarga/tidak dibayar cenderung tidak memiliki pengaturan pekerjaan formal seperti tersedianya jaminan sosial, asuransi kesehatan memadai, dll., serta tidak memiliki prospek bagus dalam karir ke depan. Oleh karena itu pekerja keluarga dikategorikan menjadi pekerjaan rentan/*vulnerable employment* (ILO, 2016). Namun, sesuai dengan UU No. 13 tahun 2013 yang menyatakan bahwa anak yang berusia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial, menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar diasumsikan memenuhi persyaratan dalam definisi pekerjaan ringan yang dimaksud.

Gambar 4.8 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2022

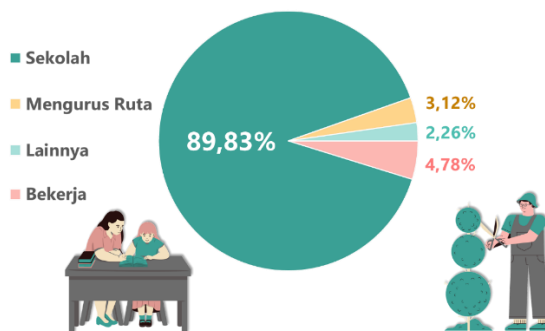


Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Berbeda dengan persentase peserta didik yang bekerja, perempuan yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dibandingkan laki-laki (36,50 persen berbanding 24,89 persen). Bosoni (2014) menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak masyarakat tradisional (pra-industri) yaitu perempuan dikaitkan untuk pengasuhan anak dan tugas-tugas rumah tangga, sementara laki-laki memainkan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, jika dilihat menurut jenjang pendidikan, persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga semakin besar seiring semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh. Hal ini dapat dikarenakan usia para peserta didik semakin mendekati usia pernikahan, sehingga persentase yang mengurus rumah tangga juga semakin tinggi.

Gambar 4.9 menunjukkan kegiatan yang memakan waktu terbanyak yang dilakukan oleh peserta didik. Terlihat bahwa meskipun sebagian peserta didik melakukan kegiatan utama selain sekolah, namun partisipasi sekolah masih mendominasi yaitu sekitar 89,83 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan didorongnya wajib belajar 12 tahun dan juga tuntutan dunia kerja pada zaman sekarang yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu prasyarat dalam perekrutan pekerja. Sementara itu, karena usia peserta didik yang dianalisis berisihan dengan usia kawin dan usia kerja, sehingga terdapat 4,78 persen peserta didik yang bekerja serta 3,12 persen yang mengurus rumah tangga sebagai kegiatan utama yang dilakukan.

Gambar 4.9 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun Menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2022

Karakteristik	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Menggunakan Telepon seluler	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	83,49	17,99	76,76
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	82,94	16,38	76,07
Perempuan	84,06	19,65	77,48
Status Disabilitas			
Disabilitas	56,61	9,02	54,22
Nondisabilitas	83,61	18,03	76,86
Jenjang Pendidikan			
SD Sederajat	72,05	5,04	61,12
SMP Sederajat	92,06	17,80	88,13
SM Sederajat	96,73	33,12	95,20
PT	97,94	52,09	96,60
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	74,62	7,18	63,36
Kuintil 2	80,56	9,94	72,23
Kuintil 3	84,37	13,61	77,82
Kuintil 4	87,69	20,71	83,06
Kuintil 5	91,56	41,91	89,46
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	86,14	22,88	82,37
Perdesaan	79,80	11,16	68,94

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2022

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	25,12	20,60	54,28
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	30,62	22,65	46,74
Perempuan	17,09	17,62	65,29
Status Disabilitas			
Disabilitas	28,96	33,45	37,59
Nondisabilitas	25,10	20,56	54,34
Jenjang Pendidikan			
SD Sederajat	51,65	4,53	43,83
SMP Sederajat	50,16	12,36	37,48
SM Sederajat	34,80	17,90	47,31
PT	16,99	23,49	59,52
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	45,46	19,07	35,46
Kuintil 2	30,67	20,16	49,17
Kuintil 3	23,90	22,66	53,44
Kuintil 4	19,40	19,46	61,15
Kuintil 5	11,21	21,28	67,50
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,11	25,18	67,70
Perdesaan	47,75	14,84	37,41

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2022

Karakteristik	Status Pekerjaan				
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar/Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	10,86	2,92	52,31	6,61	27,29
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	11,00	3,03	49,36	9,56	27,04
Perempuan	10,66	2,76	56,61	2,32	27,66
Status Disabilitas					
Disabilitas	3,77	2,97	45,40	8,79	39,06
Nondisabilitas	10,89	2,92	52,33	6,61	27,26
Jenjang Pendidikan					
SD Sederajat	6,42	0,81	3,25	3,33	86,19
SMP Sederajat	7,05	0,94	21,19	6,67	64,15
SM Sederajat	10,48	2,06	38,89	7,69	40,88
PT	11,79	3,59	63,64	6,44	14,55
Kelompok Pengeluaran					
Kuintil 1	9,45	2,81	37,49	9,09	41,16
Kuintil 2	9,66	2,59	46,86	9,94	30,95
Kuintil 3	10,48	3,19	52,71	4,95	28,66
Kuintil 4	12,10	2,26	57,83	6,18	21,64
Kuintil 5	12,20	3,70	62,83	3,78	17,49
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	11,13	2,57	66,68	5,02	14,60
Perdesaan	10,53	3,36	34,24	8,62	43,25

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga, Tahun 2022

Karakteristik	Mengurus Rumah Tangga		
	Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	30,63	69,37	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	24,89	75,11	100,00
Perempuan	36,50	63,50	100,00
Status Disabilitas			
Disabilitas	23,94	76,06	100,00
Nondisabilitas	30,66	69,34	100,00
Jenjang Pendidikan			
SD Sederajat	22,43	77,57	100,00
SMP Sederajat	29,97	70,03	100,00
SM Sederajat	34,97	65,03	100,00
PT	42,75	57,25	100,00
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	29,87	70,13	100,00
Kuintil 2	31,19	68,81	100,00
Kuintil 3	31,10	68,90	100,00
Kuintil 4	30,91	69,09	100,00
Kuintil 5	30,01	69,99	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	29,67	70,33	100,00
Perdesaan	32,01	67,99	100,00

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.6 Persentase Siswa Umur 10-24 Tahun Menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak Menurut Karakteristik Demografi, 2022

Karakteristik	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	4,78	89,83	3,12	2,26
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	5,93	89,76	1,53	2,78
Perempuan	3,60	89,91	4,76	1,72
Status Disabilitas				
Disabilitas	4,33	79,76	6,43	9,48
Nondisabilitas	4,78	89,88	3,11	2,23
Jenjang Pendidikan				
SD Sederajat	0,09	97,77	0,73	1,41
SMP Sederajat	0,97	95,90	1,57	1,56
SM Sederajat	3,09	92,28	2,75	1,88
PT	25,03	56,97	11,90	6,09
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	3,84	89,53	4,03	2,60
Kuintil 2	4,21	90,11	3,16	2,52
Kuintil 3	4,94	89,55	3,35	2,16
Kuintil 4	5,29	89,51	2,94	2,26
Kuintil 5	5,67	90,49	2,09	1,75
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	4,81	90,04	2,68	2,46
Perdesaan	4,73	89,53	3,76	1,97

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.7.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		Perkotaan
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	76,59	74,81	75,70
Sumatera Utara	83,86	85,47	84,64
Sumatera Barat	83,22	85,47	84,35
Riau	85,55	85,83	85,69
Jambi	83,09	85,32	84,20
Sumatera Selatan	90,78	91,06	90,92
Bengkulu	86,84	89,72	88,31
Lampung	88,52	87,16	87,83
Kep. Bangka Belitung	91,29	91,88	91,58
Kep. Riau	81,93	84,35	83,09
DKI Jakarta	83,88	85,20	84,53
Jawa Barat	84,66	86,33	85,48
Jawa Tengah	88,30	88,80	88,55
DI Yogyakarta	95,47	94,91	95,19
Jawa Timur	87,52	87,84	87,68
Banten	80,26	82,51	81,36
Bali	92,44	92,76	92,60
Nusa Tenggara Barat	88,06	90,48	89,25
Nusa Tenggara Timur	86,31	88,19	87,24
Kalimantan Barat	83,63	84,43	84,04
Kalimantan Tengah	82,54	82,12	82,33
Kalimantan Selatan	89,73	90,57	90,14
Kalimantan Timur	89,48	90,19	89,83
Kalimantan Utara	88,26	89,61	88,95
Sulawesi Utara	83,10	85,79	84,46
Sulawesi Tengah	76,51	78,83	77,71
Sulawesi Selatan	88,49	89,31	88,89
Sulawesi Tenggara	85,46	89,51	87,50
Gorontalo	88,98	91,51	90,30
Sulawesi Barat	83,94	88,36	86,19
Maluku	82,33	85,75	84,00
Maluku Utara	80,43	79,41	79,93
Papua Barat	72,70	75,48	74,07
Papua	68,08	72,18	70,03
Indonesia	85,55	86,74	86,14

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.7.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Laki-Laki	Perempuan	Total
	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65,48	66,62	66,04
Sumatera Utara	82,57	82,82	82,69
Sumatera Barat	82,17	82,69	82,43
Riau	80,28	82,37	81,32
Jambi	77,44	76,86	77,15
Sumatera Selatan	83,32	83,40	83,36
Bengkulu	79,74	80,83	80,28
Lampung	86,82	88,05	87,42
Kep. Bangka Belitung	85,39	86,49	85,93
Kep. Riau	81,27	79,23	80,31
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	77,11	79,59	78,32
Jawa Tengah	87,65	87,05	87,36
DI Yogyakarta	90,50	91,34	90,93
Jawa Timur	85,60	86,15	85,87
Banten	65,13	71,32	68,20
Bali	90,64	89,97	90,31
Nusa Tenggara Barat	84,97	84,14	84,57
Nusa Tenggara Timur	71,78	73,11	72,45
Kalimantan Barat	69,10	71,20	70,13
Kalimantan Tengah	70,80	71,34	71,06
Kalimantan Selatan	88,73	87,68	88,21
Kalimantan Timur	78,57	80,34	79,39
Kalimantan Utara	82,01	81,90	81,96
Sulawesi Utara	75,53	77,88	76,68
Sulawesi Tengah	72,84	71,93	72,39
Sulawesi Selatan	84,84	86,95	85,89
Sulawesi Tenggara	81,88	83,89	82,87
Gorontalo	88,02	89,42	88,72
Sulawesi Barat	77,91	77,02	77,47
Maluku	65,22	66,07	65,63
Maluku Utara	65,67	67,54	66,58
Papua Barat	62,57	62,41	62,49
Papua	24,00	25,15	24,54
Indonesia	79,31	80,30	79,80

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.7.3 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	69,33	69,46	69,39
Sumatera Utara	83,29	84,28	83,77
Sumatera Barat	82,70	84,10	83,40
Riau	82,46	83,80	83,13
Jambi	79,37	79,80	79,58
Sumatera Selatan	86,26	86,44	86,35
Bengkulu	82,23	84,07	83,15
Lampung	87,38	87,74	87,56
Kep. Bangka Belitung	88,78	89,67	89,22
Kep. Riau	81,86	83,84	82,81
DKI Jakarta	83,88	85,20	84,53
Jawa Barat	83,17	85,00	84,07
Jawa Tengah	88,00	88,01	88,01
DI Yogyakarta	94,44	94,11	94,28
Jawa Timur	86,72	87,14	86,93
Banten	76,54	79,72	78,11
Bali	91,95	91,99	91,97
Nusa Tenggara Barat	86,54	87,42	86,97
Nusa Tenggara Timur	75,75	77,14	76,44
Kalimantan Barat	74,48	76,29	75,38
Kalimantan Tengah	75,89	76,20	76,04
Kalimantan Selatan	89,24	89,13	89,19
Kalimantan Timur	86,01	87,34	86,66
Kalimantan Utara	85,97	86,97	86,47
Sulawesi Utara	79,64	82,28	80,96
Sulawesi Tengah	74,06	74,38	74,22
Sulawesi Selatan	86,59	88,07	87,32
Sulawesi Tenggara	83,24	86,07	84,64
Gorontalo	88,45	90,41	89,45
Sulawesi Barat	79,11	79,38	79,24
Maluku	72,37	74,33	73,33
Maluku Utara	69,83	70,95	70,38
Papua Barat	66,82	68,01	67,40
Papua	39,60	42,21	40,83
Indonesia	82,94	84,06	83,49

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.8.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
	(2)	(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,88	17,39	16,13
Sumatera Utara	15,50	19,96	17,66
Sumatera Barat	19,49	24,96	22,23
Riau	16,89	20,71	18,79
Jambi	19,76	26,48	23,10
Sumatera Selatan	20,11	23,31	21,70
Bengkulu	27,17	29,76	28,49
Lampung	17,44	20,27	18,88
Kep. Bangka Belitung	17,83	22,25	20,05
Kep. Riau	21,67	22,85	22,24
DKI Jakarta	27,38	30,78	29,06
Jawa Barat	20,97	23,05	21,99
Jawa Tengah	19,69	24,71	22,18
DI Yogyakarta	32,66	38,71	35,61
Jawa Timur	25,43	28,11	26,75
Banten	18,61	21,17	19,87
Bali	29,78	32,56	31,13
Nusa Tenggara Barat	15,87	20,38	18,10
Nusa Tenggara Timur	25,16	31,58	28,34
Kalimantan Barat	16,34	21,65	19,03
Kalimantan Tengah	18,76	23,09	20,94
Kalimantan Selatan	17,69	20,44	19,03
Kalimantan Timur	24,45	30,68	27,55
Kalimantan Utara	19,16	24,08	21,67
Sulawesi Utara	18,19	21,13	19,67
Sulawesi Tengah	13,42	23,40	18,58
Sulawesi Selatan	22,34	26,00	24,14
Sulawesi Tenggara	19,13	23,76	21,46
Gorontalo	21,35	28,55	25,11
Sulawesi Barat	14,01	17,10	15,59
Maluku	22,36	27,35	24,80
Maluku Utara	16,27	17,33	16,80
Papua Barat	12,00	14,37	13,17
Papua	16,05	15,57	15,82
Indonesia	21,20	24,60	22,88

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.8.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,26	8,52	7,38
Sumatera Utara	8,82	10,55	9,67
Sumatera Barat	12,33	18,17	15,24
Riau	8,83	12,98	10,90
Jambi	9,13	11,01	10,06
Sumatera Selatan	7,17	9,31	8,22
Bengkulu	7,82	12,45	10,12
Lampung	7,43	10,61	8,97
Kep. Bangka Belitung	10,99	11,10	11,04
Kep. Riau	8,94	9,57	9,24
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,65	11,65	10,63
Jawa Tengah	12,50	17,13	14,76
DI Yogyakarta	21,84	29,95	26,01
Jawa Timur	13,57	17,42	15,47
Banten	7,34	9,00	8,16
Bali	9,85	13,65	11,72
Nusa Tenggara Barat	10,39	10,63	10,51
Nusa Tenggara Timur	7,63	9,95	8,80
Kalimantan Barat	6,39	8,89	7,62
Kalimantan Tengah	6,99	7,73	7,35
Kalimantan Selatan	9,83	13,13	11,45
Kalimantan Timur	5,70	7,38	6,48
Kalimantan Utara	7,12	10,04	8,54
Sulawesi Utara	7,54	11,72	9,59
Sulawesi Tengah	6,82	9,13	7,96
Sulawesi Selatan	13,52	17,43	15,46
Sulawesi Tenggara	8,58	10,50	9,53
Gorontalo	9,69	17,09	13,38
Sulawesi Barat	8,99	12,68	10,82
Maluku	6,61	8,41	7,48
Maluku Utara	4,49	5,87	5,16
Papua Barat	5,23	7,47	6,31
Papua	1,79	2,23	2,00
Indonesia	9,67	12,71	11,16

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.8.3 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,25	11,60	10,41
Sumatera Utara	12,52	15,72	14,08
Sumatera Barat	15,93	21,60	18,76
Riau	12,17	16,18	14,17
Jambi	12,77	16,39	14,55
Sumatera Selatan	12,26	14,87	13,55
Bengkulu	14,62	18,76	16,70
Lampung	10,72	13,97	12,32
Kep. Bangka Belitung	14,93	17,68	16,29
Kep. Riau	20,36	21,53	20,92
DKI Jakarta	27,38	30,78	29,06
Jawa Barat	18,73	20,80	19,75
Jawa Tengah	16,39	21,30	18,81
DI Yogyakarta	30,42	36,74	33,54
Jawa Timur	20,51	23,66	22,06
Banten	15,84	18,14	16,97
Bali	24,38	27,34	25,82
Nusa Tenggara Barat	13,18	15,67	14,41
Nusa Tenggara Timur	12,42	15,73	14,07
Kalimantan Barat	10,08	13,80	11,92
Kalimantan Tengah	12,10	14,66	13,36
Kalimantan Selatan	13,81	16,80	15,28
Kalimantan Timur	18,49	23,93	21,15
Kalimantan Utara	14,75	19,26	17,01
Sulawesi Utara	13,32	16,95	15,13
Sulawesi Tengah	9,02	14,21	11,62
Sulawesi Selatan	17,74	21,50	19,60
Sulawesi Tenggara	12,58	15,65	14,10
Gorontalo	14,95	22,54	18,82
Sulawesi Barat	9,99	13,60	11,79
Maluku	13,20	16,35	14,73
Maluku Utara	7,80	9,17	8,47
Papua Barat	8,07	10,43	9,22
Papua	6,84	7,07	6,95
Indonesia	16,38	19,65	17,99

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.9.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	61,53	63,47	62,49
Sumatera Utara	74,13	78,06	76,03
Sumatera Barat	76,54	77,25	76,89
Riau	76,69	77,69	77,19
Jambi	78,74	79,13	78,93
Sumatera Selatan	83,00	83,71	83,35
Bengkulu	83,97	84,79	84,39
Lampung	86,15	84,21	85,17
Kep. Bangka Belitung	82,90	82,71	82,81
Kep. Riau	78,83	82,93	80,80
DKI Jakarta	82,73	84,27	83,49
Jawa Barat	81,54	83,73	82,62
Jawa Tengah	87,45	86,90	87,18
DI Yogyakarta	95,23	95,48	95,35
Jawa Timur	84,64	84,53	84,58
Banten	78,67	78,66	78,67
Bali	88,22	89,63	88,90
Nusa Tenggara Barat	79,65	82,96	81,28
Nusa Tenggara Timur	77,35	80,67	78,99
Kalimantan Barat	81,50	81,39	81,45
Kalimantan Tengah	81,84	80,38	81,11
Kalimantan Selatan	84,64	89,00	86,77
Kalimantan Timur	89,93	92,48	91,20
Kalimantan Utara	85,78	89,34	87,59
Sulawesi Utara	76,47	76,77	76,62
Sulawesi Tengah	69,08	73,73	71,48
Sulawesi Selatan	83,02	84,88	83,93
Sulawesi Tenggara	74,48	82,39	78,46
Gorontalo	83,08	84,96	84,06
Sulawesi Barat	71,73	81,12	76,51
Maluku	73,37	77,55	75,41
Maluku Utara	68,88	74,64	71,72
Papua Barat	70,26	75,27	72,73
Papua	61,98	65,20	63,52
Indonesia	81,67	83,08	82,37

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.9.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47,88	49,62	48,74
Sumatera Utara	66,64	66,55	66,60
Sumatera Barat	67,11	69,73	68,42
Riau	69,86	73,44	71,65
Jambi	68,61	68,64	68,63
Sumatera Selatan	69,78	72,16	70,96
Bengkulu	69,77	71,32	70,54
Lampung	78,48	79,88	79,16
Kep. Bangka Belitung	75,82	75,29	75,56
Kep. Riau	67,22	66,29	66,78
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	71,69	73,78	72,72
Jawa Tengah	85,57	84,79	85,19
DI Yogyakarta	89,00	89,87	89,45
Jawa Timur	77,48	78,46	77,96
Banten	59,09	66,56	62,80
Bali	82,39	79,67	81,05
Nusa Tenggara Barat	70,67	68,45	69,59
Nusa Tenggara Timur	40,13	41,96	41,05
Kalimantan Barat	59,73	62,63	61,15
Kalimantan Tengah	60,92	61,61	61,26
Kalimantan Selatan	81,31	79,69	80,52
Kalimantan Timur	77,80	77,38	77,60
Kalimantan Utara	73,78	73,76	73,77
Sulawesi Utara	60,37	66,14	63,20
Sulawesi Tengah	57,09	56,49	56,79
Sulawesi Selatan	68,44	73,05	70,73
Sulawesi Tenggara	61,64	63,71	62,66
Gorontalo	71,43	76,04	73,73
Sulawesi Barat	57,92	60,47	59,19
Maluku	42,84	41,80	42,33
Maluku Utara	45,27	45,72	45,49
Papua Barat	49,40	48,70	49,06
Papua	12,22	13,22	12,69
Indonesia	68,28	69,63	68,94

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.9.3 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	52,61	54,43	53,51
Sumatera Utara	70,79	72,87	71,81
Sumatera Barat	71,85	73,53	72,69
Riau	72,69	75,20	73,94
Jambi	72,07	72,29	72,18
Sumatera Selatan	74,99	76,75	75,86
Bengkulu	74,76	76,23	75,50
Lampung	81,00	81,39	81,19
Kep. Bangka Belitung	79,90	79,67	79,78
Kep. Riau	77,64	81,26	79,38
DKI Jakarta	82,73	84,27	83,49
Jawa Barat	79,59	81,77	80,66
Jawa Tengah	86,59	85,95	86,27
DI Yogyakarta	93,94	94,22	94,08
Jawa Timur	81,67	82,00	81,83
Banten	73,87	75,64	74,74
Bali	86,64	86,88	86,75
Nusa Tenggara Barat	75,25	75,96	75,60
Nusa Tenggara Timur	50,29	52,31	51,30
Kalimantan Barat	67,79	69,84	68,81
Kalimantan Tengah	69,99	70,08	70,03
Kalimantan Selatan	83,00	84,37	83,67
Kalimantan Timur	86,08	88,11	87,07
Kalimantan Utara	81,38	84,00	82,69
Sulawesi Utara	69,11	72,05	70,58
Sulawesi Tengah	61,09	62,62	61,86
Sulawesi Selatan	75,42	78,66	77,03
Sulawesi Tenggara	66,51	70,96	68,72
Gorontalo	76,68	80,28	78,52
Sulawesi Barat	60,67	64,76	62,71
Maluku	55,60	56,80	56,19
Maluku Utara	51,92	54,05	52,96
Papua Barat	58,16	60,09	59,10
Papua	29,83	32,07	30,89
Indonesia	76,07	77,48	76,76

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.10.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Perkotaan

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,69	74,11	91,72	95,47
Sumatera Utara	58,19	85,19	96,42	98,40
Sumatera Barat	55,58	88,50	97,61	96,52
Riau	58,33	90,05	97,05	98,73
Jambi	64,40	88,37	94,32	99,47
Sumatera Selatan	70,86	94,01	97,86	98,84
Bengkulu	68,61	92,99	99,20	99,02
Lampung	73,46	95,74	97,68	98,64
Kep. Bangka	68,90	94,35	99,31	98,86
Kep. Riau	69,85	91,55	95,13	98,46
DKI Jakarta	70,29	92,68	98,01	99,85
Jawa Barat	68,67	93,88	98,29	98,33
Jawa Tengah	75,98	95,71	98,50	99,81
DI Yogyakarta	89,43	98,49	99,62	99,87
Jawa Timur	71,92	93,85	97,18	99,06
Banten	62,73	91,56	98,52	98,66
Bali	77,51	96,50	98,16	99,24
Nusa Tenggara	69,00	90,34	96,38	97,91
Nusa Tenggara	60,04	85,92	96,34	98,30
Kalimantan Barat	67,22	90,19	97,61	99,03
Kalimantan Tengah	66,17	91,68	98,00	97,50
Kalimantan Selatan	76,42	95,95	98,84	98,96
Kalimantan Timur	83,09	97,39	98,53	98,76
Kalimantan Utara	78,44	93,27	96,61	99,14
Sulawesi Utara	55,69	88,38	95,88	98,52
Sulawesi Tengah	43,73	83,35	92,65	94,65
Sulawesi Selatan	66,89	94,43	98,82	98,02
Sulawesi Tenggara	55,82	91,65	97,13	98,78
Gorontalo	69,42	97,80	95,50	97,76
Sulawesi Barat	59,26	85,62	96,98	96,00
Maluku	54,49	79,17	91,95	97,06
Maluku Utara	50,81	78,91	93,05	97,29
Papua Barat	55,87	78,27	91,41	92,44
Papua	46,39	71,03	84,55	91,05
Indonesia	68,17	92,36	97,52	98,57

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.10.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Jenjang Pendidikan				Perdesaan
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	23,89	58,52	79,62	87,75	
Sumatera Utara	47,70	79,74	91,69	96,62	
Sumatera Barat	45,33	86,54	94,79	94,83	
Riau	53,03	85,33	96,20	97,85	
Jambi	50,73	85,17	93,62	96,15	
Sumatera Selatan	55,83	86,97	95,68	92,92	
Bengkulu	50,95	87,59	95,74	95,40	
Lampung	67,52	92,92	96,41	94,80	
Kep. Bangka	60,68	91,92	95,62	98,39	
Kep. Riau	45,26	85,91	92,01	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	
Jawa Barat	56,24	88,54	96,24	94,28	
Jawa Tengah	74,12	95,88	99,21	97,75	
DI Yogyakarta	79,03	97,91	96,93	100,00	
Jawa Timur	63,66	90,61	95,90	95,39	
Banten	43,10	78,56	92,23	89,90	
Bali	64,82	96,45	96,77	95,86	
Nusa Tenggara	54,03	80,81	91,64	91,72	
Nusa Tenggara	19,77	51,07	77,48	81,82	
Kalimantan Barat	40,63	80,68	91,91	91,30	
Kalimantan Tengah	42,26	77,86	92,08	86,27	
Kalimantan Selatan	68,37	93,99	97,99	97,75	
Kalimantan Timur	62,21	91,11	94,84	94,86	
Kalimantan Utara	54,78	84,41	97,22	96,06	
Sulawesi Utara	41,23	80,49	90,98	92,02	
Sulawesi Tengah	31,60	75,40	89,49	88,40	
Sulawesi Selatan	49,28	85,97	93,93	94,55	
Sulawesi Tenggara	39,12	79,34	94,03	95,94	
Gorontalo	53,48	90,47	95,72	91,43	
Sulawesi Barat	34,18	74,24	90,48	95,98	
Maluku	18,82	49,35	70,04	78,49	
Maluku Utara	23,22	54,08	76,28	78,21	
Papua Barat	31,31	61,00	72,84	72,12	
Papua	6,17	16,17	23,14	30,01	
Indonesia	52,06	82,47	91,87	92,38	

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.10.3 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,67	63,52	83,70	90,85
Sumatera Utara	53,28	82,68	94,34	97,80
Sumatera Barat	50,22	87,48	96,27	95,84
Riau	55,14	87,12	96,55	98,32
Jambi	55,20	86,13	93,88	97,75
Sumatera Selatan	61,41	89,55	96,57	96,36
Bengkulu	56,60	89,50	97,00	97,25
Lampung	69,37	93,84	96,89	96,59
Kep. Bangka	65,28	93,37	97,88	98,68
Kep. Riau	67,50	90,86	94,77	98,55
DKI Jakarta	70,29	92,68	98,01	99,85
Jawa Barat	66,05	92,75	97,92	97,81
Jawa Tengah	75,10	95,79	98,81	99,05
DI Yogyakarta	86,99	98,35	99,01	99,89
Jawa Timur	68,33	92,46	96,67	97,83
Banten	57,72	88,38	96,94	96,81
Bali	73,78	96,49	97,79	98,59
Nusa Tenggara	61,61	85,64	94,02	95,34
Nusa Tenggara	28,94	59,87	83,44	89,04
Kalimantan Barat	49,86	84,46	94,10	95,13
Kalimantan Tengah	52,11	83,98	94,78	92,89
Kalimantan Selatan	72,26	94,92	98,41	98,59
Kalimantan Timur	76,37	95,25	97,40	98,08
Kalimantan Utara	69,92	89,96	96,83	98,25
Sulawesi Utara	48,68	84,85	93,69	96,41
Sulawesi Tengah	35,17	77,92	90,68	91,71
Sulawesi Selatan	57,20	89,87	96,22	96,58
Sulawesi Tenggara	44,86	83,55	95,23	97,61
Gorontalo	60,71	93,75	95,62	94,92
Sulawesi Barat	39,06	76,58	91,81	95,98
Maluku	32,41	61,03	79,09	88,88
Maluku Utara	30,55	61,07	80,66	85,99
Papua Barat	41,08	67,96	81,40	82,51
Papua	19,64	34,81	46,97	60,07
Indonesia	61,12	88,13	95,20	96,60

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.11.1 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7,58	4,67	6,14
Sumatera Utara	9,03	6,44	7,76
Sumatera Barat	6,83	5,32	6,08
Riau	8,53	6,71	7,61
Jambi	6,82	6,28	6,55
Sumatera Selatan	6,90	5,47	6,18
Bengkulu	9,14	7,49	8,30
Lampung	7,29	4,40	5,84
Kep. Bangka	3,48	2,49	2,99
Kep. Riau	2,04	4,47	3,23
DKI Jakarta	2,59	3,11	2,85
Jawa Barat	5,88	5,50	5,69
Jawa Tengah	6,83	6,75	6,79
DI Yogyakarta	13,32	10,65	12,01
Jawa Timur	7,57	5,07	6,34
Banten	5,73	4,42	5,08
Bali	4,19	6,10	5,13
Nusa Tenggara	10,64	6,54	8,61
Nusa Tenggara	7,71	4,66	6,18
Kalimantan Barat	6,31	5,39	5,84
Kalimantan Tengah	7,16	4,96	6,06
Kalimantan Selatan	7,87	5,94	6,92
Kalimantan Timur	6,54	6,05	6,30
Kalimantan Utara	4,30	4,04	4,17
Sulawesi Utara	4,84	3,28	4,05
Sulawesi Tengah	11,60	6,48	8,92
Sulawesi Selatan	10,60	6,99	8,83
Sulawesi Tenggara	9,40	6,75	8,06
Gorontalo	7,24	4,15	5,62
Sulawesi Barat	5,62	4,10	4,82
Maluku	6,53	5,49	6,02
Maluku Utara	7,47	3,47	5,52
Papua Barat	4,62	2,72	3,69
Papua	6,15	4,06	5,14
Indonesia	6,77	5,54	6,16

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.11.2 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,36	4,98	8,20
Sumatera Utara	13,27	10,77	12,04
Sumatera Barat	9,27	4,22	6,73
Riau	7,72	4,42	6,07
Jambi	7,48	2,90	5,22
Sumatera Selatan	5,65	2,16	3,93
Bengkulu	9,01	4,88	6,93
Lampung	7,64	3,28	5,47
Kep. Bangka	2,64	2,91	2,77
Kep. Riau	3,63	1,78	2,81
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	7,07	2,82	5,00
Jawa Tengah	7,22	4,40	5,84
DI Yogyakarta	9,81	10,51	10,17
Jawa Timur	7,22	4,23	5,73
Banten	5,77	3,93	4,85
Bali	9,25	9,31	9,28
Nusa Tenggara	16,72	9,38	13,20
Nusa Tenggara	11,45	6,33	8,87
Kalimantan Barat	7,44	4,95	6,20
Kalimantan Tengah	8,33	3,46	5,98
Kalimantan Selatan	5,28	5,34	5,31
Kalimantan Timur	6,38	2,88	4,74
Kalimantan Utara	2,75	2,62	2,69
Sulawesi Utara	4,23	1,65	2,96
Sulawesi Tengah	10,55	4,25	7,48
Sulawesi Selatan	13,82	7,51	10,67
Sulawesi Tenggara	9,03	4,34	6,74
Gorontalo	11,52	3,00	7,19
Sulawesi Barat	13,22	4,54	8,89
Maluku	9,59	4,21	7,01
Maluku Utara	11,90	4,11	8,15
Papua Barat	8,92	6,12	7,57
Papua	17,28	16,67	17,00
Indonesia	8,93	5,14	7,06

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.11.3 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,04	4,87	7,48
Sumatera Utara	10,89	8,36	9,64
Sumatera Barat	8,02	4,78	6,40
Riau	8,06	5,39	6,72
Jambi	7,25	4,12	5,69
Sumatera Selatan	6,15	3,52	4,84
Bengkulu	9,06	5,85	7,44
Lampung	7,52	3,67	5,60
Kep. Bangka	3,13	2,66	2,90
Kep. Riau	2,21	4,23	3,19
DKI Jakarta	2,59	3,11	2,85
Jawa Barat	6,11	4,98	5,56
Jawa Tengah	7,01	5,70	6,36
DI Yogyakarta	12,61	10,62	11,63
Jawa Timur	7,42	4,72	6,09
Banten	5,74	4,30	5,03
Bali	5,56	6,95	6,24
Nusa Tenggara	13,62	7,89	10,83
Nusa Tenggara	10,38	5,85	8,10
Kalimantan Barat	7,01	5,12	6,06
Kalimantan Tengah	7,81	4,15	6,01
Kalimantan Selatan	6,60	5,65	6,14
Kalimantan Timur	6,49	5,15	5,83
Kalimantan Utara	3,74	3,55	3,64
Sulawesi Utara	4,56	2,57	3,57
Sulawesi Tengah	10,91	5,09	8,00
Sulawesi Selatan	12,24	7,26	9,78
Sulawesi Tenggara	9,17	5,32	7,27
Gorontalo	9,60	3,54	6,47
Sulawesi Barat	11,70	4,45	8,05
Maluku	8,29	4,78	6,58
Maluku Utara	10,61	3,92	7,38
Papua Barat	7,08	4,64	5,90
Papua	13,38	12,05	12,75
Indonesia	7,66	5,37	6,53

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.12.1 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	20,53	38,63	29,50
Sumatera Utara	29,99	41,76	35,77
Sumatera Barat	37,00	50,51	43,72
Riau	30,60	37,46	34,07
Jambi	17,86	25,91	21,91
Sumatera Selatan	21,89	38,95	30,49
Bengkulu	15,68	34,56	25,32
Lampung	28,98	45,79	37,39
Kep. Bangka	36,78	45,14	40,96
Kep. Riau	24,17	29,05	26,55
DKI Jakarta	9,40	14,79	12,08
Jawa Barat	20,60	31,39	25,89
Jawa Tengah	28,59	39,45	33,99
DI Yogyakarta	40,45	52,23	46,20
Jawa Timur	27,79	37,33	32,49
Banten	11,56	19,71	15,59
Bali	49,68	54,67	52,14
Nusa Tenggara	39,60	57,51	48,45
Nusa Tenggara	38,37	52,70	45,56
Kalimantan Barat	14,94	27,08	21,14
Kalimantan Tengah	15,13	25,84	20,48
Kalimantan Selatan	32,09	39,09	35,54
Kalimantan Timur	24,23	35,49	29,86
Kalimantan Utara	20,49	27,68	24,09
Sulawesi Utara	18,00	29,17	23,64
Sulawesi Tengah	23,09	36,92	30,33
Sulawesi Selatan	17,84	33,28	25,40
Sulawesi Tenggara	33,09	48,77	41,00
Gorontalo	24,00	41,96	33,45
Sulawesi Barat	23,44	46,14	35,28
Maluku	40,69	58,39	49,46
Maluku Utara	31,41	41,92	36,53
Papua Barat	21,68	29,57	25,54
Papua	18,88	26,06	22,36
Indonesia	24,36	35,10	29,67

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.12.2 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	15,09	30,31	22,62
Sumatera Utara	35,39	46,69	40,98
Sumatera Barat	22,07	38,92	30,53
Riau	19,37	32,38	25,88
Jambi	18,85	28,76	23,74
Sumatera Selatan	20,89	31,46	26,11
Bengkulu	24,63	38,80	31,76
Lampung	28,95	44,61	36,73
Kep. Bangka	22,51	35,46	28,94
Kep. Riau	32,09	40,43	35,79
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	26,91	39,32	32,97
Jawa Tengah	22,63	35,81	29,11
DI Yogyakarta	35,08	52,81	44,11
Jawa Timur	22,21	34,41	28,27
Banten	20,30	27,44	23,87
Bali	61,73	59,06	60,43
Nusa Tenggara	35,26	50,56	42,60
Nusa Tenggara	43,80	55,79	49,85
Kalimantan Barat	14,63	29,83	22,19
Kalimantan Tengah	19,35	29,15	24,09
Kalimantan Selatan	44,81	56,57	50,50
Kalimantan Timur	11,21	25,15	17,75
Kalimantan Utara	13,11	30,95	21,71
Sulawesi Utara	25,24	35,55	30,29
Sulawesi Tengah	23,85	37,26	30,38
Sulawesi Selatan	22,15	41,89	31,99
Sulawesi Tenggara	33,20	48,28	40,58
Gorontalo	23,30	37,81	30,67
Sulawesi Barat	24,48	38,01	31,24
Maluku	34,27	45,56	39,68
Maluku Utara	27,76	40,88	34,08
Papua Barat	24,11	38,13	30,85
Papua	24,35	32,92	28,35
Indonesia	25,65	38,54	32,01

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.12.3 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,99	33,22	25,02
Sumatera Utara	32,36	43,94	38,07
Sumatera Barat	29,69	44,77	37,22
Riau	24,04	34,52	29,30
Jambi	18,50	27,73	23,09
Sumatera Selatan	21,29	34,54	27,89
Bengkulu	21,36	37,23	29,38
Lampung	28,96	45,02	36,96
Kep. Bangka	30,83	41,13	35,97
Kep. Riau	25,02	30,09	27,47
DKI Jakarta	9,40	14,79	12,08
Jawa Barat	21,83	32,92	27,26
Jawa Tengah	25,90	37,82	31,80
DI Yogyakarta	39,37	52,36	45,76
Jawa Timur	25,51	36,13	30,76
Banten	13,69	21,62	17,62
Bali	52,95	55,84	54,37
Nusa Tenggara	37,47	54,21	45,62
Nusa Tenggara	42,25	54,91	48,62
Kalimantan Barat	14,75	28,75	21,78
Kalimantan Tengah	17,47	27,62	22,46
Kalimantan Selatan	38,34	47,52	42,82
Kalimantan Timur	20,20	32,55	26,26
Kalimantan Utara	17,80	28,81	23,24
Sulawesi Utara	21,25	31,94	26,58
Sulawesi Tengah	23,59	37,13	30,36
Sulawesi Selatan	20,03	37,74	28,78
Sulawesi Tenggara	33,16	48,48	40,75
Gorontalo	23,61	39,75	31,94
Sulawesi Barat	24,28	39,75	32,08
Maluku	37,00	51,22	43,92
Maluku Utara	28,82	41,19	34,80
Papua Barat	23,07	34,41	28,57
Papua	22,43	30,41	26,20
Indonesia	24,89	36,50	30,63

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.13 *Sampling Error Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi, 2022*

Provinsi	SD/Sederajat				SMP/Sederajat				SM/Sederajat				Perguruan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
		(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)			(8)	(9)	
Aceh	28,67	26,50	30,83	3,85	63,52	60,82	66,22	2,17	83,70	81,32	86,09	1,45	90,85	88,81	92,89	1,14
Sumatera Utara	53,28	51,19	55,37	2,00	82,68	80,92	84,43	1,08	94,34	93,31	95,37	0,56	97,80	96,97	98,63	0,43
Sumatera Barat	50,22	47,56	52,88	2,70	87,48	85,30	89,66	1,27	96,27	95,26	97,29	0,54	95,84	94,10	97,59	0,93
Riau	55,14	52,05	58,24	2,86	87,12	84,87	89,36	1,31	96,55	95,41	97,70	0,61	98,32	97,21	99,43	0,58
Jambi	55,20	52,03	58,37	2,93	86,13	83,59	88,66	1,50	93,88	92,08	95,67	0,97	97,75	96,28	99,22	0,77
Sumatera Selatan	61,41	58,98	63,83	2,02	89,55	87,77	91,33	1,01	96,57	95,43	97,72	0,60	96,36	94,69	98,03	0,88
Bengkulu	56,60	53,20	60,00	3,06	89,50	87,12	91,87	1,35	97,00	95,83	98,17	0,61	97,25	95,51	98,99	0,91
Lampung	69,37	67,02	71,73	1,73	93,84	92,44	95,23	0,76	96,89	95,80	97,98	0,57	96,59	94,47	98,71	1,12
Kep. Bangka Belitung	65,28	61,24	69,31	3,15	93,37	90,98	95,76	1,31	97,88	96,45	99,31	0,75	98,68	96,85	100,00	0,95
Kepulauan Riau	67,50	62,11	72,89	4,07	90,86	85,78	95,93	2,85	94,77	91,45	98,09	1,79	98,55	96,17	100,00	1,24
DKI Jakarta	70,29	67,02	73,56	2,37	92,68	90,30	95,05	1,31	98,01	96,37	99,64	0,85	99,85	99,56	100,00	0,15
Jawa Barat	66,05	64,37	67,74	1,30	92,75	91,66	93,83	0,59	97,92	97,36	98,47	0,29	97,81	96,94	98,67	0,45
Jawa Tengah	75,10	73,75	76,45	0,92	95,79	94,98	96,60	0,43	98,81	98,38	99,24	0,22	99,05	98,46	99,64	0,30
DI Yogyakarta	86,99	83,82	90,17	1,86	98,35	96,94	99,75	0,73	99,01	97,96	100,00	0,54	99,89	99,67	100,00	0,11
Jawa Timur	68,33	66,87	69,80	1,09	92,46	91,42	93,50	0,57	96,67	95,94	97,39	0,38	97,83	97,15	98,50	0,35
Banten	57,72	54,42	61,02	2,91	88,38	85,85	90,91	1,46	96,94	95,63	98,26	0,69	96,81	95,21	98,41	0,85
Bali	73,78	70,59	76,97	2,21	96,49	94,86	98,11	0,86	97,79	96,44	99,14	0,70	98,59	97,42	99,75	0,60
Nusa Tenggara Barat	61,61	58,43	64,79	2,63	85,64	82,76	88,52	1,72	94,02	92,20	95,85	0,99	95,34	93,16	97,52	1,17
Nusa Tenggara Timur	28,94	26,80	31,08	3,77	59,87	57,25	62,49	2,23	83,44	81,43	85,45	1,23	89,04	86,79	91,29	1,29
Kalimantan Barat	49,86	47,07	52,64	2,85	84,46	81,77	87,14	1,62	94,10	92,33	95,88	0,96	95,13	92,99	97,27	1,15
Kalimantan Tengah	52,11	48,96	55,25	3,08	83,98	80,66	87,30	2,02	94,78	92,97	96,59	0,97	92,89	89,66	96,12	1,77
Kalimantan Selatan	72,26	69,67	74,85	1,83	94,92	93,53	96,31	0,75	98,41	97,42	99,39	0,51	98,59	97,41	99,77	0,61
Kalimantan Timur	76,37	73,46	79,28	1,95	95,25	93,35	97,14	1,02	97,40	96,08	98,72	0,69	98,08	96,54	99,63	0,80
Kalimantan Utara	69,92	64,93	74,91	3,64	89,96	86,55	93,36	1,93	96,83	94,24	99,42	1,37	98,25	96,47	100,00	0,92
Sulawesi Utara	48,68	45,69	51,66	3,13	84,85	82,06	87,65	1,68	93,69	92,05	95,32	0,89	96,41	94,07	98,74	1,24
Sulawesi Tengah	35,17	32,15	38,18	4,37	77,92	74,93	80,92	1,96	90,68	88,53	92,82	1,21	91,71	88,98	94,43	1,52
Sulawesi Selatan	57,20	54,95	59,45	2,01	89,87	88,27	91,47	0,91	96,22	95,28	97,16	0,50	96,58	95,42	97,74	0,61
Sulawesi Tenggara	44,86	41,93	47,79	3,33	83,55	81,12	85,97	1,48	95,23	93,95	96,52	0,69	97,61	96,60	98,63	0,53
Gorontalo	60,71	56,37	65,06	3,65	93,75	91,34	96,17	1,31	95,62	93,26	97,98	1,26	94,92	92,21	97,62	1,45
Sulawesi Barat	39,06	34,91	43,21	5,43	76,58	72,32	80,84	2,84	91,81	88,95	94,67	1,59	95,98	93,22	98,74	1,47
Maluku	32,41	28,88	35,93	5,55	61,03	57,08	64,98	3,30	79,09	76,00	82,19	2,00	88,88	86,28	91,47	1,49
Maluku Utara	30,55	26,97	34,14	5,98	61,07	56,84	65,30	3,53	80,66	77,44	83,88	2,04	85,99	81,60	90,37	2,60
Papua Barat	41,08	37,47	44,69	4,48	67,96	63,88	72,05	3,07	81,40	78,28	84,53	1,96	82,51	78,42	86,59	2,53
Papua	19,64	17,47	21,81	5,64	34,81	31,48	38,14	4,88	46,97	43,05	50,89	4,26	60,07	54,64	65,50	4,61
Indonesia	61,12	60,58	61,65	0,44	88,13	87,74	88,52	0,23	95,20	94,96	95,44	0,13	96,60	96,33	96,88	0,15

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 4.14 *Sampling Error Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, 2022*

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	6,14	4,96	7,33	9,85	8,20	7,22	9,18	6,09	7,48	6,72	8,24	5,19
Sumatera Utara	7,76	6,64	8,87	7,31	12,04	10,78	13,30	5,34	9,64	8,81	10,48	4,41
Sumatera Barat	6,08	5,01	7,14	8,95	6,73	5,68	7,78	7,96	6,40	5,65	7,15	5,96
Riau	7,61	6,06	9,16	10,39	6,07	5,06	7,09	8,54	6,72	5,84	7,59	6,65
Jambi	6,55	4,59	8,51	15,27	5,22	4,22	6,22	9,74	5,69	4,75	6,64	8,50
Sumatera Selatan	6,18	4,69	7,67	12,32	3,93	3,13	4,72	10,32	4,84	4,07	5,62	8,14
Bengkulu	8,30	5,82	10,78	15,25	6,93	5,56	8,31	10,10	7,44	6,18	8,69	8,64
Lampung	5,84	4,12	7,56	15,03	5,47	4,52	6,43	8,91	5,60	4,74	6,46	7,87
Kep. Bangka Belitung	2,99	1,85	4,13	19,50	2,77	1,67	3,88	20,38	2,90	2,09	3,71	14,27
Kepulauan Riau	3,23	1,65	4,80	24,90	2,81	1,42	4,19	25,19	3,19	1,76	4,61	22,82
DKI Jakarta	2,85	2,11	3,59	13,32					2,85	2,11	3,59	13,32
Jawa Barat	5,69	5,04	6,35	5,89	5,00	4,16	5,83	8,56	5,56	5,00	6,11	5,09
Jawa Tengah	6,79	6,05	7,53	5,56	5,84	5,11	6,56	6,36	6,36	5,84	6,88	4,19
DI Yogyakarta	12,01	9,88	14,14	9,05	10,17	6,90	13,44	16,41	11,63	9,81	13,44	7,96
Jawa Timur	6,34	5,66	7,02	5,47	5,73	4,99	6,46	6,55	6,09	5,59	6,59	4,20
Banten	5,08	4,05	6,12	10,37	4,85	3,27	6,43	16,63	5,03	4,15	5,90	8,84
Bali	5,13	3,77	6,49	13,52	9,28	7,00	11,56	12,55	6,24	5,07	7,41	9,55
Nusa Tenggara Barat	8,61	6,61	10,62	11,87	13,20	10,67	15,74	9,79	10,83	9,21	12,44	7,61
Nusa Tenggara Timur	6,18	4,43	7,93	14,47	8,87	7,50	10,24	7,87	8,10	7,00	9,20	6,93
Kalimantan Barat	5,84	4,28	7,40	13,67	6,20	5,20	7,20	8,23	6,06	5,20	6,92	7,24
Kalimantan Tengah	6,06	4,44	7,68	13,62	5,98	4,63	7,33	11,53	6,01	4,97	7,06	8,83
Kalimantan Selatan	6,92	5,38	8,46	11,37	5,31	4,12	6,50	11,43	6,14	5,16	7,12	8,16
Kalimantan Timur	6,30	5,02	7,57	10,34	4,74	3,03	6,44	18,36	5,83	4,80	6,87	9,04
Kalimantan Utara	4,17	1,75	6,59	29,58	2,69	1,41	3,96	24,24	3,64	2,02	5,26	22,70
Sulawesi Utara	4,05	2,82	5,28	15,51	2,96	2,03	3,90	16,07	3,57	2,77	4,37	11,46
Sulawesi Tengah	8,92	6,47	11,37	14,01	7,48	6,27	8,70	8,29	8,00	6,83	9,18	7,51
Sulawesi Selatan	8,83	7,45	10,22	8,00	10,67	9,34	12,00	6,35	9,78	8,82	10,74	5,00
Sulawesi Tenggara	8,06	6,14	9,98	12,16	6,74	5,76	7,71	7,37	7,27	6,30	8,24	6,81
Gorontalo	5,62	3,86	7,38	15,99	7,19	5,50	8,89	12,03	6,47	5,24	7,70	9,67
Sulawesi Barat	4,82	2,14	7,51	28,43	8,89	6,75	11,03	12,28	8,05	6,25	9,84	11,40
Maluku	6,02	4,18	7,85	15,54	7,01	5,33	8,69	12,23	6,58	5,34	7,82	9,62
Maluku Utara	5,52	3,22	7,82	21,27	8,15	6,55	9,75	10,02	7,38	6,06	8,69	9,12
Papua Barat	3,69	2,24	5,13	20,05	7,57	5,51	9,64	13,91	5,90	4,56	7,24	11,56
Papua	5,14	3,71	6,58	14,25	17,00	14,89	19,11	6,32	12,75	11,23	14,26	6,06
Indonesia	6,16	5,91	6,41	2,10	7,06	6,81	7,30	1,76	6,53	6,35	6,71	1,41

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022



HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

" Secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia menempuh pendidikan selama **9,08 tahun** atau setara kelas **9 SMP/ sederajat**"



DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian RLS tertinggi, sedangkan **Papua** memiliki capaian terendah





BAB 5

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia (Kemendikbudristek, 2021). Program tersebut sebagai upaya dalam mendukung pencapaian 9 Agenda Prioritas Pembangunan. Dari program ini diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang bermutu tinggi untuk semua rakyat Indonesia yang dicirikan dengan angka partisipasi yang tinggi pada setiap jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, serta mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan yang akan dibahas dalam bab ini diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), angka naik kelas, angka bertahan, angka melanjutkan, angka putus sekolah, persentase anak tidak sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, dan tingkat penyelesaian sekolah.

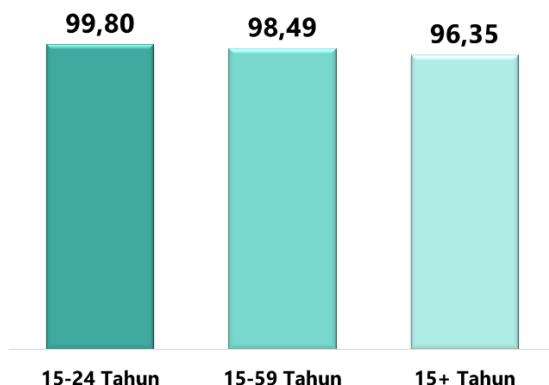
5.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat keefektifan sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan (membaca dan menulis). Kemampuan keaksaraan merupakan kemampuan dasar yang dapat membantu seseorang dalam kegiatan sehari-hari untuk terus belajar, menggali informasi, dan berkomunikasi. Dengan demikian, seseorang dapat menambah pengetahuannya dan keterampilan dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan (UNESCO, 2009).

AMH juga menjadi salah satu indikator target SDGs pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.



Gambar 5.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2022



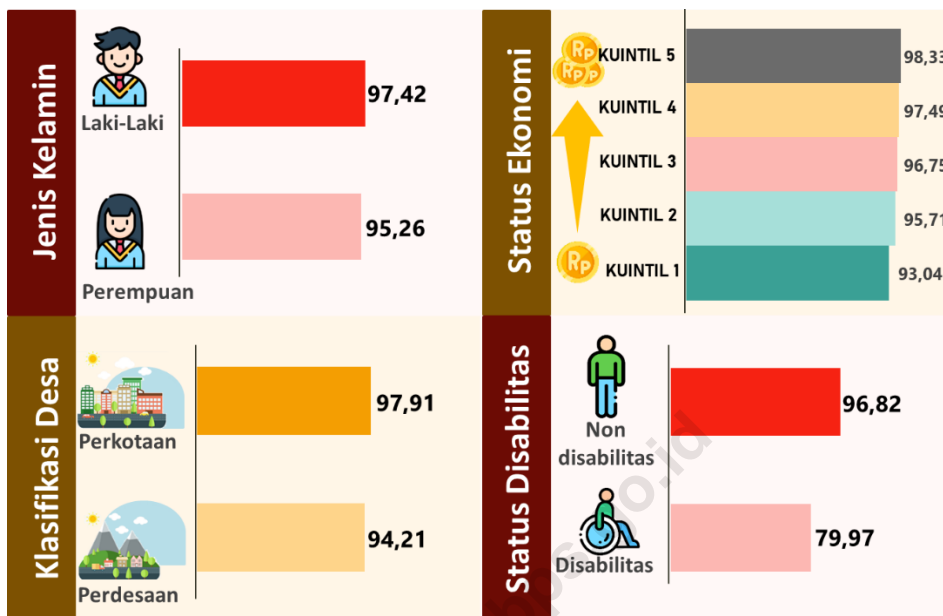
Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Pada Gambar 5.1 dapat dilihat perbandingan capaian AMH untuk setiap kelompok umur, AMH usia 15 tahun keatas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Di tahun 2022, AMH usia 15-24 tahun mencapai 99,80 persen dan AMH usia 15-59 tahun mencapai 98,49 persen sedangkan AMH usia 15 tahun keatas hanya 96,35 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun keatas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan tidak bisa baca tulis. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa capaian AMH 15 tahun keatas pada tiap karakteristik masih terdapat kesenjangan. Capaian AMH 15 tahun keatas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (95,26 persen dibanding 97,42 persen). Sementara itu, penduduk 15 tahun keatas di perdesaan memiliki capaian AMH yang juga lebih rendah dibandingkan perkotaan (94,21 persen dibanding 97,91 persen). Apabila dilihat menurut status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi status ekonominya maka akan semakin tinggi juga capaian AMH 15 tahun keatas. Kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, dimana capaian AMH 15 tahun keatas untuk penduduk yang tidak mengalami disabilitas sebesar 96,82 persen sedangkan yang mengalami disabilitas capaiannya hanya sebesar 79,97 persen.



Gambar 5.2 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2022



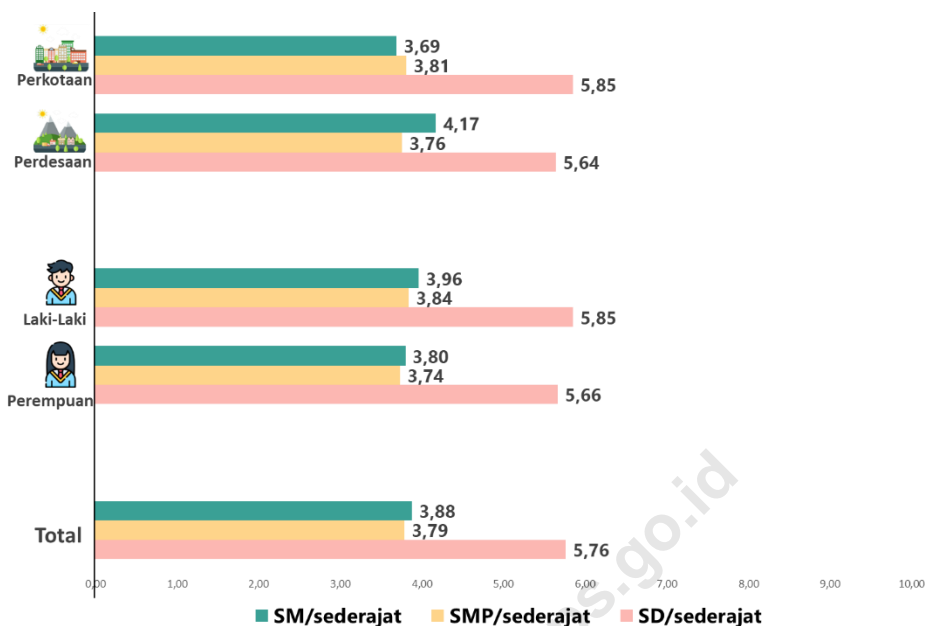
Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Keempat hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan capaian AMH supaya dapat mewujudkan prinsip SDGs yaitu “*leave no one behind*”. Adanya peningkatan kemampuan literasi penduduk akan memberikan *multiplier effect* dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain (UNESCO, 2013).

5.2 Hasil Proses Pendidikan

Indikator yang dapat melihat capaian proses pendidikan penduduk yang bersekolah dapat diukur melalui angka mengulang, angka bertahan dan angka melanjutkan. Angka mengulang yang didefinisikan sebagai proporsi peserta didik yang terdaftar pada suatu tingkat kelas di tahun tertentu dan menduduki kelas yang sama di tahun berikutnya, atau bisa juga disebut proporsi peserta didik yang tinggal kelas.

Gambar 5.3 Angka Mengulang Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2022

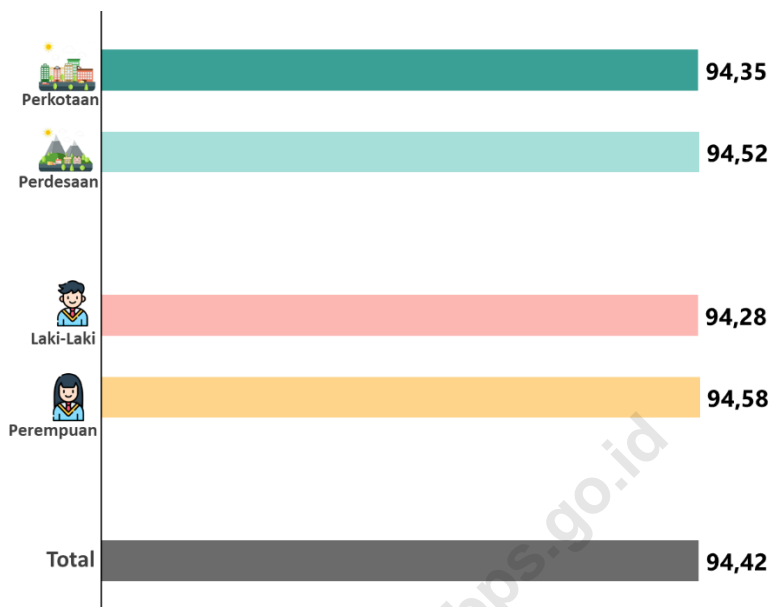


Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Gambar 5.3 menunjukkan angka mengulang paling tinggi yaitu pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, dimana dari 100 siswa terdapat 5 yang tinggal kelas. Persentase angka mengulang pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan, sedangkan jenjang SM/ sederajat angka mengulang di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Sementara itu, angka mengulang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua jenjang pendidikan.

Indikator lain yang menggambarkan capaian proses pendidikan di Indonesia dari sisi positif adalah angka bertahan SD/ Sederajat. Berdasarkan konsep UNESCO (2013) angka ini menunjukkan peluang anak yang baru masuk sekolah dasar untuk dapat bertahan sampai ke kelas akhir. Di Indonesia, kelas akhir untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat merupakan kelas 6, sehingga pada indikator ini yang dihitung adalah peluang bertahan sampai kelas 6 SD/ sederajat. Angka bertahan SD/ Sederajat juga digunakan untuk memantau pelaksanaan pendidikan dasar yang universal. Angka yang mendekati 100 dapat diartikan sebagai rendahnya kejadian mengulang kelas atau putus sekolah di jenjang SD/ sederajat (UNESCO, 2009).

Gambar 5.4 Angka Bertahan Kelas 6 SD/Sederajat Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2022

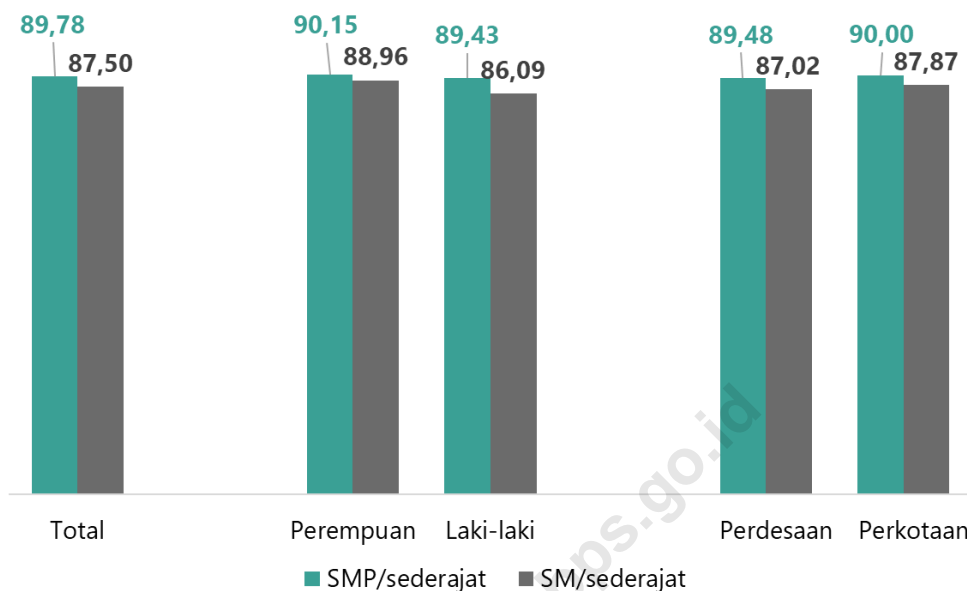


Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Berdasarkan Gambar 5.4 angka bertahan hingga kelas 6 SD/Sederajat mencapai 94,42 persen. Hal ini berarti sekitar 94 dari 100 siswa yang baru masuk SD/Sederajat dapat bertahan untuk tetap bersekolah sampai dengan kelas enam. Apabila dilihat menurut klasifikasi desa, potensi siswa untuk mencapai kelas 6 SD/Sederajat di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa di perkotaan (94,52 persen dibanding 94,35 persen).

Angka melanjutkan pendidikan juga menjadi salah satu indikator positif yang dapat menggambarkan capaian proses pendidikan. Angka melanjutkan ini menggambarkan persentase anak sekolah yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini menjadi indikator output jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih rendah, dan menjadi indikator input apabila dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi.

Gambar 5.5 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

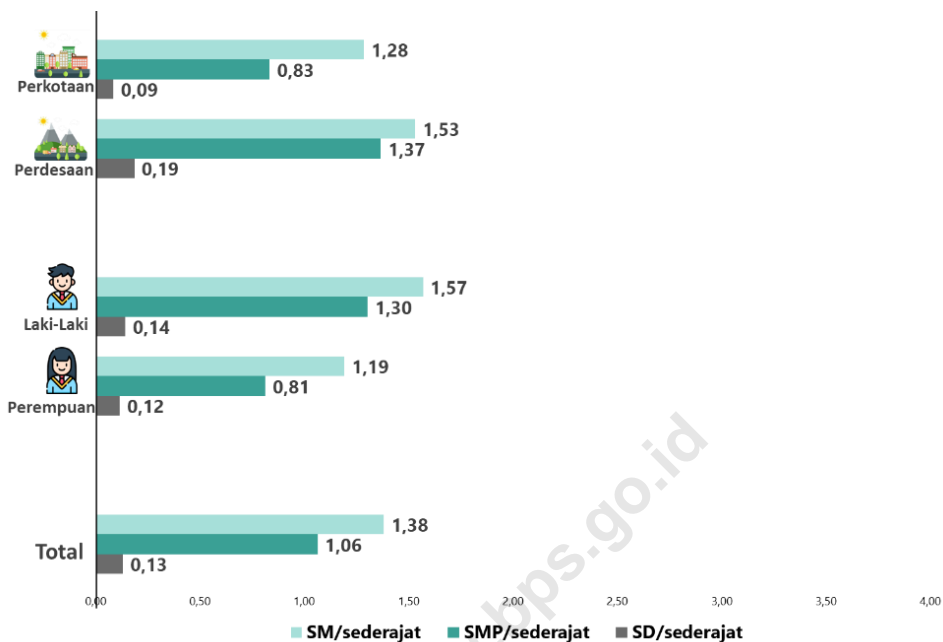
Angka melanjutkan ke jenjang SMP/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 89,78 persen sedangkan jenjang SM/Sederajat capaiannya lebih rendah yaitu sebesar 87,50 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah baik untuk jenjang SMP/Sederajat maupun SM/Sederajat, angka melanjutkan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Sementara itu persentase perempuan yang melanjutkan ke SMP/ sederajat maupun SM/ sederajat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

5.3 Angka Putus Sekolah

Sasaran yang ingin dicapai dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program prioritas nasional adalah memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan. Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Namun demikian, pada Gambar 5.6 terlihat bahwa masih terdapat penduduk yang putus sekolah, baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat



Gambar 5.6 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022



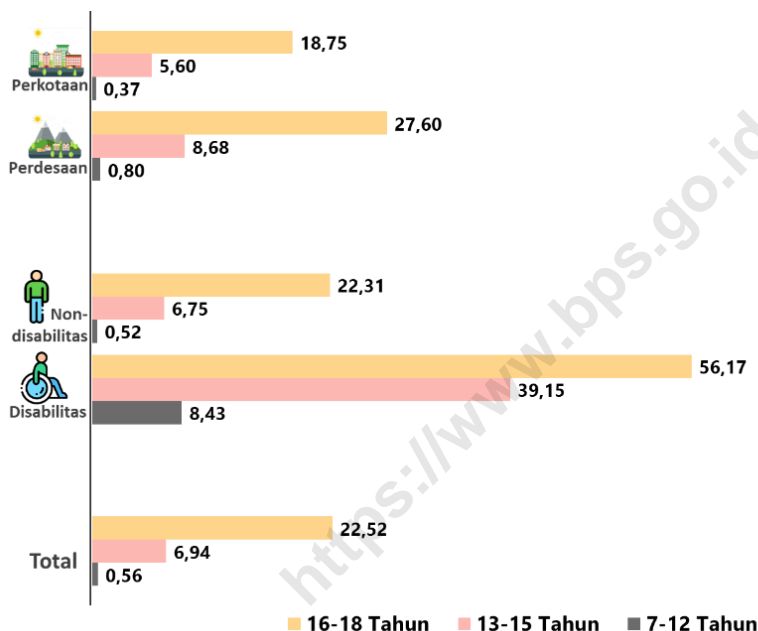
Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat, 10 di antaranya putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, dimana angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan (Okumu, 2008). Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada semua jenjang pendidikan juga lebih besar dibandingkan perempuan.

Salah satu arah kebijakan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 adalah penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), melalui program percepatan pelaksanaan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua anak usia sekolah yang tidak sekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Gambar 5.7 Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Berdasarkan Gambar 5.7 terlihat bahwa semakin bertambah umur, maka persentase anak tidak sekolah juga semakin tinggi. Persentase anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, terdapat sekitar 22 anak yang tidak sekolah. Sementara itu jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak tidak sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Perbedaan yang cukup menonjol dapat dilihat berdasarkan status disabilitas. Kesenjangan tersebut terlihat semakin melebar seiring dengan bertambahnya umur, dimana pada kelompok umur 16-18 tahun terdapat 22,31 persen penduduk non disabilitas yang tidak sekolah. Sementara itu, persentase

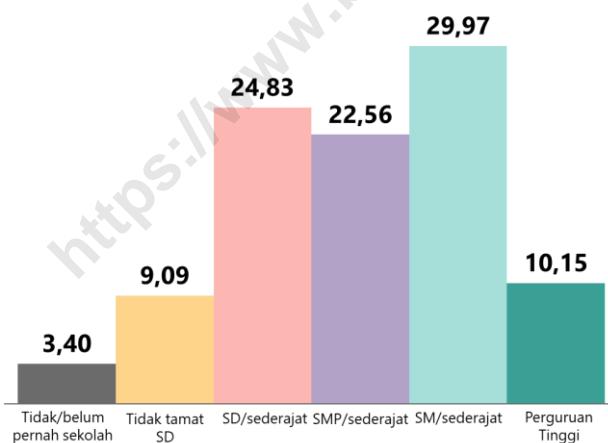


anak tidak sekolah pada penyandang disabilitas usia 16-18 tahun mencapai 2 kali lipat dari mereka yang tidak mengalami disabilitas yaitu 56,17 persen.

5.4 Tingkat Pendidikan

Secara umum, mayoritas penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun atau tamatan SMP/ sederajat ke atas (62,68 persen). Berdasarkan data Susenas 2022 dapat diketahui bahwa dari 100 penduduk 15 tahun keatas, 22 diantaranya tamatan SMP/ sederajat, 29 merupakan tamatan SM/ sederajat dan 10 yang menamatkan pendidikannya sampai jenjang Perguruan Tinggi, sedangkan sisanya tamatan SD/ sederajat ke bawah.

Gambar 5.8 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2022

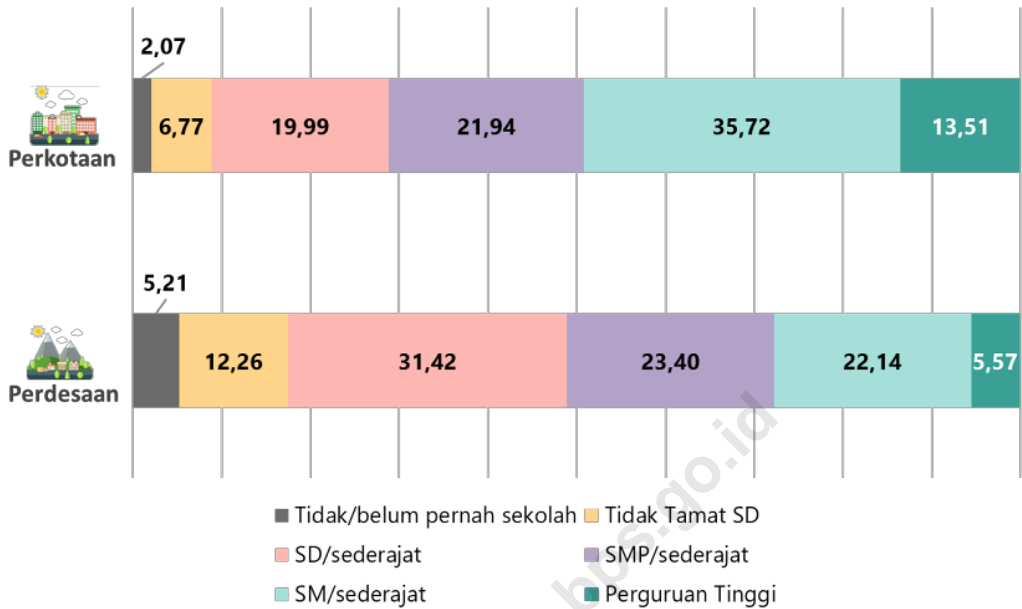


Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Dari Gambar 5.9 dapat dilihat terdapat perbedaan capaian tingkat pendidikan antara penduduk yang berada di perdesaan dan perkotaan. Di perkotaan sebagian besar penduduk usia 15 tahun keatas merupakan tamatan SM/ sederajat. Sementara itu di perdesaan didominasi oleh tamatan SD/ sederajat. Kesenjangan yang cukup jauh juga terlihat pada penduduk yang tamat Perguruan Tinggi, di perkotaan mencapai 13,51 persen sedangkan di perdesaan hanya 5,57 persen.



Gambar 5.9 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, 2022

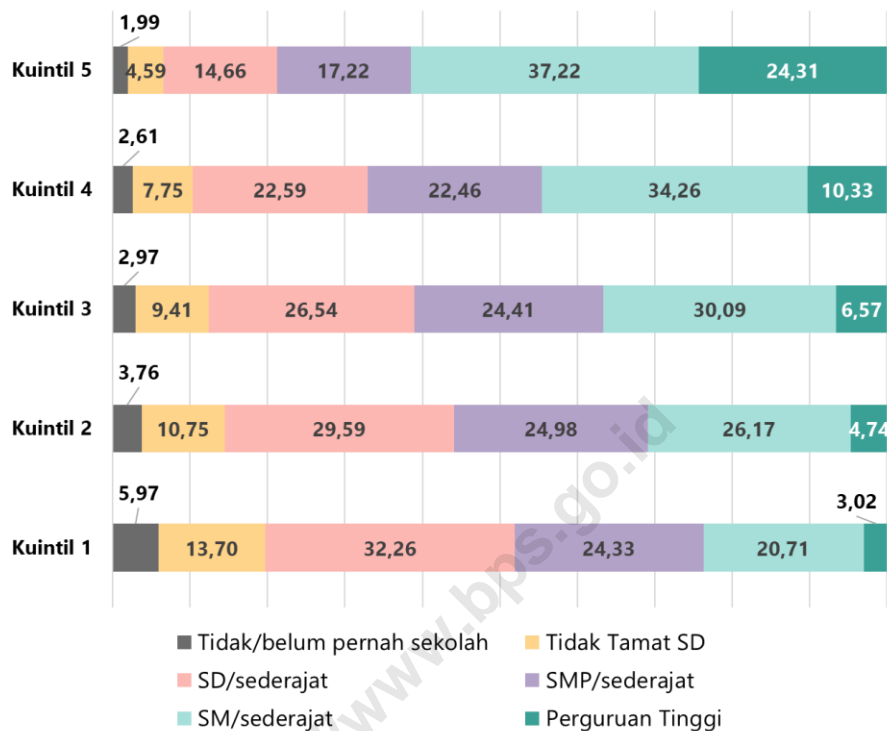


Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Sebagaimana tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi.



Gambar 5.10 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi, 2022

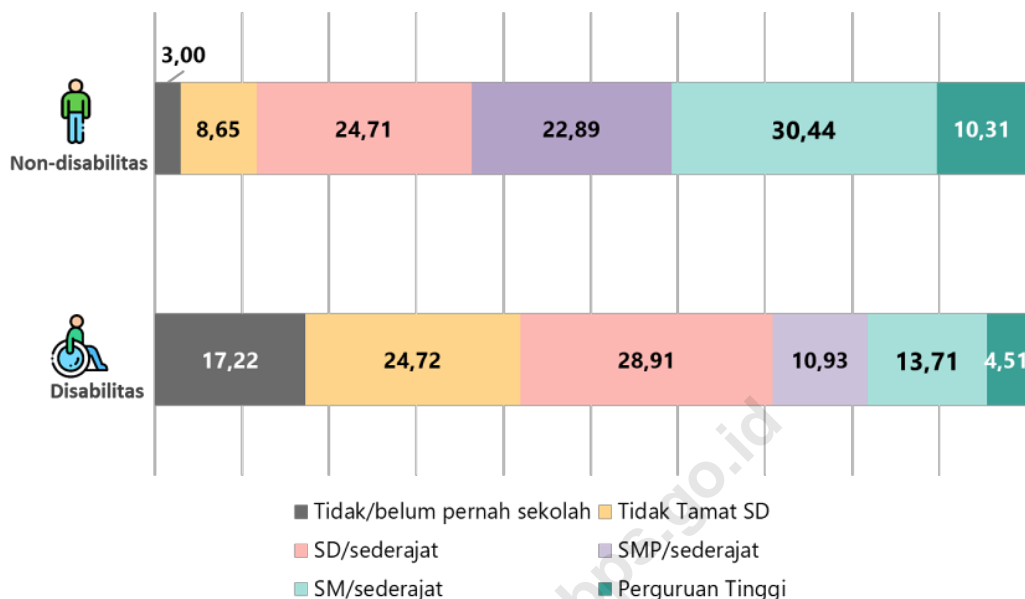


Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Gambar 5.10 menunjukkan bahwa status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Terlihat pola yang menarik dimana pada jenjang pendidikan SM/Sederajat dan Perguruan Tinggi, persentasenya semakin banyak sejalan dengan semakin baiknya status ekonomi. Sebaliknya persentase penduduk tamatan SD/ sederajat kebawah terlihat semakin besar persentasenya pada kuintil 1. Hal ini berarti penduduk pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5) didominasi oleh tamatan SM/ sederajat keatas sedangkan pada kuintil 1 didominasi oleh penduduk yang tamat SD/ sederajat kebawah.



Gambar 5.11 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Disabilitas, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Kesenjangan juga terlihat antara penduduk yang mengalami disabilitas dan tidak mengalami disabilitas. Dari Gambar 5.11 dapat dilihat bahwa mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD/ sederajat ke bawah (70,85 persen), sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP/ sederajat ke atas (63,64 persen).

5.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah serta kualitas sumber daya manusianya. Capaian RLS yang tinggi menunjukkan sistem pendidikan berjalan semakin baik (Unesco, 2009). Oleh karena itu, RLS menjadi salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Gambar 5.12. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

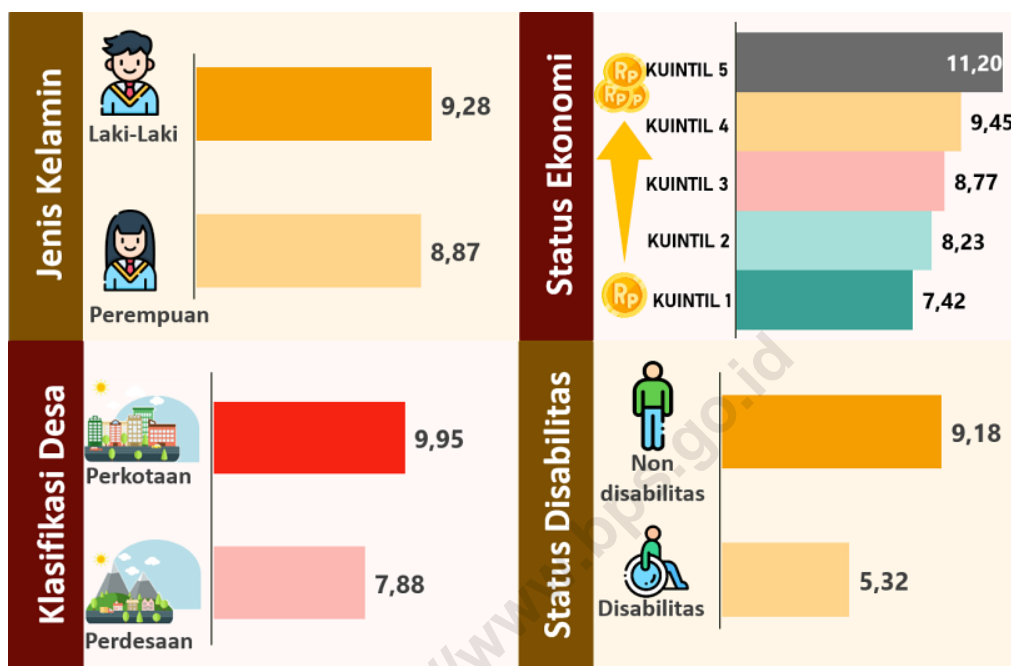
Nilai RLS pada tahun 2022 mencapai 9,08 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Dengan melihat pola pergerakan capaian RLS antar tahun, maka diharapkan dalam waktu dua tahun kedepan capaian RLS bertambah 0,1 tahun. Dengan demikian, target RLS penduduk usia 15 tahun keatas yang tertera pada RPJMN sebesar 9,18 tahun di tahun 2024 diharapkan dapat tercapai.

Jika dilihat sebaran RLS pada setiap provinsi, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian RLS tertinggi dibanding provinsi lainnya. Nilai RLS di provinsi tersebut sudah mencapai 11,30 tahun atau setara dengan kelas 11 SMA/ sederajat. Capaian ini menandakan tingkat pendidikan penduduk di DKI Jakarta sudah mulai mendekati target wajib belajar 12 tahun. Namun, jika dilihat provinsi dengan RLS terendah (Provinsi Papua) capaiannya baru sebesar 7,31 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat.

Status ekonomi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pendidikan (Ghumus dan Chudgar, 2015). Hal ini sesuai dengan gambaran RLS menurut status ekonomi rumah tangga, dimana semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi pula capaian RLS. Penduduk yang berada di kuintil 5 memiliki capaian RLS sebesar 11,20 tahun atau setara kelas 11 SM/ sederajat. Sementara

itu, perbedaan yang cukup jauh terjadi pada penduduk yang berada di kuintil 1 dimana capaiannya hanya 7,42 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat.

Gambar 5.13. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Karakteristik Demografi, 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Sementara itu dari Gambar 5.13 juga diketahui terdapat perbedaan yang cukup besar capaian RLS berdasarkan klasifikasi desa dan status disabilitas. RLS penduduk 15 tahun keatas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Dimana di perkotaan mencapai 9,95 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat sedangkan di perdesaan hanya 7,88 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat. Penduduk yang mengalami disabilitas juga memiliki capaian yang jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak mengalami disabilitas. Hal ini terlihat pada capaian RLS penduduk yang mengalami disabilitas hanya 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD/ sederajat sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat.

5.6 Tingkat Penyelesaian Pendidikan

Tingkat penyelesaian pendidikan merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang

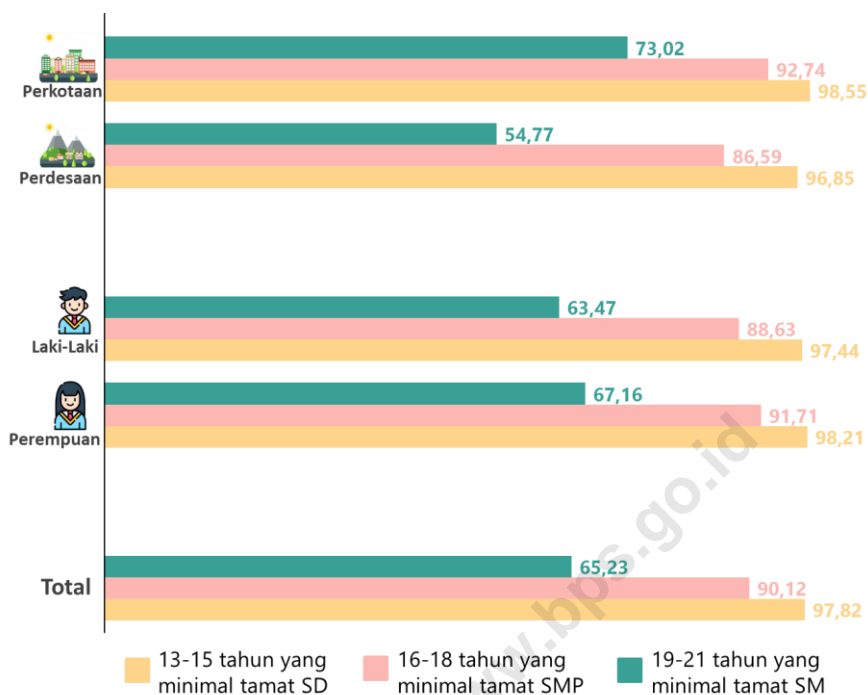


sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang digunakan dalam penghitungan antara 1 sampai 3 tahun sejak menamatkan jenjang pendidikan (Bappenas, 2020). Sebagai contoh untuk penetapan rentang usia tingkat penyelesaian SD/ sederajat, usia wajib belajar yang ditetapkan di Indonesia usia masuk sekolah dasar adalah 7 tahun, jika diasumsikan siswa lulus tepat waktu maka akan lulus di usia 12 tahun. Maka rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat penyelesaian SD/ sederajat adalah usia 13 tahun ($12+1$ tahun) sampai dengan 15 tahun ($12+3$ tahun). Sehingga, terdapat tiga umur referensi pada penghitungan tingkat penyelesaian sekolah di Indonesia, yaitu: tingkat penyelesaian SD/ Sederajat penduduk umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP/ Sederajat penduduk umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SM/ Sederajat penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan tingkat penyelesaian sekolah adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran (*school age*).

Berdasarkan Gambar 5.14 dapat diketahui bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang minimal menamatkan pendidikan SD/ sederajat adalah 97,82 persen yang artinya dari 100 orang penduduk 13-15 tahun ada sebanyak 97 orang yang minimal tamat SD/ sederajat. Sementara itu, penduduk usia 19-21 tahun yang minimal menamatkan SM/ sederajat hanya sebesar 65,23 persen. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa capaian angka penyelesaian pendidikan cenderung mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.



Gambar 5.14 Persentase Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2022

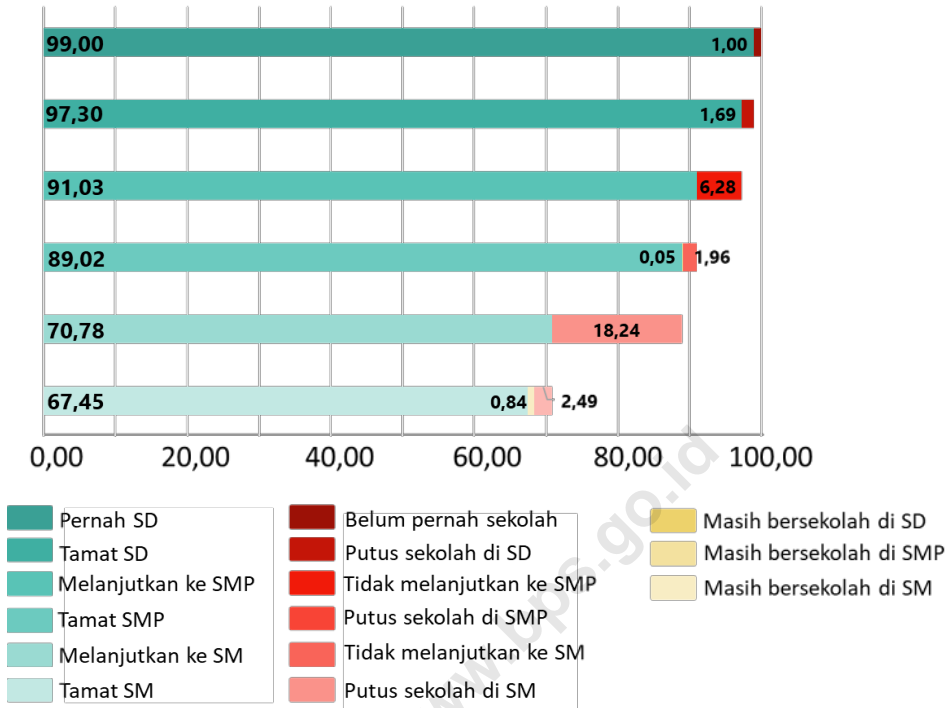


Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Tingkat penyelesaian sekolah penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan. Kesenjangan paling lebar antara perkotaan dan perdesaan terlihat pada jenjang SM/ sederajat. Persentase penduduk umur 19-21 tahun yang tinggal di perkotaan yang minimal tamat SM/ sederajat mencapai 73,02 persen sedangkan pada penduduk yang tinggal di perdesaan hanya sebesar 54,77 persen. Sementara itu, tingkat penyelesaian sekolah pada penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Dari Gambar 5.15 dapat dilihat alur pendidikan penduduk usia 21-24 tahun dari jenjang SD/ Sederajat sampai SM/ Sederajat. Terdapat sekitar 99,00 persen penduduk usia 21-24 tahun pernah berada pada jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Dari besaran tersebut, 97,30 persen diantaranya tamat SD/ Sederajat dan hanya 91,03 persen yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ Sederajat.

Gambar 5.15 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 21-24 Tahun, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Kemudian dari 91,03 persen siswa yang melanjutkan ke SMP/Sederajat terdapat 89,02 persen siswa berhasil menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Namun dari 89,02 persen tersebut, hanya 70,78 persen yang melanjutkan ke jenjang SM/Sederajat. Selanjutnya hanya ada sekitar 67,45 persen yang sudah menamatkan jenjang SM/Sederajat, 0,84 persen masih bersekolah dan 2,49 persen putus sekolah saat menempuh jenjang SM/Sederajat.

Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah besarnya persentase penduduk yang tamat SMP/ sederajat namun tidak melanjutkan ke jenjang SM/ sederajat (18,24 persen). Hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya kemampuan akademik siswa, serta faktor lainnya.

Tabel 5.1 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, 2022

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun Keatas
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,80	98,49	96,35
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	99,78	98,83	97,42
Perempuan	99,81	98,15	95,26
Status Disabilitas			
Disabilitas	94,01	89,47	79,97
Nondisabilitas	99,84	98,61	96,82
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	99,67	97,14	93,04
Kuintil 2	99,75	98,33	95,71
Kuintil 3	99,81	98,61	96,75
Kuintil 4	99,87	98,96	97,49
Kuintil 5	99,88	99,23	98,33
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	99,95	99,33	97,91
Perdesaan	99,60	97,35	94,21

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.2 Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,76	3,79	3,88
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	5,85	3,84	3,96
Perempuan	5,66	3,74	3,80
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,85	3,81	3,69
Perdesaan	5,64	3,76	4,17

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.3 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Karakteristik	Jenjang Pendidikan	
	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Total	89,78	87,50
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	89,43	86,09
Perempuan	90,15	88,96
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	90,00	87,87
Perdesaan	89,48	87,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.4 Angka Anak Tidak Sekolah (OOSC) Menurut Kelompok Umur, 2022

Karakteristik	Kelompok Umur		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,56	6,94	22,52
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	0,62	7,77	24,56
Perempuan	0,49	6,06	20,35
Status Disabilitas			
Disabilitas	8,43	39,15	56,17
Nondisabilitas	0,52	6,75	22,31
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,37	5,60	18,75
Perdesaan	0,80	8,68	27,60

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.5.1 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,90	99,82	99,42
Sumatera Utara	99,92	99,84	99,54
Sumatera Barat	99,93	99,85	99,50
Riau	99,96	99,97	99,55
Jambi	99,91	99,84	99,04
Sumatera Selatan	99,96	99,81	99,50
Bengkulu	99,84	99,80	99,01
Lampung	99,79	99,61	98,53
Kep. Bangka Belitung	99,89	99,59	98,77
Kep. Riau	99,98	99,94	99,42
DKI Jakarta	99,93	99,90	99,69
Jawa Barat	99,98	99,67	98,68
Jawa Tengah	99,97	98,64	95,85
DI Yogyakarta	99,95	99,57	96,71
Jawa Timur	99,97	98,56	96,06
Banten	99,94	99,55	98,53
Bali	99,97	99,97	97,29
Nusa Tenggara Barat	99,90	95,28	91,11
Nusa Tenggara Timur	99,89	99,19	97,99
Kalimantan Barat	99,96	98,93	96,93
Kalimantan Tengah	99,96	99,94	99,41
Kalimantan Selatan	99,93	99,65	99,09
Kalimantan Timur	99,96	99,87	99,27
Kalimantan Utara	99,76	99,40	98,91
Sulawesi Utara	99,90	99,91	99,89
Sulawesi Tengah	99,74	99,88	99,59
Sulawesi Selatan	99,94	98,89	97,22
Sulawesi Tenggara	99,78	99,61	97,68
Gorontalo	99,87	99,52	99,34
Sulawesi Barat	99,77	98,32	96,67
Maluku	99,94	99,92	99,72
Maluku Utara	99,88	99,86	99,58
Papua Barat	99,88	99,59	99,38
Papua	99,79	98,94	98,61
Indonesia	99,95	99,33	97,91

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.5.2 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,96	99,52	97,64
Sumatera Utara	99,92	99,23	98,55
Sumatera Barat	99,81	99,87	99,09
Riau	99,90	99,88	98,92
Jambi	99,90	99,36	97,64
Sumatera Selatan	99,95	99,32	98,13
Bengkulu	99,86	99,34	97,20
Lampung	99,95	99,18	96,62
Kep. Bangka Belitung	99,88	98,65	97,37
Kep. Riau	99,79	97,91	96,04
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,95	99,44	97,78
Jawa Tengah	99,95	97,43	92,53
DI Yogyakarta	99,89	97,85	90,66
Jawa Timur	99,90	96,12	89,95
Banten	99,83	98,90	97,05
Bali	99,84	96,86	91,17
Nusa Tenggara Barat	99,86	91,69	86,77
Nusa Tenggara Timur	99,03	96,60	93,44
Kalimantan Barat	99,84	95,65	92,22
Kalimantan Tengah	99,76	99,93	98,91
Kalimantan Selatan	99,90	99,39	97,65
Kalimantan Timur	99,98	99,13	98,31
Kalimantan Utara	99,30	97,37	95,58
Sulawesi Utara	99,92	99,82	99,72
Sulawesi Tengah	99,86	98,79	97,33
Sulawesi Selatan	99,67	94,54	90,02
Sulawesi Tenggara	99,99	97,41	94,70
Gorontalo	99,84	98,52	97,69
Sulawesi Barat	99,46	95,99	93,09
Maluku	99,88	99,27	99,14
Maluku Utara	99,87	99,65	98,45
Papua Barat	99,51	97,66	96,40
Papua	89,01	75,04	74,49
Indonesia	99,60	97,35	94,21

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.5.3 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Laki-Laki

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,91	99,73	98,90
Sumatera Utara	99,88	99,69	99,50
Sumatera Barat	99,91	99,90	99,65
Riau	99,95	99,93	99,46
Jambi	99,88	99,69	98,77
Sumatera Selatan	99,97	99,58	99,16
Bengkulu	99,82	99,53	98,56
Lampung	99,94	99,53	98,05
Kep. Bangka Belitung	99,90	99,20	98,72
Kep. Riau	99,97	99,87	99,48
DKI Jakarta	99,90	99,86	99,83
Jawa Barat	99,95	99,70	99,03
Jawa Tengah	99,97	98,67	96,20
DI Yogyakarta	99,87	99,50	97,15
Jawa Timur	99,92	98,25	95,41
Banten	99,97	99,64	98,76
Bali	100,00	99,58	97,45
Nusa Tenggara Barat	99,76	94,94	91,38
Nusa Tenggara Timur	99,18	97,43	95,26
Kalimantan Barat	99,82	97,59	95,48
Kalimantan Tengah	99,87	99,93	99,43
Kalimantan Selatan	99,87	99,66	99,07
Kalimantan Timur	99,93	99,72	99,42
Kalimantan Utara	99,66	98,79	98,26
Sulawesi Utara	99,97	99,86	99,79
Sulawesi Tengah	99,83	99,20	98,46
Sulawesi Selatan	99,68	96,78	94,32
Sulawesi Tenggara	99,99	98,40	96,69
Gorontalo	99,92	98,81	98,40
Sulawesi Barat	99,37	97,38	95,72
Maluku	99,84	99,61	99,56
Maluku Utara	99,97	99,83	99,18
Papua Barat	99,51	98,70	98,06
Papua	92,26	83,55	82,96
Indonesia	99,78	98,83	97,42

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.5.4 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,97	99,50	97,60
Sumatera Utara	99,97	99,45	98,73
Sumatera Barat	99,83	99,82	98,93
Riau	99,89	99,91	98,88
Jambi	99,93	99,35	97,41
Sumatera Selatan	99,93	99,42	98,12
Bengkulu	99,88	99,45	97,01
Lampung	99,85	99,11	96,41
Kep. Bangka Belitung	99,87	99,17	97,58
Kep. Riau	99,95	99,57	98,56
DKI Jakarta	99,97	99,94	99,55
Jawa Barat	99,99	99,55	97,93
Jawa Tengah	99,95	97,45	92,34
DI Yogyakarta	100,00	98,81	93,21
Jawa Timur	99,96	96,71	91,28
Banten	99,84	99,13	97,54
Bali	99,87	98,60	93,61
Nusa Tenggara Barat	100,00	92,08	86,59
Nusa Tenggara Timur	99,36	97,15	94,01
Kalimantan Barat	99,95	96,08	92,36
Kalimantan Tengah	99,82	99,95	98,78
Kalimantan Selatan	99,97	99,37	97,63
Kalimantan Timur	100,00	99,55	98,49
Kalimantan Utara	99,52	98,54	97,09
Sulawesi Utara	99,84	99,87	99,84
Sulawesi Tengah	99,80	99,09	97,63
Sulawesi Selatan	99,92	96,32	92,35
Sulawesi Tenggara	99,83	98,03	94,88
Gorontalo	99,77	99,11	98,44
Sulawesi Barat	99,70	95,50	91,84
Maluku	99,98	99,51	99,24
Maluku Utara	99,77	99,59	98,35
Papua Barat	99,83	98,20	97,18
Papua	91,78	79,27	79,18
Indonesia	99,81	98,15	95,26

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.5.5 Angka Melek Huruf Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022
Perkotaan+Perdesaan, Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,94	99,62	98,25
Sumatera Utara	99,92	99,57	99,11
Sumatera Barat	99,87	99,86	99,29
Riau	99,92	99,92	99,18
Jambi	99,90	99,52	98,10
Sumatera Selatan	99,95	99,50	98,65
Bengkulu	99,85	99,49	97,80
Lampung	99,90	99,32	97,25
Kep. Bangka Belitung	99,88	99,18	98,17
Kep. Riau	99,96	99,72	99,02
DKI Jakarta	99,93	99,90	99,69
Jawa Barat	99,97	99,62	98,49
Jawa Tengah	99,96	98,06	94,26
DI Yogyakarta	99,93	99,15	95,15
Jawa Timur	99,94	97,48	93,32
Banten	99,91	99,39	98,16
Bali	99,94	99,09	95,53
Nusa Tenggara Barat	99,88	93,51	88,97
Nusa Tenggara Timur	99,27	97,29	94,63
Kalimantan Barat	99,89	96,86	93,96
Kalimantan Tengah	99,85	99,94	99,12
Kalimantan Selatan	99,92	99,52	98,36
Kalimantan Timur	99,96	99,64	98,97
Kalimantan Utara	99,60	98,67	97,71
Sulawesi Utara	99,91	99,87	99,81
Sulawesi Tengah	99,82	99,14	98,05
Sulawesi Selatan	99,80	96,55	93,31
Sulawesi Tenggara	99,91	98,22	95,79
Gorontalo	99,85	98,96	98,42
Sulawesi Barat	99,52	96,46	93,82
Maluku	99,91	99,56	99,40
Maluku Utara	99,87	99,71	98,78
Papua Barat	99,66	98,46	97,64
Papua	92,04	81,53	81,19
Indonesia	99,80	98,49	96,35

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.6 Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,56	6,29	5,83
Sumatera Utara	6,26	4,33	4,93
Sumatera Barat	5,00	3,62	4,89
Riau	3,90	3,58	3,73
Jambi	6,74	6,73	6,04
Sumatera Selatan	5,77	4,69	4,37
Bengkulu	5,21	5,19	5,89
Lampung	2,54	3,11	2,00
Kep. Bangka Belitung	2,76	2,34	3,23
Kep. Riau	5,75	5,71	5,29
DKI Jakarta	2,66	2,65	2,46
Jawa Barat	7,43	3,47	4,29
Jawa Tengah	5,00	3,40	3,13
DI Yogyakarta	2,48	2,57	1,69
Jawa Timur	6,35	3,49	3,19
Banten	10,04	5,14	3,86
Bali	5,11	3,68	3,61
Nusa Tenggara Barat	2,41	3,36	2,79
Nusa Tenggara Timur	3,50	3,22	3,80
Kalimantan Barat	5,34	3,91	4,89
Kalimantan Tengah	6,31	3,46	3,28
Kalimantan Selatan	2,28	2,35	1,58
Kalimantan Timur	5,32	2,73	2,49
Kalimantan Utara	5,15	5,44	5,18
Sulawesi Utara	7,30	5,63	5,26
Sulawesi Tengah	5,78	4,02	4,41
Sulawesi Selatan	5,50	4,23	4,83
Sulawesi Tenggara	4,28	1,09	3,28
Gorontalo	2,93	1,94	3,60
Sulawesi Barat	4,46	5,94	4,21
Maluku	4,11	5,03	5,37
Maluku Utara	6,23	5,13	6,49
Papua Barat	6,40	3,58	5,65
Papua	8,06	5,57	5,09
Indonesia	5,76	3,79	3,88

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.7.1 Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2022

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	92,81	93,83	93,47
Sumatera Utara	93,69	94,59	94,10
Sumatera Barat	96,29	94,54	95,38
Riau	97,66	95,20	96,15
Jambi	93,79	93,70	93,73
Sumatera Selatan	95,63	93,36	94,20
Bengkulu	97,55	93,88	95,04
Lampung	97,61	97,36	97,44
Kep. Bangka Belitung	97,93	96,34	97,24
Kep. Riau	94,60	97,99	94,92
DKI Jakarta	97,51	-	97,51
Jawa Barat	93,45	91,29	93,00
Jawa Tengah	95,01	95,57	95,28
DI Yogyakarta	97,78	96,60	97,49
Jawa Timur	93,38	94,15	93,71
Banten	90,22	90,13	90,20
Bali	94,22	95,58	94,62
Nusa Tenggara Barat	97,41	97,58	97,50
Nusa Tenggara Timur	97,76	96,08	96,47
Kalimantan Barat	95,12	94,68	94,83
Kalimantan Tengah	95,19	93,45	94,16
Kalimantan Selatan	97,35	98,41	97,89
Kalimantan Timur	95,12	94,62	94,95
Kalimantan Utara	97,99	89,77	95,06
Sulawesi Utara	92,49	93,76	93,10
Sulawesi Tengah	88,62	96,02	93,88
Sulawesi Selatan	95,14	94,14	94,60
Sulawesi Tenggara	95,42	95,79	95,67
Gorontalo	97,42	96,58	96,97
Sulawesi Barat	96,50	94,73	95,09
Maluku	95,41	96,33	95,97
Maluku Utara	93,27	94,26	94,00
Papua Barat	93,30	92,93	93,08
Papua	88,47	91,82	90,74
Indonesia	94,35	94,52	94,42

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.7.2 Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	93,11	93,85	93,47
Sumatera Utara	93,71	94,53	94,10
Sumatera Barat	95,34	95,42	95,38
Riau	95,92	96,39	96,15
Jambi	93,42	94,06	93,73
Sumatera Selatan	93,39	95,06	94,20
Bengkulu	95,26	94,82	95,04
Lampung	97,42	97,46	97,44
Kep. Bangka Belitung	97,48	96,99	97,24
Kep. Riau	93,30	96,57	94,92
DKI Jakarta	97,43	97,59	97,51
Jawa Barat	93,17	92,82	93,00
Jawa Tengah	94,93	95,64	95,28
DI Yogyakarta	97,42	97,55	97,49
Jawa Timur	93,77	93,65	93,71
Banten	89,78	90,63	90,20
Bali	94,62	94,61	94,62
Nusa Tenggara Barat	98,16	96,84	97,50
Nusa Tenggara Timur	96,26	96,68	96,47
Kalimantan Barat	94,47	95,22	94,83
Kalimantan Tengah	93,92	94,42	94,16
Kalimantan Selatan	98,21	97,55	97,89
Kalimantan Timur	94,29	95,66	94,95
Kalimantan Utara	94,81	95,32	95,06
Sulawesi Utara	93,30	92,90	93,10
Sulawesi Tengah	93,63	94,14	93,88
Sulawesi Selatan	94,29	94,92	94,60
Sulawesi Tenggara	95,39	95,96	95,67
Gorontalo	97,30	96,62	96,97
Sulawesi Barat	95,55	94,63	95,09
Maluku	95,62	96,36	95,97
Maluku Utara	94,21	93,77	94,00
Papua Barat	92,87	93,29	93,08
Papua	90,52	90,98	90,74
Indonesia	94,28	94,58	94,42

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.8 Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Melanjutkan ke SMP/ sederajat	Melanjutkan ke SM/ sederajat
(1)	(2)	(4)
Aceh	88,68	82,89
Sumatera Utara	89,24	89,57
Sumatera Barat	90,21	94,20
Riau	94,90	90,30
Jambi	87,65	87,52
Sumatera Selatan	91,53	89,16
Bengkulu	91,06	92,42
Lampung	95,31	89,92
Kep. Bangka Belitung	97,26	91,09
Kep. Riau	87,80	86,67
DKI Jakarta	93,89	87,92
Jawa Barat	85,86	82,80
Jawa Tengah	89,75	87,72
DI Yogyakarta	96,63	88,85
Jawa Timur	90,12	85,53
Banten	84,71	85,99
Bali	96,86	90,43
Nusa Tenggara Barat	94,09	91,34
Nusa Tenggara Timur	92,04	90,59
Kalimantan Barat	91,64	89,93
Kalimantan Tengah	88,05	88,72
Kalimantan Selatan	94,90	92,35
Kalimantan Timur	92,18	93,10
Kalimantan Utara	93,30	93,20
Sulawesi Utara	88,75	88,78
Sulawesi Tengah	92,27	90,12
Sulawesi Selatan	90,28	90,39
Sulawesi Tenggara	94,81	95,62
Gorontalo	90,49	95,86
Sulawesi Barat	92,11	89,70
Maluku	94,73	90,67
Maluku Utara	91,44	88,71
Papua Barat	92,13	92,23
Papua	84,15	77,26
Indonesia	89,78	87,50

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.9 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,19	0,33	0,83
Sumatera Utara	NA	0,98	1,22
Sumatera Barat	0,10	0,60	1,28
Riau	NA	1,08	1,25
Jambi	NA	0,65	1,25
Sumatera Selatan	NA	1,34	1,36
Bengkulu	NA	0,83	1,97
Lampung	NA	1,43	2,59
Kep. Bangka Belitung	NA	1,26	3,62
Kep. Riau	NA	NA	2,14
DKI Jakarta	NA	NA	2,05
Jawa Barat	0,08	1,22	1,30
Jawa Tengah	NA	0,52	1,34
DI Yogyakarta	NA	NA	NA
Jawa Timur	NA	1,46	1,38
Banten	NA	0,70	1,53
Bali	NA	NA	1,10
Nusa Tenggara Barat	NA	0,98	1,22
Nusa Tenggara Timur	0,30	1,81	1,99
Kalimantan Barat	NA	0,78	1,09
Kalimantan Tengah	NA	1,28	1,40
Kalimantan Selatan	NA	1,18	2,13
Kalimantan Timur	NA	0,25	NA
Kalimantan Utara	NA	NA	2,04
Sulawesi Utara	NA	1,32	1,32
Sulawesi Tengah	0,38	1,27	1,41
Sulawesi Selatan	0,08	1,58	1,46
Sulawesi Tenggara	0,16	1,68	1,03
Gorontalo	NA	1,24	1,29
Sulawesi Barat	0,36	1,73	1,51
Maluku	NA	0,41	0,68
Maluku Utara	0,33	NA	1,32
Papua Barat	0,60	NA	1,02
Papua	2,38	3,22	0,83
Indonesia	0,13	1,06	1,38

Keterangan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.10 Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	Kelompok Umur		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,32	3,13	14,30
Sumatera Utara	0,37	4,73	12,41
Sumatera Barat	0,28	5,10	16,45
Riau	0,56	5,50	18,23
Jambi	0,29	7,25	20,96
Sumatera Selatan	0,55	7,67	23,99
Bengkulu	0,31	4,52	20,05
Lampung	0,40	6,51	25,17
Kep. Bangka Belitung	0,25	11,42	22,56
Kep. Riau	NA	2,53	13,06
DKI Jakarta	NA	4,29	13,78
Jawa Barat	0,53	8,53	27,16
Jawa Tengah	0,31	7,49	25,41
DI Yogyakarta	0,21	2,07	10,26
Jawa Timur	0,25	5,41	24,58
Banten	0,55	6,62	24,68
Bali	0,23	4,33	12,95
Nusa Tenggara Barat	0,35	4,91	21,66
Nusa Tenggara Timur	0,79	8,32	24,50
Kalimantan Barat	1,13	11,07	26,00
Kalimantan Tengah	0,46	7,99	26,42
Kalimantan Selatan	0,47	10,00	21,56
Kalimantan Timur	NA	2,18	11,56
Kalimantan Utara	NA	7,46	15,87
Sulawesi Utara	0,42	7,10	19,69
Sulawesi Tengah	1,07	8,35	25,79
Sulawesi Selatan	0,58	9,16	22,79
Sulawesi Tenggara	0,93	7,60	20,18
Gorontalo	1,42	9,98	32,07
Sulawesi Barat	2,00	12,63	26,44
Maluku	0,37	2,88	16,29
Maluku Utara	0,50	3,03	19,00
Papua Barat	0,83	3,98	18,27
Papua	7,30	21,67	34,87
Indonesia	0,56	6,94	22,52

Keterangan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.11 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022

Provinsi	Jenjang Pendidikan					
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)			(3)		(4)
Aceh	1,31	8,24	20,89	23,92	32,44	13,19
Sumatera Utara	1,55	6,90	17,63	22,71	40,53	10,67
Sumatera Barat	1,46	11,97	19,69	21,28	32,58	13,02
Riau	2,28	7,16	24,06	21,95	33,57	10,98
Jambi	2,82	7,42	26,68	23,89	29,52	9,67
Sumatera Selatan	2,00	10,73	27,96	20,44	30,50	8,38
Bengkulu	2,15	10,79	24,24	21,80	28,49	12,53
Lampung	1,93	12,04	25,44	26,61	26,93	7,07
Kep. Bangka Belitung	2,16	15,07	25,85	17,93	30,61	8,38
Kep. Riau	1,89	4,91	19,07	17,32	43,93	12,88
DKI Jakarta	0,95	2,87	11,92	17,77	48,56	17,94
Jawa Barat	2,00	6,67	28,49	23,76	29,85	9,23
Jawa Tengah	3,80	11,36	28,15	24,26	25,05	7,37
DI Yogyakarta	3,14	10,72	15,49	20,23	34,66	15,76
Jawa Timur	5,03	10,52	26,51	22,59	26,16	9,19
Banten	2,78	6,62	24,24	22,48	34,27	9,61
Bali	5,06	6,44	20,67	19,51	32,77	15,56
Nusa Tenggara Barat	6,84	12,69	24,11	22,05	24,81	9,50
Nusa Tenggara Timur	4,10	15,70	30,02	20,61	19,72	9,86
Kalimantan Barat	5,60	14,53	26,32	20,64	24,75	8,16
Kalimantan Tengah	1,99	8,60	28,54	26,18	24,21	10,47
Kalimantan Selatan	1,28	11,43	29,28	22,03	25,84	10,13
Kalimantan Timur	1,37	5,02	20,31	21,50	39,80	11,99
Kalimantan Utara	4,32	6,54	21,71	24,39	31,58	11,46
Sulawesi Utara	0,39	10,95	19,41	23,08	35,09	11,08
Sulawesi Tengah	2,64	8,00	28,94	25,22	23,24	11,96
Sulawesi Selatan	4,85	11,17	22,65	20,16	28,64	12,53
Sulawesi Tenggara	3,47	8,33	21,77	25,58	25,64	15,21
Gorontalo	3,50	20,46	24,13	19,99	19,60	12,32
Sulawesi Barat	6,11	13,14	27,32	17,78	23,16	12,49
Maluku	1,30	5,58	19,67	24,03	34,76	14,67
Maluku Utara	1,85	9,79	22,01	23,49	30,47	12,40
Papua Barat	5,35	6,15	18,29	21,07	34,67	14,46
Papua	30,77	3,75	15,33	17,50	24,51	8,14
Indonesia	3,40	9,09	24,83	22,56	29,97	10,15

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.12.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2022

Provinsi	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,79	9,27	9,79
Sumatera Utara	10,65	9,12	9,99
Sumatera Barat	10,56	8,50	9,51
Riau	10,82	8,68	9,54
Jambi	10,31	8,45	9,07
Sumatera Selatan	10,43	7,85	8,82
Bengkulu	11,22	8,31	9,28
Lampung	9,84	8,01	8,61
Kep. Bangka Belitung	9,46	7,37	8,57
Kep. Riau	10,79	7,95	10,46
DKI Jakarta	11,30	-	11,30
Jawa Barat	9,57	7,57	9,14
Jawa Tengah	9,19	7,50	8,38
DI Yogyakarta	10,70	8,28	10,07
Jawa Timur	9,38	7,41	8,50
Banten	10,09	7,58	9,46
Bali	10,36	8,19	9,74
Nusa Tenggara Barat	8,92	7,70	8,31
Nusa Tenggara Timur	10,29	7,56	8,27
Kalimantan Barat	9,73	7,15	8,10
Kalimantan Tengah	10,20	8,19	9,03
Kalimantan Selatan	9,92	7,90	8,89
Kalimantan Timur	10,73	8,79	10,13
Kalimantan Utara	10,06	8,37	9,45
Sulawesi Utara	10,58	9,03	9,87
Sulawesi Tengah	10,70	8,44	9,17
Sulawesi Selatan	10,47	7,94	9,09
Sulawesi Tenggara	11,16	8,68	9,59
Gorontalo	9,76	7,32	8,39
Sulawesi Barat	10,16	8,04	8,47
Maluku	11,53	9,46	10,37
Maluku Utara	11,38	8,87	9,60
Papua Barat	11,43	9,21	10,14
Papua	11,32	5,77	7,31
Indonesia	9,95	7,88	9,08

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.12.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,91	9,67	9,79
Sumatera Utara	10,13	9,85	9,99
Sumatera Barat	9,36	9,65	9,51
Riau	9,61	9,46	9,54
Jambi	9,23	8,90	9,07
Sumatera Selatan	8,92	8,71	8,82
Bengkulu	9,45	9,11	9,28
Lampung	8,80	8,41	8,61
Kep. Bangka Belitung	8,68	8,45	8,57
Kep. Riau	10,53	10,39	10,46
DKI Jakarta	11,55	11,04	11,30
Jawa Barat	9,35	8,93	9,14
Jawa Tengah	8,66	8,11	8,38
DI Yogyakarta	10,31	9,84	10,07
Jawa Timur	8,81	8,19	8,50
Banten	9,71	9,21	9,46
Bali	10,22	9,26	9,74
Nusa Tenggara Barat	8,71	7,92	8,31
Nusa Tenggara Timur	8,39	8,16	8,27
Kalimantan Barat	8,27	7,92	8,10
Kalimantan Tengah	9,17	8,88	9,03
Kalimantan Selatan	9,10	8,67	8,89
Kalimantan Timur	10,25	10,00	10,13
Kalimantan Utara	9,55	9,35	9,45
Sulawesi Utara	9,75	9,99	9,87
Sulawesi Tengah	9,21	9,12	9,17
Sulawesi Selatan	9,16	9,03	9,09
Sulawesi Tenggara	9,74	9,43	9,59
Gorontalo	7,97	8,83	8,39
Sulawesi Barat	8,59	8,35	8,47
Maluku	10,40	10,33	10,37
Maluku Utara	9,79	9,41	9,60
Papua Barat	10,39	9,86	10,14
Papua	7,73	6,85	7,31
Indonesia	9,28	8,87	9,08

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.13 Tingkat Penyelesaian Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022

Provinsi	Umur 13-15 Tahun minimal tamat SD/ sederajat	Umur 16-18 Tahun minimal tamat SMP/ sederajat	Umur 19-21 Tahun minimal tamat SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,45	97,62	70,12
Sumatera Utara	98,74	92,83	76,48
Sumatera Barat	97,87	88,82	65,25
Riau	98,20	88,52	66,34
Jambi	97,62	86,55	64,36
Sumatera Selatan	97,53	88,41	66,16
Bengkulu	97,65	90,81	63,79
Lampung	98,41	90,99	61,90
Kep. Bangka Belitung	96,45	84,72	65,96
Kep. Riau	98,38	95,72	72,77
DKI Jakarta	98,58	95,40	86,88
Jawa Barat	99,08	89,29	66,20
Jawa Tengah	98,01	90,01	57,79
DI Yogyakarta	98,91	97,05	87,68
Jawa Timur	98,71	90,47	66,13
Banten	97,24	92,65	65,20
Bali	97,55	94,14	74,47
Nusa Tenggara Barat	98,47	95,39	59,55
Nusa Tenggara Timur	92,35	83,24	37,71
Kalimantan Barat	95,13	81,82	57,60
Kalimantan Tengah	98,51	87,79	61,24
Kalimantan Selatan	94,68	87,95	67,24
Kalimantan Timur	99,18	95,30	73,34
Kalimantan Utara	96,94	90,52	53,92
Sulawesi Utara	96,74	91,98	65,32
Sulawesi Tengah	97,19	88,89	52,49
Sulawesi Selatan	98,05	90,54	67,36
Sulawesi Tenggara	97,24	91,19	65,19
Gorontalo	95,12	80,56	43,54
Sulawesi Barat	97,15	84,12	54,84
Maluku	98,98	93,64	71,53
Maluku Utara	97,72	94,92	66,48
Papua Barat	93,94	87,03	56,47
Papua	81,99	66,15	38,74
Indonesia	97,82	90,12	65,23

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 5.14 *Sampling Error Persentase Angka Mengulang Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022*

Provinsi	SD/sederajat				SMP/sederajat				SM/sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
		(3)	(4)			(7)	(8)			(11)	(12)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Aceh	6,56	5,31	7,81	9,70	6,29	5,12	7,45	9,46	5,83	4,65	7,01	10,33
Sumatera Utara	6,26	5,23	7,29	8,36	4,33	3,18	5,47	13,47	4,93	3,73	6,14	12,47
Sumatera Barat	5,00	3,79	6,21	12,31	3,62	2,63	4,61	14,01	4,89	3,62	6,15	13,22
Riau	3,90	2,95	4,85	12,45	3,58	2,43	4,73	16,35	3,73	2,28	5,18	19,80
Jambi	6,74	5,27	8,22	11,14	6,73	5,04	8,42	12,82	6,04	4,37	7,70	14,07
Sumatera Selatan	5,77	4,86	6,68	8,03	4,69	3,62	5,75	11,59	4,37	3,28	5,47	12,82
Bengkulu	5,21	3,80	6,63	13,86	5,19	3,59	6,79	15,71	5,89	3,99	7,78	16,40
Lampung	2,54	1,87	3,22	13,53	3,11	2,15	4,07	15,70	2,00	1,07	2,92	23,71
Kep. Bangka Belitung	2,76	1,79	3,73	17,92	2,34	1,01	3,66	28,90	3,23	1,47	4,99	27,75
Kepulauan Riau	5,75	2,97	8,52	24,60	5,71	2,82	8,60	25,81	5,29	2,23	8,34	29,47
DKI Jakarta	2,66	1,66	3,66	19,20	2,65	1,26	4,05	26,84	2,46	1,12	3,79	27,73
Jawa Barat	7,43	6,52	8,34	6,25	3,47	2,66	4,27	11,85	4,29	3,33	5,24	11,39
Jawa Tengah	5,00	4,31	5,68	6,98	3,40	2,71	4,10	10,44	3,13	2,39	3,87	12,03
DIYogyakarta	2,48	1,49	3,47	20,32	2,57	1,07	4,06	29,75	1,69	0,34	3,05	40,77
Jawa Timur	6,35	5,63	7,07	5,77	3,49	2,78	4,19	10,31	3,19	2,49	3,89	11,13
Banten	10,04	8,36	11,73	8,56	5,14	3,29	6,99	18,32	3,86	2,50	5,22	18,01
Bali	5,11	3,73	6,49	13,75	3,68	2,30	5,06	19,14	3,61	1,94	5,28	23,57
Nusa Tenggara Barat	2,41	1,66	3,16	15,85	3,36	2,21	4,51	17,44	2,79	1,55	4,03	22,66
Nusa Tenggara Timur	3,50	2,80	4,20	10,18	3,22	1,87	4,56	21,32	3,80	2,76	4,85	14,00
Kalimantan Barat	5,34	4,24	6,44	10,52	3,91	2,58	5,24	17,37	4,89	3,43	6,34	15,17
Kalimantan Tengah	6,31	4,92	7,70	11,24	3,46	2,30	4,62	17,10	3,28	1,90	4,65	21,38
Kalimantan Selatan	2,28	1,47	3,08	18,07	2,35	1,09	3,60	27,25	1,58	0,84	2,32	23,80
Kalimantan Timur	5,32	3,68	6,96	15,75	2,73	1,53	3,92	22,42	2,49	1,28	3,69	24,69
Kalimantan Utara	5,15	3,29	7,01	18,41	5,44	2,52	8,35	27,35	5,18	2,25	8,11	28,82
Sulawesi Utara	7,30	5,81	8,80	10,47	5,63	3,91	7,35	15,57	5,26	3,58	6,94	16,27
Sulawesi Tengah	5,78	4,57	7,00	10,70	4,02	2,52	5,52	19,08	4,41	2,82	6,00	18,37
Sulawesi Selatan	5,50	4,61	6,39	8,24	4,23	2,97	5,49	15,24	4,83	3,61	6,04	12,81
Sulawesi Tenggara	4,28	3,37	5,19	10,83	1,09	0,54	1,63	25,60	3,28	1,95	4,60	20,61
Gorontalo	2,93	1,82	4,04	19,30	1,94	0,69	3,19	32,93	3,60	1,66	5,54	27,50
Sulawesi Barat	4,46	3,11	5,81	15,47	5,94	3,82	8,06	18,21	4,21	2,14	6,27	25,02
Maluku	4,11	2,91	5,31	14,86	5,03	3,23	6,83	18,24	5,37	3,76	6,99	15,30
Maluku Utara	6,23	4,49	7,98	14,30	5,13	3,16	7,11	19,65	6,49	4,28	8,70	17,38
Papua Barat	6,40	4,81	7,98	12,66	3,58	2,24	4,93	19,11	5,65	3,72	7,57	17,37
Papua	8,06	6,43	9,68	10,29	5,57	3,83	7,30	15,88	5,09	3,35	6,83	17,46
Indonesia	5,76	5,51	6,01	2,24	3,79	3,53	4,05	3,46	3,88	3,62	4,14	3,47

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.15 *Sampling Error Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2022*

Provinsi	SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SM/ sederajat			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,19	0,03	0,35	41,94	0,33	0,08	0,58	39,12	0,83	0,42	1,25	25,54
Sumatera Utara	NA	NA	NA	53,01	0,98	0,40	1,56	30,15	1,22	0,72	1,72	20,98
Sumatera Barat	0,10	0,03	0,17	35,33	0,60	0,21	0,98	32,73	1,28	0,60	1,96	27,15
Riau	NA	NA	NA	61,61	1,08	0,45	1,71	29,67	1,25	0,63	1,88	25,50
Jambi	NA	NA	NA	70,25	0,65	0,16	1,15	38,54	1,25	0,57	1,93	27,73
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	50,62	1,34	0,75	1,93	22,33	1,36	0,28	2,44	40,35
Bengkulu	NA	NA	NA	58,04	0,83	0,26	1,40	35,04	1,97	0,71	3,24	32,62
Lampung	NA	NA	NA	59,29	1,43	0,63	2,24	28,59	2,59	1,62	3,56	19,13
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	94,88	1,26	0,17	2,36	44,34	3,62	1,81	5,43	25,54
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	78,60	NA	NA	NA	53,87	2,14	0,22	4,06	45,77
DKI Jakarta	NA	NA	NA	99,92	NA	NA	NA	82,76	2,05	0,97	3,13	26,82
Jawa Barat	0,08	0,01	0,15	47,44	1,22	0,78	1,65	18,36	1,30	0,75	1,84	21,43
Jawa Tengah	NA	NA	NA	62,33	0,52	0,27	0,77	24,27	1,34	0,93	1,74	15,46
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	100,14	NA	NA	NA	50,76	NA	NA	NA	60,62
Jawa Timur	NA	NA	NA	66,08	1,46	0,92	2,00	18,94	1,38	0,92	1,84	17,05
Banten	NA	NA	NA	99,96	0,70	0,20	1,20	36,48	1,53	0,54	2,52	33,05
Bali	NA	NA	NA	96,18	NA	NA	NA	89,00	1,10	0,17	2,03	43,24
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	81,89	0,98	0,24	1,71	38,30	1,22	0,50	1,93	29,94
Nusa Tenggara Timur	0,30	0,14	0,45	26,38	1,81	1,21	2,41	16,86	1,99	1,29	2,70	17,98
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	64,10	0,78	0,22	1,33	36,62	1,09	0,45	1,72	29,87
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	55,39	1,28	0,39	2,18	35,51	1,40	0,52	2,28	32,18
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	53,05	1,18	0,34	2,03	36,48	2,13	1,14	3,12	23,64
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	71,66	0,25	0,01	0,48	47,90	NA	NA	NA	59,06
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	99,94	NA	NA	NA	54,80	2,04	0,67	3,42	34,39
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	85,86	1,32	0,56	2,09	29,42	1,32	0,46	2,18	33,22
Sulawesi Tengah	0,38	0,16	0,60	29,71	1,27	0,62	1,91	26,03	1,41	0,75	2,06	23,84
Sulawesi Selatan	0,08	0,01	0,16	46,87	1,58	0,96	2,21	20,21	1,46	0,83	2,08	21,86
Sulawesi Tenggara	0,16	0,04	0,29	39,47	1,68	0,99	2,36	20,79	1,03	0,46	1,59	28,14
Gorontalo	NA	NA	NA	71,54	1,24	0,38	2,11	35,59	1,29	0,41	2,17	34,79
Sulawesi Barat	0,36	0,05	0,66	44,28	1,73	0,33	3,12	41,18	1,51	0,31	2,71	40,61
Maluku	NA	NA	NA	59,73	0,41	0,09	0,73	39,36	0,68	0,27	1,08	30,47
Maluku Utara	0,33	0,09	0,58	37,32	NA	NA	NA	54,49	1,32	0,48	2,17	32,48
Papua Barat	0,60	0,24	0,95	30,72	NA	NA	NA	55,30	1,02	0,26	1,78	38,21
Papua	2,38	1,77	3,00	13,14	3,22	2,34	4,11	14,01	0,83	0,29	1,38	33,51
Indonesia	0,13	0,10	0,15	9,79	1,06	0,93	1,20	6,59	1,38	1,23	1,54	5,74

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 5.16 *Sampling Error* Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022

Provinsi	7-12 Tahun				13-15 Tahun				16-18 Tahun			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	0,32	0,13	0,51	30,03	3,13	2,34	3,92	12,84	14,30	12,46	16,14	6,56
Sumatera Utara	0,37	0,19	0,55	24,52	4,73	3,86	5,59	9,34	12,41	10,98	13,83	5,87
Sumatera Barat	0,28	0,07	0,49	38,34	5,10	3,91	6,29	11,88	16,45	14,27	18,62	6,74
Riau	0,56	0,27	0,85	26,47	5,50	4,17	6,84	12,36	18,23	15,81	20,66	6,79
Jambi	0,29	0,08	0,50	36,78	7,25	5,45	9,06	12,67	20,96	18,11	23,82	6,95
Sumatera Selatan	0,55	0,31	0,78	22,13	7,67	6,19	9,14	9,84	23,99	21,50	26,49	5,30
Bengkulu	0,31	0,08	0,54	37,52	4,52	2,97	6,07	17,44	20,05	16,98	23,11	7,80
Lampung	0,40	0,20	0,59	24,92	6,51	5,17	7,86	10,56	25,17	22,65	27,69	5,11
Kep. Bangka Belitung	0,25	0,01	0,48	49,33	11,42	8,53	14,31	12,90	22,56	18,77	26,34	8,56
Kepulauan Riau	NA	0,00	0,67	75,73	2,53	0,87	4,19	33,46	13,06	9,20	16,91	15,06
DKI Jakarta	NA	0,00	0,46	78,56	4,29	2,64	5,94	19,67	13,78	11,00	16,55	10,28
Jawa Barat	0,53	0,36	0,70	16,13	8,53	7,35	9,72	7,09	27,16	25,26	29,05	3,57
Jawa Tengah	0,31	0,19	0,44	20,57	7,49	6,50	8,48	6,76	25,41	23,81	27,01	3,22
DIYogyakarta	0,21	0,00	0,42	49,98	2,07	0,89	3,25	29,10	10,26	7,14	13,39	15,53
Jawa Timur	0,25	0,12	0,39	27,05	5,41	4,50	6,32	8,59	24,58	23,04	26,12	3,20
Banten	0,55	0,11	0,98	40,28	6,62	5,00	8,25	12,52	24,68	21,52	27,84	6,53
Bali	0,23	0,05	0,41	40,74	4,33	2,73	5,93	18,86	12,95	10,37	15,53	10,17
Nusa Tenggara Barat	0,35	0,01	0,69	49,11	4,91	3,27	6,54	16,97	21,66	18,58	24,75	7,27
Nusa Tenggara Timur	0,79	0,57	1,02	14,62	8,32	7,00	9,65	8,12	24,50	22,45	26,54	4,26
Kalimantan Barat	1,13	0,71	1,54	18,71	11,07	9,14	13,00	8,88	26,00	23,48	28,51	4,93
Kalimantan Tengah	0,46	0,11	0,81	38,84	7,99	6,19	9,79	11,48	26,42	22,98	29,86	6,64
Kalimantan Selatan	0,47	0,14	0,80	35,81	10,00	7,92	12,08	10,63	21,56	18,83	24,29	6,46
Kalimantan Timur	NA	0,00	0,36	57,27	2,18	1,28	3,08	21,01	11,56	9,26	13,87	10,18
Kalimantan Utara	NA	0,00	0,71	53,32	7,46	4,86	10,07	17,80	15,87	12,02	19,73	12,39
Sulawesi Utara	0,42	0,17	0,66	29,71	7,10	5,35	8,84	12,54	19,69	16,91	22,48	7,22
Sulawesi Tengah	1,07	0,58	1,56	23,36	8,35	6,61	10,09	10,61	25,79	23,07	28,52	5,38
Sulawesi Selatan	0,58	0,34	0,82	21,23	9,16	7,84	10,47	7,33	22,79	20,80	24,78	4,46
Sulawesi Tenggara	0,93	0,58	1,28	19,02	7,60	6,14	9,07	9,84	20,18	17,88	22,49	5,83
Gorontalo	1,42	0,66	2,17	27,08	9,98	7,37	12,59	13,34	32,07	28,13	36,02	6,28
Sulawesi Barat	2,00	1,21	2,80	20,19	12,63	9,82	15,43	11,34	26,44	22,62	30,26	7,37
Maluku	0,37	0,15	0,59	30,82	2,88	1,98	3,77	15,92	16,29	13,91	18,68	7,47
Maluku Utara	0,50	0,13	0,88	38,02	3,03	1,88	4,17	19,28	19,00	15,84	22,16	8,48
Papua Barat	0,83	0,36	1,29	28,81	3,98	2,70	5,27	16,50	18,27	15,47	21,08	7,84
Papua	7,30	6,36	8,25	6,61	21,67	19,43	23,90	5,27	34,87	32,06	37,68	4,11
Indonesia	0,56	0,50	0,61	5,03	6,94	6,61	7,27	2,39	22,52	21,97	23,07	1,25

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022



DAFTAR PUSTAKA






DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Pendidikan 2021. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Buku 1 Pedoman Kepala BPS Provinsi, Statistisi Ahli Madya/Koordinator Fungsi Statistik BPS Provinsi, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Maret 2022. Jakarta: BPS.
- Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan. 2018. Panduan Implementasi Pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD. Banjarbaru: BP-PAUD dan Dikmas
- Bappenas. 2020. Tujuan 4 Metadata SDGs Edisi II. Jakarta: Bappenas
- Bappenas. SDGs Tujuan 5. Diakses pada 17 Oktober 2022 melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5>
- Bappenas. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Jakarta: Bappenas.
- Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., & Ambasz, D. (2019). The impact of school infrastructure on learning: A synthesis of the evidence.
- Bosoni, M. L. 2014. " Breadwinners " or " Involved Fathers?" Men , Fathers and Work in Italy SPRING 2014 , Vol . 45 , No . 2 , SPECIAL ISSUE: The Transformation of Family Relationships in I. *Journal of Comparative Family Studies*, 45(2, The Transformation of Family Relationships in Italy), 293–315. <https://www.jstor.org/stable/24339612>
- Choi, Yool. 2017. Students Employment and Persistence : Evidence of Effect Heterogeneity of Student Employment on College Dropout. DOI:10.1007/s11162-017-9458-y
- Detik. 2022, 21 September. Ruang Kelas Rusak, Pelajar SD di Cianjur Terpaksa Gantian Belajar. Diakses pada 25 September 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6304218/ruang-kelas-rusak-pelajar-sd-di-cianjur-terpaksa-gantian-belajar>.





Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Hasil Survey Pelaksanaan Kegiatan Belajar dari Rumah (BDR) di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Bosoni, M. L. 2014. " Breadwinners " or " Involved Fathers?" Men , Fathers and Work in Italy SPRING 2014 , Vol . 45 , No . 2 , SPECIAL ISSUE: The Transformation of Family Relationships in I. Journal of Comparative Family Studies, 45(2, The Transformation of Family Relationships in Italy), 293–315. <https://www.jstor.org/stable/24339612>

ILO. (2016). WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK: TRENDS FOR YOUTH 2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_513739.pdf

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kemdikbud. 2020. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Jakarta: Kemdikbud.

Kemdikbud, 2022. Kurikulum Merdeka Jadi Jawaban untuk Atasi Krisis Pembelajaran. Diakses melalui: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdeka-jadi-jawaban-untuk-atasi-krisis-pembelajaran>. Diakses pada tanggal: 2 September 2022.

Kemdikbud. 2022. Implementasi Kurikulum Merdeka. Diakses melalui: <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/>. Diakses pada tanggal: 15 September 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Statistik Persekolahan SD 2021/2022. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Statistik Persekolahan SMP 2021/2022. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Statistik Persekolahan SMA 2021/2022. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Statistik Persekolahan SMK 2021/2022. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Bappenas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Survei Belajar dari Rumah (PPT)

KPAI. 2021. Survei Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Sistem Penilaian Jarak Jauh Berbasis Pengaduan KPAI diakses pada 02 Oktober 2022 melalui <https://bankdata.kpai.go.id/infografis/survei-pelaksanaan-pembelajaran-jarak-jauh-pjj-dan-sistem-penilaian-jarak-jauh-berbasis-pengaduan-kpai>.

Mortimer, J. T. 2010. The Benefits and Risks of Adolescent Employment. The prevention researcher, 17(2), 8. <https://doi.org/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936460/>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD


Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, UNICEF, GIZ dan SNV Indonesia. 2022. Profil Sanitasi Sekolah 2022. Jakarta.

Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).





Surat Keputusan Bersama (SKB) NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan NOMOR 440-717 TAHUN 2021 terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/KB/2022; Nomor 408 Tahun 2022; Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022; dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Tumin, Tumin & Faizuddin, Ahmad & Mansir, Firman & Purnomo, Halim & Aisyah, Nurul. (2020). Working Students in Higher Education: Challenges and Solutions. Al-Hayat: Journal of Islamic Education. 4. 79. 10.35723/ajie.v4i1.108.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 13 Tahun 2003

UU No. 16 Tahun 2019

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. 2009. Education Indicators Technical guidelines

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN





YSEN22.K

Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2022

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	
101	Provinsi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
102	Kabupaten/Kota* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103	Kecamatan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
104	Desa/Kelurahan* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan 1. Perkotaan 2. Perdesaan
106	Nomor Blok Sensus <input type="checkbox"/>
107	Nomor Kode Sampel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
108	Nomor Urut Bangunan Fisik di Sketsa Peta WB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
110	Nama Kepala Rumah Tangga
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga Latitude (lintang) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Longitude (bujur) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

*) Coret yang tidak perlu

SELAMAT PAGI/SANGI/SOREMALAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN DAN PENGLUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MENAWANCARAI BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASAKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

Ya bersedia → Mulai wawancara

Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXIII. Catatan

Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIII Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN				
Uraian	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pencacah	Staf BPS Provinsi	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Staf BPS Kab/Kota	2	Tgl <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KSK	3	Bln <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mitra	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202. Pengawas	Staf BPS Provinsi	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Staf BPS Kab/Kota	2	Tgl <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KSK	3	Bln <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mitra	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
203. Hasil pencacahan rumah tangga	Terisi lengkap	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Terisi tidak lengkap	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Responden menolak	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BLOK III. RINGKASAN	
301	Banyaknya anggota rumah tangga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
302	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun <input type="checkbox"/>
303	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas <input type="checkbox"/>
304	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas <input type="checkbox"/>
305	Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin <input type="checkbox"/>

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian daftar, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian secepat-cepatnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengolah. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
4. Pencatatan harus meneliti/memeriksa seluruh isian daftar dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum daftar isian diserahkan ke pengawas.
5. Perhatian dan penuh lands-landa atau alur pertanyaan yang tertera pada daftar isian.
6. Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibaca.
7. Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh dilingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh dilingkari salah satu.
8. Blok I tentang keterangan tempat diisi sebelum ke lapangan.
9. Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda garis putus-putus dan tulisan lipat disini pada Blok IV halaman 2. sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibebaskan saja).
10. Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XIII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
11. Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam landa garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
12. Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari setiap blok.
13. Contoh cara penulisan informasi penerimaan Bantuan Pangan adalah menggunakan format rala kanan:

E. BERAPA NILAI JUMLAH KOMODITAS YANG DIBEI/MENGGUNAKAN

E. BERAS
 (i) Rp. 5.5.000,-
 (ii) 5.0 Kg

BANTUAN PANGAN TERSEBUT?
 (i) BERAPA TOTAL RUPIAH YANG DIBELANJAKAN UNTUK MASING-MASING KOMODITAS?
 (ii) BERAPA KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBEI?

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Maret 2022.

Tahun lahir	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahun lahir	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tahun lahir	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Tahun lahir	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Waktu mulai wawancara:

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) SERTA SAMA SAMA YANG BAKSA, TINGGAL DI RUMAH TANGGA, INDIAN KEPENGURUSAN/MAWANIYA DIKELOMPOK DARI SATU DAPUR, MULADARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, UCUCU, ORANG TUAMERTUA, PEMBERANTUS/PERTU, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	402	403 (Kode)	404	405	406	407	408	409	410
No. urut ART	APAKAH HUBUNGAN DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA?	APAKAH PERALIHAN RUMAH TANGGA?	APAKAH STATUS KEKAWINAN?	APAKAH PERALIHAN KEKAWINAN?	APAKAH PERALIHAN KEKAWINAN?	KAPAN DILAHIRKAN?	BERAPA UMUR (tahun)?	Jika berstatus kawin (40# 2)	Jika berstatus belum kawin (40# 3)	No. urut ART
	1. Belum kawin	1. Belum kawin	1. Laki-laki	1. Laki-laki	1. Laki-laki	Tgl/Bln/Thn (DD/MM/YYYY)	Jika harus diisi: Umur (nama) tahun, Umur (nama) tahun, Umur (nama) tahun	1. Ya	2. Tidak	
	2. Kawin	2. Kawin	2. Perempuan	2. Perempuan	2. Perempuan		Jika tulis 97 (Dalam tahun)	3. Tidak	4. Tidak	
1			1			/ /				
2						/ /				
3						/ /				
4						/ /				
5						/ /				
6						/ /				
7						/ /				
8						/ /				
9						/ /				
10						/ /				

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat. Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.

Jika terdapat ART yang kepengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

1. KRT 2. Istri/suami 3. Anak kandung/lini 4. Anak angkat 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang tua/mertua 8. Pembantu/sopir 9. Lainnya (familial lain, orang yang tidak ada hubungan/familial dengan KRT)

KONSEP DAN DEFINISI

- **Pertanyaan 203: Hasil Pencacahan Rumah Tangga**
 - Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap.
 - Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota.
 - Tidak ada ART responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan.
 - Responden menolak apabila responden menolak untuk diwawancarai.
 - Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tanggabangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya, rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/ruih karena gempa/banjir/bencana lain.
- **Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga**

Kejala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.
- **Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?**

Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.
- **Pertanyaan 605: Apakah Seding/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah?**

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- **Pertanyaan 607, 608, dan 609: Apakah Dapat Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dalam Bahasa Sehari-Hari?**

Dapat membaca dan menulis yang dimaksud adalah jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya.

Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya: Saya membaca.
- **Pertanyaan 610: Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket A/B/C)?**

Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.
- **Pertanyaan 612: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Ditikuti?**

Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C).

KONSEP DAN DEFINISI

- **Pertanyaan 613: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki?**

Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang ditlalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta.

Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal. (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Sesorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**
- **Pertanyaan 614: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?**

Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.
- **Pertanyaan 702: Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)?**

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah non formal (Paket A/B/C), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.

Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/ gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumahantnggaan, seperti memasak, mencuci dsb. digolongkan sebagai pengurus rumah tangga.

Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.
- **Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2021, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?**

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan.
- **Pertanyaan 1101: Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Dimiliki (nama)?**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: Peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang urunannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta bukan PBI terdiri atas:

 - a. **Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota TNI; c) Anggota Polri; d) Pejabat negara; e) Pegawai pemerintah nonpegawai negeri; f) Pegawai swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
 - b. **Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.
 - c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- c. **Bukan Pekerja dan anggota keluarganya** terdiri atas: a) Investor; b) Pemberi kerja; c) Penerima pensiun; d) Veteran; e) Perintis kemerdekaan; dan f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar Iuran.



BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

No. Urut ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI/PERNAH MEMILIKI BUKU/AKTA MENINGGAL DARI KUJAWA? (cek isian 405?) BOLEH SAYA MELIHATNYA? (untuk perkawinan yang terakhir) (Kode)	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu/Kandung Lihai Blok IV (isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	APAKAH (nama) MEMILIKI/PERNAH MEMILIKI/INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 508 ←	Nomor Induk Kependudukan (Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART)										Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 505) (Kode)	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan 1. KK 2. KTP 3. Lainnya (Kode)	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (Kode)	(Diisi oleh pengawas) Apakah isian 506 sama dengan isian 405? (Cek isian 405)
					505	506	507	508	509									
401																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK

- Laki-laki
Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3
- Perempuan
Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7
- Tidak dapat ditentukan
Jika tidak termasuk kode 1 atau 2

Kode 501: Kepemilikan Buku Akta Nikah

- Ya, dapat ditunjukkan
- Ya, tidak dapat ditunjukkan
- Tidak memiliki
- Tidak tahu

Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran

- Ya, dapat ditunjukkan
- Ya, tidak dapat ditunjukkan
- Tidak memiliki
- Tidak tahu





BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN										
No. Urut ART	Untuk ART Semua Umur		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Berumur 0-10 Tahun		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas			
	DI MANAKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika di kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	APAKAH (nama) SEBANG/PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH?	APAKAH (nama) SEBANG/PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH?	APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMAT Sederhana dalam bahasa sehari-hari dengan menggunakan: HURUF LATIN/ARAB/ALFABET? HURUF/ HURUFLAINYA? (CONTOH: JAWA, KAMI, CINA, DLL.)	1.Ya 5.Tidak	1.Ya 5.Tidak
	601	602	603	604	605	606	607	608	609	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Kode 605: Partisipasi Prasekolah**
- Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2021/2022)
 - Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2021/2022)
 - Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2021/2022
 - Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah
- Kode 606: Jenis Prasekolah**
- Taman Kanak-kanak
 - Bustanul Athfal
 - Raudatul Athfal
 - Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.)
 - Kelompok Bermain
 - Taman Penitipan Anak



BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	Untuk ART berumur 5 tahun ke atas					Untuk ART berumur 5-30 tahun		Untuk ART berumur 5-24 tahun					
	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C)	APAKAH (nama) BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA?	APA JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG SEDANG/ DIKUTI (nama)?	APA UJAZAH/ SITB YANG DIMILIKI (nama)?	Jika masih bersekolah (610-2), DALAM ENAM BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)?	SELAMA BULAN AGUSTUS 2021-FEBRUARI 2022 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA?	(Jika P.618 ≠ 0) UNTUK PENERIMAAN BERAPA SEMESTER?	Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (610 = 2 atau 3)				
	(Kode = 1 ke ART berikutnya Blok VII Kode=3->612)	(Kode = 1 Negeri 2.Swasta)	(Kode) (nama)?	(Kode) (nama)?	(Kode) (nama)?	1. Ya dapat ditunjukkan 2. Ya tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak	1. Ya 2. Ya tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak	(Semester)	(Kode) (nama) APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2020/2021)?				
									(Kode) (nama) APAKAH (nama) BERSEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN YANG DIKUTI (nama) WAKTU ITU?				
									(Kode) (nama) APAKAH (nama) BERSEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN YANG DIKUTI (nama) WAKTU ITU?				
401	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 610 dan 620:
Partisipasi Sekolah
 1. Tidak/belum pernah bersekolah
 2. Masih bersekolah
 3. Tidak bersekolah lagi

Kode 612 dan 621: Jenjang Pendidikan dan Kode 614: Ijazah/STTB
 01. Paket A
 02. SDBL
 03. SD
 04. MI
 05. SPM/PDF Ula
 06. Paket B
 07. SMP LB
 08. SMP
 09. MTs
 10. SPM/PDF Wustha
 11. Paket C
 12. SMLB
 13. SMA
 14. MA
 15. SMK
 16. MAK
 17. SPM/PDF Ulya
 18. D/ID2
 19. D3
 20. D4
 21. S1
 22. Profesi
 23. S2
 24. S3

Kode 613 dan 622: Tingkat/Kelas
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Tamat & Lulus)
 • Jika masih kuliah Profesi, Kode 1
 • Jika masih kuliah S2, Kode 6
 • Jika masih kuliah S3, Kode 7

Kode 615 dan 616: Ijazah/SD
 25. Tidak Punya Ijazah SD (khusus 614)

BLOK VII. KETERANGAN KEPERILIKAN TABUNGAN DAN KETENAGAKERJAAN

No. Unit ART	Untuk ART Umur 6 Tahun ke Atas	Untuk ART Umur 10 Tahun ke Atas				Untuk ART Umur 18 Tahun ke Atas				
	APAKAH (nama) MEMILIKI REKENING TABUNGAN BAIK ATAS NAMA SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DILEBAGA KEUANGAN (KERANGAN, KOPERASI)? 1. Ya 5. Tidak	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA SAJA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibaca)	DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGUNAKAN WAKTU TERBANYAK? 1. BEKERJA → 705 2. SEKOLAH 3. MENGIURUS RUMAH TANGGA 4. LAINNYA SELAIN KEGIATAN TERSEBUT 5. TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN Jika X terpilih → 704	Jika tidak bekerja (702 pilihan A tidak di lingkari) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI PEKERJAAN/USHAH ATAU TEMPAT PEKERJAAN (nama)? Tuliskan selengkap-lengkapnyanya (Kode lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama diisit oleh pengawas. Kode dapat dilihat pada halaman terakhir VSEN22.K)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA STATUS/KEJUJUKAN (nama) DALAM PEKERJAAN UTAMA? (Kode)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, BERAFA JUMLAH JAM KERJA DARI PEKERJAAN UTAMA? (Jam)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, BERAFA JUMLAH JAM KERJA DARI PEKERJAAN UTAMA? (Jam)	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, BERAFA JUMLAH JAM KERJA DARI PEKERJAAN UTAMA? (Jam)		
401										
1	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	704 <input type="checkbox"/>	705 <input type="checkbox"/>	706 <input type="checkbox"/>	707 <input type="checkbox"/>	708 <input type="checkbox"/>	709 <input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
6	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
8	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
10	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Kode 706: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan

(Jika 704=1), 706 tidak boleh berkode 5 atau 6)

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- Buruh/tani/jawani/pegawai
- Pekerja bebas
- Pekerja keluarga atau tidak dibayar

- Kartu Prakerja bukanlah kartu fisik, melainkan sebuah kode unik 16 angka yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pelatihan. Nomor kartu prakerja diperoleh setelah mendarat di situs resmi kartu prakerja www.prakerja.go.id dan dinyatakan lulus sebagai penerima kartu prakerja.

- Responden dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong.
- Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Urut (HP/NIKRABEL ART)	DALAM 3 BILAN TERAKHIR MENGGUNAKAN TELEFON SELULER (HP/NIKRABEL)?		DALAM 3 BILAN TERAKHIR MEMILIKI TELEFON SELULER (HP/NIKRABEL)?		DALAM 3 BILAN TERAKHIR APAKAH (nama) YANG DIMANUKAN TABLET, ATAU PERANGKAT LAINNYA, MENURUT PROVIDER/OPERATOR BERIKUT:		DALAM 3 BILAN TERAKHIR APAKAH (nama) YANG DIMANUKAN TABLET, ATAU PERANGKAT LAINNYA?		DALAM 3 BILAN TERAKHIR APAKAH (nama) TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM, WHATSAPP, DLL)?		DALAM 3 BILAN TERAKHIR APA SAJA JENIS KOMPUTER YANG DIGUNAKAN (nama)?		DALAM 3 BILAN TERAKHIR, DI MANA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)		DALAM 3 BILAN TERAKHIR, LINTUK APA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)		Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas			
	1. Ya	5. Tidak	TEKONSEL?	INDOSAT?	XL AXIAT?	LAINNYA?	A. PC/DESKTOP	B. LAPTOP/NOTEBOOK	C. TABLET	X. TIDAK MENGGUNAKAN KOMPUTER	1. Ya	5. Tidak	A. RUMAH SENDIRI	B. DI RUMAH SENDIRI	C. TEMPAT BERGEJAKRANTOR	D. GEDUNG SEKOLAH/KAMPUS	E. TEMPAT UMUM	F. DALAM KONDISI BERGERAK	1. Ya	5. Tidak
401																				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

- Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibelidibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- Memiliki/guasa HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/mengguasi HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.
- Menggunakan internet: apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan.
- Mengakses internet untuk hiburan misalnya download/main game, menonton tv, download/menonton film/video, radio, download gambar dan musik menggunakan internet.
- Pembuatan konten digital misalnya mengunggah konten, menggunakan cloud storage (Google Drive, Dropbox, dll), menggunakan software yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, spreadsheet, presentasi), dll.
- Pernah belajar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) jika belajar TIK secara formal (di sekolah) atau nonformal (di tempat kursus yang memiliki kurikulum) namun tidak termasuk belajar otodidak. Misalnya, belajar aplikasi perkantoran (Microsoft Office/MS Word, MS Excel, dll.), pemrograman, robotik, dll.

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN

SEJAK 1 JANUARI- 31 DESEMBER 2021, APAKAH (nama) PERHAJAT/ KORBAN KEJAHATAN YANG MELAKUKAKAN/ TERSEBUT DALAM PROSES PELAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENYAPAKAN/ DITAMBAH BANTUAN HUKUM? 1.Ya 5.Tidak	BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BEPERGIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejadian, Tulis 7)										PELECEHAN SEKSUAL	LAINNYA				
	SEJAK 1 JANUARI- 31 DESEMBER 2021, APAKAH (nama) PERHAJAT/ KORBAN KEJAHATAN YANG MELAKUKAKAN/ TERSEBUT DALAM PROSES PELAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENYAPAKAN/ DITAMBAH BANTUAN HUKUM? 1.Ya 5.Tidak		PENCURIAN		PENGANIAYAAN		PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		PELECEHAN SEKSUAL			JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI			
No. Urut	SEJAK 1 JANUARI- 31 DESEMBER 2021, APAKAH (nama) PERHAJAT/ KORBAN KEJAHATAN YANG MELAKUKAKAN/ TERSEBUT DALAM PROSES PELAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENYAPAKAN/ DITAMBAH BANTUAN HUKUM? 1.Ya 5.Tidak		PENCURIAN		PENGANIAYAAN		PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		PELECEHAN SEKSUAL		JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI				
	BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BEPERGIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejadian, Tulis 7)		JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI				
401	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Kode 904: Maksud Utama Bepergian

- Berlibur/rekreasi
- Profesi/bisnis
- Misi/perencanaan/kongres/seminar
- Training/pendidikan/pelatihan
- Kesehatan/berobat
- Berziarah/keagamaan
- Mengunjungi teman/keluarga
- Mudik/pulang kampung hari raya
- Obrolan/kesenian
- Belanja/shopping
- Lainnya

- Lingkungan keseharian didefinisikan sebagai wilayah geografis (tidak harus terdekat) bagi seseorang melakukan untuk rutinitas kehidupannya/pekerjaannya. Misalnya rumah, kantor atau tempat kerja, pasar yang rutin dikunjungi, sekolah, taman yang rutin dikunjungi, fasilitas olahraga yang rutin dikunjungi, dan sebagainya.
- Bepergian rutin adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:

- Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
- Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
- Polisi mengetahui sendiri.

Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan di kantor polisi

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)

No. Urut ART	Isikan kode 1 jika Umur < 2 tahun atau kode 0 jika Umur < 2 tahun	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

• **Petugas tidak diperkenankan** memusulkan bahwa responden tidak mengalami disabilitas tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata

• **Gangguan/keterbatasan fungsi** antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hiang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil/menggunakan tangan/jari.

• **Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.**

• **Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)** yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

BLOK XI: KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN									
No.	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIMILIKI (nama)? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri C. Jamkesmas D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPUNYAI KELUHAN KESEHATAN (PANAS, BATUK, PILEK, DIARE, PEKERJAAN, PUSING, PENYAKIT KRONIS, DSB.)? 1. Ya 5. Tidak ART berikutnya ← Blok XII	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGABATI SENIOR? 1. Ya 5. Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUAH RAWAT JALAN? 1. Ya → 1107 5. Tidak	APA ALASAN UTAMA (nama) TIDAK RAWAT JALAN? 01. Tidak punya biaya berobat 02. Tidak ada sarana transportasi 03. Tidak ada sarana transportasi 04. Waktu tunggu pelayanan lama 05. Mengobati sendiri 06. Tidak ada yang mendampingi 07. Merasa tidak perlu 08. Khawatir terpapar Covid-19 09. Lainnya (Lanjut ke ART berikutnya/ Blok XII)	DALAM SEBULAN TERAKHIR, DI MANA SAJA TEMPAT (nama) RAWAT JALAN? ARS Pemerintah B. RS Swasta C. Praktik dokter/bidan D. Klinik/Praktik dokter bersama E. Puskesmas/Pustu F. UKBM (Poskeseas, Polindes, Poyandu, Balai Pengobatan) G. Praktik pengobatan tradisional/ alternatif H. Lainnya	DALAM SEBULAN TERAKHIR, BERAPA KALI (nama) RAWAT JALAN? (Kali)	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK RAWAT JALAN? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri C. Jamkesmas D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	
									1101
401									
1	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
2	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
3	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
4	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
5	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
6	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
7	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
8	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
9	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	
10	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	

• Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

• Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya.

• Tanggungannya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.

• Rawat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendampingi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendampingi petugas kesehatan ke rumah.

• Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan adalah bila biaya berobat jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibayai oleh penjamin kesehatan.

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK

No. urut ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) FERNAH DIRAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak 1205 ←	DALAM SETAHUN TERAKHIR, DIMANA SALA TEMPAT (nama) DIRAWAT INAP? A.RS Pemerintah B.RS Swasta C.Praktik/bidan D.Klinik/Praktik dokter bersama E.Puskesmas F.Praktik pengobatan tradisional/ alternatif G.Lainnya	DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI (nama) DIRAWAT INAP?	JAMINAN KESEHATAN APA SAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri C. Jamkesda D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	SELAMA SEBUAH TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK MENGGUNAKAN MEROKOK ELEKTRIK? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu	SELAMA SEBUAH TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK TEBERAKAU? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak → 1208 8. Tidak tahu ART berikutnya/ ← Blok XIII	APAKAH DULU SEBELUM SEBUAH TERAKHIR (nama) PERVAH MEROKOK TEBERAKAU? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu	
	Urut ART Berumur 5 Tahun ke Atas							
						(Batang)		
401	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Rawat Inap adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap semalam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.
- Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap adalah bila biaya rawat inap tergolong rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.
- Jumlah hari adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir
- Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebuah terakhir sampai saat pencacahan.
- Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/lingkawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap *shisha/waterpipe*.
- Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu selama sebuah terakhir adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebuah dikali 7 dibagi 30.

BLOK XIII. KETERANGAN PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN

No. Urut ART	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J K	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H I J	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H

DALAM SETERAHIN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENYUSUNAKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA?
 A. Tidak mengalami keluhan kesehatan
 B. Mengobati sendiri
 C. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan
 D. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi
 E. Kartu JKN tidak aktif
 F. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah responden
 G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan kesehatan
 H. Tidak ada biaya (transportasi dll.)
 I. Waktu tunggu pelayanan lama/ante panjang
 J. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda
 K. Lainnya

DALAM SETERAHIN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERIKSA KESEHATAN MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA TERSEBUT?
 A. Tidak memenuhi prosedur
 B. Tidak sesuai jadwal pelayanan
 C. Lensis pelayanan yang diminta tidak dicakup
 D. Tidak ada tenaga medis yang dibutuhkan sebagai pemberi layanan
 E. Tidak ada obat
 F. Tidak memiliki pemantauan penunjang
 G. Lainnya

DALAM SETERAHIN TERAKHIR, APAKAH (nama) TIDAK PERNAH MENYUSUNAKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK PERAWAT INAP?
 A. Tidak mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan rawat inap
 B. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan
 C. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi
 D. Kartu JKN tidak aktif
 E. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah responden
 F. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan
 G. Tidak ada biaya (transportasi, akomodasi, dll.)
 H. Waktu tunggu pelayanan lama/ante panjang
 I. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda
 J. Lainnya

DALAM SETERAHIN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENYUSUNAKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA?
 1. Ya
 2. Tidak
 3. Tidak
 4. Tidak
 5. Tidak
 6. Tidak
 7. Tidak
 8. Tidak
 9. Tidak
 10. Tidak

- Pemeriksaan kesehatan yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan kesehatan baik dalam keadaan memiliki keluhan maupun tidak dalam keadaan memiliki keluhan. Contoh pemeriksaan tidak dalam keluhan adalah pemeriksaan kehamilan, imunisasi, keluarga berencana, dan lainnya.
- Responden tergelong pernah memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk pemeriksaan kesehatan apabila responden pernah memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk pemeriksaan kesehatan sampai dengan pemeriksaan tersebut selesai.
- Responden tergelong pernah memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk rawat inap apabila responden pernah memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk rawat inap sampai dengan rawat inap tersebut selesai.

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi
BLOK XIV. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI/(DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)			
1401. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	<input type="text"/> bulan	<input type="text"/> bulan	<input type="text"/> bulan
IMUNISASI BALITA			
SAYA AKAN MENANYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI			
1402. APAKAH BAPAK/IBU MEMILIKI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHKAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan..... Ya, tidak dapat ditunjukkan..... Tidak ada kartu/buku.....	1 → 1404 2 → 1406 5	Ya, dapat ditunjukkan..... Ya, tidak dapat ditunjukkan..... Tidak ada kartu/buku.....
1403. APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMILIKI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)?	Ya, dapat ditunjukkan..... Ya, tidak dapat ditunjukkan..... Tidak ada kartu/buku.....	1 → 1404 2 → 1406 5	Ya, dapat ditunjukkan..... Ya, tidak dapat ditunjukkan..... Tidak ada kartu/buku.....
1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi. Tulis 44 di kolom tanggal, bulan, dan tahun, jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis 00 jika imunisasi tidak diberikan.	Ya..... Tidak.....	1 → 1406 5 → 1406	Ya..... Tidak.....
a. HEPATITIS B (<24 JAM)	Tanggal	Tahun	Tanggal
b. BCG	Bulan	Tahun	Bulan
c. POLIO TETES 1	Tanggal	Tahun	Tanggal
d. DPT-HB-Hib 1	Bulan	Tahun	Bulan
e. POLIO TETES 2	Tanggal	Tahun	Tanggal
f. DPT-HB-Hib 2	Bulan	Tahun	Bulan
g. POLIO TETES 3	Tanggal	Tahun	Tanggal
h. DPT-HB-Hib 3	Bulan	Tahun	Bulan
i. POLIO TETES 4	Tanggal	Tahun	Tanggal
j. POLIO SUNTIK (IPV)	Bulan	Tahun	Bulan
k. CAMPYLOBACTER (MR)	Tanggal	Tahun	Tanggal



PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3		
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):									
l. DPT-Hib-HB LANJUTAN									
m. CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN									
n. MMR									
1405. APAKAH (nama balita) MENERIMA IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT PEKAN IMUNISASI NASIONAL? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI									
1406. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK MELINDUNGINYA DARI BERBAGAI PENYAKIT?	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417
1407. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TBC – BIASANYA DISUNTIKAN PADA LENGAN ATAU BAHU DAN MEMBUKA LUKA – ?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1408. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT POLIO – YANG "DITETESKAN KE MULUT ATAU DISUNTIKAN PADA LENGAN/PAHA" – ?	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411
1409. KAPAN VAKSIN POLIO PERTAMA DITERIMA (nama balita). APAKAH PADA SEBULAN PERTAMA KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2
1410. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali	a. POLIO TETES : .. kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : .. kali
1411. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN DPT – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TETANUS, BATUK REJAN, ATAU DIPTERI? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413



PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):
1412. SUDAH BERAFA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT? kali kali kali
1413. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YAITU SUNTIKAN DI PIPA-ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B diadakan-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAFA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN HEPATITIS B? kali kali kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN/ATAU SETELAHNYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT CAMPAK? i. CAMPAK – RUBELLA (MR)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
A S I DAN MP-ASI DITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1401, berikan tanda centang (✓)	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV
1417. A. APAKAH (nama baduta) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419
B. LAMANYA PEMBERIAN ASI: I. TANPA MAKANAN PENDAMPING II. DENGAN MAKANAN PENDAMPING	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): 1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8
1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENERMA CAIRAN SELAMA SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKONSUMSIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta. b. MINUMAN LAIN (AIR PUTH, JUS TANPA GULA, SUP/KALDU, TEHKOPI TANPA GULA, AIR TAJIN, DLL)? c. MINUMAN BERPEMANIS GULA (MINUMAN RINGAN, SODA, TEH MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL)?	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM? a. SEREAL, AKAR, DAN UMBI (NASI, JAGUNG, GANDUM, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL)? b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)? c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL)? d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGING/IKAN DALAM KALENG, DLL)? e. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL)? f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERDAUN SELAP)? g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL)? h. MAKANAN RINGANYANG GURIH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KRIM, PERMEN, KUE KERING, CAKE, DLL)?	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8 a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN PADAT, SETENGAH PADAT, ATAU LUNAK? Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8	Ya 1 5 8 Tidak 1 5 8 Tidak tahu 1 5 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407): tahun tahun tahun tahun tahun tahun
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN			
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu... 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu... 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu... 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←
1504. A. DIMANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Rumah bersalin/Klinik 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Rumah bersalin/Klinik 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Rumah bersalin/Klinik 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR? (Probing, jika responden menjawab tidak ada yang menolong, tanyakan "APAKAH ADA ORANG DEWASA YANG MENEMANI PADA SAAT MELAHIRKAN?")	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Dukun beranak/paraji 5 Lainnya 6 Tidak ada 7	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Dukun beranak/paraji 5 Lainnya 6 Tidak ada 7	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Dukun beranak/paraji 5 Lainnya 6 Tidak ada 7
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8



PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407): 1505. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir.....1 1-23 jam setelah lahir.....2 ≥24 jam setelah lahir.....3 Tidak pernah.....5 Tidak tahu.....8	<1 jam setelah lahir.....1 1-23 jam setelah lahir.....2 ≥24 jam setelah lahir.....3 Tidak pernah.....5 Tidak tahu.....8 tahun tahun <1 jam setelah lahir.....1 1-23 jam setelah lahir.....2 ≥24 jam setelah lahir.....3 Tidak pernah.....5 Tidak tahu.....8
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama/pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENCEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah.....1 → 1605 Ya, sedang.....2 Tidak.....5 → 1606	Ya, pernah.....1 → 1605 Ya, sedang.....2 Tidak.....5 → 1606	Ya, pernah.....1 → 1605 Ya, sedang.....2 Tidak.....5 → 1606
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN? Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW...1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP...2 IUD/AKDR/spiral.....3 Suntikan.....4 Susuk KB/implan.....5 Pil.....6 Kondom pria/karet KB.....7 Intravag/kondom wanita/diafragma...8 Metode menyusui alami.....9 Pantang berkala/kalender.....10 Lainnya, tuliskan:.....11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW...1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP...2 IUD/AKDR/spiral.....3 Suntikan.....4 Susuk KB/implan.....5 Pil.....6 Kondom pria/karet KB.....7 Intravag/kondom wanita/diafragma...8 Metode menyusui alami.....9 Pantang berkala/kalender.....10 Lainnya, tuliskan:.....11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW...1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP...2 IUD/AKDR/spiral.....3 Suntikan.....4 Susuk KB/implan.....5 Pil.....6 Kondom pria/karet KB.....7 Intravag/kondom wanita/diafragma...8 Metode menyusui alami.....9 Pantang berkala/kalender.....10 Lainnya, tuliskan:.....11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama/pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR/KALI?	Rumah sakit.....1 Puskesmas/Pustu/Klinik.....2 TKBK/TMK/MUJAN.....3 Polindes/Poskesdes.....4 Posyandu/PosKB/PPKBD.....5 Rumah bersalin.....6 Praktik dokter umum/kandungan...7 Praktik bidan/bidan di desa/parawat.....8 Apotek/toko obat.....9 Lainnya, tuliskan:.....10	Rumah sakit.....1 Puskesmas/Pustu/Klinik.....2 TKBK/TMK/MUJAN.....3 Polindes/Poskesdes.....4 Posyandu/PosKB/PPKBD.....5 Rumah bersalin.....6 Praktik dokter umum/kandungan...7 Praktik bidan/bidan di desa/parawat.....8 Apotek/toko obat.....9 Lainnya, tuliskan:.....10	Rumah sakit.....1 Puskesmas/Pustu/Klinik.....2 TKBK/TMK/MUJAN.....3 Polindes/Poskesdes.....4 Posyandu/PosKB/PPKBD.....5 Rumah bersalin.....6 Praktik dokter umum/kandungan...7 Praktik bidan/bidan di desa/parawat.....8 Apotek/toko obat.....9 Lainnya, tuliskan:.....10



PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut. Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi: tahun tahun tahun
1604. APAKAH (nama/pasangan) PERNAH BERHENTI/BERGANTI ALAT/CARA KB?	Ya.....1 Tidak.....5 → 1606	Ya.....1 Tidak.....5 → 1606	Ya.....1 Tidak.....5 → 1606
1605. APAKAH ALAT/CARA KB YANG DIGUNAKAN SEBELUMNYA?	IUD/AKDR/spiral.....1 Suntikan.....2 Susuk KB/implan.....3 PII.....4 Kondom pria/karet KB.....5 Lainnya, tuliskan:.....6	IUD/AKDR/spiral.....1 Suntikan.....2 Susuk KB/implan.....3 PII.....4 Kondom pria/karet KB.....5 Lainnya, tuliskan:.....6	IUD/AKDR/spiral.....1 Suntikan.....2 Susuk KB/implan.....3 PII.....4 Kondom pria/karet KB.....5 Lainnya, tuliskan:.....6
1606. APAKAH SAAT INI (nama) SEDANG HAMIL?	Ya.....1 Tidak.....5 → 1608	Ya.....1 Tidak.....5 → 1608	Ya.....1 Tidak.....5 → 1608
1607. BILA YA, SAYA AKAN BERTANYA TENTANG KEHAMILAN (nama) SAAT INI. KETIKA (nama) TAHU BAHWA (nama) HAMIL, APAKAH (nama) INGIN HAMIL PADA SAAT SAAT ITU?	Ya.....1 Tidak.....5	Ya.....1 Tidak.....5	Ya.....1 Tidak.....5
Pertanyaan 1608-1609 untuk perempuan pernah kawin (PPK) yang tidak menggunakan alat KB (1601 = 1 atau 5)			
1608. SAYA INGIN BERTANYA TENTANG RENCANA KE DEPAN. APAKAH (nama) INGIN PUNYA ANAK/ANAK LAGI, ATAU LEBIH SUKA TIDAK MEMPUNYAI ANAK/ANAK LAGI?	Ya, segera ingin punya anak/ anak lagi (< 2 tahun).....1 Ya, ingin punya anak lagi kemudian (≥ 2 tahun).....2 Tidak.....5	Ya, segera ingin punya anak/ anak lagi (< 2 tahun).....1 Ya, ingin punya anak lagi kemudian (≥ 2 tahun).....2 Tidak.....5	Ya, segera ingin punya anak/ anak lagi (< 2 tahun).....1 Ya, ingin punya anak lagi kemudian (≥ 2 tahun).....2 Tidak.....5
1609. APAKAH ALASAN UTAMA TIDAK MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB?	Alasan fertilitas.....1 Tidak setuju KB.....2 Tidak tahu alat/cara KB.....3 Takut efek samping.....4 Lainnya.....5 Tidak tahu.....8	Alasan fertilitas.....1 Tidak setuju KB.....2 Tidak tahu alat/cara KB.....3 Takut efek samping.....4 Lainnya.....5 Tidak tahu.....8	Alasan fertilitas.....1 Tidak setuju KB.....2 Tidak tahu alat/cara KB.....3 Takut efek samping.....4 Lainnya.....5 Tidak tahu.....8



**BLOK XVII. AKSES TERHADAP MAKANAN
(DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)**

Nama dan No. Urut pemberi informasi:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA:			
1701. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1702. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1703. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1704. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA PERNAH MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1705. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DRIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1706. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1707. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1708. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN

Nama dan No. Urut pemberi informasi:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)			
1801. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENSUS/RUMAH INI?	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5	<input type="checkbox"/>	keluarga
1802. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI? (Pilihan jawaban boleh dibacakan)	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART ...1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis 3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) 5 Tidak punya 6	<input type="checkbox"/>	m ² (Bulatkan dalam meter persegi)
1803. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? (Pilihan jawaban boleh dibacakan)	Ya 1 Tidak 5		
1804. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Asbes 4 Bambu 5 Kayu/sirap 6 Lainnya 7		
1805. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-INYA/ANNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan 3 Anyaman bambu 4 Balang kayu 5 Bambu 6 Lainnya 7		
1806. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS? (Pilihan jawaban boleh dibacakan)	Ya 1 Tidak 5		
1807. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		



BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
<p>B. <i>Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)</i>, BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJA TERDEKAT?</p> <p>1811.A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?</p> <p>B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?</p> <p>1812. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KERUPANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?</p> <p>1813. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?</p> <p>1814.A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL.?</p> <p>B. <i>Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)</i>, BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJA TERDEKAT?</p> <p>1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?</p>	<p>< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8</p> <p>Di rumah/kawasan dalam pagar rumah 1 → 1812 Di luar kawasan pagar rumah 2</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> menit</p> <p>Tidak tahu 998</p> <p>Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8</p> <p>Ya Tidak A. KERUH 1 5 B. BERMARNA 1 5 C. BERASA 1 5 D. BERDUSA 1 5 E. BERBAU 1 5</p> <p>Air kemasan bermerk 1 } 1815.A Air isi ulang 2 } Leding 3 } Sumur boripompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 9 } Air hujan 10 } 1815.A Lainnya 11 }</p> <p>< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8</p> <p>Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 } 1816.A Tidak ditiriskan melintai 4 }</p>

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
<p>1808. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?</p> <p>Marmel/granit 1 Keramik 2 Parket/vinil/karpet 3 Ubin/tegel/teraso 4 Kayu/papan 5 Semen/bata merah 6 Bambu 7 Tanah 8 Lainnya 9</p> <p>1809.A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?</p> <p>Ada, digunakan hanya ART sendiri 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 2 Ada, di MCK komunal 3 Ada, di MCK umum/sepupun menggunakan 4 } 1810.A Ada, ART tidak menggunakan 5 } Tidak ada fasilitas 6 }</p> <p>B. <i>Jika 1809.A = 1, 2, atau 3</i> APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?</p> <p>Pleingsengan dengan tutup 1 Pleingsengan tanpa tutup 2 Cemplung/cubluk 3 Cemplung/cubluk 4</p> <p>C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA?</p> <p>Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut 3 } 1810.A Lubang tanah 4 } Pantalanah lapang/kebun 5 } Lainnya 6 }</p> <p>D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?</p> <p>Tidak tahu 98 <input type="checkbox"/> tahun</p> <p>E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIGOSONGKAN/DILARUKAN/PENYEDOTAN?</p> <p>Tidak pernah 7 Tidak tahu 8</p> <p>1810.A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?</p> <p>Air kemasan bermerk 1 } 1811.A Air isi ulang 2 } Leding 3 } Sumur boripompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) 9 } 1811.A Air hujan 10 } Lainnya 11 }</p>	



BLOK XX. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG																																								
2001. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT? (Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak)	<table border="0"> <tr> <td>A. TABUNG GAS 5 KG ATAU LEBIH.....</td> <td>Ya</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>B. LEMARI ES/KULKAS.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C. AC.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>D. PEMANAS AIR (WATER HEATER).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>E. TELEFON RUMAH (PSTN).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>G. EMAS/PERHASAN (MINIMAL 10 GRAM).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H. SEPEDA MOTOR.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>I. PERAHU.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>J. PERAHU MOTOR.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>K. MOBIL.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>L. TELEVISI LAYAR DATAR (MINIMAL 30 INCH).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M. TANAHILAHAN.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>	A. TABUNG GAS 5 KG ATAU LEBIH.....	Ya	Tidak	B. LEMARI ES/KULKAS.....	1	5	C. AC.....	1	5	D. PEMANAS AIR (WATER HEATER).....	1	5	E. TELEFON RUMAH (PSTN).....	1	5	F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET.....	1	5	G. EMAS/PERHASAN (MINIMAL 10 GRAM).....	1	5	H. SEPEDA MOTOR.....	1	5	I. PERAHU.....	1	5	J. PERAHU MOTOR.....	1	5	K. MOBIL.....	1	5	L. TELEVISI LAYAR DATAR (MINIMAL 30 INCH).....	1	5	M. TANAHILAHAN.....	1	5
A. TABUNG GAS 5 KG ATAU LEBIH.....	Ya	Tidak																																						
B. LEMARI ES/KULKAS.....	1	5																																						
C. AC.....	1	5																																						
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER).....	1	5																																						
E. TELEFON RUMAH (PSTN).....	1	5																																						
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET.....	1	5																																						
G. EMAS/PERHASAN (MINIMAL 10 GRAM).....	1	5																																						
H. SEPEDA MOTOR.....	1	5																																						
I. PERAHU.....	1	5																																						
J. PERAHU MOTOR.....	1	5																																						
K. MOBIL.....	1	5																																						
L. TELEVISI LAYAR DATAR (MINIMAL 30 INCH).....	1	5																																						
M. TANAHILAHAN.....	1	5																																						
2002. (Jika 2001.M = 1), JIKA MEMILIKI TANAHILAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/LAHAN TERSEBUT?	<table border="0"> <tr> <td>KRT.....</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Pasangan KRT.....</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Anak.....</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>ART lainnya.....</td> <td>D</td> </tr> </table>	KRT.....	A	Pasangan KRT.....	B	Anak.....	C	ART lainnya.....	D																															
KRT.....	A																																							
Pasangan KRT.....	B																																							
Anak.....	C																																							
ART lainnya.....	D																																							

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN																									
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa kran/pompa atau bascom, ember, wadah air atau selensinya.	<table border="0"> <tr> <td>Tersedia air.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak tersedia air.....</td> <td>5</td> </tr> </table>	Tersedia air.....	1	Tidak tersedia air.....	5																				
Tersedia air.....	1																								
Tidak tersedia air.....	5																								
C. Cek ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	<table border="0"> <tr> <td>Tersedia sabun/deterjen.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak tersedia sabun/deterjen.....</td> <td>5</td> </tr> </table>	Tersedia sabun/deterjen.....	1	Tidak tersedia sabun/deterjen.....	5																				
Tersedia sabun/deterjen.....	1																								
Tidak tersedia sabun/deterjen.....	5																								
1816. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	<table border="0"> <tr> <td>Lisrik PLN dengan meteran.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lisrik PLN tanpa meteran.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Lisrik non-PLN.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Bukan lisrik.....</td> <td>4</td> </tr> </table>	Lisrik PLN dengan meteran.....	1	Lisrik PLN tanpa meteran.....	2	Lisrik non-PLN.....	3	Bukan lisrik.....	4																
Lisrik PLN dengan meteran.....	1																								
Lisrik PLN tanpa meteran.....	2																								
Lisrik non-PLN.....	3																								
Bukan lisrik.....	4																								
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	<table border="0"> <tr> <td>Meteran 1</td> <td>Meteran 2</td> <td>Meteran 3</td> </tr> <tr> <td>450 Watt.....</td> <td>1</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>900 Watt.....</td> <td>2</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>1.300 Watt atau lebih.....</td> <td>3</td> <td>□</td> </tr> </table>	Meteran 1	Meteran 2	Meteran 3	450 Watt.....	1	□	900 Watt.....	2	□	1.300 Watt atau lebih.....	3	□												
Meteran 1	Meteran 2	Meteran 3																							
450 Watt.....	1	□																							
900 Watt.....	2	□																							
1.300 Watt atau lebih.....	3	□																							
1817. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	<p>(Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)</p> <table border="0"> <tr> <td>Lisrik.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Etilji 5,5 kg/botol gas.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Etilji 12 kg.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Etilji 3 kg.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gas kota.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Bogas.....</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Minyak tanah.....</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Briket.....</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Arang.....</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Kayu bakar.....</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Lainnya.....</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Tidak memasak di rumah.....</td> <td>0</td> </tr> </table>	Lisrik.....	1	Etilji 5,5 kg/botol gas.....	2	Etilji 12 kg.....	3	Etilji 3 kg.....	4	Gas kota.....	5	Bogas.....	6	Minyak tanah.....	7	Briket.....	8	Arang.....	9	Kayu bakar.....	10	Lainnya.....	11	Tidak memasak di rumah.....	0
Lisrik.....	1																								
Etilji 5,5 kg/botol gas.....	2																								
Etilji 12 kg.....	3																								
Etilji 3 kg.....	4																								
Gas kota.....	5																								
Bogas.....	6																								
Minyak tanah.....	7																								
Briket.....	8																								
Arang.....	9																								
Kayu bakar.....	10																								
Lainnya.....	11																								
Tidak memasak di rumah.....	0																								

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN																															
1901. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT? (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	<table border="0"> <tr> <td>A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....</td> <td>Ya</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>D. KREDIT DARI KOPERASI.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>E. PERORANGAN DENGAN BUNGA.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F. PEGADAIAN.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>G. PERUSAHAAN LEASING.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>I. PINJAMAN ONLINE.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>J. LAINNYA.....</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>	A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	Ya	Tidak	B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR.....	1	5	C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....	1	5	D. KREDIT DARI KOPERASI.....	1	5	E. PERORANGAN DENGAN BUNGA.....	1	5	F. PEGADAIAN.....	1	5	G. PERUSAHAAN LEASING.....	1	5	H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).....	1	5	I. PINJAMAN ONLINE.....	1	5	J. LAINNYA.....	1	5
A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	Ya	Tidak																													
B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR.....	1	5																													
C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....	1	5																													
D. KREDIT DARI KOPERASI.....	1	5																													
E. PERORANGAN DENGAN BUNGA.....	1	5																													
F. PEGADAIAN.....	1	5																													
G. PERUSAHAAN LEASING.....	1	5																													
H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).....	1	5																													
I. PINJAMAN ONLINE.....	1	5																													
J. LAINNYA.....	1	5																													

BLOK XXI. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA									
2101. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBAYARAN DI RUMAH TANGGA INI?	<table border="0"> <tr> <td>ART YANG BEKERJA.....</td> <td>1 → 2101.B</td> </tr> <tr> <td>KIRIMAN UANG/BARANG.....</td> <td>2 → 2101.C</td> </tr> <tr> <td>INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA).....</td> <td>3 → Blok XXII</td> </tr> <tr> <td>PENSUNJIAN.....</td> <td>4 → Blok XXII</td> </tr> </table>	ART YANG BEKERJA.....	1 → 2101.B	KIRIMAN UANG/BARANG.....	2 → 2101.C	INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA).....	3 → Blok XXII	PENSUNJIAN.....	4 → Blok XXII
ART YANG BEKERJA.....	1 → 2101.B								
KIRIMAN UANG/BARANG.....	2 → 2101.C								
INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA).....	3 → Blok XXII								
PENSUNJIAN.....	4 → Blok XXII								
B. (Jika 2101.A = 1) APAKAH ART YANG MEMANGGUNG PEMBAYARAN TERBESAR?	<table border="0"> <tr> <td>Nama ART.....</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>No. Urut ART.....</td> <td>□</td> </tr> </table>	Nama ART.....	□	No. Urut ART.....	□				
Nama ART.....	□								
No. Urut ART.....	□								
C. (Jika 2101.A = 2) APAPKA MENERIMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	<table border="0"> <tr> <td>ORANG TUA.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ANAK.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FAMILIAN.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>LAINNYA.....</td> <td>4</td> </tr> </table>	ORANG TUA.....	1	ANAK.....	2	FAMILIAN.....	3	LAINNYA.....	4
ORANG TUA.....	1								
ANAK.....	2								
FAMILIAN.....	3								
LAINNYA.....	4								

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Ya	Tidak	BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MEMERIKAJAMINAN SOSIAL TERSEBUT?
2201. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MEMERIKAJAMINAN SOSIAL BERUPA:	(iii)		
(i)	(iii)		
A. JAMINAN PENSJUN/VETERAN	1 → 2201.iii.A	5 → 2201.B	A. _____ orang
B. JAMINAN HARI TUA	1 → 2201.iii.B	5 → 2201.C	B. _____ orang
C. JAMINAN/ASURANSI KECELAKAAN KERJA	1 → 2201.iii.C	5 → 2201.D	C. _____ orang
D. JAMINAN/ASURANSI KEMATIAN	1 → 2201.iii.D	5 → 2201.E	D. _____ orang
E. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	1 → 2201.iii.E	5 → 2202	E. _____ orang
2202. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMERIKAJAMINAN KARTU KELUARGA SEHAITERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu..... 1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu..... 2 Tidak..... 5		
2203. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENADJIPENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya..... 1 Tidak..... 5 → 2205		
2204. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENADJIPENERIMA PKH?	Ya..... 1 Tidak..... 8 Tidak tahu..... 5 } 2205		
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MEMERIKAJAMINAN BANTUAN PKH?	Kantor Pos..... 1 ATM..... 2 Kantor Bank..... 3 Agen Bank..... 4 Pendamping, ketua kelompok..... 5		
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAJABANTUAN PKH DIFERUNGKANYADALAGI? <i>(Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)</i>	Belanja Pangan..... A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll)..... B Biaya Pengobatan..... C Biaya Perawatan Ibu Hamil..... D Biaya Sekolah..... E Pembayaran Hutang/Kredit..... F Lainnya, tuliskan..... G		
2205. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MEMERIKAJAMINAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya..... 1 Tuliskan No. Untur ART Lansia 1) [] [] [] [] ; 2) [] [] [] [] ; 3) [] [] [] [] ; 4) [] [] [] [] Tidak..... 5		
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MEMERIKAJAMINAN SOSIAL DARI PKH?	Ya..... 1 Tuliskan No. Untur ART Lansia 1) [] [] [] [] ; 2) [] [] [] [] ; 3) [] [] [] [] ; 4) [] [] [] [] Tidak..... 5		
2206. APAKAH TERDAPAT ART BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MEMERIKAJAMINAN BANTUAN SUBSIDI UPAH/IBSU?	Ya..... 1 Tuliskan No. Untur ART 1) [] [] [] [] ; 2) [] [] [] [] ; 3) [] [] [] [] ; 4) [] [] [] [] Tidak..... 5		
2207. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENADJIPENERIMAJAMINAN BANTUAN PANGAN (BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)/PROGRAM SEMBAKO)?	Ya..... 1 Tidak..... 5 → 2209		

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Bulan Februari 2022	Bulan Januari 2022	Bulan Desember 2021	Bulan November 2021									
<p>Z208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGGUNAAN BANTUAN PANGAN:</p> <p>A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA BANTUAN PANGAN PADA 4 BULAN TERAKHIR?</p> <p>B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI BANTUAN YANG DITERIMA?</p> <p>C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?</p> <p>D. APAKAH RUMAH TANGGA MEMANFAATKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?</p> <p>E. BERAPA NILAI JUMLAH KOMODITAS YANG DIBELI/MENGGUNAKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?</p> <p>(i) BERAPA TOTAL RUPIAH YANG DIBELANJAKAN UNTUK MASING-MASING KOMODITAS?</p> <p>(ii) BERAPA KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI?</p> <p>Nomor urut bahan pangan lainnya, misalnya:</p> <table border="1"> <tr> <td>Komoditas</td> <td>No. Urut di VSEN22.KP</td> </tr> <tr> <td>Tepung terigu</td> <td>006</td> </tr> <tr> <td>Daging ayam ras</td> <td>056</td> </tr> <tr> <td>Tempe</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Pepaya</td> <td>116</td> </tr> </table> <p>Nomor urut untuk komoditas lainnya lihat VSEN22.KP</p>	Komoditas	No. Urut di VSEN22.KP	Tepung terigu	006	Daging ayam ras	056	Tempe	103	Pepaya	116	<p>A) Ya 1 Tidak 5 → Januari '22</p> <p>B) Ya, tuliskan 1 Rp. Tidak 5 → 2208 D</p> <p>C) Bulan</p> <p>D) Ya 1 Tidak 5 → Januari '22</p> <p>E) BERAS (i) Rp. (ii) Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp. (ii) Bulir LAINNYA, tuliskan: No. Urut di VSEN22.KP:</p> <p>(i) Rp. (ii) (kuantitas)</p> <p>Tuliskan satuan:</p> <p>F) Baik 1 CUKUP 2 BURUK 3</p> <p>G) Ya 1 Tidak 5</p> <p>H) Kos/warung/toko 1 Rumah Pangan Kita 2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan 3 Kantor bank 4 Lainnya 5</p>	<p>A) Ya 1 Tidak 5 → Desember '21</p> <p>B) Ya, tuliskan 1 Rp. Tidak 5 → 2208 D</p> <p>C) Bulan</p> <p>D) Ya 1 Tidak 5 → Desember '21</p> <p>E) BERAS (i) Rp. (ii) Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp. (ii) Bulir LAINNYA, tuliskan: No. Urut di VSEN22.KP:</p> <p>(i) Rp. (ii) (kuantitas)</p> <p>Tuliskan satuan:</p> <p>F) Baik 1 CUKUP 2 BURUK 3</p> <p>G) Ya 1 Tidak 5</p> <p>H) Kos/warung/toko 1 Rumah Pangan Kita 2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan 3 Kantor bank 4 Lainnya 5</p>	<p>A) Ya 1 Tidak 5 → 2209</p> <p>B) Ya, tuliskan 1 Rp. Tidak 5 → 2208 D</p> <p>C) Bulan</p> <p>D) Ya 1 Tidak 5 → 2209</p> <p>E) BERAS (i) Rp. (ii) Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp. (ii) Bulir LAINNYA, tuliskan: No. Urut di VSEN22.KP:</p> <p>(i) Rp. (ii) (kuantitas)</p> <p>Tuliskan satuan:</p> <p>F) Baik 1 CUKUP 2 BURUK 3</p> <p>G) Ya 1 Tidak 5</p> <p>H) Kos/warung/toko 1 Rumah Pangan Kita 2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan 3 Kantor bank 4 Lainnya 5</p>
Komoditas	No. Urut di VSEN22.KP												
Tepung terigu	006												
Daging ayam ras	056												
Tempe	103												
Pepaya	116												
<p>Z209. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ARTI LAINNYA MENERIMA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT TERKAIT COVID-19 SEPERTI BERIKUT.</p> <p>(Bacakan seluruh jenis bantuan, A.s.d. D Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</p>	<p>A. BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 1 Ya Tidak 5</p> <p>B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) 1 Ya Tidak 5</p> <p>C. BANTUAN BERUPA BERAS BULOG 1 Ya Tidak 5</p> <p>D. BANTUAN BERUPA SEMBAKO PPKM 1 Ya Tidak 5</p>	<p>A. BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 1 Ya Tidak 5</p> <p>B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) 1 Ya Tidak 5</p> <p>C. BANTUAN BERUPA BERAS BULOG 1 Ya Tidak 5</p> <p>D. BANTUAN BERUPA SEMBAKO PPKM 1 Ya Tidak 5</p>	<p>A. BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 1 Ya Tidak 5</p> <p>B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) 1 Ya Tidak 5</p> <p>C. BANTUAN BERUPA BERAS BULOG 1 Ya Tidak 5</p> <p>D. BANTUAN BERUPA SEMBAKO PPKM 1 Ya Tidak 5</p>	<p>A) Ya 1 Tidak 5 → November '21</p> <p>B) Ya, tuliskan 1 Rp. Tidak 5 → 2208 D</p> <p>C) Bulan</p> <p>D) Ya 1 Tidak 5 → November '21</p> <p>E) BERAS (i) Rp. (ii) Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp. (ii) Bulir LAINNYA, tuliskan: No. Urut di VSEN22.KP:</p> <p>(i) Rp. (ii) (kuantitas)</p> <p>Tuliskan satuan:</p> <p>F) Baik 1 CUKUP 2 BURUK 3</p> <p>G) Ya 1 Tidak 5</p> <p>H) Kos/warung/toko 1 Rumah Pangan Kita 2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan 3 Kantor bank 4 Lainnya 5</p>									

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Z210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO? Penjelasan: Usaha mikro memiliki kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.	Ya	1	Tuliskan No. Urut ART 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 4) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tidak	5	
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)?	Ya	1	Tuliskan No. Urut ART 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 4) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tidak	5	
Z211. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?	Bantuan yang Diterima Setiap Tahun Terakhir		
	Ya	1 → 2211.A.i	Rp.
	Tidak	5 → 2211.B	Rp.
	Ya	1 → 2211.B.i	Rp.
	Tidak	5 → Blok XXIII	Rp.

BLOK XXIII. CATATAN

Kunjungan I	: Tanggal	:	Mulai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Selesai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kunjungan II	: Tanggal	:	Mulai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Selesai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- Kode 705: Lapangan Usaha (diisi oleh pengawas)**
- 01. Pertanian tanaman padi dan palawija
 - 02. Hortikultura
 - 03. Perkebunan
 - 04. Peternakan
 - 05. Pelayaran
 - 06. Kehutanan dan perikanan lainnya
 - 07. Pertambangan dan penggalian
 - 08. Industri pengolahan
 - 09. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin
 - 10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
 - 11. Konstruksi
 - 12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
 - 13. Pengangkutan dan pergudangan
 - 14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
 - 15. Informasi dan komunikasi
 - 16. Aktivitas keuangan dan asuransi
 - 17. Real estate
 - 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis
 - 19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya
 - 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
 - 21. Pendidikan
 - 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial
 - 23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi
 - 24. Aktivitas jasa lainnya
 - 25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja
 - 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstrasistemasi lainnya

Waktu selesai wawancara: : :



METADATA



No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Peserta Didik per Rombel	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah rombel di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
2	Rasio Rombel per Kelas	Perbandingan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah kelas di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah kelas di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
3	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	$\frac{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i \text{ yang berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i} \times 100\%$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
4	Rasio Murid-Guru	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah guru di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang masih/pernah bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Ajaran 2021/2022 dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$APKPAUD = \frac{JMPAUD}{JP3 - 6} \times 100\%$ <p>APKPAUD: APK PAUD JMPAUD: Jumlah penduduk umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD JP3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun</p>	Susenas Maret
6	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masih/pernah bersekolah di jenjang pendidikan PAUD pada Tahun Ajaran 2021/2022 dengan jumlah penduduk umur 3-6 tahun. Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$APMPAUD = \frac{JMPAUD3 - 6}{JP3 - 6} \times 100\%$ <p>APMPAUD: APM PAUD JMPAUD3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD JP3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang saat ini bersekolah kelas 1 SD/ sederajat dan sebelumnya pernah mengikuti PAUD dengan jumlah penduduk kelas 1 SD/ sederajat. Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAMI, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$AKS = \frac{JM1SDPAUD}{JM1SD} \times 100\%$ <p>AKS: Angka Kesiapan Sekolah JM1SDPAUD: Jumlah murid kelas 1 SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD JM1SD: Jumlah murid kelas 1 SD/ sederajat</p>	Susenas Maret
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A/ sederajat (7-12 tahun).	$APKSD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$ <p>APKSD: APK SD/ sederajat JMSD: Jumlah murid SD/ sederajat JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun</p>	Susenas Maret
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat (13-15 tahun).	$APKSMP = \frac{JMSMP}{JP13-15} \times 100\%$ <p>APKSMP: APK SMP/ sederajat JMSMP: Jumlah murid SMP/ sederajat JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C /sederajat (16-18 tahun).	$APKSM = \frac{JMSM}{JP16 - 18} \times 100\%$ <p>APKSM: APK SM/ sederajat JMSM: Jumlah murid SM/ sederajat JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun</p>	Susenas Maret
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan PT (19-23 tahun).	$APKPT = \frac{JMPT}{JP19 - 23} \times 100\%$ <p>APKPT: APK PT JMPT: Jumlah murid PT JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun</p>	Susenas Maret
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun.	$APMSD = \frac{JMSD7 - 12}{JP7 - 12} \times 100\%$ <p>APMSD: APM SD/ sederajat JMSD7-12: Jumlah murid SD/ sederajat umur 7-12 tahun JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1) 13	(2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat	(3) Perbandingan antara jumlah penduduk umur 13-15 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun.	(4) $APMSMP = \frac{JMSMP13 - 15}{JP13 - 15} \times 100\%$ APMSMP: APM SMP/ sederajat JMSMP13-15: Jumlah murid SMP/ sederajat umur 13-15 tahun JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun	(5) Susenas Maret
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun.	$APMSM = \frac{JMSM16 - 18}{JP16 - 18} \times 100\%$ APMSM: APM SM/ sederajat JMSM16-18: Jumlah murid SM/ sederajat umur 16-18 tahun JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun	Susenas Maret
15	Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 19-23 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun.	$APMPT = \frac{JMPT19 - 23}{JP19 - 23} \times 100\%$ APMPT: APM PT JMPT19-23: Jumlah murid PT umur 19-23 tahun JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	<p>Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.</p> <p>Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).</p>	$TP_i = \frac{N_{TPi}}{N_i} \times 100\%$ <p>T_{Pi}: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i N_{TPi}: Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut N_i: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i</p>	Susenas Maret
17	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.	$PS_i = \frac{N_{PSi}}{N_i} \times 100\%$ <p>P_{Si}: Angka anak tidak sekolah untuk jenjang i N_{PSi}: Jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentu N_i: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan I pada periode yang sama</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Angka Melek Huruf (AMH)	Indikator ini mengukur Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	$AMH_{15+} = \frac{MH_{15+}}{P_{15+}} \times 100\%$ <p>Keterangan AMH : Angka Melek Huruf MH₁₅₊ : Penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf P₁₅₊ : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret
19	Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan	Persentase siswa kelas x suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran lalu yang masih duduk di kelas x pada tahun ajaran sekarang, terhadap anak kelas x pada tahun ajaran lalu	$Angka\ Mengulang = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang menduduki jenjang yang sama pada tahun ajaran sekarang dan tahun lalu B : Jumlah siswa pada suatu jenjang tahun ajaran lalu</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Angka Bertahan Sampai Kelas 6 SD/ sederajat	<p>Persentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas 6 SD</p>	<p>Angka Bertahan = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : NOM SD2 + NOM SD3 + NOM SD4 + NOM SD5 + NOM SD6 B : MASIH SD1 + MASIH SD2 + MASIH SD3 + MASIH SD4 + MASIH SD5</p> <p>NOM SD2 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 2 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 2 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD NOM SD3 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 3 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 3 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD NOM SD4 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD NOM SD5 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>NOM SD4 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD</p> <p>NOM SD5 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD</p> <p>NOM SD6 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 6 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 6 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD</p> <p>MASIH SD1 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD</p> <p>MASIH SD2 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD</p> <p>MASIH SD3 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD</p> <p>MASIH SD4 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD</p> <p>MASIH SD5 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD</p>	

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan SMP/ sederajat dan SM/ sederajat	<p>Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu</p>	<p>Angka Melanjutkan ke SMP/ sederajat = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun ajaran sekarang B : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu</p> <p>Angka Melanjutkan ke SM/ sederajat = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SM pada tahun ajaran sekarang B : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu</p>	Susenas Maret
22	Angka anak tidak sekolah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun	Anak tidak sekolah adalah penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.	$PS_i = \frac{N_{PSi}}{N_i} \times 100\%$ <p>Keterangan PSi : Angka anak tidak sekolah untuk kelum i NPSi : Jumlah penduduk kelompok umur i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentu Ni : Jumlah penduduk kelompok umur i</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	Persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.	<p>Angka Putus Sekolah $= \frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan pendidikan sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu B : Jumlah siswa pada tahun ajaran lalu yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama</p>	Susenas Maret
24	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah	<p>TP $= \frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan TP : tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan A : Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan tertentu B : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret
25	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	<p>RLS $= \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^n X_i$</p> <p>Keterangan xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 15 tahun ke atas N = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	<p>Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.</p> <p>Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).</p>	$TP_i = \frac{N_{TPI}}{N_i} \times 100\%$ <p>TPI: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi: Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i</p>	Susenas Maret

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo no. 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> email: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-4566



9 772086 456606 >